DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Lampiran ..... **iii**
Daftar Tabel ..... **iv**
Daftar Gambar ..... **xii**
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 7
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 9
2.1 Ekonomi Makro 9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 9
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 10
2.1.3 Inflasi 11
2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 11
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 12
2.1.6 Kemiskinan 12
2.1.7 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 13
2.1.8 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan 14
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 16
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 16
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 17
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 21
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 22
2.3.1 Urusan Wajib 22
2.3.2 Urusan Pilihan 23
2.3.3 Urusan Penunjang 23
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 24
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 24
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan 25
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah 30
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 33
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan 33
3.2.2 Pengelolaan Belanja 34
Bab IV Kebijakan Akuntansi 37
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 37
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 37
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 37
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 38
4.5 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya 46
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 47
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan 47
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 47
5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 105
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 110
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 198
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas 232
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 235
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas 237

5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas Pada Pendapatan 237
5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) 242
5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan 246
5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 246
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah 248
6.1 Kondisi Umum Daerah 248
6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis 248
6.1.2 Jumlah Penduduk 250
6.1.3 Kondisi Demografi 251
6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok 253
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan 256
6.4 Catatan Penting Lainnya Terkait Pandemi Covid-19 257
Bab VII Penutup
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran
Lampiran 1	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah ,Organisasi,Program dan Kegiatan
Lampiran 2	Usulan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa
Lampiran 3	Usulan Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa
Lampiran 4	Rekap Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021
Lampiran 5	Laporan Pencairan Dana Desa Kabupaten Pacitan
Lampiran 6	Rekapitulasi Sisa Kas di Bendahara Dana Bos
Lampiran 7	Daftar Mutasi Aset *Extracomptable* Kabupaten Pacitan
Lampiran 8	Penyusutan *Extracomtable* Kabupaten Pacitan
Lampiran 9	Laporan Aset Tetap Renovasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021
Lampiran 10	Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Pacitan
Lampiran 11	Laporan Kinerja Bidang Kesehatan dan/atau Ekonomi Sosial untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun 2021
Lampiran 12	Laporan Keuangan BUMD PDAM Audited
Lampiran 13	Laporan Keuangan BUMD PDAU Audited

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 1

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten pacitan Tahun 2016-2020 10

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 10

Tabel 4 Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 14

Tabel 5 Tabel Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2016 s/d 2020 14

Tabel 6 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 15

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 17

Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 20

Tabel 9 Target Belanja Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 21

Tabel 10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 21

Tabel 11 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 27

Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 27

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 28

Tabel 14 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 29

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 29

Tabel 16 Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 32

Tabel 17 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 33

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 47

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 47

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 49

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 50

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2021 dan Tahun 2020 50

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 dan Tahun 2020 52

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2021 dan Tahun 2020 53

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020 54

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020 56

Tabel 27 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020 56
Tabel 28 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 57
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020 57
Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020 58
Tabel 31 Pendapatan BLUD 58
Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Tahun 2021 dan Tahun 2020 59
Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 59
Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020 60
Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020 61
Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020 63
Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020 68
Tabel 38 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 71
Tabel 39 Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 75
Tabel 40 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021 75
Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020 76
Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 77
Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 77
Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2021 dan 2020 79
Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020 80
Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 80
Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 81
Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 81
Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020 82
Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 85
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 86
Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 86

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2020 87
Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 88
Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan Tahun 2020 88
Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021 dan Tahun 2020 89
Tabel 57 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2021 91
Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 92
Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020 93
Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2020 94
Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020 94
Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020 95
Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan Tahun 2020 96
Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 97
Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga 97
Tabel 66 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan 98
Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2021 dan Tahun 2020 99
Tabel 68 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 99
Tabel 69 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 100
Tabel 70 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 100
Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2021 dan Tahun 2020 101
Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2021 dan Tahun 2020 102
Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 102
Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 102
Tabel 75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020 104
Tabel 76 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 dan Tahun 2020 104
Tabel 77 Laporan Realisasi dan Sisa Kas Dana JKN FKTP 24 UPT Puskesmas 112
Tabel 78 Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOS 115

Tabel 79 Piutang Daerah Tahun 2021 116
Tabel 80 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2021 116
Tabel 81 Piutang Pajak Daerah 116
Tabel 82 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan 118
Tabel 83 Piutang Retribusi 119
Tabel 84 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 119
Tabel 85 Piutang Pokok- dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian) 122
Tabel 86 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 122
Tabel 87 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2021 124
Tabel 88 Rekapitulasi Penyisihan Piutang 124
Tabel 89 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek 127
Tabel 90 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2021 132
Tabel 91 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2021 134
Tabel 92 Daftar Obat Expired Dinas Kesehatan Tahun 2021 139
Tabel 93 Daftar Obat Expired Date 2021 RSUD Tahun 2021 139
Tabel 94 Daftar Bahan Laboratorium Expired Tahun 2021 RSUD Date 2021 145
Tabel 95 Daftar Obat Expired Date 2021 KBPP 145
Tabel 96 Investasi Non Permanen - Dana Bergulir 146
Tabel 97 NRV Investasi Dana Bergulir 147
Tabel 98 Investasi Permanen 148
Tabel 99 Rincian Investasi Bank Jatim 149
Tabel 100 Investasi Permanen pada BPR Jatim 149
Tabel 101 Investasi Permanen pada PDAM 150
Tabel 102 Rincian Investasi PDAM 150
Tabel 103 Rincian Aset Tetap/Inventaris PDAU 152
Tabel 104 Mutasi Aset Tetap 153
Tabel 105 Mutasi Tanah 155
Tabel 106 Mutasi Tanah Per SKPD 155
Tabel 107 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin 157
Tabel 108 Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD 158
Tabel 109 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 168
Tabel 110 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2021 168
Tabel 111 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 173
Tabel 112 Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Per SKPD 174
Tabel 113 Aset Tetap Lainnya 177
Tabel 114 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD 177
Tabel 115 Konstruksi dalam Pengerjaan 181

Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan 182
Tabel 117 Akumulasi Penyusutan 183
Tabel 118 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan 183
Tabel 119 Aset Lainnya 185
Tabel 120 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga 186
Tabel 121 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) 188
Tabel 122 Aset Tidak Berwujud - *Software* 189
Tabel 123 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 190
Tabel 124 Rincian Akumulasi Amortisasi per Golongan 191
Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2021 192
Tabel 126 Kewajiban Jangka Pendek 2021 192
Tabel 127 Pendapatan Diterima Dimuka 193
Tabel 128 Utang Belanja 195
Tabel 129 Utang Belanja Barang 195
Tabel 130 Utang Belanja Jasa 196
Tabel 131 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 198
Tabel 132 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 198
Tabel 133 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 198
Tabel 134 Rincian Pajak Hotel Tahun 2021 dan Tahun 2020 199
Tabel 135 Rincian Pajak Restoran Tahun 2021 dan Tahun 2020 199
Tabel 136 Rincian Pajak Hiburan - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 199
Tabel 137 Pajak Reklame - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 200
Tabel 138 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 201
Tabel 139 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020 202
Tabel 140 Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 202
Tabel 141 Rincian Pendapatan Bunga - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 203
Tabel 142 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 203
Tabel 143 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 204
Tabel 144 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 204
Tabel 145 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Tahun 2021 dan Tahun 2020 204
Tabel 146 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 205
Tabel 147 Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020 205
Tabel 148 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 205
Tabel 149 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020 206

Tabel 150 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan Tahun 2020 206
Tabel 151 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 207
Tabel 152 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2020 207
Tabel 153 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020 208
Tabel 154 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 208
Tabel 155 Rincian Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 210
Tabel 156 Beban Tahun 2021 dan Tahun 2020 210
Tabel 157 Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 210
Tabel 158 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 211
Tabel 159 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2021 dan Tahun 2020 212
Tabel 161 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2021 dan Tahun 2020 212
Tabel 161 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 dan Tahun 2020 212
Tabel 162 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 dan Tahun 2020 213
Tabel 163 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 dan Tahun 2020 213
Tabel 164 Beban Persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 214
Tabel 165 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2021 dan Tahun 2020 214
Tabel 166 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2021 dan Tahun 2020 217
Tabel 167 Beban Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 218
Tabel 168 Beban Jasa Kantor Tahun 2021 dan Tahun 2020 218
Tabel 169 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2020 dan Tahun 2019 220
Tabel 170 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2021 dan Tahun 2020 221
Tabel 171 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2020 222
Tabel 172 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020 222
Tabel 173 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020 223
Tabel 174 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 223
Tabel 175 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2021 dan Tahun 2020 223
Tabel 176 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2021 dan Tahun 2020 224
Tabel 177 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2021 dan Tahun 2020 225
Tabel 178 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2021 dan Tahun 2020 225
Tabel 179 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 226
Tabel 180 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 226
Tabel 181 Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 226

Tabel 182 Beban Penyusutan Tahun 2021 dan Tahun 2020 228
Tabel 183 Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 228
Tabel 184 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Tahun 2020 228
Tabel 185 Beban Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020 229
Tabel 186 Beban Lain - Lain Tahun 2021 dan Tahun 2020 230
Tabel 187 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 230
Tabel 188 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 231
Tabel 189 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas 235
Tabel 190 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO 237
Tabel 191 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO 237
Tabel 192 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada LO 237
Tabel 193 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan pada LO 238
Tabel 194 Penjelasan Selisih Saldo Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada LO 239
Tabel 195 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO 240
Tabel 196 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO 240
Tabel 197 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO 241
Tabel 198 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO 241
Tabel 199 Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO Tahun 2021 242
Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2021 242
Tabel 201 Rincian Selisih Saldo Belanja/Beban/Beban Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa Tahun 2021 243
Tabel 202 Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Pacitan 248
Tabel 203 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 250
Tabel 204 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 250
Tabel 205 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021 251
Tabel 206 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020-2021 251
Tabel 207 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 252
Tabel 208 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2020.....9

Gambar 2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019.....11

Gambar 3 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pacitan 2016-2020.....11

Gambar 4 Grafik Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020.....12

Gambar 5 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2020 (Ribu Jiwa).....13

Gambar 6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2016 s/d 2020.....13

Gambar 7 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2020 14

Gambar 8 Peta Administratif Kabupaten Pacitan 249

Gambar 9 Grafik Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 253

I. PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun Provinsi), dan pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dan perubahannya.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
5. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) Jouncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) Jouncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Jouncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jouncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 20112 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) jouncto Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 9);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
61. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 2);
62. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 1);
63. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 PP Nomor 18);
64. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 1);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);

73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);
75. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
76. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
77. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pembayaran Tera/Tera Ulang;
78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 7);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan;
81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim;
82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 7);
83. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
84. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
85. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 7);
86. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 39);
87. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
88. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 23);
89. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2020;
90. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 91);
91. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 15);

92. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);

93. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 31);

94. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 168 tahun 2021 tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana yang tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;

95. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 188);

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
  - 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
  - 2.1.3 Inflasi
  - 2.1.4 Tingkat Partisipan Angkatan Kerja (TPAK)
  - 2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
  - 2.1.6 Kemiskinan
  - 2.1.7 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
  - 2.1.8 Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
- 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
  - 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  - 2.3.1 Urusan Wajib
  - 2.3.2 Urusan Pilihan
  - 2.3.3 Urusan Penunjang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan
  - 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan
  - 3.2.1 Pengelolaan Pendapatan
  - 3.2.2 Pengelolaan Belanja

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Pengungkapan – pengungkapan lainnya

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
  - 5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - 5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
  - 5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
  - 5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE)
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas
5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas Pada Pendapatan
5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)
5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan
5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
6.1 Kondisi Umum Daerah
6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis
6.1.2 Jumlah Penduduk
6.1.3 Kondisi Demografi
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
6.4 Catatan Penting Lainnya Terkait Pandemi Covid-19
Bab VII Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi dan gambar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan:

Grafik.Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2016 s/d 2020

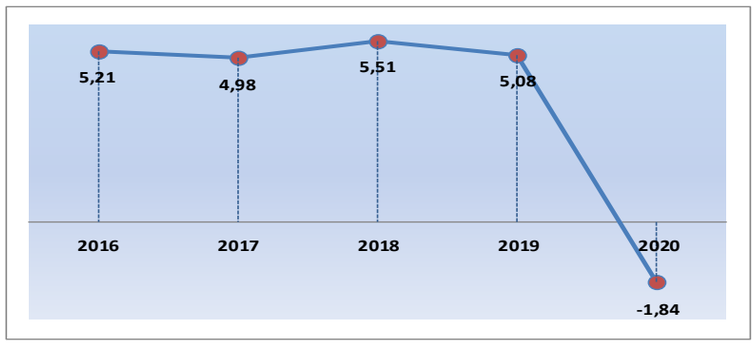

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 1,84%. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya persebaran Covid-19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian.
Untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi yang mengalami kenaikan yang dominan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,25	1,17	1,77	-0,09	3,80
B	Pertambangan dan penggalian	4,03	5,63	4,34	2,36	-6,66
C	Industri pengolahan	5,23	5,70	7,87	5,90	-6,69
D	Pengadaan listrik dan gas	4,21	4,39	4,84	6,13	-0,10
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,50	6,44	5,40	5,79	3,46
F	Konstruksi	5,64	7,83	7,93	8,38	-6,18
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	6,45	7,55	6,97	7,63	-4,31
H	Transportasi dan pergudangan	8,41	8,72	8,87	8,72	-4,97
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,18	7,92	8,23	8,13	-9,25
J	Informasi dan komunikasi	7,62	6,92	6,97	7,83	7,81
K	Jasa keuangan dan asuransi	6,25	5,28	4,48	3,83	-0,80
L	Real estate	5,34	3,91	4,23	5,01	2,91
M, N	Jasa perusahaan	6,18	5,53	6,34	6,83	-7,48
O	Administrasi pemerintahan,	5,32	2,22	4,16	3,39	-2,09

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pertahanan dan jaminan sosial wajib					
P	Jasa pendidikan	6,38	3,99	5,24	7,26	1,78
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	4,74	5,39	6,84	7,26	9,76
R, S, T, U	Jasa lainnya	4,58	4,46	8,43	6,83	-15,58
Produk Domestik Regional Bruto		**5,21**	**4,98**	**5,47**	**5,08**	**-1,84**

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2021

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRBnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pacitan tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB (Rp.Juta)	12.767,11	13.810,32	15.010,81	15.978,18	**15.785,20**
PDRB ADHK (Rp.Juta)	9.489,68	9.962,50	10.511,44	11.045,06	**10.837,87**

Sumber : Bappeda Kabupaten Pacitan, diolah

Sedangkan distribusi PDRB per sektor tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan (Miliar Rupiah) Tahun 2016– 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.800,48	3.991,77	4.213,59	4.309,80	4.512,44
B	Pertambangan dan Penggalian	733,60	791,03	877,33	919,87	863,44
C	Industri Pengolahan	834,85	909,10	1.007,81	1.089,67	1.033,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,63	4,24	4,64	5,01	5,00
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,37	12,32	13,12	13,74	14,22
F	Konstruksi	1.941,04	2.144,47	2.340,48	2.499,21	2.346,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.112,01	2.314,83	2.582,52	2.841,78	2.728,03
H	TransportasidanPergudangan	280,93	319,76	355,34	393,84	374,65
I	PenyediaanAkomodasidan Makan Minum	264,56	293,05	321,90	352,79	324,44
J	Informasi dan Komunikasi	690,31	751,99	805,69	879,62	951,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	253,27	276,92	297,11	310,85	308,53
L	*Real Estate*	192,24	204,96	223,89	240,80	248,60
M,N	Jasa Perusahaan	34,34	37,61	41,64	45,66	42,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	537,16	571,45	632,21	695,66	703,56
P	Jasa Pendidikan	619,58	661,38	705,60	769,23	785,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,31	126,64	136,99	149,93	165,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	342,44	363,81	408,56	444,46	377,56
Produk Domestik Regional Bruto		**12.767,11**	**13.775,32**	**14.968,41**	**15.961,91**	**15.785,20**

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2021

Jika dilihat dari data PDRB atas dasar harga berlaku diatas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Pacitan dalam hal ini di tahun 2020 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp4.512.440.000.000. Terbesar

kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedah motor sebesar Rp2.728.030.000.000. Selanjutnya secara berurutan diikuti sektor konstruksi dengan besaran Rp2.346.260.000.000 dan sektor industri pengolahan dengan besaran rupiah sebesar Rp1.033.010.000.000.

2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kabupaten Pacitan masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kabupaten Pacitan lebih detail selama tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut.

Grafik Gambar.2
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019

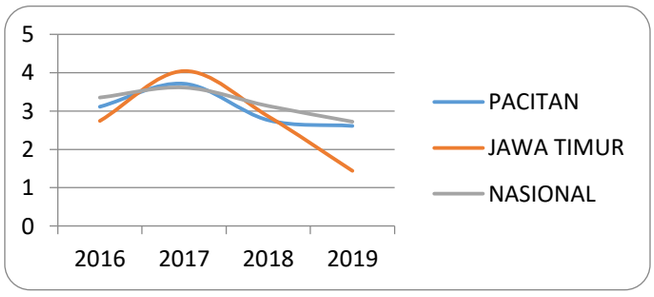

Tingkat inflasi Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, inflasi mencapai 3,11 % sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,71 %. Pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 2,76 % di bawah Provinsi dan Nasional. Sedangkan di tahun kemarin 2019 mengalami penurunan lagi sehingga menjadi sebesar 2,61, yang berarti inflasi di Kabupaten Pacitan semakin terkendali. Secara keseluruhan inflasi di Kabupaten Pacitan masih terkendali selama empat tahun terakhir.

2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut grafik yang menunjukkan pergerakan persentase TPAK Kabupaten Pacitan.

Gambar 3 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Pacitan Tahun 2016–2020

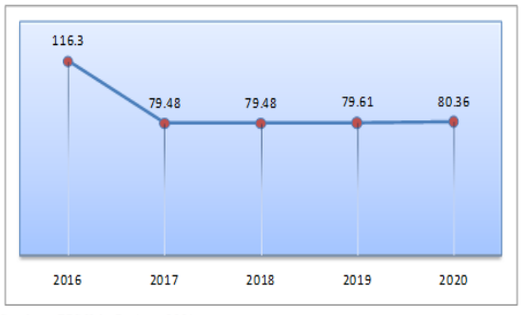

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pergerakan persentase TPAK menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase tingkat partisipasi angkatan kerja cukup tinggi, yaitu mencapai 116,3%, namun di tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 36,82% sehingga berada di angka 79,48%. Pada tahun 2018 persentase TPAK tidak mengalami

perubahan, akan tetapi mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 0,13% menjadi 79,61% kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 80,36%. Peningkatan persentase TPAK ini memberikan gambaran peningkatan penduduk yang masuk dalam dunia kerja karena tidak sedang sekolah atau mengurus rumah tangga.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 4 Grafik
Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2016 – 2020

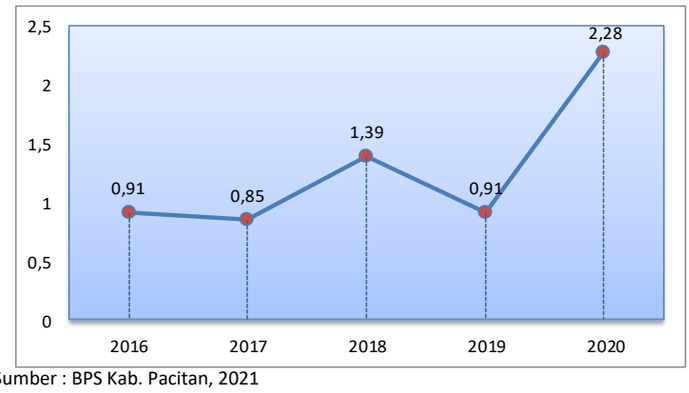

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2021

TPT di Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan sebesar 1,37% jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini diduga akibat dampak pandemi Covid-19. Banyak perusahaan baik yang skala besar maupun kecil tutup usahanya karena efek pandemi ini. Hal lain yang diduga adalah mereka yang sebelumnya bekerja di kota-kota besar karena lapangan pekerjaan di kota menyempit kemudian banyak yang pulang ke desa-desa, sementara di desa tidak tersedia lapangan pekerjaan, hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya pengangguran.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

Memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Pacitan pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, perekonomian Nasional dan perekonomian global akibat wabah Covid-19, diperkirakan perekonomian Kabupaten Pacitan akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1) Penanggulangan kemiskinan
2) Penguatan daya saing ekonomi lokal
3) Pemulihan perekonomian lokal
4) Pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Setelah berakhirnya wabah Covid-19, dibukanya akses perekonomian dari berbagai sektor termasuk beroperasinya kembali sektor pariwisata diharapkan akan memulihkan kondisi ekonomi daerah. Selain tantangan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2021 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kabupaten Pacitan terutama terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, dan dengan pulihnya perekonomian lokal, regional dan nasional, maka kondisi perekonomian daerah pada RKPD Tahun 2021 ditargetkan tumbuh sebesar 4.5 - 5.5%. Untuk mencapai target tersebut perlu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial utamanya sektor pertanian dan pangan dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pacitan. Program dan kegiatan juga difokuskan pada peningkatan peran dan sinergitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.

2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

martabat manusia.Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan berturut-turut menurun. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 80,82 ribu jiwa. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, termasuk Kabupaten Pacitan. Banyak pekerja yang sebelumnya berada di kota-kota besar karena lapangan pekerjaan di kota menyempit kemudian banyak yang pulang ke desa-desa. Hal ini secara langsung berdampak pada ekonomi keluarga yang ada di desa dan menyebabkan peningkatan beban ekonomi keluarga yang berakibat pada menurunnya rata-rata pengeluaran perkapita dan penurunan pengeluaran perkapita memposisikan penduduk berada pada posisi dibawah garis kemiskinan menjadikan mereka masuk dalam kelompok miskin. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan:

Gambar.5Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 (Ribu Jiwa)

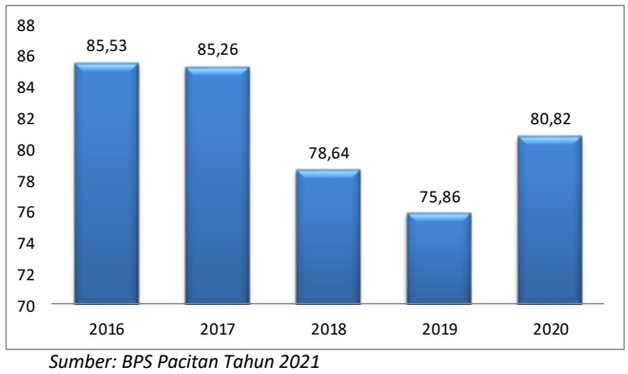

Sumber: BPS Pacitan Tahun 2021

Penurunan jumlah angka penduduk dapat diartikan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Pacitan telah menunjukkan keberhasilan dalam penanganan kemiskinan. Namun demikian, tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih jauh diatas angka kemiskinan provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pacitan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Gambar 6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2016 s/d 2020 (Persen)

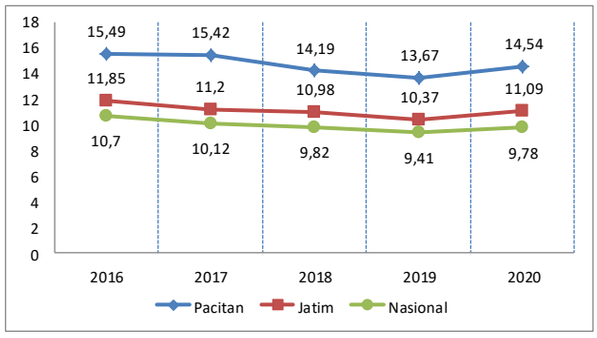

2.1.7 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2016 sebesar 65,74 dan terus meningkat menjadi sebesar 68,39 pada tahun 2020. Berikut kami sajikan data IPM Kabupaten Pacitan tahun 2016 s/d 2020 sebagai berikut:

Gambar 7 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016 s/d 2020

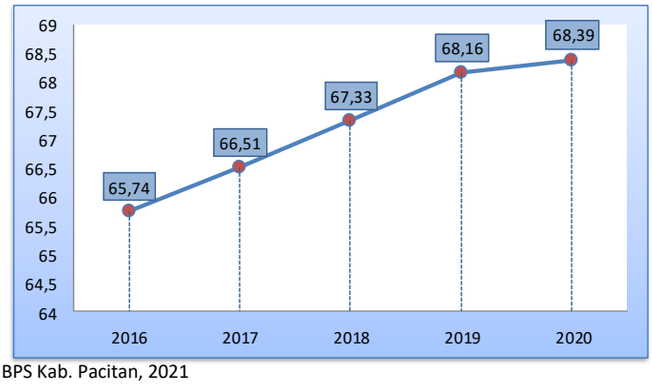

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2021

Peningkatan pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat (Usia Harapan Hidup), Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita).

Tabel 4 Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia harapan hidup (tahun)	71,18	71,31	71,52	71,77	71,94
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,19	12,41	12,61	12,62	12,64
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,89	7,02	7,19	7,28	7,60
4	Pengeluaran per kapita (000 rupiah)	8 048	8 288	8 527	9 033	8 796
5	Angka melek huruf (persen)	93,15	93,47	94,01	94,46	95,24
6	Persentase balita gizi buruk	0,18	0,15	0,21	0,16	0,20
7	Cakupan desa siaga aktif (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Pacitan Tahun 2021

2.1.8 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Nasional tahun 2022 menjadi pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran ekonomi nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Kondisi perekonomian nasional dapat dilihat dari tabel indikator makro ekonomi nasional tahun 2016 s/d 2020 sebagai berikut:

Tabel 5 Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2016 s / d 2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDB Per Kapita (juta)	47.937,7	51.891,2	55.990,5	59.065,3	56,9
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
3	Angka Kemiskinan (%)	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19
4	Pengangguran Terbuka	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07
5	IPM	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
6	Gini Rasio	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber: Statistik Indonesia 2021

Untuk mewujudkan misi tersebut maka Pemerintah Jawa Timur menetapkan alternatif Tema RKPD 2022 adalah:

Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah

Di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro

Untuk mewujudkan tema RKPD tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh agenda pembangunan tahun 2022, yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;

2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkisar 4,09-5,80 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 10,76 – 10,47 persen;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 72,58 – 73,07;
4. Gini rasio pada kisaran 0,368 -0,367 dan
5. Tingkat pengangguran terbuka 4,81 – 4,61 persen.

Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

Sebagai dasar penetapan kinerja tahun 2021 maka berikut disajikan capaian dari tahun 2016-2020 indikator makro Kabupaten Pacitan :

Tabel 6 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Perkapita (juta)	12,767	13,775	14,698	15,961	15,785
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21	4,98	5,51	5,08	(1,84)
3	Angka Kemiskinan (%)	15,49	15,42	14,19	13,67	14,54
4	Pengangguran Terbuka	0,91	0,85	1,38	0,91	2,28
5	IPM	65,74	66,51	67,33	68,16	68,39
6	Gini Rasio	0,36	0,32	0,35	0,39	0,35

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2021

1. Pelayanan publik: Layanan Pendidikan, Kesehatan dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi;
2. Penanggulangan kemiskinan: Penanganan kemiskinan akibat pandemic Covid-19;
3. Penanganan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung sektor pariwisata dan sektor unggulan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata yang didukung Sektor”. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022 yaitu:

1. Layanan Pendidikan, Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi;
2. Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan;
4. Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan Pendukung Pariwisata;
5. Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,0%;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,27%;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 69,94%;
4. Gini rasio pada kisaran 0,36%;
5. Tingkat pengangguran terbuka 1,53%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2022 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan Dampak dari Pandemi Covid-19;
3. Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang Mendukung Sektor Pariwisata;
4. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Utamanya Kinerja Sektor Pertanian yang Mendukung Pariwisata;
5. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Akuntabel berbasi E-government.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Tiga sumber pendapatan daerah Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut:

Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari dana perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan belanja pembangunan yang sifat peruntukan dan anggarannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Provinsi.

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

(dalam Rrupiah)

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.570.384.617.416,00**	**1.655.537.179.548,00**	**1.788.495.524.090,00**	**1.718.881.931.376,00**	**1.624.631.028.789,00**	**1.695.124.683.282,75**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**342.675.850.088,00**	**202.090.671.761,00**	**185.153.427.758,00**	**199.044.387.518,00**	**168.459.638.378,00**	**211.689.109.365,52**
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	67.457.168.815,00	29.748.463.837,00	33.550.764.990,00	36.075.038.103,00	35.062.233.638,00	35.571.955.001,23
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.774.086.533,00	25.989.347.391,00	23.213.971.232,00	28.851.343.905,00	18.994.470.321,00	16.829.943.993,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.553.186.053,00	2.439.361.626,00	2.486.655.951,00	2.593.777.560,00	2.669.553.062,00	2.704.269.238,35
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	247.891.408.687,00	143.913.498.907,00	125.902.035.585,00	131.524.227.950,00	111.733.381.357,00	156.582.941.132,94
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1.726.713.610.875,00**	**1.081.180.109.317,00**	**1.170.405.463.618,00**	**1.192.754.353.367,00**	**1.106.069.120.350,00**	**1.130.204.605.402,00**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.715.573.584,00	52.713.507.009,00	99.006.905.287,00	81.796.889.037,00	82.626.327.469,00	109.910.867.903,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.172.557.802.000,00	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00	817.563.878.000,00	739.879.366.000,00	731.754.165.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	477.440.235.291,00	234.751.256.308,00	277.683.212.331,00	293.393.586.330,00	283.563.426.881,00	288.539.572.499,00
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**500.995.156.453,00**	**372.266.398.470,00**	**432.936.632.714,00**	**327.083.190.491,00**	**350.102.270.061,00**	**353.230.968.515,23**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	16.683.429.867,00	-	185.297.460.000,00	50.089.880.000,00	58.554.240.000,00	72.470.827.044,09
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	134.852.032.586,00	84.159.547.470,00	80.030.636.714,00	90.982.239.491,00	75.229.252.061,00	95.756.679.614,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	203.796.214.000,00	213.591.851.000,00	162.652.536.000,00	180.842.992.000,00	202.349.929.000,00	179.462.490.000,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	145.663.480.000,00	74.515.000.000,00	4.956.000.000,00	5.168.079.000,00	13.968.849.000,00	5.540.971.857,14

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020, secara umum komponen belanja terdiri dari:

Kebijakan perencanaan Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen RKPD Tahun 2020 meliputi:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan perencanaan belanja Operasi diperuntukkan memenuhi belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja bantuan sosial, rutin belanja barang dan jasa, belanja habis pakai, untuk mencapai RPJMD dan tema serta target RKPD Perubahan 2021 yang digunakan untuk:

1. BELANJA OPERASI
   1) Belanja Pegawai

      Belanja Pegawai digunakan untuk Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

      Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

   2) Belanja Barang dan Jasa

      Belanja daerah memprioritaskan program yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2021 akibat Pandemi covid-19 untuk dilaksanakan dan menjadi prioritas pelaksanaannya dan juga Belanja belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

      Belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk menambah belanja modal untuk meningkatkan aset daerah.

   3) Belanja Hibah dalam perubahan RKPD 2021 dilakukan pergeseran untuk mengefektifkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tidak dilakukan penambahan maupun hibah baru.

   4) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan

Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja modal tanah untuk pembebasan tanah jalan Watu Karung Srau, untuk akses pariwisata, belanja modal tanah pasar tulakan sedangkan belanja modal lainnya yang diharapkan dapat menambah nilai aset pemerintah daerah.

3. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana non alam seperti Pandemi Covid 19 yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2021 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun

1. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat secara luas;

3. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk menambah belanja modal untuk meningkatkan aset daerah**.**

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada Tahun 2020 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD ini, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektivitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas *(money follow program)* dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

1) Prioritas Pembangunan Daerah

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan RKPD

Tahun 2020 ini memprioritaskan pada bidang pertanian dan pariwisata sebagai unggulan daerah.

2) Efisien dan Efektifitas Anggaran

RKPD Tahun 2020 ini menerapkan prinsip penggunaan anggaran dan belanja daerah secara efektif dan efisien serta menghindari pemborosan dari penganggaran maupun pelaksanaannya, dilaksanakan *refocusing* anggaran untuk meningkatkan pencapaian target sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat hal ini diikuti dengan peningkatan kesejahteraan aparatur daerah dengan memberikan tunjangan kinerja.

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai indikator hasil yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan pada akhir kegiatan. Penetapan target yang dibebankan pada setiap program dan kegiatan harus dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Indikator dan target kinerja meliputi, keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat daerah yang mengampunya, capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan indikator program dan sasaran.

4) Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi RPJMD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	**Belanja**	**1.644.719.320.619**	**1.629.539.754.070**	**1.595.939.987.645**	**1.921.214.125.566**	**1.570.270.990.460**	**1.739.281.107.303**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**999.717.047.413**	**970.051.810.279**	**968.381.424.996**	**1.161.549.922.426**	**1.080.929.046.606**	**1.020.273.481.114**
2.1.1.	Belanja Pegawai	696.547.418.733	613.359.536.719,00	622.125.985.893	653.790.730.071	624.056.147.994	681.671.386.519
2.1.2.	Belanja Hibah	24.282.642.656	30.704.144.100,00	41.591.117.583	52.272.194.500	87.702.988.960	33.369.940.000
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	6.599.373.506	12.912.131.865,00	8.430.153.804	119.702.257.569	10.749.680.534	8.312.476.000
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	4.576.300.137	3.916.790.996,00	4.947.836.016	5.520.484.143	5.168.064.575	6.022.622.800
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	266.846.408.881	306.057.342.384,00	289.639.074.200	327.312.348.544	324.351.550.300	287.897.055.795
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	864.903.500	3.101.864.215,00	1.647.257.500	2.951.907.599	28.900.614.243	3.000.000.000
2.2.	**Belanja Langsung**	**645.002.273.206**	**659.487.943.791**	**627.558.562.649**	**759.664.203.140**	**489.341.943.855**	**719.007.626.189**
2.2.1.	Belanja Pegawai	52.206.025.090	62.614.137.539,41	40.029.499.657	37.743.537.026	28.924.311.643	37.495.524.749
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	213.629.250.899	250.271.504.108,94	315.608.818.338	349.856.181.230	320.359.144.542	369.082.348.232
2.2.3.	Belanja Modal	379.166.997.217	346.602.302.143,00	271.920.244.654	372.064.484.884	140.058.487.669	312.429.753.208

Sumber: LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 Unaudited dan APBD 2021

Tabel 9 Target Belanja Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

(dalam Rrupiah)

No	Uraian	APBD 2021	Perubahan 2021	Berlebih/Berkurang
1	2	3	4	5
2	**BELANJA DAERAH**			
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.147.935.331.890**	**1.190.635.247.573**	**42.699.915.683**
02.01.01	Belanja Pegawai	705.913.506.735	710.324.346.562	4.410.839.827
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	391.901.117.650	434.884.185.201	42.983.067.551
02.01.05	Belanja Hibah	43.832.707.505	36.141.515.810	-7.691.191.695
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	6.288.000.000	9.285.200.000	2.997.200.000
02.02	**BELANJA MODAL**	**217.257.227.575**	**212.286.954.941**	**-4.970.272.634**
02.02.01	Belanja Modal Tanah	2.826.550.000	5.751.050.000	2.924.500.000
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.374.444.882	67.727.075.086	11.352.630.204
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.275.957.655	67.874.280.807	-16.401.676.848
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.026.704.209	69.382.402.173	-1.644.302.036
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.753.570.829	1.552.146.875	-1.201.423.954
02.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.000.000.000**	**15.150.167.507**	**11.150.167.507**
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	15.150.167.507	11.150.167.507
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**300.813.237.138**	**296.796.426.700**	**-4.016.810.438**
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	6.291.182.958	5.524.372.520	-766.810.438
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	294.522.054.180	291.272.054.180	-3.250.000.000
	Jumlah Belanja	**1.670.005.796.603**	**1.714.868.796.721**	**44.863.000.118**

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA) dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan rasional serta memperhatikan rambu-rambu yang diamanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD dan batas maksimal defisit yang diperkenankan. Pembiayaan tersebut meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan.

Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada peningkatan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat, PDAM dan Perusahaan Daerah yang besarannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan *likuiditas* keuangan daerah.

Tabel 10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi/Target RPJMD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PEMBIAYAAN	145.494.591.271,00	27.387.331.622,00	52.794.957.100,00	63.976.382.007,13	42.191.996.500,74	96.558.034.829,67
3.1.	Penerimaan	146.444.591.271,00	28.337.331.622,00	53.394.957.100,00	64.926.382.007,13	42.191.996.500,74	96.558.034.829,67

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi/Target RPJMD 2021
	Pembiayaan Daerah						
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	146.414.491.271,00	28.306.481.622,00	53.384.757.100,00	36.075.038.102,63	42.184.796.500,74	96.552.034.829,67
3.1.2.	Penerimaan piutang daerah	30.100.000,00	30.850.000,00	10.200.000,00	28.851.343.904,50	7.200.000,00	6.000.000,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**950.000.000,00**	**950.000.000,00**	**600.000.000,00**	**950.000.000,00**	**-**	**-**
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	950.000.000,00	950.000.000,00	600.000.000,00	950.000.000,00	-	-

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2020, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2020.

Target Kinerja APBD dijabarkan dalam setiap prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri dari :

2.3.1 Urusan Wajib

Urusan wajib di Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari urusan:
   Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman; Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari urusan:

   Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2.3.2 Urusan Pilihan

Urusan Pilihan, yang terdiri dari urusan:

Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

2.3.3 Urusan Penunjang

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari urusan:

Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Pemerintahan Umum.

Rekapitulasi Realisasi APBD, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dijelaskan dalam **Lampiran 1**.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 182 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2021. Adapun ketentuan pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2021, Tanggal 19 Februari 2021

   Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

   - Surat Gubernur Nomor 910/3050/201.2/2021 Tanggal 16 Februari 2021 tentang Penarikan Kembali Bantuan keuangan Khusus Kabupaten Pacitan Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

2) Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2021, Tanggal 6 Mei 2021

   Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

   - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan dampaknya:
   - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
   - Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.910/870/keuda tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemanfaatan Sisa Dana BOK Tambahan Tahun 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;
   - Surat Gubernur Nomor 412.2/10460/112.3/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov Jatim Tahun 2021;
   - Surat Gubernur Nomor 045.2/680/102.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov Jatim Tahun 2021;
   - Surat Gubernur Nomor 903/307/101.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov Jatim Tahun 2021;
   - Surat Gubernur Nomor 410/3949/112.4/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Belanja Bantuan Keuangan Khusus TMMD ke 110,111, dan 112 kepada Kabupaten;
   - Pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3) Pergeseran I Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2021, Tanggal 29 November 2021

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 179 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Cadangan Tahun 2021 sebesar Rp. 464.500.000 untuk Dinas Pendidikan;
- Surat Gubernur Jawa Timur No. 903/6752/101.1/2021 tgl 29 Oktober 2021 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab./Kota Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021
- Pergeseran antar rincian objek belanja dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

4) Pergeseran II Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2021, Tanggal 1 Desember 2020 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- pergeseran antar rincian objek belanja dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan atau semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya serangkaian upaya yang berkesinambungan antara pengelola program dan kegiatan yang baik, disamping itu sektor peningkatan pelayanan publik masih menjadi landasan utama dalam pencapaian target pendapatan daerah, sehingga kedepannya peningkatan pendapatan daerah tidak semata-mata hanya menjadi opini akan tetapi merupakan pendapatan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai secara rasional dan dapat dicapai secara kinerja.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
   - Pajak Daerah;
   - Retribusi Daerah;
   - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi :
   - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

- Pendapatan Transfer Antar Daerah.

3. Lain – lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :

- Pendapatan Hibah;
- Dana Darurat;
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

a Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

b Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber – sumber pendapatan daerah;

c Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;

d Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;

e Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;

f Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.610.798.165.584 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.695.124.683.283 lebih dari target sebesar Rp. 84.326.517.699 atau mencapai 105.24 %.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 211.689.109.365,52;
- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.410.964.746.873,14; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 72.470.827.044,09

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara umum dalam rangka pemenuhan target APBD, hampir semua komponen pendapatan dapat melampaui target, kecuali dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memang mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian terpuruk dan penurunan pemasukan negara, berdasarkan data realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.695.124.683.282,75 mengalami kenaikan sebesar Rp70.493.654.493,37 atau 4,34% dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp1.624.631.028.789,.

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021,dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam Rrupiah)

C	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih (Rp)	Capaian (%)
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**200.687.644.604**	**141.408.260.531,00**	**211.689.109.365,52**	**70.280.848.834,52**	**149,7**
-	Pajak Daerah	35.199.255.616	33.108.151.000	35.571.955.001,23	2.463.804.001,23	107,44
-	Retribusi Daerah	36.807.595.000	22.208.174.390,00	16.829.943.993,00	-5.378.230.397,00	75,78
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000	2.600.000.000	2.704.269.238,35	104.269.238,35	104,01
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.080.793.988	83.491.935.141,00	156.582.941.132,94	73.091.005.991,94	187.54.00
B	**Pendapatan Transfer**	**1.406.032.151.999**	**1.397.755.191.030,00**	**1.410.964.746.873,14**	**13.209.555.843,14**	**100,95**
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.317.690.786.300	1.299.620.499.547	1.309.667.095.402,00	10.046.595.855,00	100,77
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.341.365.699	98.134.691.483	101.297.651.471,14	3.162.959.988,14	103,22
C	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**45.661.000.000**	**71.634.714.023,00**	**72.470.827.044,09**	**836.113.021,09**	**101,17**
-	Pendapatan Hibah	0	0	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	100,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.661.000.000	71.634.714.023	71.462.827.044,09	(171.886.978,91)	99,76
JUMLAH PENDAPATAN		**1.652.380.796.603**	**1.610.798.165.584**	**1.695.124.683.282,75**	**84.326.517.699,00**	**105,24**

Komposisi target dan realisasi pajak daerah pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Pajak Hotel	**330.000.000,00**	**323.006.066,00**	**97,88**
1	Pajak Hotel	270.000.000,00	265.757.004,00	98,43
2	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	40.000.000,00	31.708.562,00	79,27
4	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	20.000.000,00	25.540.500,00	127,70
	Pajak Restoran	**1.662.526.000,00**	**2.278.471.612,23**	**137,05**
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	97.000.000,00	111.297.295,00	114,74
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	65.526.000,00	60.742.500,00	92,70
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	2.106.431.817,23	140,43
	Pajak Hiburan	**16.650.000,00**	**21.384.078,00**	**128,43**
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	13.500.000,00	17.043.000,00	126,24
2	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	-	-
3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.150.000,00	4.341.078,00	137,81
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-
	Pajak Reklame	**293.850.000,00**	**357.186.757,00**	**121,55**
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/	261.000.000,00	293.060.983,00	112,28

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Megatron			
2	Pajak Reklame Kain	23.100.000,00	43.453.531,00	188,11
3	Pajak Reklame Berjalan	9.750.000,00	20.672.243,00	212,02
	Pajak Penerangan Jalan	**12.000.000.000,00**	**12.827.822.560,00**	**106,90**
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.000.000.000,00	12.827.822.560,00	106,90
	Pajak Parkir	**32.000.000,00**	**30.637.253,00**	**95,74**
1	Pajak Parkir	32.000.000,00	30.637.253,00	95,74
	Pajak Air Tanah	**60.000.000,00**	**63.519.880,00**	**105,87**
1	Pajak Air Tanah	60.000.000,00	63.519.880,00	105,87
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	**113.125.000,00**	**264.226.350,00**	**233,57**
1	Pajak Bentonit	82.000.000,00	230.571.750,00	281,19
2	Pajak Granit/Andesit	9.000.000,00	14.529.600,00	161,44
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	22.125.000,00	19.125.000,00	86,44
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	**17.100.000.000,00**	**18.085.058.410,00**	**105,76**
1	PBBP2	17.100.000.000,00	18.085.058.410,00	105,76
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**1.500.000.000,00**	**1.320.642.035,00**	**88,04**
1	BPHTB-Pemindahan Hak	1.500.000.000,00	1.320.642.035,00	88,04
Jumlah		**33.108.151.000,00**	**35.571.955.001,23**	**107,44**

Komposisi target dan realisasi retribusi daerah pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:.

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021

(dalam Rrupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Capaian (%)
A	Retribusi Jasa Umum	13.832.769.500,00	10.646.647.000,00	76,97
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.377.627.000,00	4.798.476.500,00	57,28
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.727.382.500,00	1.893.385.000,00	109,61
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.767.250.000,00	2.842.317.000,00	102,71
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	330.500.000,00	380.090.000,00	115
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.500.000,00	100
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	17.510.000,00	17.690.000,00	101,03
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	605.000.000,00	707.188.500,00	116,89
B	Retribusi Jasa Usaha	8.198.579.890,00	5.870.417.359,00	71,6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	536.400.000,00	728.599.385,00	135,83
2	Retribusi Tempat Pelelangan	308.089.890,00	391.338.974,00	127,02
3	Retribusi Terminal	49.032.000,00	60.083.000,00	122,54
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	10.513.000,00	30,04
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	0	0	
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	16.800.000,00	16.900.000,00	100,6
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.253.258.000,00	4.662.983.000,00	64,29
C	Retribusi Perizinan Tertentu	176.825.000,00	312.879.634,00	176,94
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	175.000.000,00	312.094.634,00	178,34
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.825.000,00	785.000,00	43,01
JUMLAH		22.208.174.390,00	16.829.943.993,00	75,78

Komposisi target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan daerah pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021

(dalam Rrupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Presentase
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	**2.600.000.000,00**	**2.704.269.238,35**	**104,01**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.600.000.000,00	2.704.269.238,35	104,01
JUMLAH		**2.600.000.000,00**	**2.704.269.238,35**	**104,01**

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Presentase (%)
A	**Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan**	**349.545.231,00**	**458.520.245,04**	**131,18**
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	27.400.000,00	97.775.166,00	356,84
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	322.145.231,00	360.745.079,04	111,98
B	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**743.181.458,00**	**609.415.958,00**	**82**
1	Hasil Sewa BMD	90.000.000,00	327.108.000,00	363,45
1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	583.181.458,00	212.307.958,00	36,41
2	Hasil dari Bangun Guna Serah	70.000.000,00	70.000.000,00	100
C	**Jasa Giro**	**500.000.000,00**	**357.735.615,61**	**71,55**
	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00	357.735.615,61	71,55
D	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**260.580.000,00**	**318.891.138,62**	**122,38**
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	260.580.000,00	318.891.138,62	122,38
E	**Pendapatan Bunga**	**6.403.286.296,00**	**4.909.986.282,33**	**76,68**
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.403.286.296,00	4.909.986.282,33	76,68
F	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**8.862.600,00**	**158.820.516,00**	**1.792,03**
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.862.600,00	158.820.516,00	**1.792,03**
G	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**41.159.556,00**	**64.103.280,75**	**155,74**
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.859.193,00	2.781.722,00	149,62
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	129.436,00	665.515,00	514,17
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	22.824,00	141.429,00	619,65
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8.371.060,00	14.638.587,00	174,87
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	149.115,00	223.593,00	149,95
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	137.148,00	330.399,00	240,91
6	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.000,00	397.752,00	779,91
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.439.780,00	44.924.283,00	147,58
8	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	0,75	100
H	**Pendapatan dari Pengembalian**	**184.000.000,00**	**228.384.298,00**	**124,12**
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	184.000.000,00	228.384.298,00	124,12
I	**Pendapatan BLUD**	**75.000.000.000,00**	**149.475.763.798,59**	**199,3**
1	Pendapatan BLUD	75.000.000.000,00	149.475.763.798,59	199,3
J	**Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**100**
1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	1.320.000,00	1.320.000,00	100
JUMLAH		**83.491.935.141,00**	**156.582.941.132,94**	**187,54**

3.1.2 Pengelolaan Belanja

Secara definitif belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2021 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi:

1.1 Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

1.2 Belanja daerah dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;

1.3 Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;

1.4 Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut :

1.1 Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;

1.2 Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;

1.3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat;

1.4 Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.659.176.387.136,94 realisasinya mencapai Rp1.570.270.990.460,45 atau 94,64% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.080.929.046.605,56 dan belanja langsung sebesar Rp489.341.943.854,89 sehingga terdapat penghematan belanja daerah sebesar Rp88.905.396.676,49 atau 5,36%.

Dari kelompok Belanja Tidak Langsung selain dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp640.044.604.708,30 dengan realisasi Rp624.056.147.994,00 pada tahun anggaran 2020 juga dialokasikan untuk:

2.1 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp98.687.874.355,00 terealisasi sebesar Rp87.702.988.960,00 yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja Hibah diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional;

2.2 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp11.199.100.000,00 terealisasi sebesar Rp10.749.680.534,00 diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

2.3 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp5.953.587.004,00 terealisasi sebesar Rp5.168.064.575,00, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bagi Hasil tersebut diarahkan sebagai kompensasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masuk ke Pemerintah Daerah;

2.4 Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dianggarkan sebesar Rp324.968.550.299,56 terealisasi sebesar Rp324.351.550.299,56 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW, bantuan Operasional BPD, bantuan semen, Purna Tugas Perangkat Desa, bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;

2.5 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp39.939.731.923,95 terealisasi sebesar Rp28.900.614.243,00 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk:

2.1 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp29.936.928.902,00 terealisasi sebesar Rp28.924.311.643,40 yaitu untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan;

2.2 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp353.222.763.477,02 terealisasi sebesar Rp320.359.144.542,49 digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

2.3 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp155.223.246.467,11 terealisasi sebesar Rp140.058.487.669,00 digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada:

2.1 Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik.

2.2 Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan pemerintahan.

2.3 Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

2.4 Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

2.5 Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja.

2.6 Melakukan efisiensi belanja, melalui:

2.6.1 Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;

2.6.2 Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 secara rinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 16 Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021

(dalam Rrupiah)

No	Jenis Belanja	Target		Realisasi	
		Jumlah (Rp)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp)	Proporsi (%)
	BELANJA OPERASI	**1.202.844.925.830,00**	**70,45**	**1.129.605.443.865,05**	**70,15**
1	Belanja Pegawai	710.871.113.759,00	41,64	685.105.320.296,77	42,55
2	Belanja Barang dan Jasa	452.579.676.261,00	26,51	407.624.438.104,96	23,87
3	Belanja Hibah	35.395.415.810,00	2,07	33.286.776.563,32	2,07
4	Belanja Bantuan Sosial	3.998.720.000,00	0,23	3.588.908.900,00	0,22
	BELANJA MODAL	**196.194.162.383,00**	**11,49**	**174.928.799.770,00**	**10,86**
1	Belanja Modal Tanah	3.501.050.000,00	0,21	3.488.277.800,00	0,22
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.177.798.612,00	3,93	59.673.855.155,00	3,71
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.859.343.494,00	4,03	59.211.649.523,00	3,68
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	55.199.051.030,00	3,23	51.102.738.057,00	3,17

No	Jenis Belanja	Target		Realisasi	
		Jumlah (Rp)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp)	Proporsi (%)
	Irigasi				
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.456.919.247,00	0,09	1.452.279.235,00	0,09
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**12.874.193.270,00**	**0,75**	**12.174.540.228,00**	**0,76**
1	Belanja Tidak Terduga	12.874.193.270,00	0,75	12.174.540.228,00	0,76
	BELANJA TRANSFER	**295.440.518.931,00**	**17,30**	**293.572.507.730,20**	**18,23**
1	Belanja Bagi Hasil	5.579.372.520,00	0,33	4.492.035.027,00	0,28
2	Belanja Bantuan Keuangan	289.861.146.411,00	16,98	289.080.472.703,20	17,95
	Jumlah	**1.707.353.800.414,00**	100,00	**1.610.281.291.593,25**	**100,00**

Keterangan : % Proporsi Terhadap Total Belanja Daerah

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH	**1.610.798.165.584,00**	**1.695.124.683.282,75**	**105,24**
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.408.260.531,00	211.689.109.365,52	149,70
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.397.755.191.030,00	1.410.964.746.873,14	100,95
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.634.714.023,00	72.470.827.044,09	101,17
	BELANJA DAERAH	**1.707.353.800.414,00**	**1.610.281.291.593,25**	**94,31**
1	BELANJA OPERASI	1.202.844.925.830,00	1.129.605.443.865,05	93,91
2	BELANJA MODAL	196.194.162.383,00	174.928.799.770,00	89,16
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.874.193.270,00	12.174.540.228,00	94,57
4	BELANJA TRANSFER	295.440.518.931,00	293.572.507.730,20	99,37
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(96.555.634.830,00)**	**84.843.391.689,50**	**(87,87)**
	PEMBIAYAAN DAERAH	**96.555.634.830,00**	**96.558.034.829,67**	**100,00**
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.555.634.830,00	96.558.034.829,67	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**96.555.634.830,00**	**96.558.034.829,67**	**100,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**181.401.426.519,17**	**-**

Sesuai target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan secara proporsional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pacitan semaksimal mungkin.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berusaha mencari solusi-solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun permasalahan dan solusi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan

1. Permasalahan

   Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

   1.1 Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Pajak Daerah;

   1.2 Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan Wajib Pajak Daerah;

   1.3 Data piutang tidak akurat;

1.4 Sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak kurang *transparan* dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak;

1.5 Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;

1.6 Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan benar;

1.7 Belum tercukupinya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus sebagai juru sita pajak;

1.8 Belum tersedianya sistem dan mekanisme di bidang pajak daerah.

1.9 Kondisi pandemi covid 19 membuat penurunan pendapatan negara sehingga ada pengurangan dana perimbangan ke daerah.

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:

2.1 Rekrutmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak daerah;

2.2 Pengalokasian anggaran secara bertahap untuk pembelian sarana dan prasarana pelayanan publik;

2.3 Memutakhirkan data piutang pajak daerah melalui program kegiatan pendataan dan penilaian;

2.4 Sosialisasi kesadaran membayar pajak daerah yang dilaksanakan secara kontinu bagi wajib pajak;

2.5 Pembenahan administrasi dan penyempurnaan regulasi pajak daerah;

2.6 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;

2.7 Mengusulkan diklat kompetensi aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan juru sita pajak kepada BKPPD Kabupaten Pacitan; dan

2.8 Merencanakan studi tiru pelaksanaan dan mekanisme sidang pajak.

2.9 Peningkatan koordinasi kepada pemerintah pusat.

3.2.2 Pengelolaan Belanja

1. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Belanja Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

1.1 Adanya perubahan ketentuan aturan dari Pemerintah Pusat, yang mengakibatkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam penerapannya di daerah khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer dari DAK;

1.2 Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS, JKN dan BLUD), yang digunakan langsung dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

1.3 Belum *optimal*-nya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi Likin) dan jaringan *online* antar OPD. Hal ini dikarenakan proses pembangunan Aplikasi tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu;

1.4 Alokasi belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;

1.5 Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;

1.6 Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan

pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia;

1.7 Adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan pagu alokasi bantuan keuangannya setelah Peraturan Daerah APBD Kabupaten ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

1.8 Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;

1.9 Adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan *refocusing* anggaran, sehingga banyak belanja yang dipangkas untuk menangani pandemi covid.

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan Belanja Daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:

2.1 Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer;

2.2 Menetapkan rekening BOS, JKN dan BLUD menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Dana Bos dan JKN dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);

2.3 Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

2.3.1 Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi secara *online* antar OPD;

2.3.2 Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan jaringan *online* antar OPD baik di *server* maupun jaringannya;

2.3.3 Berkoordinasi secara aktif dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi secara *online* antar OPD;

2.4 Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut;

2.5 Aktif mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;

2.6 Terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menambah kapasitas jaringan online seluruh OPD peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.7 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar belanja yang didanai oleh bantuan tersebut dapat segera direalisasikan;

2.8 Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna untuk alokasi Belanja Modal, serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat dipertanggungjawabkan;

2.9 Dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja daerah hanya diperuntukan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak;

2.10 Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas yang ditetapkan;

2.11 Anggaran penanganan pandemi covid 19 lebih diprioritaskan pada Anggaran 2021;

2.12 Dalam rangka peningkatan jumlah personil OPD yang memahami dan memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, ditempuh langkah–langkah sebagai berikut:

2.12.1 Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi mengenai pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah;

2.12.2 Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan di OPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, mengenai pengelolaan aset daerah.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas

   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrual.

   Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

a) diterima di Rekening Kas Daerah; atau

b) diterima oleh SKPD; atau

c) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD; dan

d) diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS). Pengakuan Pendapatannya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan SP3B dengan SP2B yang disahkan oleh PPKD.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatannya untuk operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja dengan menyampaikan SP3B dan SP2B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

6. Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi persentase piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

a. Kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan; dan

d. Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

a. Piutang pajak;

b. Piutang retribusi; dan

c. Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

   1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan

   2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

   1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan

   2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

   1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

   2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

   1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

   2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

   1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

(1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

(2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya termasuk di dalamnya Dana Bergulir. Dana Bergulir tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Secara teknis pengelolaan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2021. Dana bergulir diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang yang telah dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan. Dana Bergulir disajikan dalam Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Jumlah dana bergulir diragukan tertagih dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan kualitas Dana Bergulir yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan
   2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
   2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
   2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;

2) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak ada ahli waris;

3) Penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau

4) Penerima/obyek dana bergulir mengalami kejadian luar biasa (*force majeure*).

Dari kriteria kualitas Dana Bergulir tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan penyisihan dana bergulir dengan Besaran Penyisihan Dana Bergulir sebagai berikut.

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2021 pada harga perolehan yang terdiri dari:

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

10.Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

11. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan *kurs* tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara akrual untuk pendapatan dan belanja serta informasi tambahan mengenai rincian *output* dan *outcame* dalam bentuk indikator kinerja keuangan dengan maksud agar pembaca memahami pos-pos aset

dan kewajiban yang timbul dari penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja

4.5 Pengungkapan - Pengungkapan lainnya

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya memuat pengungkapan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan atau penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, permasalahan hukum yang ditangani pemerintah kabupaten, catatan penting lainnya terkait pandemi Covid-19.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1. Pendapatan	**1.610.798.165.584,00**	**1.695.124.683.282,75**	**1.624.631.028.789,38**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2021, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.610.798.165.584,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.695.124.683.282,75 atau sebesar 105,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020, realisasi pendapatan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.493.654.493,37 atau sebesar 4,34%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.408.260.531,00	211.689.109.365,52	149,70	168.459.638.378,38	43.229.470.987,14
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.397.755.191.030,00	1.410.964.746.873,14	100,95	1.397.617.150.411,00	13.347.596.462,14
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.634.714.023,00	72.470.827.044,09	101,17	58.554.240.000,00	13.916.587.044,09
Jumlah		**1.610.798.165.584,00**	**1.695.124.683.282,75**	**105,24**	**1.624.631.028.789,38**	**70.493.654.493,37**

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2021, anggaran PAD adalah sebesar Rp141.408.260.531,00 dan realisasinya sebesar Rp211.689.109.365,52 atau sebesar 149,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, realisasi PAD pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp43.229.470.987,14 atau sebesar 25,66%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Daerah	33.108.151.000,00	35.571.955.001,23	107,44	35.062.233.638,16	509.721.363,07
2	Retribusi Daerah	22.208.174.390,00	16.829.943.993,00	75,78	18.994.470.321,00	(2.164.526.328,00)
3	Hasil Pengelolaan	2.600.000.000,00	2.704.269.238,35	104,01	2.669.553.062,20	34.716.176,15

	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4	Lain-lain PAD yang Sah	83.491.935.141,00	156.582.941.132,94	187,54	111.733.381.357,02	44.849.559.775,92
Jumlah		**141.408.260.531,00**	**211.689.109.365,52**	**149,70**	**168.459.638.378,38**	**43.229.470.987,14**

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2021. Dari target sebesar Rp141.408.260.531,00 dan realisasinya sebesar Rp211.689.109.365,52 sehingga melebihi target sebesar Rp70.280.848.834,52 atau 49,70%.

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, terdapat satu jenis PAD yang tidak mencapai target, yaitu Pendapatan dari Retribusi Daerah yang pada Tahun 2021 hanya mencapai Rp16.829.943.993,00 atau 75,78% dari pagu anggaran sebesar Rp22.208.174.390,00. Uraian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 1 angka (7) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 1 angka (6) menyebutkan

instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 1 angka (4) menyebutkan perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp35.571.955.001,23 atau sebesar 107,44% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	330.000.000,00	323.006.066,00	97,88	284.141.167,00	38.864.899,00
2	Pajak Restoran	1.662.526.000,00	2.278.471.612,23	137,05	1.850.806.091,16	427.665.521,07
3	Pajak Hiburan	16.650.000,00	21.384.078,00	128,43	18.259.752,00	3.124.326,00
4	Pajak Reklame	293.850.000,00	357.186.757,00	121,55	336.685.263,00	20.501.494,00
5	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	12.827.822.560,00	106,90	12.135.694.507,00	692.128.053,00
6	Pajak Parkir	32.000.000,00	30.637.253,00	95,74	33.491.100,00	(2.853.847,00)
7	Pajak Air Tanah	60.000.000,00	63.519.880,00	105,87	53.654.409,00	9.865.471,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	113.125.000,00	264.226.350,00	233,57	449.111.233,00	(184.884.883,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17.100.000.000,00	18.085.058.410,00	105,76	17.453.361.557,00	631.696.853,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	1.320.642.035,00	88,04	2.447.028.559,00	(1.126.386.524,00)
Jumlah		**33.108.151.000,00**	**35.571.955.001,23**	**107,44**	**35.062.233.638,16**	**509.721.363,07**

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi jenis pajak yang dipungut menggunakan *self assessment system* antara lain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dapat terealisasi secara optimal disebabkan karena berkurangnya nilai transaksi pengalihan hak sertifikat (jual beli, hibah, maupun waris) sedangkan Pajak Parkir dan Pajak Hotel tidak dapat terealisasi secara optimal karena sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Pacitan masih belum pulih sepenuhnya akibat adanya pandemi Covid-19.

Dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020, realisasi pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp509.721.363,07 atau 1,45%.

Dari total pendapatan Pajak Daerah diatas, sebesar 50,84 % atau sebesar Rp18.085.058.410,00 diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang merupakan pemberi kontribusi terbesar pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2021. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp12.827.822.560,00 atau 36,06%, dan Pajak Restoran sebesar Rp2.278.471.612,23 atau 6,41% dari total penerimaan pajak daerah.

Realisasi Pajak Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan adanya penurunan objek pajak (misal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir) akibat terdampak pandemi Covid-19.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp16.829.943.993,00 atau sebesar 75,78% dari anggaran yang telah ditetapkan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	13.832.769.500,00	10.646.647.000,00	76,97	12.915.407.400,00	(2.268.760.400,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	8.198.579.890,00	5.870.417.359,00	71,60	5.664.714.525,00	205.702.834,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	176.825.000,00	312.879.634,00	176,94	414.348.396,00	(101.468.762,00)
Jumlah		**22.208.174.390,00**	**16.829.943.993,00**	**75,78**	**18.994.470.321,00**	**(2.164.526.328,00)**

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp10.646.647.000,00 atau sebesar 76,97% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.377.627.000,00	4.798.476.500,00	57,28	7.186.614.400,00	(2.388.137.900,00)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.727.382.500,00	1.893.385.000,00	109,61	1.873.344.500,00	20.040.500,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.767.250.000,00	2.842.317.000,00	102,71	2.801.533.000,00	40.784.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	330.500.000,00	380.090.000,00	115,00	293.010.000,00	87.080.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	7.500.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	17.510.000,00	17.690.000,00	101,03	-	17.690.000,00

7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	605.000.000,00	707.188.500,00	116,89	760.905.500,00	(53.717.000,00)
Jumlah		**13.832.769.500,00**	**10.646.647.000,00**	**76,97**	**12.915.407.400,00**	**(2.268.760.400,00)**

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, pasal 1 angka (4) instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Perda No 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang mencakup pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (tera timbangan dan pertashop)
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Dari jumlah Realisasi Jasa Umum tersebut diatas, sebesar 45,07% atau sebesar Rp4.798.476.500,00 diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan pemberi kontribusi terbesar di Tahun 2021.

Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp2.842.317.000,00 atau 102,71% dari anggaran, dan mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp40.784.000,00 atau 1,46% dari tahun 2020.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.198.579.890,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp5.870.417.359,00 atau sebesar 71,60%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	536.400.000,00	728.599.385,00	135,83	213.982.850,00	514.616.535,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	308.089.890,00	391.338.974,00	127,02	257.965.675,00	133.373.299,00
3	Retribusi Terminal	49.032.000,00	60.083.000,00	122,54	28.855.000,00	31.228.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	10.513.000,00	30,04	3.072.000,00	7.441.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	-	-	-	8.670.000,00	(8.670.000,00)
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	16.800.000,00	16.900.000,00	100,60	14.050.000,00	2.850.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.253.258.000,00	4.662.983.000,00	64,29	5.138.119.000,00	(475.136.000,00)
Jumlah		**8.198.579.890,00**	**5.870.417.359,00**	**71,60**	**5.664.714.525,00**	**205.702.834,00**

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang diserahi tugas untuk memungut retribusi.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi

adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Khusus Parkir.

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, pasal 1 angka (4) menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Retribusi jasa usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di Tahun 2021 adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dilakukan penutupan semua obyek wisata selama beberapa bulan sehingga tidak ada kunjungan wisata.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp176.825.000,00 dengan realisasi sebesar Rp312.879.634,00 atau sebesar 176,94%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	175.000.000,00	312.094.634,00	178,34	412.138.396,00	(100.043.762,00)
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.825.000,00	785.000,00	43,01	2.210.000,00	(1.425.000,00)
Jumlah		**176.825.000,00**	**312.879.634,00**	**176,94**	**414.348.396,00**	**(101.468.762,00)**

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, penyelenggaraan layanan persetujuan bangunan gedung dan retribusi persetujuan bangunan gedung maka untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sementara dihentikan dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati 188.45/764/KPTS/408.12/2021 Tentang Pembebasan Retribusi Atas Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

- Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Izin Trayek.

Untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp312.094.634,00 atau 178,34% dari anggaran dan Retribusi Izin Trayek hanya terealisasi sebesar Rp785.000,00 atau 43,01% dari pagu anggaran Rp1.825.000,00 dikarenakan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan pribadi terutama kendaraan roda 2 (dua) sehingga kendaraan umum yang bertrayek banyak beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi dan tidak memperpanjang izin trayek.

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.704.269.238,35 atau sebesar 104,01% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.600.000.000,00	2.704.269.238,35	104,01	2.669.553.062,20	34.716.176,15
Jumlah		**2.600.000.000,00**	**2.704.269.238,35**	**104,01**	**2.669.553.062,20**	**34.716.176,15**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim. Pendapatan tersebut merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2020. Pembagian dividen PT Bank Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 1 Tanggal 3 Mei 2021.

Pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 5 Tanggal 22 Juni 2021. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu 0,36% untuk Bank Jatim dan 0,99% pada PT Bank BPR Jatim.

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp 2.704.269.238,35 terdiri atas Pendapatan dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp2.614.465.238,35 dan pendapatan dividen dari PT Bank BPR Jatim sebesar Rp89.804.000,00.

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp156.582.941.132,94 atau sebesar 187,54% dari anggaran yang telah ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga .
- Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Bunga dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan..
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Denda Pajak Daerah dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan dari Pengembalian dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD.
- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Lain lain pendapatan yang sah lainnya dipungut oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	349.545.231,00	458.520.245,04	131,18	241.751.000,00	216.769.245,04
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	743.181.458,00	609.415.958,00	82,00	879.362.068,00	(269.946.110,00)
3	Jasa Giro	500.000.000,00	357.735.615,61	71,55	417.695.520,37	(59.959.904,76)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	260.580.000,00	318.891.138,62	122,38	320.688.677,57	(1.797.538,95)
5	Pendapatan Bunga	6.403.286.296,00	4.909.986.282,33	76,68	5.834.513.767,02	(924.527.484,69)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.862.600,00	158.820.516,00	1.792,03	0,00	158.820.516,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	41.159.556,00	64.103.280,75	155,74	246.184.508,00	(182.081.227,25)
8	Pendapatan dari Pengembalian	184.000.000,00	228.384.298,00	124,12	182.704.558,00	45.679.740,00
9	Pendapatan BLUD	75.000.000.000,00	149.475.763.798,59	199,30	83.705.772.290,08	65.769.991.508,51
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	19.038.335.021,00	(19.038.335.021,00)
11	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	0,00	1.320.000,00
12	Lain-Lain PAD yang sah Lainya	0,00	0,00	0,00	866.373.946,98	(866.373.946,98)
Jumlah		**83.491.935.141,00**	**156.582.941.132,94**	**187,54**	**111.733.381.357,02**	**44.849.559.775,92**

1) Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan di Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp458.520.245,04 atau 131,18% merupakan pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya (hasil penjualan hewan, biota perairan dan tanaman) dan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	226.651.000,00	(226.651.000,00)
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	(15.100.000,00)
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	27.400.000,00	97.775.166,00	356,84	0,00	97.775.166,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	322.145.231,00	360.745.079,04	111,98	0,00	360.745.079,04
Jumlah		**349.545.231,00**	**458.520.245,04**	**131,18**	**241.751.000,00**	**216.769.245,04**

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp97.775.166,00 dapat dijelaskan sebagaimana dalam data tabel berikut:

Tabel 28 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Hewan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	0,00	5.400.000,00
2	Hasil Penjualan Biota Perairan	20.000.000,00	78.575.166,00	392,88	0,00	78.575.166,00
3	Hasil Penjualan Tanaman	2.000.000,00	13.800.000,00	690,00	0,00	13.800.000,00
Jumlah		**27.400.000,00**	**97.775.166,00**	**356,84**	**-**	**97.775.166,00**

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp360.745.079,04 yang terdiri dari hasil penjualan bekas bangunan sebesar Rp22.593.000,00 , hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp197.871.100,00 dan pendapatan lain-lain yang tidak terdapat pagu anggaran sebesar Rp140.280.979,04

2) Pendapatan Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari pendapatan hasil sewa BMD, Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dan Hasil dari Bangun Guna Serah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Sewa BMD	90.000.000,00	327.108.000,00	363,45	0,00	327.108.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	583.181.458,00	212.307.958,00	36,41	879.362.068,00	(667.054.110,00)
3	Hasil dari Bangun Guna Serah	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00	70.000.000,00
Jumlah		**743.181.458,00**	**609.415.958,00**	**82,00**	**879.362.068,00**	**(269.946.110,00)**

3) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan. Anggaran Pendapatan Jasa Giro sejumlah Rp500.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp357.735.615,61 atau 71,55% turun sebesar Rp59.959.904,76 dibandingkan Tahun 2020. Anggaran pendapatan Jasa Giro TA 2021 turun dikarenakan menyesuaikan jumlah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang mengalami penurunan.

4) Pendapatan Hasil pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp318.891.138,62 atau 122,38% dari pagu yang ditetapkan. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.797.538,95 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19, pelaku usaha masih hati - hati untuk menambah modal serta fihak pengelola dana bergulir harus selektif dalam memberi modal yang sifatnya produktif.

5) Pendapatan bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.909.986.282,33 atau 76,68% dari anggaran yang ditetapkan dan

mengalami penurunan sebesar Rp924.527.484,69 dikarenakan menyesuaikan jumlah pengendapan anggaran. Adapun dengan rincian sebagai berikut:

Bank Jatim sebesar Rp4.433.013.697,97

BRI sebesar Rp199.089.022,00

BNI sebesar Rp98.157.535,00

Mandiri sebesar Rp55.171.232,86

BTN sebesar Rp124.554.794,50

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp158.820.516,00 dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp8.862.600,00

7) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp64.103.280,75 atau sebesar 155,74% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan denda pajak Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.859.193,00	2.781.722,00	149,62	1.852.571,00	929.151,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	129.436,00	665.515,00	514,17	226.477,00	439.038,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	22.824,00	141.429,00	619,65	0.00	141.429,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8.371.060,00	14.638.587,00	174,87	6.503.403,00	8.135.184,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	149.115,00	223.593,00	149,95	73.508,00	150.085,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	137.148,00	330.399,00	240,91	148.885,00	181.514,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.000,00	397.752,00	779,91	9.227.556,00	(8.829.804,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.439.780,00	44.924.283,00	147,58	49.190.935,00	(4.266.652,00)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,75	100,00	178.961.173,00	(178.961.172,25)
Jumlah		**41.159.556,00**	**64.103.280,75**	**155,74**	**246.184.508,00**	**(182.081.227,25)**

8) Pendapatan dari pengembalian terealisasi sebesar Rp 228.384.298,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan atau sebesar 124,12%. Terjadi kenaikan sebesar Rp45.679.740,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020.

9) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) terealisasi sebesar Rp149.475.763.798,59 atau 199,3% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kenaikan Pendapatan BLUD sebesar Rp65.769.991.508,51 dari Tahun Anggaran 2020 dikarenakan adanya realisasi pendapatan dari jasa layanan dengan penjamin senilai Rp139.033.091.318,00.

Adapun rincian rekening pendapatan BLUD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31 Pendapatan BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	**PENDAPATAN JASA LAYANAN**	**148.665.390.465,65**
	Pendapatan Jasa Layanan - Instalasi/Unit	9.563.727.147,65

	Pendapatan Jasa Layanan - Dengan Penjamin	139.033.091.318,00
	Pendapatan Non Instalasi	68.572.000,00
2	**HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**	**13.800.000,00**
	Pendapatan Sewa	13.800.000,00
3	**PENDAPATAN BLUD LAINNYA**	**796.573.332,94**
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan	12.000.000,00
	Jasa Giro	51.934.877,92
	Pendapatan Bunga	489.910.958,79
	Lain-Lain Pendapatan Blud Yang Sah Lainnya	242.727.496,23
Jumlah		**149.475.763.798,59**

10) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)* sebesar Rp 1.320.000,00 yang merupakan pendapatan denda dari tidak bermasker

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.397.755.191.030,00 dan realisasinya Rp1.410.964.746.873,14 atau sebesar 100,95%. Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp13.347.596.462,14. Pendapatan Transfer dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2021.

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.120.158.009.547,00	1.130.204.605.402,00	100,90	1.106.069.120.350,00	24.135.485.052,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	179.462.490.000,00	179.462.490.000,00	100,00	202.349.929.000,00	(22.887.439.000,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	92.593.719.626,00	95.756.679.614,00	103,42	75.229.252.061,00	20.527.427.553,00
4	Bantuan Keuangan	5.540.971.857,00	5.540.971.857,14	100,00	13.968.849.000,00	(8.427.877.142,86)
JUMLAH		**1.397.755.191.030,00**	**1.410.964.746.873,14**	**100,95**	**1.397.617.150.411,00**	**13.347.596.462,14**

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.130.204.605.402,00 atau sebesar 100,90% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	41.883.169.448,00	45.946.433.886,00	109,70	37.256.152.066,00	8.690.281.820,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	41.144.062.924,00	63.964.434.017,00	155,46	45.370.175.403,00	18.594.258.614,00
3	Dana Alokasi Umum	731.754.165.000,00	731.754.165.000,00	100,00	739.879.366.000,00	(8.125.201.000,00)
4	Dana Alokasi Khusus	305.376.612.175,00	288.539.572.499,00	94,49	283.563.426.881,00	4.976.145.618,00
Jumlah		**1.120.158.009.547,00**	**1.130.204.605.402,00**	100,90	**1.106.069.120.350,00**	24.135.485.052,00

1) **Dana Bagi hasil pajak sebesar Rp41.883.169.448,00 terealisasi sebesar Rp 45.946.433.886,00 dengan rincian sebagai berikut**:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.568.237.430,00	7.804.343.758,00	140,16	4.157.646.331,00	3.646.697.427,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.760.843.087,00	15.174.090.554,00	110,27	0.00	15.174.090.554,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.356.273.800,00	2.192.768.989,00	161,68	16.771.790.869,00	(14.579.021.880,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.197.815.131,00	20.775.230.585,00	98,01	16.326.714.866,00	4.448.515.719,00
Jumlah		**41.883.169.448,00**	**45.946.433.886,00**	**109.70**	**37.256.152.066,00**	**8.690.281.820,00**

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan

  Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.568.237.430,00 terealisasi sebesar Rp7.804.343.758,00.

  Realisasi sebesar Rp7.804.343.758,00 terdiri dari Rp1.245.371.430,00 kurang bayar tahun 2020 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020, sebesar Rp4.322.866.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, sebesar Rp2.236.106.328,00 kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

- DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp13.760.843.087,00 terealisasi sebesar Rp15.174.090.554,00.

  Realisasi sebesar Rp.15.174.090.554,00 terdiri dari Rp2.359.946.087,00 kurang bayar tahun 2020 sesuai PMK Nomor 255/PMK.07/2021, sebesar Rp.11.400.897.000,00 merupakan realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, sebesar Rp.1.413.247.467,00 merupakan kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

- DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.356.273.800,00 terealisasi sebesar Rp2.192.768.989,00.
  Realisasi sebesar Rp2.192.768.989,00 terdiri dari sebesar Rp269.467.800,00 kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021, sebesar Rp1.086.806.000,00 merupakan realisasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, sebesar Rp836.495.189,00 merupakan kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

- DBH dari Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.197.815.131,00 terealisasi sebesar Rp20.775.230.585,00.

  Realisasi sebesar Rp20.775.230.585,00 terdiri dari sebesar Rp1.379.722.131,00 kurang bayar tahun 2020 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021, sebesar Rp525.821.501,00 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020 sebesar Rp18.331.736.025,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, dan

PMK Nomor 230/PMK.07/2020 sebesar Rp537.950.928,00 kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

2) **Dana Bagi hasil Bukan Pajak sebesar 41.144.062.924,00 terealisasi sebesar Rp63.964.434.017,00 dengan rincian sebagai berikut**

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	36.593.747.700,00	57.368.872.546,00	156,77	37.803.687.552,00	19.565.184.994,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	817.468.900,00	1.087.707.787,00	133,06	5.382.490.341,00	(4.294.782.554,00)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	39.874.676,00	39.874.676,00	100,00	31.628.750,00	8.245.926,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	12.755.675,00	12.755.675,00	100,00	44.296.086,00	(31.540.411,00)
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.797.884.150,00	3.491.713.806,00	194,21	1.125.961.957,00	2.365.751.849,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	524.712.673,00	605.890.377,00	115,47	0	605.890.377,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00		193.834.428,00	(193.834.428,00)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.619.150,00	1.357.619.150,00	100,00	788.276.289,00	569.342.861,00
Jumlah		**41.144.062.924,00**	**63.964.434.017,00**	**899,51**	**45.370.175.403,00**	**18.594.258.614,00**

- DBH Sumber Daya Alam (SD) Minyak Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.593.747.700,00 terealisasi sebesar Rp57.368.872.546,00.

  Realisasi sebesar Rp57.368.872.546,00 terdiri dari sebesar Rp572.689.700,00 kurang bayar tahun 2020 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021, sebesar Rp36.021.058.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, sebesar Rp20.775.124.846,00 kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

- DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp817.468.900,00 terealisasi sebesar Rp1.087.707.787,00

Realisasi sebesar Rp1.087.707.787,00 terdiri dari sebesar Rp9.831.900,00 kurang bayar tahun 2020 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021, sebesar Rp807.637.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, dan sebesar Rp270.238.887,00 kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

- DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.874.676,00 terealisasi sebesar Rp39.874.676,00.

  Realisasi sebesar Rp39.874.676,00 terdiri dari sebesar Rp8.027.051,00 kurang bayar tahun 2020 sesuai PMK Nomor 113/PMK.07/2020, sebesar Rp4.295.625,00 kurang bayar Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021 sebesar Rp27.552.000,00 realisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2020.

- DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.755.675,00 terealisasi sebesar Rp12.755.675,00.
  Realisasi sebesar Rp12.755.675,00 terdiri dari sebesar Rp6.773.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 113. Tahun 2020 dan realisasi sebesar Rp5.982.675,00 kurang bayar tahun 2020 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021.

- DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty Bagi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.797.884.150,00 terealisasi sebesar Rp3.491.713.806,00.

  Realisasi sebesar Rp3.491.731.806,00 terdiri dari sebesar Rp1.773.836.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, sebesar Rp24.048.150,00 kurang bayar Tahun 2018 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021, dan sebesar Rp1.693.829.656,00 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp524.712.673,00 terealisasi sebesar Rp605.809.377,00.

  Realisasi sebesar Rp605.890.377,00 terdiri dari sebesar Rp258.039.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, sebesar Rp208.703.923,00 kurang bayar tahun 2020 PMK Nomor 113/PMK.07/2020, sebesar Rp57.969.750,00 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021, sebesar Rp81.177.704,00 kurang bayar Tahun 2019 DAN Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,00 terealisasi sebesar 0,00.

- DBH Sumber Daya Alam Perikanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.357.619.150,00 terealisasi sebesar Rp1.357.619.150,00.

  Realisasi sebesar Rp1.357.619.150,00 terdiri dari realisasi Rp1.128.319.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, sebesar 229.300.150,00 kurang bayar tahun 2020 PMK Nomor 113/PMK.07/2020.

3) **Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp731.754.165.000,00**
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebesar Rp731.754.165.000,00. Dari alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp731.754.165.000,00 terealisasi sebesar Rp731.754.165.000,00

4) **Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp sebesar Rp288.539.572.499,00**

Dana Alokasi Fisik sebesar Rp103.027.786.121,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dari pagu APBD sebesar Rp120.343.179.500,00 terealisasi sebesar Rp103.027.786.121,00. Adapun Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 adalah

Dana Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) terdiri dari:

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	970.692.000,00	888.355.985,00	91,52	283.563.426.881,00	(282.675.070.896,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	26.389.408.000,00	23.293.757.950,00	88,27	0,00	23.293.757.950,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	23.021.104.000,00	21.076.198.200,00	91,55	0,00	21.076.198.200,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	3.410.668.000,00	2.745.497.897,00	80,50	0,00	2.745.497.897,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	11.245.347.000,00	8.903.033.100,00	79,17	0,00	8.903.033.100,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	20.230.300.000,00	16.282.106.521,00	80,48	0,00	16.282.106.521,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.770.783.500,00	2.382.548.708,00	85,99	0,00	2.382.548.708,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.188.528.000,00	893.347.800,00	75,16	0,00	893.347.800,00
9	DAK Fisik-Bidang		3.248.783.000,00		0,00	3.248.783.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
	Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.248.783.000,00		100,00		
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.473.350.000,00	1.462.679.000,00	99,28	0,00	1.462.679.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.910.322.000,00	9.982.418.331,00	83,81	0,00	9.982.418.331,00
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.608.732.000,00	2.480.837.697,00	68,75	0,00	2.480.837.697,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.488.926.000,00	3.488.926.000,00	100,00	0,00	3.488.926.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.559.674.000,00	4.216.876.510,00	75,85	0,00	4.216.876.510,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	648.572.000,00	504.429.422,00	77,78	0,00	504.429.422,00
16	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	1.177.990.000,00	1.177.990.000,00	100,00	0,00	1.177.990.000,00
Jumlah		**120.343.179.500,00**	**103.027.786.121,00**	**85,61**	**283.563.426.881,00**	**(180.535.640.760,00)**

- DAK-Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp970.692.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp970.692.000,00, dan terealisasi sebesar Rp888.355.985,00.

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Pendidikan Reguler SD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp26.389.408.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26.389.408.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.293.757.950,00.

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp23.021.104.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.021.104.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.076.198.200,00.

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-Perpustakaan Daerah

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp3.410.668.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.410.668.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.745.497.897,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana-Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Pelayanan Kesehatan Dasar untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp11.245.347.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.245.347.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.903.033.100,00.

- DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp20.230.000,00

ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.230.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.282.106.521,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kefarmasian untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.770.783.500,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.770.783.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.382.548.708,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana - Reguler-Keluarga Berencana

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan-Reguler- Keluarga Berencana untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.188.528.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.188.528.000,00 dan terealisasi sebesar Rp893.347.800,00.

- DAK Fisik-Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp3.248.783.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.248.783.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.248.783.000,00.

- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.473.350.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.473.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.462.679.000,00.

- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik- Bidang Jalan Reguler – Jalan untuk alokasi Kbupaten Pacitan sebesar Rp11.910.322.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.910.322.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.982.418.331,00.

- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik- Bidang Air Minum – Penugasan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp3.608.732.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.608.732.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.480.837.697,00.

- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik- Bidang Sanitasi – Penugasan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp3.488.926.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.488.926.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.488.926.000,00.

- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi Penugasan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp5.559.674.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.559.674.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.216.876.510,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik- Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp648.572.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp648.572.000,00 dan terealisasi sebesar Rp504.429.422,00.

- DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dana Alokasi Khusus Fisik- Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.177.990.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.177.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.177.990.000,00.

5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp185.511.786.378,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp185.511.786.378,00 dari Pagu Anggaran Rp185.033.432.675,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	150.984.057.000,00	150.984.057.000,00	100	0,00	150.984.057.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	926.500.000,00	926.500.000,00	100	-	926.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.896.584.850,00	10.896.584.850,00	100	0,00	10.896.584.850,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.492.711.650,00	2.492.711.650,00	100	0,00	2.492.711.650,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.125.924.447,00	14.411.630.933,00	118,85	0,00	14.411.630.933,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	473.104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	70.313.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.263.935.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.984.708.758,00	2.984.708.758,00	100	0,00	2.984.708.758,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	527.793.445,00	527.793.445,00	100	0,00	527.793.445,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.232.337.742,00	1.232.337.742,00	100	0,00	1.232.337.742,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	372.462.000,00	100	0,00	372.462.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	683.000.000,00	683.000.000,00	100	0,00	683.000.000,00
Jumlah		**185.033.432.675,00**	**185.511.786.378,00**	**100,26**	**0,00**	**185.511.786.378,00**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari

- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD)

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Lampiran V,12 Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp150.984.057.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.984.057.000,00 dan terealisasi sebesar Rp150.984.057.000,00.

- DAK Non Fisik- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Lampiran V,12 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp462.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp926.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp926.500.000,00.

- DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

  Berdasarkan Peraturan Presiden 113 Tahun 2021 Lampiran V,12 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp11.390.400.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.896.584.850,00 dan terealisasi sebesar Rp10.896.584.850,00.

- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

  Berdasarkan Peraturan Presiden 113 Tahun 2021 Lampiran V,12 Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.527.600.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.492.711.650,00 dan terealisasi sebesar Rp2.492.711.650,00.

- DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional Kesehatan-BOKKB-BOK.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Lampiran V,12 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan (BOKB) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar

Rp18.369.945.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.125.924.447,00 dan terealisasi sebesar Rp14.411.630.933,00.

- DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Lampiran V,12 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan (BOK-KB) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp521.383.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp473.104.100,00 dan terealisasi sebesar 0,00.

- DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.12 Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Akreditasi Puskesmas untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.425.197.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.313.135.,00 dan terealisasi sebesar 0,00.

- DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.12 Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.100.059.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar

  Rp1.263.935.548,00 dan terealisasi sebesar 0,00.

- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.12 Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB) dan (BOKB) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp3.876.285.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.984.708.758,00 dan terealisasi sebesar Rp2.984.708.758,00.

- DAK Non Fisik-PK2UKM.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.12 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp528.058.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp527.793.445,00 dan terealisasi sebesar Rp527.793.445,00.

- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.12 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.570.742.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.232.337.742,00 dan terealisasi sebesar Rp1.232.337.742,00.

- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.12 Dana Fasilitasi Penanaman Modal untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp372.462.000,00

ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp372.462.000,00 dan terealisasi sebesar Rp372.462.000,00.

- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.12 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp683.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp683.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp683.000.000,00.

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp179.462.490.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp28.354.469.000,00. Pagu dan Realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.13 tentang Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp28.354.469.000,00 terealisasi sebesar Rp28.354.469.000,00 dari Pagu Anggaran Rp28.354.469.000,00

2) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2021 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp151.108.021.000,00. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.15, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp151.108.021.000,00 ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pacitan sebesar Rp151.108.021.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.108.021.000,00.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp95.756.679.614,00 atau sebesar 103,42% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.657.214.663,00	33.488.854.707,00	147,81	19.187.435.256,00	14.301.419.451,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.720.007.668,00	11.591.602.349,00	138,58	7.207.664.723,00	4.383.937.626,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.595.325.002,00	18.358.666.891,00	110,63	12.793.296.184,00	5.565.370.707,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	129.019.553,00	255.183.602,00	197,79	204.902.566,00	50.281.036,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	44.492.152.740,00	32.062.372.065,00	72,06	35.835.953.332,00	(3.773.581.267,00
	Jumlah	**92.593.719.626,00**	**95.756.679.614,00**	**103,42**	**75.229.252.061,00**	**20.527.427.553,00**

1) **Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp33.488.854.707,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/247/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.414.424.800,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/420/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.862.621.700,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/727/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.294.508.000,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/728/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.622.392.227,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/836/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.294.907.980,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.657.214.663,00 dengan realisasi sebesar Rp33.488.854.707,00.

2) **Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp11.591.602.349,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/247/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021. sebesar Rp1.270.971.800,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/420/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.112.100.325,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/727/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.714.367.000,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/728/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.703.813.069,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/836/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.790.350.155,00.

  Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.720.007.668,00 dan terealisasi sebesar Rp11.591.602.349,00.

3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp18.358.666.891,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/247/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.040.485.800,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/420/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.660.425.075,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/727/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.683.436.000,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/728/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.399.226.291,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/836/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.575.093.725,00.

  Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.595.325.002,00 dengan realisasi sebesar Rp18.358.666.891,00.

4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan realisasi sebesar Rp255.183.602,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/247/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.857.800,00

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/420/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi

Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.000.575,00

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/727/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.105.000,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/728/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp69.925.042,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/836/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.295.185,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp129.019.553,00 dengan realisasi sebesar Rp255.183.602,00.

5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok realisasi sebesar Rp32.062.372.065,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/646/KPTS/013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.543.424.740,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/300/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.060.617.112,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/463/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.818.773.001,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/738/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.639.557.212,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp44.492.152.740,00 dengan realisasi sebesar Rp32.062.372.065,00.

Realisasi tersebut tidak termasuk didalamnya subsidi BPJS yang dipotong langsung dari Pendapatan Bagi Hasil pajak Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang

Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor : 588/BA/VII-11/0321 Nomor : 900/133/408.55/2021 sebesar Rp8.758.418.109,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMk.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/941/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 diterima pada Kas Daerah sebesar Rp7.250.848.664,00 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nomor 00265/STS/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2022 sehingga pada Tahun 2021 ditetapkan sebagai Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok.

1.2.4 Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Tahun 2021 terealisasi Rp5.540.971.857,14 atau sebesar 100% dari pagu anggaran yang terdiri dari:

Tabel 39 Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	13.968.849.000,00	(13.968.849.000,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.540.971.857,00	5.540.971.857,14	100,00	0.00	5.540.971.857,14
Jumlah		**5.540.971.857,00**	**5.540.971.857,14**	**100,00**	**13.968.849.000,00**	**(8.427.877.142,86)**

Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.427.877.142,86 dikarenakan adanya pelaksanaan refocusing dan realokasi Belanja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 di Jawa Timur serta berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Alokasi
1.	Program Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Propinsi Jatim 2021	69.000.000,00
2.	Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 110,111 dan 112 Tahun 2021	175.000.000,00
3.	Pemenuhan Honor 45 orang Perawat Ponkesdes selama 4 bulan	279.000.000,00
4.	Pemenuhan Honor 4 Orang Dokter Puskesmas sesuai Standar selama 4 bulan	60.000.000,00
5.	Bantuan Transport kunjungan konseling kesehatan pada keluarga dengan masalah kesehatan oleh tim yang terdiri dari bidan/perawat ponkesdes dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan selama 5 bulan	90.000.000,00
6.	Pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan pada keluarga dengan masalah kesehatan	10.800.000,00
7.	Pendampingan Pencegahan Stunting	254.000.000,00

No	Uraian	Alokasi
8.	Pendampingan Poskestren	121.029.000,00
9.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Guru Swasta (BPPDGS) selama 1 bulan	472.000.000,00
10.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS selama 9 bulan sebanyak 115 orang	207.000.000,00
11.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 9 bulan, Jenjang Pendidikan TK sebanyak 4 orang	36.000.000,00
12.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 9 bulan, Jenjang Pendidikan SD sebanyak 14 orang	126.000.000,00
13.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 9 bulan, Jenjang Pendidikan SMP sebanyak 7 orang	63.000.000,00
14.	Pemenuhan Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00
15.	Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket)	357.142.857,14
16.	Pemenuhan Honor 4 orang Dokter Puskesmas sesuai Standar selama 8 bulan	120.000.000,00
17.	Pemenuhan Honor 45 orang Perawat Ponkesdes sesuai Standar selama 8 bulan	558.000.000,00
18.	Peringatan Hari Jadi Ke-76 Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00
19.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 5 bulan	2.360.000.000,00
20.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD/Non PNS selama 3 bulan	69.000.000,00
21.	Pemenuhan Honorarium Kinerja /Non PNS selama 3 bulan – Jenjang Pendidikan TK sebanyak 4 orang	12.000.000,00
22.	Pemenuhan Honorarium Kinerja /Non PNS selama 3 bulan – Jenjang Pendidikan SD sebanyak 9 orang	27.000.000,00
23.	Pemenuhan Honorarium Kinerja /Non PNS selama 3 bulan – Jenjang Pendidikan SMP sebanyak 4 orang	15.000.000,00
Jumlah		**5.540.971.857,14**

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp71.634.714.023,00 dengan realisasi sebesar Rp72.470.827.044,09 atau sebesar 101,17%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah	0,00	1.008.000.000,00	00,00	892.000.000,00	116.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.634.714.023,00	71.462.827.044,09	99,76	57.662.240.000,00	13.800.587.044,09
Jumlah		**71.634.714.023,00**	**72.470.827.044,09**	**101,17**	**58.554.240.000,00**	**13.916.587.044,09**

1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.008.000.000,00,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.008.000.000,00 dikarenakan terdapat pendapatan hibah dari pemerintah pusat di Tahun 2021 yang berasal dari Program Hibah Air Minum Perdesaan di Desa Kabupaten Pacitan.

1.3.2 Pendapatan lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya sebesar Rp71.462.827.044,09 terdiri atas Lain-Lain pendapatan sebesar Rp53.396.340.211,09 dan Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp18.066.486.833,00 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Lain-lain Pendapatan	53.396.340.211,00	53.396.340.211,09	100,00	57.662.240.000,00	(4.265.899.788,91)
2	Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP)	18.238.373.812,00	18.066.486.833,00	99,06	0,00	18.066.486.833,00
Jumlah		**71.634.714.023,00**	**71.462.827.044,09**	**99,76**	**57.662.240.000,00**	**13.800.587.044,09**

1) Lain-lain Pendapatan

Realisasi Lain-lain pendapatan sebesar Rp53.396.340.211,09 terdiri dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp5.695.350.211,09 yang merupakan pengembalian dari sisa dana PEMILU Tahun 2020 dan realisasi pendapatan dari dana BOS sebesar Rp47.700.990.000,00 yang merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah-sekolah negeri jenjang pendidikan dasar guna menunjang kegiatan operasionalnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah-sekolah penerima berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun ajaran 2020/2021, Kepmendikbud Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun ajaran 2021/2022, Kepmendikbud 210/P/2021 Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Dana Bos pada Satuan Pendidikan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 dianggarkan dalam APBD pada Rekening Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis pendapatan Hibah Dana Bos, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana Bos pada entitas laporan PPKD. Adapun beberapa rincian pendapatan hibah SD Negeri dan SMP Negeri setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	5.695.350.211,00	5.695.350.211,09	100	0,00	5.695.350.211,09
2	Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo	2.070.810.000,00	2.070.810.000,00	100	3.149.310.000,00	(1.078.500.000,00)
3	Hibah Dana BOS SD Kec. Punung	2.078.550.000,00	2.078.550.000,00	100	2.511.780.000,00	(433.230.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
4	Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku	1.680.480.000,00	1.680.480.000,00	100	2.448.810.000,00	(768.330.000,00)
5	Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan	3.913.350.000,00	3.913.350.000,00	100	4.124.040.000,00	(210.690.000,00)
6	Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung	2.659.830.000,00	2.659.830.000,00	100	3.349.380.000,00	(689.550.000,00)
7	Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari	2.334.150.000,00	2.334.150.000,00	100	3.081.810.000,00	(747.660.000,00)
8	Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan	2.790.540.000,00	2.790.540.000,00	100	3.337.140.000,00	(546.600.000,00)
9	Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar	2.591.550.000,00	2.591.550.000,00	100	3.697.020.000,00	(1.105.470.000,00)
10	Hibah Dana BOS SD Kec. Tegalombo	3.032.010.000,00	3.032.010.000,00	100	4.613.040.000,00	(1.581.030.000,00)
11	Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan	4.011.810.000,00	4.011.810.000,00	100	4.696.860.000,00	(685.050.000,00)
12	Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo	2.849.760.000,00	2.849.760.000,00	100	3.630.090.000,00	(780.330.000,00)
13	Hibah Dana BOS SD Kec. Sudimoro	2.188.710.000,00	2.188.710.000,00	100	2.825.460.000,00	(636.750.000,00)
14	Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo	1.239.480.000,00	1.239.480.000,00	100	1.339.410.000,00	(99.930.000,00)
15	Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung	1.102.530.000,00	1.102.530.000,00	100	1.104.290.000,00	(1.760.000,00)
16	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku	825.550.000,00	825.550.000,00	100	836.440.000,00	(10.890.000,00)
17	Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan	2.463.450.000,00	2.463.450.000,00	100	2.473.460.000,00	(10.010.000,00)
18	Hibah Dana BOS SMP Kec. Kebonagung	1.068.210.000,00	1.068.210.000,00	100	1.091.140.000,00	(22.930.000,00)
19	Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari	1.162.150.000,00	1.162.150.000,00	100	1.221.870.000,00	(59.720.000,00)
20	Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan	1.155.330.000,00	1.155.330.000,00	100	1.772.150.000,00	(616.820.000,00)
21	Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar	1.108.800.000,00	1.108.800.000,00	100	654.000.000,00	454.800.000,00
22	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo	987.800.000,00	987.800.000,00	100	1.102.300.000,00	(114.500.000,00)
23	Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan	1.525.260.000,00	1.525.260.000,00	100	1.580.260.000,00	(55.000.000,00)
24	Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo	1.950.080.000,00	1.950.080.000,00	100	1.913.340.000,00	36.740.000,00
25	Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro	910.800.000,00	910.800.000,00	100	1.108.840.000,00	(198.040.000,00)
Jumlah		**53.396.340.211,00**	**53.396.340.211,09**	100	**57.662.240.000,00**	**(4.265.899.788,91)**

2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Tingkat Pertama (FKTP)

Pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS

Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1.	Puskesmas Pacitan	566.785.209,00	793.987.384,00	140,09	827.282.336,00	(33.294.952,00)
2.	Puskesmas Tanjungsari	1.514.037.017,00	1.483.556.302,00	97,99	1.568.774.018,00	(85.217.716,00)
3.	Puskesmas Kebonagung	645.230.260,00	758.288.698,00	117,52	776.662.295,00	(18.373.597,00)
4.	Puskesmas Ketrowonojoyo	396.690.072,00	501.135.628,00	126,33	436.601.144,00	64.534.484,00
5.	Puskesmas Arjosari	940.559.463,00	1.084.853.258,00	115,34	1.143.306.590,00	(58.453.332,00)
6.	Puskesmas Kedungbendo	392.710.840,00	291.177.069,00	74,15	303.842.900,00	(12.665.831,00)
7.	Puskesmas Punung	536.303.791,00	559.619.071,00	104,35	579.574.676,00	(19.955.605,00)
8.	Puskesmas Gondosari	377.142.416,00	349.856.138,00	92,76	348.547.638,00	1.308.500,00
9.	Puskesmas Pringkuku	465.041.569,00	556.025.816,00	119,56	535.285.393,00	20.740.423,00
10.	Puskesmas Candi	369.426.071,00	336.795.760,00	91,17	350.824.805,00	(14.029.045,00)
11.	Puskesmas Donorojo	724.739.387,00	753.177.755,00	103,92	740.939.200,00	12.238.555,00
12.	Puskesmas Kalak	501.736.782,00	401.890.203,00	80,10	411.223.400,00	(9.333.197,00)
13.	Puskesmas Ngadirojo	926.517.769,00	969.123.654,00	104,60	1.002.177.900,00	(33.054.246,00)
14.	Puskesmas Wonokarto	370.142.540,00	324.935.154,00	87,79	361.613.150,00	(36.677.996,00)
15.	Puskesmas Tulakan	1.645.709.196,00	1.826.687.261,00	111,00	1.874.270.400,00	(47.583.139,00)
16.	Puskesmas Bubakan	897.185.288,00	965.978.404,00	107,67	1.011.069.750,00	(45.091.346,00)
17.	Puskesmas Sudimoro	557.519.187,00	506.813.444,00	90,91	515.781.300,00	(8.967.856,00)
18.	Puskesmas Sukorejo	415.155.339,00	271.969.877,00	65,51	340.427.649,00	(68.457.772,00)
19.	Puskesmas Tegalombo	1.630.295.326,00	1.194.735.562,00	73,28	1.537.669.674,00	(342.934.112,00)
20.	Puskesmas Gemaharjo	1.114.281.192,00	1.039.043.488,00	93,25	971.989.678,00	67.053.810,00
21.	Puskesmas Nawangan	910.276.307,00	1.000.695.984,00	109,93	1.035.764.925,00	(35.068.941,00)
22.	Puskesmas Pakisbaru	807.047.501,00	808.136.659,00	100,13	1.022.471.250,00	(214.334.591,00)
23.	Puskesmas Bandar	721.205.340,00	676.730.091,00	93,83	764.921.900,00	(88.191.809,00)
24.	Puskesmas Jeruk	812.635.950,00	611.274.173,00	75,22	577.313.050,00	33.961.123,00
Jumlah		**18.238.373.812,00**	**18.066.486.833,00**	**99,06**	**19.038.335.021,00**	**(971.848.188,00)**

Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama merupakan pendapatan yang dasar pemungutannya adalah kesepakatan dan perjanjian antar Pemerintah daerah dengan Fihak Ketiga. Pada Tahun 2021 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD terealisasi sebesar Rp18.066.486.833,00 dari pagu senilai Rp.18.238.373.812,00. Pada Tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan dikarenakan pada Tahun 2020 terdapat Silpa JKN dan diperhitungkan terhadap pendapatan JKN di Tahun 2021 oleh Pihak BPJS.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.309.667.095.402 atau mencapai 77,26% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Pendapatan Hibah sebesar Rp1.008.000.000,00 atau 0,06% dari total realisasi pendapatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.695.124.683.282,75 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk

penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening desa di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2021 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan sebesar Rp151.108.021.000,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2. Belanja	**1.411.913.281.483,00**	**1.316.708.783.863,05**	**1.240.751.375.585,89**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.316.708.783.863,05 atau sebesar 93,26% dari anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.411.913.281.483,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp75.957.408.277,16 atau sebesar 6,12%. Rincian anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2021, yaitu.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	BELANJA OPERASI	1.202.844.925.830,00	1.129.605.443.865,05	93,91	1.071.792.273.673,89	57.813.170.191,16
2	BELANJA MODAL	196.194.162.383,00	174.928.799.770,00	89,16	140.058.487.669,00	34.870.312.101,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.874.193.270,00	12.174.540.228,00	94,57	28.900.614.243,00	(16.726.074.015,00)
Jumlah		**1.411.913.281.483,00**	**1.316.708.783.863,05**	**93,26**	**1.240.751.375.585,89**	**75.957.408.277,16**

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.129.605.443.865,05 atau sebesar 93,91% dari anggaran dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai	710.871.113.759,00	685.105.320.296,77	96,38	636.133.907.404,00	48.971.412.892,77
2	Belanja Barang dan Jasa	452.579.676.261,00	407.624.438.104,96	90,07	337.205.696.775,89	70.418.741.329,07
3	Belanja Hibah	35.395.415.810,00	33.286.776.563,32	94,04	87.702.988.960,00	(54.416.212.396,68)
4	Belanja Bantuan Sosial	3.998.720.000,00	3.588.908.900,00	89,75	10.749.680.534,00	(7.160.771.634,00)
Jumlah		**1.202.844.925.830,00**	**1.129.605.443.865,05**	**93,91**	**1.071.792.273.673,89**	**57.813.170.191,16**

Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp57.813.170.191,16 atau 5,39% dari realisasi Tahun 2020. Kenaikan realisasi terbesar terdapat pada komponen Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp685.105.320.296,77 atau sebesar 96,38% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar Rp25.765.793.462,23 atau 3,62% merupakan penghematan anggaran tahun 2021 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun,

meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain. Adapun rincian belanja pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	459.778.997.022,00	451.656.026.598,00	98,23	597.945.028.329,00	(146.289.001.731,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	32.159.694.085,00	28.067.946.283,00	87,28	17.829.881.639,00	10.238.064.644,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.416.626.651,00	178.857.457.961,29	93,44	2.084.807.076,00	176.772.650.885,29
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.839.263.698,00	18.018.427.989,00	95,64	5.614.495.950,00	12.403.932.039,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	624.532.303,00	396.397.740,00	63,47	581.935.000,00	(185.537.260,00)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	851.960.000,00	99,99	0,00	851.960.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	11.286.421.410,00	(11.286.421.410,00)
8	Belanja Pegawai BLUD	7.200.000.000,00	7.257.103.725,48	100,79		7.257.103.725,48
9	Uang Lembur				791.338.000,00	(791.338.000,00)
Jumlah		**710.871.113.759,00**	**685.105.320.296,77**	**96,38**	**636.133.907.404,00**	**48.971.412.892,77**

Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp48.971.412.892,77 atau 7,70% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2021. Di Antara realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp685.105.320.296,77 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja pegawai BLUD sebesar Rp7.257.103.725,48

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp407.624.438.104,96 atau sebesar 90,07% dari anggaran sebesar Rp452.579.676.261,00. Terjadi penghematan belanja sebesar Rp44.955.238.156,04 atau 9,93% merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.418.741.329,07 atau 20,88% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Barang	124.048.122.525,00	111.874.794.169,00	90,19	82.300.007.729,50	29.574.786.439,50
2	Belanja Jasa	137.879.840.091,00	115.757.675.462,00	83,96	97.974.806.834,74	17.782.868.627,26
3	Belanja Pemeliharaan	7.373.060.385,00	7.153.556.818,12	97,02	7.494.951.909,80	(341.395.091,68)
4	Belanja Perjalanan Dinas	44.446.214.486,00	37.596.811.431,00	84,59	39.533.670.801,25	(1.936.859.370,25)

5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.663.185.259,00	11.592.520.230,00	69,57	275.850.000,00	11.316.670.230,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.967.365.763,00	39.738.625.852,00	99,43	27.130.471.204,00	12.608.154.648,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.201.887.752,00	83.910.454.142,84	102,08	69.620.021.063,20	14.290.433.079,64
8	Honorarium PNS				6.409.858.984,00	(6.409.858.984,00)
9	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD				6.466.058.249,40	(6.466.058.249,40)
Jumlah		**452.579.676.261,00**	**407.624.438.104,96**	**89,80**	**337.205.696.775,89**	**70.418.741.329,07**

Adapun Rincian penggunaan anggaran dan realisasi Belanja Barang Dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang
   Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp124.048.122.525,00 terealisasi sebesar Rp111.874.794.169,00 atau 90,19% .

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
I	**Belanja Barang Pakai Habis**	**124.006.069.725,00**	**111.832.906.169,00**	**90,18**	**82.300.007.729,50**	**29.532.898.439,50**
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.971.604.153,00	3.846.063.312,00	96,84	0,00	3.846.063.312,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.087.054.478,00	1.631.444.886,00	78,17	1.104.308.645,00	527.136.241,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.503.450.275,00	2.872.757.700,00	82,00	2.849.452.589,00	23.305.111,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	92.094.470,00	90.967.430,00	98,78	2.709.364.844,00	(2.618.397.414,00)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	165.235.350,00	153.172.500,00	92,70	190.027.600,00	(36.855.100,00)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	32.827.500,00	26.306.400,00	80,14	33.581.400,00	(7.275.000,00)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	374.399.440,00	170.140.200,00	45,44	143.731.000,00	26.409.200,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	113.050.000,00	111.110.000,00	98,28	55.890.000,00	55.220.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	394.907.000,00	377.258.200,00	95,53	0,00	377.258.200,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	614.986.175,00	593.029.836,00	96,43	2.957.427.808,00	(2.364.397.972,00)
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	223.087.920,00	213.482.500,00	95,69	4.994.000,00	208.488.500,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	24.200.000,00	23.540.000,00	97,27	0,00	23.540.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	355.541.390,00	340.050.595,00	95,64	0,00	340.050.595,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk	2.483.051.048,00	2.290.161.596,00	92,23	6.245.959.871,00	(3.955.798.275,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.761.257.957,00	2.602.904.113,00	94,27	0,00	2.602.904.113,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.856.039.339,00	7.007.009.708,00	89,19	7.176.316.850,00	(169.307.142,00)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	247.579.450,00	228.445.060,00	92,27	178.141.000,00	50.304.060,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	-	5.475.000,00	(5.475.000,00)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.699.109.585,00	2.554.966.975,00	94,66	0,00	2.554.966.975,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.083.853.496,00	1.061.520.369,00	97,94	0,00	1.061.520.369,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.100.937.180,00	1.077.545.715,00	97,88	1.253.984.778,00	(176.439.063,00)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.025.885.600,00	940.600.910,00	91,69	0,00	940.600.910,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	15.620.000,00	15.620.000,00	100,00	0,00	15.620.000,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	1.355.311.000,00	1.188.687.872,00	87,71	811.017.487,00	377.670.385,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.690.257.433,00	6.677.884.834,00	68,91	1.910.003.574,00	4.767.881.260,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.243.220.402,00	2.611.177.628,00	80,51	4.287.354.739,50	(1.676.177.111,50)
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	612.058.130,00	484.364.337,00	79,14	7.724.280.335,00	(7.239.915.998,00)
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.462.333.240,00	8.271.533.316,00	87,42	4.048.515.800,00	4.223.017.516,00
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	47.404.482.424,00	46.432.684.535,00	97,95	20.557.232.968,00	25.875.451.567,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
30	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	189.000.000,00	167.300.000,00	88,52	0,00	167.300.000,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.983.582.490,00	1.947.986.745,00	98,21	2.954.216.020,00	(1.006.229.275,00)
32	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	398.822.500,00	334.835.370,00	83,96	382.926.950,00	(48.091.580,00)
33	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	528.000,00	528.000,00	100,00	29.700.000,00	(29.172.000,00)
34	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	278.873.858,00	(278.873.858,00)
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.513.948.500,00	11.211.032.925,00	89,59	9.473.403.354,00	1.737.629.571,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	645.032.500,00	627.898.440,00	97,34	861.399.156,00	(233.500.716,00)
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	99.821.275,00	(99.821.275,00)
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.854.267.500,00	1.443.507.110,00	50,57	360.116.316,00	1.083.390.794,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	504.068.000,00	490.938.765,00	97,40	0,00	490.938.765,00
40	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	104.500.000,00	104.500.000,00	100,00	38.610.000,00	65.890.000,00
41	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	36.900.000,00	36.671.250,00	99,38	0,00	36.671.250,00
42	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.900.000,00	9.817.500,00	99,17	203.543.450,00	(193.725.950,00)
43	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	179.833.500,00	(175.983.500,00)
44	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	429.851.700,00	(426.551.700,00)
45	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.680.000,00	64.680.000,00	100,00	1.410.324.162,00	(1.345.644.162,00)
46	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	157.350.600,00	(157.350.600,00)
47	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)
48	Belanja Pakaian KORPRI	17.260.000,00	16.816.250,00	97,43	2.000.000,00	14.816.250,00
49	Belanja Pakaian Adat Daerah	46.200.000,00	46.134.000,00	99,86	192.270.650,00	(146.136.650,00)
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	556.190.000,00	552.530.180,00	99,34	472.201.300,00	80.328.880,00
51	Belanja Pakaian Olahraga	1.046.105.800,00	841.906.107,00	80,48	516.605.150,00	325.300.957,00
52	Belanja Pakaian	18.000.000,00	17.963.000,00	99,79	0,00	17.963.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
	Paskibraka					
53	Belanja Pakaian Jas/Safari	16.500.000,00	16.280.000,00	98,67	0,00	16.280.000,00
II	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	42.052.800,00	41.888.000,00	99,61	0,00	41.888.000,00
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	24.265.800,00	24.114.200,00	99,38	0,00	24.114.200,00
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	17.787.000,00	17.773.800,00	99,93	0,00	17.773.800,00
Jumlah		**124.048.122.525,00**	**111.874.794.169,00**	**90,19**	**82.300.007.729,50**	**29.574.786.439,50**

Realisasi Belanja Barang tersebut diatas terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp8.271.533.316, yang terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp290.845.125
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 294.627.000
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp196.999.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.973.734.861,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp14.925.000
- Dinas Perikanan sebesar Rp1.248.013.000
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.900.000
- Dinas Sosial sebesar Rp554.988.930,00
- Kecamatan Pacitan sebesar Rp595.708.400,00
- Sekretariat Daerah sebesar Rp99.792.000

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp46.432.684.535,00 yang terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp1.937.267.100,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 12.650.000,00
- Dinas Perikanan sebesar Rp403.627.000,00
- Dinas Pangan Rp67.443.300,00
- Dinas Pertanian Rp 7.569.244.135,00
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp36.440.222.200,00
- Kecamatan Pacitan sebesar Rp 2.230.800,00

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa dengan anggaran sebesar Rp137.879.840.091,00 terealisasi sebesar Rp115.757.675.462,00 atau 83,96%

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Jasa Kantor	108.896.242.930,00	93.395.695.975,00	85,77	87.862.579.811,74	5.533.116.163,26
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.962.823.208,00	14.290.669.975,00	71,59	6.403.541.956,00	7.887.128.019,00
3	Belanja Sewa Tanah	413.350.000,00	335.750.000,00	81,23	175.444.444,00	160.305.556,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.435.151.900,00	1.085.360.070,00	75,63	941.848.300,00	143.511.770,00

5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	597.490.000,00	482.725.700,00	80,79	293.661.423,00	189.064.277,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	24.200.000,00	23.827.650,00	98,46	0,00	23.827.650,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.758.041.000,00	3.621.269.150,00	96,36	1.540.919.500,00	2.080.349.650,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.235.000.000,00	1.216.159.000,00	98,47	0,00	1.216.159.000,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	58.900.000,00	(58.900.000,00)
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	853.600.000,00	683.620.832,00	80,09	697.911.400,00	(14.290.568,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	485.871.000,00	474.706.250,00	97,70	0,00	474.706.250,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	218.070.053,00	147.890.860,00	67,82	0,00	147.890.860,00
	Jumlah	**137.879.840.091,00**	**115.757.675.462,00**	**83,96**	**97.974.806.834,74**	**17.782.868.627,26**

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp7.373.060.385,00 terealisasi sebesar Rp7.153.556.818,12 atau 97,02%

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.042.146.708,00	2.887.324.864,00	94,91	1.414.615.399,00	1.472.709.465,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.825.216.064,00	1.787.169.354,12	97,92	2.473.104.210,80	(685.934.856,68)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.489.197.613,00	2.463.862.600,00	98,98	3.607.232.300,00	(1.143.369.700,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	15.200.000,00	92,12	0,00	15.200.000,00
Jumlah		7.373.060.385,00	7.153.556.818,12	97,02	7.494.951.909,80	(341.395.091,68)

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp44.446.214.486,00 terealisasi sebesar Rp37.596.811.431,00 atau 84,59%

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.023.253.700,00	13.744.938.731,00	91,49	21.656.506.926,25	(7.911.568.195,25)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.447.236.886,00	22.919.324.700,00	80,57	17.877.163.875,00	5.042.160.825,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	745.696.500,00	718.701.000,00	96,38	0,00	718.701.000,00

4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	230.027.400,00	213.847.000,00	92,97	0,00	213.847.000,00
Jumlah		**44.446.214.486,00**	**37.596.811.431,00**	**84,59**	**39.533.670.801,25**	**(1.936.859.370,25)**

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp16.663.185.259,00 terealisasi sebesar Rp11.592.520.230,00 atau 69,57.

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
I	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**9.835.428.000,00**	**4.861.383.000,00**	**49,43**	**275.850.000,00**	**4.585.533.000,00**
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	54.695.000,00	**54.650.000,00**	**99,92**	**275.850.000,00**	**(221.200.000,00)**
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	72.000.000,00	**72.000.000,00**	**100,00**	0,00	**72.000.000,00**
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.950.000,00	**5.950.000,00**	**100,00**	0,00	**5.950.000,00**
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.702.783.000,00	**4.728.783.000,00**	**48,74**	0,00	**4.728.783.000,00**
II	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**6.827.757.259,00**	**6.731.137.230,00**	**98,58**	0,00	**6.731.137.230,00**
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.827.757.259,00	**6.731.137.230,00**	**98,58**	0,00	**6.731.137.230,00**
Total		**16.663.185.259,00**	**11.592.520.230,00**	**69,57**	**275.850.000,00**	**11.316.670.230,00**

(1). Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.861.383.000,00 adalah sebagai berikut:

- Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp54.650.000,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp38.950.000,00, DPPKBPPA sebesar Rp1.950.000,00, Perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.750.000,00
- Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp72.000.000,00 pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan Pacitan
- Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp5.950.000,00
- Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp4.728.783.000,00 yang ditangani oleh Dinas Pangan sebesar Rp440.000.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp3.148.783.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar

Rp1.140.000.000,00

(2). Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 6.731.137.230,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 6.285.613.100,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp419.018.530,00 dan Dinas Perpustakaan sebesar Rp 26.505.600,00

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS dengan anggaran sebesar Rp39.967.365.763,00 terealisasi sebesar Rp39.738.625.852,00 atau 99,43%

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp82.201.887.752,00, terealisasi sebesar Rp83.910.454.142,84 atau 102,08% dari anggaran yang ditetapkan

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33.286.776.563,32 atau sebesar 94,04 % dari anggaran sebesar Rp35.395.415.810,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.308.455.098,00	1.303.632.865,00	99,63	0,00	1.303.632.865,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.066.193.357,00	30.962.376.738,32	93,64	86.682.222.000,00	(55.719.845.261,68)
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.767.355,00	1.020.766.960,00	100,00	1.020.766.960,00	0,00
Jumlah		**35.395.415.810,00**	**33.286.776.563,32**	**94,04**	**87.702.988.960,00**	**(54.416.212.396,68)**

Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp54.416.212.396,68 atau 62,05% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penerima hibah.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat senilai Rp1.303.632.865,00 berada dalam program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dengan rincian penerima sebagai berikut.

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	% Rincian Peneriman
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.269.955.098,00	1.265.318.765,00	Hibah Pembangunan Gedung Serbaguna Kejaksaan Pacitan senilai Rp559.159.765,00 dan Rehab Gedung Polres Bayang Karya Pacitan senilai Rp706.159.000,00 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang)

2	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	38.500.000,00	38.314.100,00	Pembayaran Pengawasan Pembangunan Gedung Kejaksaan pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang)
Jumlah		**1.308.455.098,00**	**1.303.632.865,00**	

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp30.962.376.738,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	Rincian Peneriman
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.787.522.000,00	6.732.522.000,00	**Dinas Pendidikan** Belanja Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Rehab gedung senilai Rp352.522.000,00 - Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru Paud sebesar 192.522.000,00 - Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD Rp135.000.000,00 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Rp25.000.000,00 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang** Belanja Hibah Uang senilai Rp4.100.000.000,00. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang yang terdiri dari: - Kegiatan pengembangan Sistem Air limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat sebesar Rp3.365.000.000,00 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah/Kota Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan sebesar Rp735.000.000,00 **Satpol PP** Belanja hibah uang kepada Kepolisian Resor Pacitan sebesar Rp1.000.000.000,00 **Dinas Perikanan** Belanja Hibah Uang untuk kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp50.000.000,00 **Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga** Belanja Hibah Uang sebesar Rp960.000.000,00 yang dipergunakan untuk: - Operasional Kegiatan FORMI 2021Rp100.000.000,00 - Operasional Kegiatan Kwarcab Pramuka Kabupaten Pacitan 2021Rp300.000.000,00 - Koni Tahun 2021 Rp450.000.000,00 - Operasional Kegiatan KNPI Kabupaten Pacitan Tahun 2021Rp100.000.000,00 - Operasional NPCI Kab. Pacitan Tahun 2021Rp10.000.000,00 **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** Belanja Hibah Uang untuk kegiatan Operasional Kadin Kabupaten Pacitan senilai Rp150.000.000,00 **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah** Belanja Hibah uang untuk PWRI senilai Rp120.000.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	Rincian Peneriman
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	33.450.000,00	**Dinas Lingkungan Hidup** Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Madrasah Aliyah Pondok Tremas Arjosari (Angkutan Sampah Motor Roda 3 (tiga) Rp 33.450.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.124.620.857,00	24.084.098.000,00	**Dinas Pendidikan senilai Rp17.238.620.000,00** - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp310.000.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp100.000,000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp160.000.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp160.000.000,00 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp90.000.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.885.170.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp195.000.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp75.000.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp25.000.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp10.115.100.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp351.050.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp1.870.100.000,00 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp50.000.000,00 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp349.200.000,00 - Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp503.000.000,00 **Satpol PP sebesar Rp 170.000.000,00 Hibah Uang kepada**:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	Rincian Peneriman
				- Hibah uang untuk pelaksanaan pembangunan Gedung kantor PEPABRI Kab. Pacitan sebesar Rp100.000.000,00 - Hibah uang untuk mendukung pelaksanaan program kerja PEPABRI Tahun 2021sebesar Rp40.000.000,00 - Hibah uang kepada PP Polri Cabang Pacitan (untuk mendukung pelaksanaan program kerja PP Polri Cabang Pacitan Tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,00 **Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp40.000.000,00** - Bantuan Operasional DEKOPINDA Kabupaten Pacitan Rp30.000.000,00. - Bantuan Sarana Produksi Kelompok Usaha Kecil Menengah "SRI NANDI" Desa Sidomulyo Ngadirojo Rp 10.000.000,00 **Dinas Perikanan Rp21.060.000,00** Hibah uang untuk kegiatan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha **Dinas pertanian Rp340.500.000,00** - Hibah Operasional HKTI Rp50.000.000,00 - Hibah Operasional Kelembagaan KTNA Rp50.000.000,00 - Hibah ke Kelompok Tani Rp240.500.000,00 **Sekretariat Daerah Rp 5.883.918.000,00** Hibah uang untuk pembangunan Masjid/Mushola dan Organisasi Kemasyarakatan . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp.390.000.000,00 - Hibah kepada DHC sebesar Rp100.000.000,00 - Hibah kepada LVRI sebesar Rp40.000.000,00 - Hibah kepada Nahdlatul Ulama sebesar Rp150.000.000,00 - Hibah kepada Muhammadiyah sebesar Rp100.000.000,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	119.050.500,00	112.306.738,32	**Dinas Pangan** Belanja Hibah barang berupa 1 Unit Lumbung Pangan dan 1 Unit Lantai Jemur di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar
Jumlah		**33.066.193.357,00**	**30.962.376.738,32**	

Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Belanja Hibah Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.020.767.355,00 terealisasi sebesar Rp1.020.766.960,00 atau 99,99%. Pelaksanaan pemberian Hibah kepada Partai Politik menyesuaikan jumlah perolehan suara pada pemilihan umum Tahun 2021 dan mengacu pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/74/KPTS/408.12/2021 tentang Penerima dan Besaran Hibah Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
1	Partai DEMOKRAT	309.675.375,00	309.675.360,00	14
2	Partai GOLKAR	184.415.400,00	184.415.400,00	9
3	Partai PDI Perjuangan	118.023.300,00	118.023.200,00	6
4	Partai Kebangkitan Bangsa	99.060.975,00	99.060.960,00	5
5	Partai HANURA	76.711.950,00	76.711.920,00	3
6	Partai NASDEM	56.426.895,00	56.426.800,00	2

No	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
7	Partai GERINDRA	60.682.635,00	60.682.600,00	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	72.369.945,00	72.369.920,00	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	43.400.880,00	43.400.800,00	2
Jumlah		**1.020.767.355,00**	**1.020.766.960,00**	**45**

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2021 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.588.908.900,00 atau 89,75% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp3.998.720.000,00. Belanja Bantuan Sosial tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu baik berupa uang maupun barang pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.753.908.900,00 atau 81,06% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada individu yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.835.000.000,00 atau 100% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada Keluarga yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	Rincian Penerima
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.154.200.000,00	1.744.615.000,00	**Dinas Pendidikan** - Bantuan Sosial Pendidikan Siswa Miskin Grindulu Mapan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Rp41.400.000,00 - Bantuan Sosial Pendidikan Siswa Miskin Grindulu Mapan Jenjang SMP dan MTs Rp109.500.000,00 **Dinas Sosial** Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial terealisasi sebesar Rp1.317.200.000,00 dengan sasaran 1.480 KPM **Sekretariat Daerah** Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat bagian kesra sebesar Rp.276.515..000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	Rincian Penerima
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	9.520.000,00	9.293.900,00	**Dinas Pangan** Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu (PMTAS PAUD) Sub Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sasaran 119 siswa berupa paket makanan tambahan pangan
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.835.000.000,00	1.835.000.000,00	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** - Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dengan sasaran 144 keluarga pada kecamatan Punung (10 kel), Pringkuku (10 kel), Nawangan (4 kel), Bandar (100 kel), Ngadirojo (10 kel), Sudimoro (10 kel) - Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan sasaran 2 Keluarga pada Kecamatan Pacitan dan Ngadirojo
Jumlah		**3.998.720.000,00**	**3.588.908.900,00**	

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2021 adalah sebesar Rp196.194.162.383,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp174.928.799.770,00 atau sebesar 89,16%. Penghematan belanja modal sebesar Rp 21.265.362.613,00 atau 10,84% yang merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2020, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp34.870.312.101,00 atau 24,90% menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2021.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	3.501.050.000,00	3.488.277.800,00	99,64	934.954.200,00	2.553.323.600,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.177.798.612,00	59.673.855.155,00	88,83	43.200.008.270,00	16.473.846.885,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.859.343.494,00	59.211.649.523,00	85,99	56.266.451.465,00	2.945.198.058,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.199.051.030,00	51.102.738.057,00	92,58	33.804.571.317,00	17.298.166.740,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.456.919.247,00	1.452.279.235,00	99,68	5.852.502.417,00	(4.400.223.182,00)
Jumlah		**196.194.162.383,00**	**174.928.799.770,00**	**89,16**	**140.058.487.669,00**	**34.870.312.101,00**

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp174.928.799.770,00, yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya

administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp2.792.044.455,68 atau 1.59 %.

Diantara realisasi Belanja Modal sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp9.797.328.373,00 yang terdiri dari peralatan mesin BOS sebesar Rp8.959.427.133,00 dan Aset tetap Lainnya BOS sebesar Rp837.901.240,00 serta Belanja Modal BLUD sebesar Rp3.998.631.405,00 yang dipergunakan untuk Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp3.726.795.950,00 dan Belanja Modal Gedung tempat Kerja BLUD sebesar Rp271.835.455,00

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada Tahun 2021 sebesar Rp3.488.277.800,00 atau 99,64 % dari target anggaran. Realisasi belanja modal tanah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.553.323.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah Persil	1.376.050.000,00	1.363.812.200,00	99,11	291.054.000,00	1.072.758.200,00
2	Belanja Modal Lapangan	2.125.000.000,00	2.124.465.600,00	99,97	643.900.200,00	1.480.565.400,00
Jumlah		**3.501.050.000,00**	**3.488.277.800,00**	**99,64**	**934.954.200,00**	**2.553.323.600,00**

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah Tahun 2021 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar Rp3.488.277.800,00 atau 100,00%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp59.673.855.155,00 atau 88,83% dari target anggaran yang dirincian sebagai berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Alat Besar	1.229.969.205,00	1.013.230.000,00	82,38	3.065.711.000,00	(2.052.481.000,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.099.675.740,00	1.739.476.421,00	42,43	1.371.633.130,00	367.843.291,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.147.270,00	9.776.300,00	74,36	1.561.500.500,00	(1.551.724.200,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	679.781.720,00	511.968.975,00	75,31	111.677.500,00	400.291.475,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.668.419.924,00	6.419.231.632,00	96,26	4.186.163.001,00	2.233.068.631,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	686.063.580,00	641.319.100,00	93,48	668.711.319,00	(27.392.219,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.867.396.137,00	10.966.601.025,00	79,08	6.859.490.477,00	4.107.110.548,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	22.005.624.468,00	20.722.809.135,00	94,17	5.223.383.670,00	15.499.425.465,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
9	Belanja Modal Komputer	4.619.809.040,00	4.468.194.134,00	96,72	2.818.197.136,00	1.649.996.998,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	31.636.000,00	31.625.000,00	99,97	0,00	31.625.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	17.250.000,00	17.187.500,00	99,64	14.960.000,00	2.227.500,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	206.809.500,00	205.783.000,00	99,50	0,00	205.783.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	287.477.070,00	240.429.850,00	83,63	0,00	240.429.850,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.037.238.958,00	8.959.427.133,00	99,14	17.318.580.537,00	(8.359.153.404,00)
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.727.500.000,00	3.726.795.950,00	99,98	0,00	3.726.795.950,00
Jumlah		**67.177.798.612,00**	**59.673.855.155,00**	**88,83**	**43.200.008.270,00**	**16.473.846.885,00**

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp59.673.855.155,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp57.222.764.679,62 atau 95% sedangkan realisasi sebesar Rp2.451.090.475,38 atau 4,1% dinonkapitalisasi.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp59.211.649.523,00 atau sebesar 85,99% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.537.875.322,00	58.939.814.068,00	86,00	55.487.695.815,00	3.452.118.253,00
2	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	498.065.000,00	(498.065.000,00)
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	48.968.172,00	0,00	0,00	280.690.650,00	(280.690.650,00)
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	272.500.000,00	271.835.455,00	99,76	0,00	271.835.455,00
Jumlah		**68.859.343.494,00**	**59.211.649.523,00**	**85,99**	**56.266.451.465,00**	**2.945.198.058,00**

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp59.211.649.523,00 yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp59.091.243.387,70 atau 99,79% sedangkan realisasi sebesar Rp120.406.135,30 atau 0,203% dinonkapitalisasi.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut termasuk belanja untuk memperoleh aset yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp102.748.285,30 ada pada Dinas PUPR.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp51.102.738.057,00 atau sebesar 92,58% dari anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari:

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**44.231.101.154,00**	**41.709.653.097,00**	**94,30**	**26.079.737.990,00**	**15.629.915.107,00**
	Belanja Modal Jalan	41.105.653.765,00	38.615.583.045,00	93,94	26.052.971.490,00	12.562.611.555,00
	Belanja Modal Jembatan	3.125.447.389,00	3.094.070.052,00	99,00	26.766.500,00	3.067.303.552,00
2	**Belanja Modal Bangunan Air**	**10.918.349.876,00**	**9.343.649.960,00**	**85,58**	**7.466.898.597,00**	**1.876.751.363,00**
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.231.318.958,00	6.770.865.510,00	82,26	6.069.170.875,00	701.694.635,00
	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	344.608.275,00	334.005.000,00	96,92	349.315.000,00	(15.310.000,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.107.998.188,00	1.070.242.950,00	96,59	1.048.412.722,00	21.830.228,00
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.234.424.455,00	1.168.536.500,00	94,66	0,00	1.168.536.500,00
3	**Belanja Modal Instalasi**	0,00	0,00	0,00	**257.934.730,00**	**(257.934.730,00)**
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	9.770.000,00	(9.770.000,00)
	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	222.375.230,00	(222.375.230,00)
	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	25.789.500,00	(25.789.500,00)
4	**Belanja Modal Jaringan**	**49.600.000,00**	**49.435.000,00**	**99,67**	0,00	**49.435.000,00**
	Belanja Modal Jaringan Listrik	49.600.000,00	49.435.000,00	99,67	0,00	49.435.000,00
Jumlah		**55.199.051.030,00**	**51.102.738.057,00**	**92,58**	**33.804.571.317,00**	**17.298.166.740,00**

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp51.102.738.057,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp Rp51.102.738.057,00 atau 100,00%.

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.452.279.235,00, atau 99,68% dari target anggaran yang terdiri dari:

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	197.891.200,00	(197.891.200,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000.000,00	247.830.000,00	99,13	1.229.393.000,00	(981.563.000,00)
3	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	(34.000.000,00)
4	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	19.910.000,00	(19.910.000,00)
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	367.423.600,00	366.547.995,00	99,76	195.741.700,00	170.806.295,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	839.495.647,00	837.901.240,00	99,81	1.778.846.307,00	(940.945.067,00)
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	2.396.720.210,00	(2.396.720.210,00)
Jumlah		**1.456.919.247,00**	**1.452.279.235,00**	**99,68**	**5.852.502.417,00**	**(4.400.223.182,00)**

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.452.279.235,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp1.231.731.390,00 atau 84,81% sedangkan realisasi Rp220.547.845,00 atau 15,18% dinonkapitalisasi.

2.3 BelanjaTidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.12.174.540.228,00 atau 94,57% dari anggaran sebesar Rp12.874.193.270,00. Dari realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp.12.174.540.228,00 yang realisasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan untuk penanganan darurat akibat bencana sebesar Rp1.999.302.000,00 ,merupakan Pengembalian Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.000.000.000,00 dan merupakan bantuan sosial tidak direncanakan diajukan oleh SKPD Penanggung jawab.sebesar Rp1.167.965.691,00

Untuk rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan darurat akibat bencana dapat dijelaskan sebagaimana data tabel

Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2021	Realisasi
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**200.000.000,00**
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat ambrolnya pagar dan talud sekolah dasar Negeri 3 Sidomulyo Kecamatan Kebonagung di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 272 / KPTS / 408.12 / 2021**	**90.000.000,00**
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Ambrolnya pagar dan talud SDN 3 Sidomulyo Kec. Kebonagung Tahun 2021	90.000.000,00
B	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat ambrolnya pagar dan talud sekolah dasar Negeri 5 Ngreco Kecamatan Tegalombo di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 273 / KPTS / 408.12 / 2021**	**110.000.000,00**
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Ambrolnya pagar dan talud SDN 5 Ngreco Kec. Arjosari Tahun 2021	110.000.000,00
2	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**644.616.000,00**
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat pengaman sungai di wilayah Kecamatan Pacitan dan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 275 / KPTS / 408.12 / 2021**	**400.000.000,00**
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam (Tebing	400.000.000,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2021	Realisasi
	Sungai Gridulu) di Kabupaten Pacitan TH 2021	
B	**Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 887 / KPTS / 408.12 / 2021**	**200.200.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2021	200.200.000,00
C	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 544 / KPTS / 408.12 / 2021**	**50.000.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Arjosari Tahun 2021	50.000.000,00
D	**Pengembalian belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pacitan Th 2021**	**(4.094.000,00)**
E	**Pengembalian belanja bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pacitan Th 2021**	**(1.490.000,00)**
3	**DINAS PUPR, PERKIM, BPBD**	**1.154.686.000,00**
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 839 / KPTS / 408.12 / 2021**	**1.160.500.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk PERKIM Penanganan Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor kegiatan Usulan Penyedia dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2021	140.000.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk BPBD Penanganan Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2021	25.500.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk Dinas PUPR Penanganan Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2021	995.000.000,00
B	**Pengembalian Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsong di Kab. Pacitan Th 2021**	**(5.814.000,00)**
	Jumlah	**1.999.302.000,00**

Sedangkan rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga bantuan sosial tidak direncanakan dapat dijelaskan sebagaimana data tabel:

Tabel 66 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian penerima	Anggaran	Realisasi
1	Bantuan Sosial tidak direncanakan Bidang Pendidikan	150.000.000,00	0,00
2	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/Pasung	250.000.000,00	158.005.200,00
3	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Kesehatan	772.500.000,00	772.036.090,00
4	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Penanggulangan Bencana	300.000.000,00	0,00
5	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan PMKS	200.000.000,00	177.196.938,00
6	Gerakan Orang Tua Asuh Kabupaten Pacitan	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**
7	Bantuan pangan Daerah Grindulu mapan	**600.000,00**	
	Jumlah	**1.741.100.000,00**	**1.175.238.228,00**

Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu sebesar Rp9.000.000.000,00 atas Penyetoran Bantuan Keuangan Khusus pada Perubahan APBD Provinsi Jatim TA 2020.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 28.900.614.243,00 atau 237,39% dikarenakan menyesuaikan kondisi darurat dan mendesak.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3. Transfer	**295.440.518.931,00**	**293.572.507.730,20**	**329.519.614.874,56**

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp293.572.507.730,20 atau sebesar 99,37 % dari anggaran dan

mengalami penurunan sebesar Rp35.947.107.144,36 atau sebesar 10,91% dari realisasi Tahun 2020.

Realisasi tersebut berupa realisasi bagi hasil sebesar Rp4.492.035.027,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp289.080.472.703,20 dengan penjelasan sebagai berikut.

3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil senilai Rp4.492.035.027,00 atau sebesar 80,51% dari Total Anggaran yang terdiri dari belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.891.751.014,00	3.301.504.626,00	84,83	3.610.057.615,00	(308.552.989,00)
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.687.621.506,00	1.190.530.401,00	70,54	1.558.006.960,00	(367.476.559,00)
Jumlah		**5.579.372.520,00**	**4.492.035.027,00**	**80,51**	**5.168.064.575,00**	**(676.029.548,00)**

3.1.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp3.301.504.626,00 atau sebesar 84,83% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp 308.552.989,00 atau sebesar 8,55% dari realisasi Tahun 2020.

Penghitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam L**ampiran 2.**

Adapun rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per objek pajak untuk masing-masing kecamatan TA 2021 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 68 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	263.655.362,00
2	Belanja Bagi Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	266.286.019,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	271.605.117,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	412.809.359,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	333.668.548,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	312.644.585,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	199.395.306,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	138.134.372,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	229.558.885,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	324.271.430,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	342.843.989,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	206.631.654,00
Jumlah		**3.301.504.626,00**

3.1.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.190.530.401,00 atau sebesar 70,54% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp 367.476.559,00 atau sebesar 23,59% dari realisasi Tahun 2020.

Penghitungan dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa per rincian obyek retribusi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 3.**

Adapun rincian bagi hasil retribusi di masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 69 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	166.480.176,00
2	Belanja Bagi Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	129.864.503,00
3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	112.309.226,00
4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	136.117.990,00
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	106.304.459,00
6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	113.959.391,00
7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	54.046.473,00
8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	49.051.768,00
9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	61.544.692,00
10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	94.112.393,00
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	110.789.620,00
12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	55.949.710,00
Jumlah		**1.190.530.401,00**

3.2 Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp289.080.472.703,20 atau sebesar 99,77 % dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp35.271.077.596,36 atau sebesar 12,26 % dari realisasi Tahun 2020. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/95/KPTS/408.12/2021 tentang Penerima dan Besaran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/742/KPTS/408.12/2021.

Tabel 70 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	20.810.210.908,00	20.765.118.592,00	99,78	19.817.659.633,69	947.458.958,31
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	23.117.994.908,00	23.084.554.908,00	99,86	27.926.572.860,74	(4.842.017.952,74)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	22.682.608.203,00	22.522.301.203,00	99,29	25.011.465.439,55	(2.489.164.236,55)
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	28.662.687.151,00	28.608.101.151,20	99,81	32.394.917.056,00	(3.786.815.904,80)
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	30.857.280.087,00	30.750.944.590,00	99,66	35.284.343.698,87	(4.533.399.108,87)
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	24.067.253.641,00	24.047.412.783,00	99,92	24.865.629.134,71	(818.216.351,71)
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	21.710.402.548,00	21.710.402.548,00	100,00	28.631.126.548,00	(6.920.724.000,00)
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	19.353.482.335,00	19.334.822.335,00	99,90	20.427.904.335,00	(1.093.082.000,00)
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	21.020.485.495,00	20.908.525.495,00	99,47	21.559.906.495,00	(651.381.000,00)
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	32.253.819.648,00	32.207.109.648,00	99,86	38.227.777.648,00	6.020.668.000,00)
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	26.851.114.499,00	26.767.972.551,00	99,69	30.665.678.551,00	(3.897.706.000,00)
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	18.373.806.899,00	18.373.206.899,00	100,00	19.538.568.899,00	(1.165.362.000,00)
	Jumlah	**289.761.146.322,00**	**289.080.472.703,20**	**99,73**	**324.351.550.299,56**	**(35.271.077.596,36)**

Di dalam realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp289.080.472.703,20 termasuk di dalamnya terdapat realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagaimana **Lampiran 4.**

Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) sebesar Rp151.108.021.000,00 yang merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang disalurkan langsung ke rekening desa melalui KPPN total sebesar Rp 151.108.021.000,00. Realisasi Penggunaan Dana Desa adalah sebesar Rp 151.108.021.000,00. Adapun rincian penggunaan atau realisasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 5.**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
4. Surplus / Defisit LRA	**(96.555.634.830,00)**	**84.843.391.689,5**	**54.360.038.328,93**

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp84.843.391.689,50 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.610.798.165.584,00	1.695.124.683.282,75	105,24	1.624.631.028.789,38	70.493.654.493,37
2	Belanja dan Transfer	1.707.353.800.414,00	1.610.281.291.593,25	94,31	1.570.270.990.460,45	40.010.301.132,80
Surplus (Defisit)		**(96.555.634.830,00)**	**84.843.391.689,50**	**(87,87)**	**54.360.038.328,93**	**30.483.353.360,57**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
5. Pembiayaan Netto	**96.555.634.830,00**	**96.558.034.829,67**	**42.191.996.500,74**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp96.558.034.829,67 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp96.555.634.830,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp54.366.038.328,93 atau 128,85% dari realisasi tahun lalu, yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pembiayaan	96.555.634.830,00	96.558.034.829,67	100,00	42.191.996.500,74	54.366.038.328,93
Pembiayaan Netto		96.555.634.830,00	96.558.034.829,67	100,00	42.191.996.500,74	54.366.038.328,93

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp96.558.034.829,67 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp96.555.634.830,00 dan kenaikan sebesar Rp54.366.038.328,93 atau 128,85% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	96.552.034.830,00	96.552.034.829,67	100,00	42.184.796.500,74	54.367.238.328,93
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.600.000,00	6.000.000,00	166,67	7.200.000,00	(1.200.000,00)
Jumlah		**96.555.634.830,00**	**96.558.034.829,67**	**100,00**	**42.191.996.500,74**	**54.366.038.328,93**

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp96.552.034.829,67 terdiri dari Sisa Lebih Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pelampauan Penerimaan PAD	8.224.133.208,00	8.224.133.208,73	100,00	8.399.776.170,68	(175.642.961,95)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.766.351.854,00	14.766.351.854,00	100,00	(73.831.465.244,00)	88.597.817.098,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	892.000.000,00	892.000.000,00	100,00	16.621.352.143,00	(15.729.352.143,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	117.847.146,00	117.847.146,00	100,00	2.650.000,00	115.197.146,00
5	Penghematan Belanja	60.444.881.691,00	60.444.881.690,86	100,00	99.648.759.739,67	(39.203.878.048,81)
6	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	950.000.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
	Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					
7	Sisa Belanja Lainnya	10.656.820.930,00	10.656.820.930,08	100,00	(9.156.276.308,61)	19.813.097.238,69
Jumlah		**96.552.034.829,00**	**96.552.034.829,67**	**100,00**	**42.184.796.500,74**	**54.367.238.328,93**

Adapun Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 merupakan penerimaan dari Perjanjian Pinjaman (pokok piutang Dana Bergulir/*revolving*) pada Dinas Pertanian.

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 berupa penyertaan modal dan investasi non permanen tidak ada anggaran dan realisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah, terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Dokumen rencana Kegiatan Investasi yang disiapkan oleh PPKD, selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah

Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Sehingga penyertaan modal pada tahun 2021 belum dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun ini masih pada tahap melaksanakan kajian investasi penyertaan modal kepada PDAM dan BPR sebagai dasar untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM dan BPR.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	**0,00**	**181.401.426.519,17**	**96.552.034.829,67**

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp181.401.426.519,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.610.798.165.584,00	1.695.124.683.282,75	105,24	1.624.631.028.789,38	70.493.654.493,37
2	Belanja dan Transfer	1.707.353.800.414,00	1.610.281.291.593,25	94,31	1.570.270.990.460,45	40.010.301.132,80
3	Surplus/Defisit	(96.555.634.830,00)	84.843.391.689,50	(87,87)	54.360.038.328,93	30.483.353.360,57
4	Pembiayaan Netto	96.555.634.830,00	96.558.034.829,67	100,00	42.191.996.500,74	54.366.038.328,93
SILPA		**0,00**	**181.401.426.519,17**	**0,00**	**96.552.034.829,67**	**84.849.391.689,50**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp181.401.426.519,17 tersebut terdiri dari.

Tabel 76 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas 2021	Jumlah Kas 2020
1	Kas Di Kas Daerah	107.939.174.117,39	74.422.988.355,87
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	16.824.643,00	32.276.393,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas Di BLUD	72.694.637.634,94	18.369.611.359,67
5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	442.643.980,84	1.584.048.353,13
6	Kas di Bendahara Dana BOS	308.146.143,00	2.143.110.368,00
SiLPA LRA		**181.401.426.519,17**	**96.552.034.829,67**

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam Pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang sehingga menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

1. SAL Awal

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih	**96.552.034.829,67**	**42.184.796.500,74**

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp96.552.034.829,67 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 sebesar Rp Rp96.552.034.829,67 dengan rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah sebagai berikut:

SiLPA BEBAS			**Rp. 41.921.982.999,87**
SiLPA TERIKAT :			**Rp. 54.630.051.829,80**
BLUD	Rp	18.401.887.752,67	
JKN	Rp	1.584.048.353,13	
BOS	Rp	2.143.110.368,00	
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	1.639.439.614,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) :			
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	Rp	7.286.512.860,00	
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)	Rp	63.500.000,00	
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp	493.815.150,00	
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp	34.888.350,00	
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	9.374.881.812,00	
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	338.404.258,00	
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	Rp	264.555,00	

dan UKM			
- Dana Pelayanan Kepariwisataan	Rp	29.432.550,00	
Bantuan Keuangan	Rp	9.223.732.780,00	
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	3.847.470.935,00	
Dana Alokasi Khusus	Rp	168.662.492,00	
Jumlah SiLPA			**Rp 96.552.034.829,67**

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**96.552.034.829,67**	**42.184.796.500,74**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai Rp96.552.034.829,67 merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2021 yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah tahun 2020.

Pelampauan penerimaan PAD	**Rp**	**8.224.133.208,73**
Pajak Daerah	Rp	3.784.743.256,16
Retribusi Daerah	Rp	637.931.880,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	69.553.062,20
Lain-Lain PAD yang sah	Rp	3.731.905.010,37
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	**Rp**	**14.766.351.854,00**
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	5.481.374.455,00
Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp	9.284.977.399,00
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**Rp**	**892.000.000,00**
Pendapatan Hibah	Rp	892.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	0,00
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	**Rp**	**60.444.881.690,86**
Belanja Operasi	Rp	49.677.021.218,80
Belanja Modal	Rp	8.114.100.612,11
Belanja Transfer	Rp	1.402.522.429,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	1.251.237.430,95
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	**Rp**	**1.450.000.000,00**
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.450.000.000,00
Sisa Belanja Lainnya	**Rp**	**10.656.820.930,08**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp	9.709.052.080,08
Sisa Dana BOS	Rp	947.768.850,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	**Rp**	**117.847.146,00**
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	117.847.146,00
Penggunaan SiLPA	**Rp**	**96.552.034.829,67**

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)	**181.401.426.519,17**	**96.552.034.829,67**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai Rp181.401.426.519,17, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut

Pelampauan penerimaan PAD	**Rp**	**70.280.848.834,52**
Pajak Daerah	Rp	2.463.804.001,23
Retribusi Daerah	Rp	(5.378.230.397,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	104.269.238,35
Lain-lain PAD yang sah	Rp	73.091.005.991,94
Pelampauan Pendapatan Transfer	**Rp**	**13.209.555.843,14**
Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	Rp	26.883.635.531,00
Dana Alokasi Umum	Rp	0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp	(17.315.393.379,00)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	478.353.703,00
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	0,00
Dana Desa	Rp	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	3.162.959.988,00
Bantuan Keuangan	Rp	0,14
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	**Rp**	**836.113.021,09**
Pendapatan Hibah	Rp	1.008.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	(171.886.978,91)
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	**Rp**	**97.072.508.820,75**
Belanja Pegawai	Rp	25.765.793.462,23
Belanja Barang dan Jasa	Rp	44.955.238.156,04
Belanja Modal	Rp	21.265.362.613,00
Belanja Hibah	Rp	2.108.639.246,68
Belanja Bantuan Sosial	Rp	409.811.100,00
Belanja Bagi Hasil	Rp	1.087.337.493,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	780.673.707,80
Belanja Tidak Terduga	Rp	699.653.042,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	**Rp**	**2.399.999,67**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp	(0,33)
Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah	Rp	2.400.000,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	**Rp**	**0,00**
Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	0,00
Penggunaan SiLPA	**Rp**	**181.401.426.519,17**

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	Tahun 2021 (Rp)	**Tahun 2020 (Rp)**
Koreksi Kesalahan Pembukuan	**0,00**	**0,00**

Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

5. SAL Akhir

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
SAL Akhir	**181.401.426.519,17**	**96.552.034.829,67**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. SAL Akhir diperoleh dari SAL Awal, Penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya dan lain-lain. Adapun rincian SiLPA menurut sumber dana dapat dijelaskan sebagai berikut.

SiLPA BEBAS			**Rp65.570.967.747,25**
SiLPA TERIKAT :			**Rp115.830.458.771,92**
BLUD	Rp	72.711.462.277,94	
JKN	Rp	442.643.980,84	
BOS	Rp	308.146.143,00	
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	9.010.679.411,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) :			
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	Rp		8.121.876.820,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)	Rp		41.750.000,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp		1.142.750.850,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp		537.835.000,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp		6.974.252.654,00
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp		100.638.670,00
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp		500.150,00
- Dana Pelayanan Kepariwisataan	Rp		29.432.550,00

-	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	51.903.270,00
-	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	63.832.950,00
-	Bantuan Keuangan	Rp	484.934.387,14
-	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	15.639.060.783,00
-	Dana Alokasi Khusus	Rp	168.758.875,00
	Jumlah SiLPA		**Rp181.401.426.519,17**

5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.211.712.683.788,63 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap,dan Aset Lainnya.

1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp226.901.018.482,48 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
AsetLancar	**226.901.018.482,48**	**158.514.800.714,25**	**68.386.217.768,23**

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	107.939.174.117,39	74.422.988.355,87	33.516.185.761,52
1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Kas di Bendahara Penerimaan	16.824.643,00	32.276.393,00	(15.451.750,00)
1.1.4.	Kas di BLUD	72.694.637.634,94	18.369.611.359,67	54.325.026.275,27
1.1.5.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	442.643.980,84	1.584.048.353,13	(1.141.404.372,29)
1.1.6.	Kas di Bendahara Dana BOS	308.146.143,00	2.143.110.368,00	(1.834.964.225,00)
1.1.7.	Kas Lainnya	0	64.142.198,82	(64.142.198,82)
1.1.8.	Piutang Pajak Daerah	3.864.523.259,00	2.711.773.996,00	1.152.749.263,00
1.1.9	Piutang Retribusi	992.199.213,37	1.203.387.261,37	(211.188.048,00)
1.1.10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.212.132.189,42	8.230.045.439,24	4.982.086.750,18
1.1.11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	6.901.177.873,00	(6.901.177.873,00)
1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.250.848.664,00	7.543.424.740,00	(292.576.076,00)
1.1.13	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.653.730.243,41)	(4.599.229.872,00)	(54.500.371,41)
1.1.14	Beban Dibayar Dimuka	25.025.000,00	45.781.333,00	(20.756.333,00)
1.1.15	Persediaan	24.808.593.880,93	39.862.262.915,15	(15.053.669.034,22)
Jumlah Aset Lancar		**226.901.018.482,48**	**158.514.800.714,25**	**68.386.217.768,23**

Kas dan Setara Kas

Nilai Aset Lancar sejumlah Rp181.401.426.519,17 yang merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp181.401.426.519,17 yang merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Bendahara Kapitasi JKN,Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya Dengan Rincian Sebagai Berikut.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	107.939.174.117,39	74.422.988.355,87	33.516.185.761,52
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	16.824.643,00	32.276.393,00	(15.451.750,00)
1.1.4	Kas di BLUD	72.694.637.634,94	18.369.611.359,67	54.325.026.275,27
1.1.5	Kas di BendaharaKapitasi JKN	442.643.980,84	1.584.048.353,13	(1.141.404.372,29)
1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	308.146.143,00	2.143.110.368,00	(1.834.964.225,00)
1.1.7	KasLainnya	0,00	64.142.198,82	(64.142.198,82)
JumlahKas SetaraKas		**181.401.426.519,17**	**96.616.177.028,49**	**84.785.249.490,68**

1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	**107.939.174.117,39**	**74.422.988.355,87**	**33.516.185.761,52**

Kas di Kas Daerah sebesar RP107.939.174.117,39 merupakan saldo bank yang berada pada Rekening Giro PT Bank Jatim,Tbk sebesar Rp107.933.626.172,18 dengan nomor Giro 0211002166 dan yang berada di rekening Bank Mandiri sebesar Rp5.547.945,21.

1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2021, Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo Rp0,00.

1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	**16.824.643,00**	**32.276.393,00**	**(15.451.750,00)**

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2021, Kas di Bendahara Penerimaan bersaldo Rp16.824.643,00. Saldo Tersebut Merupakan Setoran Dalam Perjalanan (*deposit in transit*) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD karena pada tanggal 31 Desember 2021 setelah jam 12.00 WIB, bank tidak dapat melakukan pembukuan dihari yang sama pada BLUD RSUD sesuai jadwal operasional bank.

1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Kas di BendaharaBLUD	**72.694.637.634,94**	**18.369.611.359,67**	**54.325.026.275,27**

Kas di BLUD RSUD posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp72.694.637.634,94 tersimpan pada rekening di PT Bank Jatim

Tbk. Denganrekeninggironomor 021.101.3613 sebesar Rp72.694.637.634,94.

1.1.5 Kas di Bendahara JKN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di BendaharaJKN	**442.643.980,84**	**1.584.048.353,13**	**(1.141.404.372,29)**

Kasdi Bendahara Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan merupakan Kas FKTP posisi 31 Desember 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi.

Saldo Kas di Bendahara JKN sejumlah Rp442.643.980,84 tersebut tersimpan pada rekening FKTP .

Saldo Kas di Bendahara JKN sebesar Rp442.643.980,84 termasuk didalamnya terdapat pendapatan jasa giro PT BNI (Persero) Tbk. yang belum dipindahbukukan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp593.101,00.

Adapun rincian Kas diBendahara JKN masing-masing FKTP dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 77 LaporanRealisasidanSisaKas Dana JKN FKTP 24 UPT Puskesmas

(dalam Rupiah)

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER			AUTO DEBET JASA GIRO YANG TERUTANG DI TAHUN 2020	TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2021 (sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO				
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PACITAN	67.859.650,00	794.038.850,00	1.507.481,00	(1.558.947,00)	(143.080,00)	793.987.384,00	844.625.676,00	17.221.358,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TANJUNGSARI	94.398.020,00	1.483.620.880,00	1.959.400,00	(2.023.978,00)	(105.822,00)	1.483.556.302,00	1.551.639.782,00	26.314.540,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KEBONAGUNG	46.557.781,00	758.296.919,00	784.899,00	(793.120,00)	(32.452,00)	758.288.698,00	786.603.866,00	18.242.613,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KETROWONOJOYO	32.703.368,00	501.089.782,00	844.730,00	(798.884,00)	(29.439,00)	501.135.628,00	449.634.509,00	84.204.487,00
Pendapatan Dana Kapitasi	186.877.856,00	1.084.876.144,00	3.180.250,00	(3.203.136,00)	(169.581,00)	1.084.853.258,00	1.260.637.128,00	11.093.986,00

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER			AUTO DEBET JASA GIRO YANG TERUTANG DI TAHUN 2020	TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2021 (sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO				
JKN FKTP PUSKESMAS ARJOSARI								
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KEDUNGBENDO	22.930.516,00	291.178.334,00	282.374,00	(283.639,00)	(17.195,00)	291.177.069,00	313.761.129,00	346.456,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PUNUNG	48.956.685,00	559.644.465,00	857.152,00	(882.546,00)	(36.753,00)	559.619.071,00	602.782.362,00	5.793.394,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS GONDOSARI	126.945,00	349.858.130,00	92.650,00	(94.642,00)	(7.004,00)	349.856.138,00	344.772.273,00	5.210.810,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PRINGKUKU	14.778.796,00	556.015.304,00	588.728,00	(578.216,00)	(8.592,00)	556.025.816,00	552.995.087,00	17.809.525,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS CANDI	1.510.249,00	336.795.251,00	256.896,00	(256.387,00)	(6.564,00)	336.795.760,00	337.089.769,00	1.216.240,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS DONOROJO	10.034.070,09	753.177.755,00	657.221,83	-657.221,83		753.177.755,00	754.312.795,00	8.899.030,09
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KALAK	1.967.496,89	401.890.203,00	219.351,04	-219.351,04		401.890.203,00	383.467.859,00	20.389.840,89
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS NGADIROJO	15.498.025,98	969.123.654,00	1.413.246,21	-1.413.246,21		969.123.654,00	1.035.112.174,00	15.498.025,98
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS WONOKARTO	20.839.745,80	324.935.154,00	306.686,07	-306.686,07		324.935.154,00	338.916.667,00	6.858.232,80

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER			AUTO DEBET JASA GIRO YANG TERUTANG DI TAHUN 2020	TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2021 (sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO				
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TULAKAN	226.646.139,00	1.826.687.261,00	2.769.449,88	-2.769.449,88		1.826.687.261,00	1.969.400.141,00	83.933.259,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS BUBAKAN	81.424.195,82	965.978.404,00	866.438,09	-866.438,09		965.978.404,00	1.047.399.159,00	3.440,82
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS SUDIMORO	123.031.156,28	506.813.444,00	911.622,05	-911.622,05		506.813.444,00	622.889.001,00	6.955.599,28
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS SUKOREJO	2.549.998,47	271.969.877,00	204.521,35	-204.521,35		271.969.877,00	271.349.349,00	3.170.526,47
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TEGALOMBO	308.985.068,00	1.195.077.982,00	4.080.930,00	(4.423.350,00)	(459.569,00)	1.194.735.562,00	1.425.462.657,00	78.257.973,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS GEMAHARJO	4.428.153,00	1.039.097.247,00	879.056,00	(932.815,00)	(88.388,00)	1.039.043.488,00	1.040.492.552,00	2.979.089,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS NAWANGAN	32.336.291,49	1.000.695.984,00	1.030.218,93	-1.030.218,93		1.000.695.984,00	1.033.029.522,29	2.753,20
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PAKIS BARU	46.977.490,84	808.136.659,00	619.539,55	-619.539,55		808.136.659,00	854.746.252,00	367.897,84
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS BANDAR	91.684.258,77	676.730.091,00	969.788,38	-969.788,38		676.730.091,00	748.914.778,00	19.499.571,77
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS	34.957.876,70	611.274.173,00	594.872,52	-594.872,52		611.274.173,00	637.856.718,00	8.375.331,70

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER			AUTO DEBET JASA GIRO YANG TERUTANG DI TAHUN 2020	TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2021 (sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO				
JERUK								
JUMLAH	**1.518.059.833,13**	**18.067.001.947,00**	**5.877.501,90**	**(26.392.615,90)**	**(1.104.439,00)**	**18.066.486.833,00**	**19.207.891.205,29**	**442.643.980,84**

1.1.6 Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Dana BOS	**308.146.143,00**	**2.143.110.368,00**	**(1.834.964.225,00)**

Saldo Kas tersebut merupakan sisa kas dari Dana BOS pada posisi 31 Desember 2021.Saldo Kas BOS Tahun 2021 sebesar Rp308.146.143,00 terdiri dari saldo tunai sebesar Rp251.852.880,00 dan saldo bank sebesar Rp56.293.263,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Dana Bos di satuan Pendidikan Dasar Yaitu SD dan SMP Negeri dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 78 Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOS

(dalam Rupiah)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	SALDO BOS 2020	SALDO TAHUN 2021	RINCIAN SALDO	
					TUNAI	BANK
1	SEKOLAH DASAR (SD)	NEGERI	1.720.439.540,00	220.166.292,00	205.531.850,00	14.634.442,00
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	NEGERI	422.670.828,00	87.979.851,00	46.321.030,00	41.658.821,00
JUMLAH			**2.143.110.368,00**	**308.146.143,00**	**251.852.880,00**	**56.293.263,00**

Adapun penjelasan rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Bos pada masing-masing Satuan Pendidikan dapat dilihat di **Lampiran 6.**

1.1.7 KasLainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Lainnya	**0,00**	**64.142.198,82**	**(64.142.198,82)**

Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp 0,00. Terjadi Penurunan sebesar Rp64.142.198,82 yang merupakan saldo Kas Lainnya di Tahun 2020 atas Pajak Daerah yang dipungut bendahara dari kegiatan BOS sebesar Rp8.213.082,82 dan Utang PFK Bos sebesar Rp55.929.116,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan bulan Maret 2021

Piutang Daerah

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.319.703.325,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79 Piutang Daerah Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak	3.864.523.259,00	2.711.773.996,00	1.152.749.263,00
Piutang Retribusi	992.199.213,37	1.203.387.261,37	(211.188.048,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.212.132.189,42	8.230.045.439,24	4.982.086.750,18
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	6.901.177.873,00	(6.901.177.873,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.250.848.664,00	7.543.424.740,00	(292.576.076,00)
Jumlah Piutang Bersih	**25.319.703.325,79**	**26.589.809.309,61**	**(1.270.105.983,8)**

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 80 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des 2020	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2021
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/ Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran dan Reklasifikasi	
Piutang Pajak	2.711.773.996,00	0,00	18.092.505.263,00	0,00	18.085.793.410,00	2.718.485.849,00
Piutang Retribusi	1.203.387.261,37	0,00	167.093.216,00	0,00	378.281.264,00	992.199.213,37
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.230.045.439,24	0,00	11.469.014.864,88	0,00	6.486.698.114,70	13.212.362.189,42
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	6.901.177.873,00	0,00	0,00	0,00	6.901.177.873,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.543.424.740,00	0,00	7.250.848.664,00	0,00	7.543.424.740,00	7.250.848.664,00
Jumlah Piutang Bersih	**26.589.809.309,61**	**0,00**	**36.979.462.007,88**	**0,00**	**39.395.375.401,70**	**24.173.895.915,79**

Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1.8 Piutang Pajak

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Pajak	**3.864.523.259,00**	**2.711.773.996,00**	**1.152.749.163,00**

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp3.864.523.259,00 berada di Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 81 Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2021	Penambahan 2021	Saldo Akhir 2021
1	Piutang Pajak Hotel	3.198.000,00	0,00	95.000,00	0,00	3.103.000,00
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00
3	Piutang Pajak Rumah Kos dg Jumlah Kamar	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2021	Penambahan 2021	Saldo Akhir 2021
	Lebih dari 10 (Sepuluh)					
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.112.500,00	0,00	640.000,00	553.000,00	9.025.500,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	3.310.500,00	3.310.500,00
6	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.346.000,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00
7	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
8	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
9	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.972.000,00	0,00	0,00	999.000,00	3.971.000,00
10	Piutang Pajak Reklame Berjalan	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
11	Piutang Pajak Parkir	391.200,00	0,00	0,00	49.500,00	440.700,00
12	Piutang Pajak Air Tanah	494.748,00	0,00	0,00	188.617,00	683.365,00
13	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.686.126.548,00	0,00	347.903.642,00	349.103.878,00	2.687.326.784,00
14	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	1.146.037.410,00	1.146.037.410,00
TOTAL		**2.711.773.996,00**	**0,00**	**348.638.642,00**	**1.501.387.905,00**	**3.864.523.259,00**

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp3.864.523.259,00 di Tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 1.152.749.163,00 atau 42,51% dibandingkan realisasi Tahun 2020. Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal Tahun 2020 Rp2.711.773.996,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp348.638.642,00 dan penambahan piutang pajak Tahun 2021 sebesar Rp1.501.387.905,00.

Saldo piutang pajak sebesar Rp3.864.523.259,00 didominasi oleh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.687.326.784,00 atau 69,54% dari total piutang pajak.

Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIOP dengan nilai piutang yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada nilai BAST dicatatkan sejumlah Rp1.187.434.104,00 sementara pada database SISMIOP terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00. Selisih tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data piutang.

Pemeliharaan basis data SISMIOP dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang sampai dengan Tahun 2021 masih dalam tahap

penyusunan database yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan pemeliharaan data piutang.

Sampai dengan 31 Desember 2021 saldo piutang PBB-P2 tercatat sejumlah Rp2.338.715.235,00 sementara pada database SISMIOP masih terdapat data piutang sejumlah Rp7.081.346.102,00 sehingga terdapat selisih Rp4.742.630.867,00.Adapun Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 82 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan

(dalam Rupiah)

TAHUN PAJAK	KONDISI PER 1 JANUARI 2014			KONDISI PER 31 DESEMBER 2021		
	BA - 15/WPJ.24/ KP.14/2014 (Rp.)	DATABASE SISMIOP (Rp.)	SELISIH (Rp.)	SALDO PIUTANG (Rp.)	DATABASE SISMIOP (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
2021				348.611.549,00	348.611.549,00	-
2020				195.438.294,00	207.343.192,00	11.904.898,00
2019				135.101.925,00	159.590.737,00	24.488.812,00
2018				239.658.080,00	201.260.415,00	(38.397.665,00)
2017				242.594.486,00	260.005.240,00	17.410.754,00
2016				211.412.176,00	219.079.338,00	7.667.162,00
2015				176.649.557,00	196.435.732,00	19.786.175,00
2014				160.463.786,00	171.962.075,00	11.498.289,00
2013	240.101.172,00	2.277.815.183,00	2.037.714.011,00	152.361.027,00	160.735.511,00	8.374.484,00
2012	170.191.557,00	170.191.557,00	0,00	138.640.313,00	140.463.110,00	1.822.797,00
2011	309.988.483,00	309.988.483,00	0,00	221.267.785,00	211.781.176,00	(9.486.609,00)
2010	1.002.353,00	1.002.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.180.860,00	1.180.860,00	0,00	241.835,00	241.835,00	0,00
2008	98.679,00	98.679,00	0,00	98.679,00	98.679,00	0,00
2007	84.567.000,00	1.327.280.315,00	1.242.713.315,00	84.567.000,00	1.327.280.315,00	1.242.713.315,00
2006	56.914.000,00	549.778.043,00	492.864.043,00	56.914.000,00	549.778.043,00	492.864.043,00
2005	75.650.000,00	885.185.071,00	809.535.071,00	75.650.000,00	885.185.071,00	809.535.071,00
2004	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00
2003	-	643.619.733,00	643.619.733,00	0,00	643.619.733,00	643.619.733,00
sd. 2002	**247.723.000,00**	**1.290.622.031,00**	**1.042.899.031,00**	247.639.292,00	1.290.641.675,00	1.043.002.383,00
2002		69.341.791,00	69.341.791,00	0,00	69.341.791,00	69.341.791,00
2001		311.477.648,00	311.477.648,00	0,00	311.477.648,00	311.477.648,00
2000		251.511.235,00	251.511.235,00		251.511.235,00	251.511.235,00
1999		198.325.522,00	198.325.522,00		198.325.522,00	198.325.522,00
1998		216.614.526,00	216.614.526,00		216.614.526,00	216.614.526,00
1997		193.261.963,00	193.261.963,00		193.261.963,00	193.261.963,00
1996		45.648.050,00	45.648.050,00		45.648.050,00	45.648.050,00
1995		0,00	0,00		0,00	0,00
1994		4.441.296,00	4.441.296,00		4.441.296,00	4.441.296,00
JUMLAH	**1.187.434.104,00**	**7.912.606.533,00**	**6.725.172.429,00**	**2.338.715.235,00**	**7.081.346.102,00**	**4.742.630.867,00**

1.1.9 Piutang Retribusi

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Retribusi	**992.199.213,37**	**1.203.387.261,00**	**(211.188.048,00)**

Jumlah Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp992.199.213,37 yaitu terdiri dari:

Tabel 83 Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2021	Penambahan per 31 Des 2021	Saldo Akhir 2021
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	165.887.000,00	0,00	165.887.000,00	167.084.000,00	167.084.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.362.000,00	0,00	140.311.000,00	0,00	75.051.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	445.883.931,00	0,00	38.000.000,00	0,00	407.883.931,00
6	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	270.929.080,37	0,00	34.083.264,00	0,00	236.845.816,37
7	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
8	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	9216,00	9.216,00
	Total	**1.203.387.261,37**	**0,00**	**378.281.264,00**	**167.093.216,00**	**992.199.213,37**

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp992.199.213,37 di Tahun 2021, mengalami penurunan sebesar Rp211.188.048,00 atau 17,54% dibandingkan Tahun 2020.

Nilai Piutang sebesar Rp992.199.213,37 berasal dari saldo awal Tahun 2020 Rp1.203.387.261,37 dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp378.281.264,00 dan penambahan piutang Tahun 2021 sebesar Rp167.093.216,00.

1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	**13.212.132.189,42**	**8.230.045.439,24**	**4.982.086.750,18**

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp13.212.132.189,42 terdiri atas:

Tabel 84 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Koreksi Saldo Awal 2021	Pelunasan 2021	Penambahan2021	Saldo Akhir 2021
1	Piutang Jasa Giro	30.427.664,42	0,00	30.427.664,42	0,00	0,00
2	Piutang Bunga Deposito	2.003.424,66	0,00	2.003.424,66	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	1.520.000,00	0,00	2.370.000,00	3.890.000,00
4	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	0,00	15.696.000,00	0,00	237.937.500,00	253.633.500,00
5	Piutang Denda Pajak (BAPENDA)	1.061.448.392,94	0,00	38.492.820,00	85.374.717,88	1.108.330.290,82
6	Piutang dari Pengembalian	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00
7	Piutang BLUD (RSUD)	6.355.768.818,00	0,00	6.302.363.067,00	11.144.182.647,00	11.197.588.398,00

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Koreksi Saldo Awal 2021	Pelunasan 2021	Penambahan2021	Saldo Akhir 2021
8	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	338.807.389,22	0,00	12.411.138,62	0,00	326.396.250,60
9	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	346.589.750,00	-17.216.000,00	7.080.000,00	0,00	322.293.750,00
-	Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan	15.696.000,00	*(15.696.000,00)*	0,00	0,00	0,00
-	Hasil Perjanjian Kerja Sama -BPKAD	1.520.000,00	*(1.520.000,00)*	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Revolping-Pertanian	45.910.000,00	0,00	7.080.000,00	0,00	38.830.000,00
-	Anggota DPRD 1999-2004	283.463.750,00	0,00	0,00	0,00	283.463.750,00
TOTAL		**8.230.045.439,24**	**0,00**	**6.487.778.114,70**	**6.487.778.114,70**	**13.212.132.189,42**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp13.212.132.189,42di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.982.086.750,18 atau 37,71% berasal dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp8.230.045.439,24, pelunasan sebesar Rp6.487.778.114,70 dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2021sebesar Rp11.469.864.864,88

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

1) Piutang Jasa Giro Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,00 berasal dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp30.427.664,42 dan telah terjadi pelunasan di Tahun 2021.

2) Piutang bunga Deposito pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,00 berasal dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp2.003.424,66 dan terjadi pelunasan di Tahun 2021.

3) Piutang hasil sewa BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.890.000,00 berasal dari koreksi saldo Tahun 2021 sebesar Rp1.520.000,00 yang saldo awalnya berada pada rekening hasil perjanjian kerjasama dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.370.000,00.

4) Piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar Rp253.633.500,00 berasal dari koreksi saldo Tahun 2021 sebesar Rp15.696.000,00 yang saldo awalnya berada pada rekening Lain-lain PAD yang sah (piutang perjanjian kerjasama-dinas perikanan) dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp237.937.500,00.

5) Piutang denda pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.108.330.290,82. Piutang tersebut merupakan piutang atas sanksi administrasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

6) Piutang dari Pengembalian sebesar Rp 0,00 berasal dari saldo tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 dan telah terjadi pelunasan di tahun 2021.

7) Piutang BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp11.197.588.398,00. Piutang BLUD merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien, yang belum diterima hingga 31 Desember 2021. Piutang BLUD RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 diakui sebesar Rp11.197.588.398,00 yang terdiri dari:

   - Piutang Pasien Umum pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp78.273.311,00 dengan rincian sebagai berikut.
     - Pasien umum pelayanan Tahun 2016 sebesar Rp41.455.621,00
     - Pasien umum pelayanan Tahun 2018 sebesar Rp11.950.130,00.
     - Pasien umum dalam perawatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.867.560,00.
   - Piutang pasien BPJS (JKN) untuk klaim layanan s.d Desember 2021 sebesar Rp3.782.834.056,00
   - Piutang pasien Jasa Raharja untuk klaim layanan sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp23.800.281,00.
   - Piutang pasien kerjasama Kemenkes untuk klaim layanan sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar Rp7.312.680.750,00.

8) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (piutang bunga) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp326.396.250,60.Piutang tersebut merupakan piutang bunga atas Investasi Dana Bergulir sejak Tahun 2002 s/d 2019 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sudah jatuh tempo.

9) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp322.293.750,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   - Piutang Hasil Perjanjian Kerja Sama (Pabrik Es) yang dikelola oleh Dinas Perikanan sebesar Rp0,00. Terdapat koreksi saldo Tahun 2021 senilai Rp15.696.000,00 dikarenakan ada reklas rekening, yang semula berada pada rekening piutang hasil perjanjian kerjasama reklas ke rekening piutang hasil kerja sama dengan BMD.
   - Piutang Hasil Perjanjian Kerjasama sebesar Rp0,00 yang dikelola BPKAD atas sewa Kios Pacitan per 31 Desember 2021. Terdapat koreksi saldo Tahun 2021 senilai Rp1.520.000,00 dikarenakan ada reklas rekening, yang semula berada pada rekening piutang hasil perjanjian kerjasama reklas ke rekening piutang hasil sewa BMD.
   - Piutang Pendapatan Lainnya (Purna Tugas Anggota DPRD)
     Piutang Pendapatan Lainnya merupakan tagihan kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa Tahun 1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti sebesar Rp283.463.750,00. Terhadap piutang pendapatan lainnya tidak ada mutasi di tahun 2021.

- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) Rp38.830.000,00 pada Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Piutang Pokok- dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian)

(dalam Rupiah)

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas Pertanian	Saldo Piutang 31 Des 2020		Mutasi2021		Saldo Piutang 31 Desember 2021		
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Total Piutang
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong	6.000.000,00	1.080.000,00	(6.000.000,00)	(1.080.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman	16.530.000,00	0,00	0,00	0,00	16.530.000,00	0,00	16.530.000,00
Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
Jumlah	44.830.000,00	1.080.000,00	**(6.000.000,00)**	**(1.080.000,00)**	38.830.000,00	0,00	38.830.000,00

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) – Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai Rp 16.530.000,00 pada Kelompok Paguyuban Ternak Sapi di desa Kembang Kecamatan Pacitan.

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) – Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin senilai Rp22.300.000,00 pada Kelompok Gemah Ripah I di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp 15.700.000,00 dan Kelompok Gemah Ripah II di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp 6.600.000,00

1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**0,00**	**6.901.177.873,00**	**(6.901.177.873,00)**

Adapun daftar mutasi piutang transfer pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 86 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2021	Penambahan 2021	Saldo Akhir 2021
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	5.780.328.949,00	0,00	5.780.328.949,00	0,00	0,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.120.848.924,00	0,00	1.120.848.924,00	0,00	0,00
TOTAL		**6.901.177.873,00**	**0,00**	**6.901.177.873,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp0,00. Saldo awal sebesar Rp6.901.177.873,00 pada piutang pajak dan piutang bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam telah ada pelunasan di Tahun 2021 sebesar Rp6.901.177.873,00 berdasarkan PMK Nomor 133/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020

1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**7.250.848.664,00**	**7.543.424.740,00**	**(292.576.076,00)**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Sebesar Rp7.250.848.664,00 Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp292.576.076,00 atau 3,87% dibandingkan tahun 2020. Saldo tersebut berasal dari saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp7.543.424.740,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp7.543.424.740,00 berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07 2021

Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp7.250.848.664,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/941/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

Nilai sebesar Rp7.250.848.664,00 tersebut telah diterima di rekening Kas Daerah pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nomor STS 00265/STS/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2022.

1.1.13 Penyisihan Piutang Pendapatan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Penyisihan Piutang	**(4.653.730.243,41)**	**(4.599.229.872,00)**	**(54.500.371,40)**

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Piutang Pajak:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo,Penyisihan 0,5%,
2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,
3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >2 tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit Belum melunasi, penyisihan 50%,
4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Piutang Retribusi:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1 bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo,penyisihan 0,5%,

2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3 bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,

3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan – 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%,

4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12 bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan waktu jatuh tempo,Penyisihan 0,5%,

2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum melakukan pelunasan 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,

3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%,

4) **Kualitas macet** apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu 1 bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyisihan 100%.

Penyisihan Piutang Tahun 2021 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 87 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.872.981.675,59)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(825.941.463,45)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.918.552.861,05)
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(36.254.243,32)
Jumlah		(4.653.730.243,41)

Penyisihan piutang sebesar Rp4.653.730.243,41 diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut dirinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 88 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	**PIUTANG PAJAK**	**3.864.523.259,00**	**1.500.895.576,00**	**198.244.672,00**	**639.460.561,00**	**1.525.922.450,00**
1	Piutang Pajak Hotel	3.103.000,00	0,00	305.000,00	2.798.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Rumah	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Penginapan dan Sejenisnya					
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.025.500,00	553.000,00	1.744.000,00	6.728.500,00	0,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.310.500,00	3.310.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	8.346.000,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,00
7	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	192.000,00	0,00	84.600,00	107.400,00	0,00
8	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	3.971.000,00	999.000,00	180.000,00	2.792.000,00	0,00
10	Piutang Pajak Reklame Berjalan	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
11	Piutang Pajak Parkir	440.700,00	49.500,00	0,00	391.200,00	0,00
12	Piutang Pajak Air Tanah	683.365,00	188.617,00	61.778,00	432.970,00	0,00
13	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.687.326.784,00	348.611.549,00	195.438.294,00	617.354.491,00	1.525.922.450,00
14	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.146.037.410,00	1.146.037.410,00	0,00	0,00	0,00
2	**PIUTANG RETRIBUSI**	**992.199.213,37**	**167.093.216,00**	0,00	0,00	**825.105.997,37**
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	167.084.000,00	167.084.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.051.000,00	0,00	0,00	0,00	75.051.000,00
4	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	407.883.931,00	0,00	0,00	0,00	407.883.931,00
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	236.845.816,37	0,00	0,00	0,00	236.845.816,37
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00	0,00
3	**PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**13.212.132.189,42**	**11.343.999.325,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.859.132.864,42**
1	Piutang Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Bunga deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Sewa BMD	3.890.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
4	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	253.633.500,00	197.437.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	47.196.000,00
5	Piutang Denda Pajak (BAPENDA)	1.108.330.290,82	9.178,00	0,00	0,00	1.108.321.112,82
6	Piutang dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang BLUD (RSUD)	11.197.588.398,00	11.144.182.647,00	0,00	0,00	53.405.751,00
8	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	326.396.250,60	0,00	0,00	0,00	326.396.250,60
9	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	323.373.750,00	0,00	0,00	0,00	323.373.750,00
-	*Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*Piutang Perjanjian Kerjasama (BPKAD)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*Piutang Revolping-Pertanian*	38.830.000,00	0,00	0,00	0,00	38.830.000,00
-	*Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004*	283.463.750,00	0,00	0,00	0,00	283.463.750,00
4	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Piutang Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Pajak Daerah					
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**	**7.250.848.664,00**	**7.250.848.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Bagi Hasil Pajak Rokok	7.250.848.664,00	7.250.848.664,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PIUTANG		**25.319.703.325,79**	**20.262.836.781,00**	**202.744.672,00**	**643.960.561,00**	**4.210.161.311,79**

Tabel 89 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	**PIUTANG PAJAK**	3.864.523.259,00	1.500.895.576,00	198.244.672,00	639.460.561,00	1.525.922.450,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.872.981.675,58	7.504.477,88	19.824.467,20	319.730.280,50	1.525.922.450,00
	NRV Piutang	1.991.541.583,42	1.493.391.098,12	178.420.204,80	319.730.280,50	-
1	Piutang Pajak Hotel	*3.103.000,00*	-	305.000,00	2.798.000,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.429.500,00***	**-**	***30.500,00***	***1.399.000,00***	**-**
	NRV Piutang	1.673.500,00	-	***274.500,00***	1.399.000,00	-
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan Dan Sejenisnya	963.000,00	963.000,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***4.815,00***	***4.815,00***	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	958.185,00	958.185,00	-	-	-
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	183.000,00	183.000,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***915,00***	***915,00***	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	*182.085,00*	*182.085,00*	-	-	-
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.025.500,00	553.000,00	1.744.000,00	6.728.500,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***3.541.415,00***	***2.765,00***	***174.400,00***	***3.364.250,00***	**-**
	NRV Piutang	5.484.085,00	550.235,00	1.569.600,00	3.364.250,00	-
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.310.500,00	3.310.500,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***16.552,50***	***16.552,50***	**-**	**-**	**-**

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	NRV Piutang	3.293.947,50	3.293.947,50	-	-	-
6	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	8.346.000,00	-	-	8.346.000,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***4.173.000,00***	**-**	**-**	***4.173.000,00***	**-**
	NRV Piutang	4.173.000,00	-	-	4.173.000,00	-
7	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	192.000,00	-	84.600,00	107.400,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***62.160,00***	**-**	***8.460,00***	***53.700,00***	**-**
	NRV Piutang	129.840,00	-	76.140,00	53.700,00	-
8	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	431.000,00	-	431.000,00	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**43.100,00**	**-**	**43.100,00**	**-**	**-**
	NRV Piutang	387.900,00	-	387.900,00	-	-
9	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	3.971.000,00	1.179.000,00	-	2.792.000,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**1.401.895,00**	**5.895,00**	**-**	**1.396.000,00**	**-**
	NRV Piutang	2.569.105,00	1.173.105,00	-	1.396.000,00	-
10	Piutang Pajak Reklame Berjalan	510.000,00	-	-	510.000,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**255.000,00**			**255.000,00**	**-**
	NRV Piutang	255.000,00			255.000,00	-
11	Piutang Pajak Parkir	440.700,00	49.500,00	-	391.200,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**195.847,50**	**247,50**	**-**	**195.600,00**	**-**
	NRV Piutang	244.852,50	49.252,50	-	195.600,00	-
12	Piutang Pajak Air Tanah	683.365,00	188.617,00	61.778,00	432.970,00	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**223.605,89**	**943,09**	**6.177,80**	**216.485,00**	**-**
	NRV Piutang	459.759,12	187.673,92	55.600,20	216.485,00	-
13	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.687.326.784,00	348.611.549,00	195.438.294,00	617.354.491,00	1.525.922.450,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**1.855.886.582,65**	**1.743.057,75**	**19.543.829,40**	**308.677.245,50**	**1.525.922.450,00**
	NRV Piutang	831.440.201,36	346.868.491,26	175.894.464,60	308.677.245,50	-
14	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.146.037.410,00	1.146.037.410,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Jml Penyisihan	5.730.187,05	5.730.187,05	-	-	-
	NRV Piutang	1.140.307.222,95	1.140.307.222,95	-	-	-
2	**PIUTANG RETRIBUSI**	**992.199.213,37**	**167.093.216,00**	**-**	**-**	**825.105.997,37**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***825.941.463,45***	***835.466,08***	**-**	**-**	***825.105.997,37***
	NRV Piutang	*166.257.749,92*	*166.257.749,92*	-	-	-
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	167.084.000,00	167.084.000,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***835.420,00***	***835.420,00***	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	*166.248.580,00*	*166.248.580,00*	-	-	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.051.000,00	-	-	-	75.051.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***75.051.000,00***	**-**	**-**	**-**	***75.051.000,00***
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
4	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	407.883.931,00	-	-	-	407.883.931,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***407.883.931,00***	**-**	**-**	**-**	***407.883.931,00***
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	236.845.816,37	-	-	-	236.845.816,37
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***236.845.816,37***	**-**	**-**	**-**	***236.845.816,37***
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	-	-	-	105.325.250,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***105.325.250,00***	**-**	**-**	**-**	***105.325.250,00***
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	9.216,00	9.216,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	46,08	46,08	-	-	-
	NRV Piutang	9.169,92	9.169,92	-	-	-
3	**PIUTANG LAIN-**	**13.212.132.189,42**	**11.343.999.325,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.859.132.864,42**

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	LAIN PAD YANG SAH					
	% penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.919.628.611,05***	***56.715.746,63***	***450.000,00***	***2.250.000,00***	***1.860.212.864,42***
	NRV Piutang	*11.292.733.578,38*	*11.286.433.578,38*	*4.050.000,00*	*2.250.000,00*	-
1	Piutang Jasa Giro	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	-	-	-	-	-
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
2	Piutang Bunga deposito	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	-	-	-	-	-
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
3	Piutang Hasil Sewa BMD	3.890.000,00	2.370.000,00	-	-	1.520.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.531.850,00	11.850,00	-	-	1.520.000,00
	NRV Piutang	2.358.150,00	2.358.150,00	-	-	-
4	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	253.633.500,00	197.437.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	47.196.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***50.883.187,50***	***987.187,50***	***450.000,00***	***2.250.000,00***	***47.196.000,00***
	NRV Piutang	*202.750.312,50*	*196.450.312,50*	*4.050.000,00*	*2.250.000,00*	-
5	Piutang Denda Pajak (BAPENDA)	1.108.330.290,82	9.178,00	-	-	1.108.321.112,82
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.108.321.158,71***	***45,89***	***-***	***-***	***1.108.321.112,82***
	NRV Piutang	*9.132,11*	*9.132,11*	-	-	-
6	Piutang dari Pengembalian	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
7	Piutang BLUD (RSUD)	11.197.588.398,00	11.144.182.647,00	-	-	53.405.751,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***109.126.664,24***	***55.720.913,24***	***-***	***-***	***53.405.751,00***
	NRV Piutang	*11.088.461.733,77*	*11.088.461.733,77*	-	-	-
8	*Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)*	*326.396.250,60*	-	-	-	*326.396.250,60*
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	*326.396.250,60*				*326.396.250,60*
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
9	*Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya*	322.293.750,00	-	-	-	322.293.750,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	322.293.750,00	-	-	-	322.293.750,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
-	*Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan*	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
-	Piutang Perjanjian Kerjasama (BPKAD)	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
-	Piutang Revolping-Pertanian	38.830.000,00	-	-	-	38.830.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	38.830.000,00	-	-	-	38.830.000,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
-	Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004	283.463.750,00	-	-	-	283.463.750,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	283.463.750,00	-	-	-	283.463.750,00
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
4	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	-	-	-	-	-
5	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**	**7.250.848.664,00**	**7.250.848.664,00**	**-**	**-**	**-**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***36.254.243,32***	***36.254.243,32***	**-**	**-**	**-**

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	NRV Piutang	*7.214.594.420,68*	36.254.243,32	-	-	-
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	***7.250.848.664,00***	7.250.848.664,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***36.254.243,32***	***36.254.243,32***	**-**	**-**	**-**
	NRV Piutang	7.214.594.420,68	***7.214.594.420,68***	-	-	-
TOTAL PIUTANG		25.319.703.325,79	20.262.836.781,00	202.744.672,00	643.960.561,00	4.210.161.311,79
		0,50%	10%	50%	100%	100%
	4.648.000.056,36	101.314.183,91	20.274.467,20	321.980.280,50	4.210.161.311,79	4.210.161.311,79
	20.665.973.082,40	20.161.522.597,10	182.470.204,80	321.980.280,50	-	100%

1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2021 (Rp)	3 1Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	**25.025.000,00**	**45.781.333,00**	**(20.756.333,00)**

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.025.000,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban atau Belanja yang telah dibayar pada periode Tahun 2021 namun pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan terjadi di tahun berikutnya. Adapun rincian beban dibayar dimuka adalah beban dibayar dimuka Premi Asuransi BUMIDA sebesar Rp25.025.000,00

1.1.15 Persediaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Persediaan	**24.808.593.880,93**	**39.862.262.915,15**	**(15.053.669.034,22)**

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 adalah sebesar 24.808.593.880,93 Persediaan dicatat dengan metode periodik dan *perpetual*. Persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, maka dicatat dengan metode *perpetual* dimana transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat dalam kartu barang.

Sedangkan persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), dicatat dengan metode periodik.

Nilai mutasi persediaan pada masing-masing SKPD tanggal 31 Desember 2021 merupakan hasil *stock opname* fisik. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Berkurang	Bertambah	
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	2.256.906.469,79	21.550.383.992,77	26.523.440.926,63	7.229.963.403,65
2	DINAS KESEHATAN	9.493.032.527,02	22.649.991.706,90	21.120.345.390,95	7.963.386.211,07
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.443.523.348,02	47.652.088.132,67	48.514.570.572,44	8.306.005.787,79

No	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Berkurang	Bertambah	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.422.863.159,47	28.435.142.370,77	17.020.089.321,30	7.810.110,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.538.251.771,40	44.126.580.681,4	36.588.328.910,00	0.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0.00	14.858.650,00	14.858.650,00	0.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.969.500,00	138.278.500,00	140.441.710,00	10.132.710,00
8	DINAS SOSIAL	0.00	752.749.020,00	753.014.730,00	265.710,00
9	DINAS PANGAN	194.978.868,00	533.986.430,00	339.283.310,00	275.748,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	98.165.100,00	595.049.550,00	528.182.410,00	31.297.960,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	482.541.204,20	1.362.531.793,80	1.579.669.640,00	699.679.050,40
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0.00	200.354.165,00	200.354.165,00	0.00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK	287.872.960,60	1.410.891.111,00	1.326.952.352,00	203.934.201,60
14	DINAS PERHUBUNGAN	87.964.068,00	696.087.935,90	664.683.704,00	56.559.836,10
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0.00	48.700.660,00	48.966.370,00	265.710,00
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	0.00	162.767.225,00	162.767.225,00	0.00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0.00	140.159.369,00	140.425.079,00	265.710,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN	0.00	61.630.480,00	61.896.190,00	265.710,00
19	DINAS PERIKANAN	165.662.846,00	2.099.967.765,58	1.962.344.204,90	28.039.285,32
20	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	286.000,00	350.931.980,00	425.836.540,00	75.190.560,00
21	DINAS PERTANIAN	32.659.000,00	8.177.529.670,00	8.148.174.860,00	3.304.190,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49.987.505,00	462.476.374,00	457.710.074,00	45.221.205,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0.00	193.987.710,00	193.987.710,00	0.00
24	BPKAD	52.189.060,00	973.075.837,00	1.050.336.829,00	129.450.052,00
25	BAPPENDA	241.719.377,65	401.933.657,65	160.479.990,00	265.710,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	680.350,00	189.811.885,00	190.858.655,00	1.727.120,00
27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0.00	70.063.900,00	70.063.900,00	0.00
28	INSPEKTORAT	997.000,00	106.246.964,00	106.053.244,00	803.280,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Berkurang	Bertambah	
29	SEKRETARIAT DAERAH	4.012.800,00	1.217.509.600,00	1.220.375.650,00	6.878.850,00
30	SEKRETARIAT DPRD	0.00	340.585.819,00	340.585.819,00	0.00
31	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0.00	72.241.000,00	72.506.710,00	265.710,00
32	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	0.00	48.358.900,00	48.624.610,00	265.710,00
33	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	0.00	141.391.560,00	147.137.360,00	5.745.800,00
34	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	0.00	123.364.350,00	123.630.060,00	265.710,00
35	KANTOR KECAMATAN PACITAN	0.00	2.441.695.337,00	2.441.695.337,00	0.00
36	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	0.00	45.235.275,00	45.235.275,00	0.00
37	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	0.00	233.756.000,00	234.021.710,00	265.710,00
38	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	0.00	152.314.100,00	152.579.810,00	265.710,00
39	KANTOR KECAMATAN BANDAR	0.00	111.745.685,00	111.745.685,00	0,00
40	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	0.00	132.221.950,00	132.487.660,00	265.710,00
41	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	0.00	224.880.900,00	225.146.610,00	265.710,00
42	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	0.00	133.033.450,00	133.033.450,00	0.00
43	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	0.00	101.248.500,00	101.248.500,00	0.00
JUMLAH		**39.862.262.915,15**	**189.077.839.943,44**	**174.024.170.909,22**	**24.808.593.880,93**

Sedangkan rincian nilai persediaan per jenis barang pada masing-masing SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :.

Tabel 91 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH
A	**BAHAN**	**427.574.579,32**
1	**Bahan Bangunan dan Konstruksi**	**289.206.017,00**
-	Dinas Pendidikan	237.660.112,00
-	Dinas Kesehatan	10.390.300,00
-	Dinas Perindustrian dan perdagangan	41.155.605,00
2	**Bahan Kimia**	**74.408.487,00**
-	Dinas Pendidikan	4.673.000,00
-	Dinas Kesehatan	69.735.487,00
3	**Bahan Bakar dan Pelumas**	**965.000,00**
-	Dinas Pendidikan	965.000,00
4	**Bahan Baku**	**225.000,00**

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH
-	Dinas Pendidikan	225.000,00
5	**Bahan/Bibit Tanaman**	**17.617.500,00**
-	Dinas pendidikan	17.617.500,00
6	**Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**1.350.000,00**
-	Dinas Kesehatan	1.350.000,00
7	**Isi Tabung Gas**	**16.029.000,00**
-	Dinas Pendidikan	14.996.500,00
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	1.032.500,00
8	**Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**	**27.773.575,32**
-	Dinas Perikanan	27.773.575,32
9	**Bahan Lainnya**	**0,00**
B	**SUKU CADANG**	**21.976.700,00**
1	**Suku Cadang Alat Angkutan**	**19.587.300,00**
-	Dinas Kesehatan	19.587.300,00
2	**Suku Cadang Alat Laboratorium**	**85.000,00**
-	Dinas Pendidikan	85.000,00
3	**Suku Cadang Alat Pertanian**	**2.304.400,00**
-	Dinas Pendidikan	2.304.400,00
C	**ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR**	**3.342.140.996,21**
1	**Alat Tulis Kantor**	**434.042.141,70**
-	Dinas Pendidikan	310.283.933,00
-	Dinas Kesehatan	60.783.005,50
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	42.240.723,20
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.548.500,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.002.250,00
-	Dinas Perhubungan	202.400,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.597.630,00
-	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.030.700,00
-	Sekretariat Daerah	1.353.000,00
2	**Kertas dan Cover**	**557.981.307,50**
-	Dinas Pendidikan	481.555.155,00
-	Dinas Kesehatan	51.926.285,00
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	12.044.747,50
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.943.900,00
-	Dinas Perhubungan	182.600,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.100.200,00
-	Inspektorat Daerah	537.570,00
-	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah	165.000,00
-	Sekretariat Daerah	5.525.850,00
3	**Bahan Cetak**	**551.626.831,00**
-	Dinas Pendidikan	293.765.034,00
-	Dinas Kesehatan	2.062.500,00
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	66.872.297,00

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	134.602.600,00
-	Dinas Perhubungan	54.324.400,00
4	**Benda Pos**	**17.229.500,00**
-	Dinas Pendidikan	12.147.000,00
-	Dinas Kesehatan	4.612.500,00
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	470.000,00
5	**Persediaan Dokumen/Administrasi Tender**	**2.421.500,00**
-	Dinas Pendidikan	2.421.500,00
6	**Bahan Komputer**	**1.067.575.426,49**
-	Dinas Pendidikan	299.470.247,00
-	Dinas Kesehatan	160.964.378,79
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	21.682.550,30
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.052.000,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	565.076.450,40
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.172.000,00
-	Kecamatan Punung	157.800,00
7	**Perabot Kantor**	**424.349.988,42**
-	Dinas Pendidikan	347.754.950,02
-	Dinas Kesehatan	28.036.212,40
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	18.528.826,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	30.030.000,00
8	**Alat Listrik**	**175.962.120,00**
-	Dinas Pendidikan	114.372.750,00
-	Dinas Kesehatan	25.619.900,00
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	35.254.470,00
-	Dinas Perhubungan	715.000,00
9	**Perlengkapan Dinas**	**19.754.000,00**
-	Dinas Pendidikan	1.164.000,00
-	Dinas Kesehatan	18.590.000,00
10	**Perlengkapan Pendukung Olahraga**	**10.895.150,00**
-	Dinas Pendidikan	10.895.150,00
11	**Benda Berharga**	**80.303.031,10**
-	Dinas Pendidikan	310.000,00
-	Dinas Perhubungan	1.002.581,10
-	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	74.924.850,00
-	Dinas Perindustrian dan perdagangan	4.065.600,00
D	**OBAT-OBATAN**	**12.028.436.353,78**
1	**Obat**	**2.867.749.604,27**
-	Dinas Pendidikan	39.151.550,00
-	Dinas Kesehatan	2.628.757.922,67
-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	199.840.131,60
2	**Obat-obatan Lainnya**	**996.982.425,92**

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH
-	Dinas Pendidikan	453.307.920,00
-	Dinas Kesehatan	406.961.582,92
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	27.472.156,00
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.710,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	265.710,00
-	Dinas Sosial	265.710,00
-	Dinas Perindustrian dan perdagangan	265.710,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	265.710,00
-	Dinas Perhubungan	132.855,00
-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.094.070,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	265.710,00
-	Dinas Perikanan	265.710,00
-	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	265.710,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.710,00
-	Dinas Perpustakaan	265.710,00
-	Dinas Pertanian	265.710,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93.580.222,00
-	Badan Pendapatan Daerah	265.710,00
-	Inspektorat Daerah	265.710,00
-	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah	531.420,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	265.710,00
-	Kecamatan Donorojo	265.710,00
-	Kecamatan Punung	5.588.000,00
-	Kecamatan Pringkuku	265.710,00
-	Kecamatan Arjosari	265.710,00
-	Kecamatan Nawangan	265.710,00
-	Kecamatan Tegalombo	265.710,00
-	Kecamatan Tulakan	265.710,00
3	**Persediaan Rumah Sakit Daerah**	**8.115.022.781,79**
-	Dinas Pendidikan	14.071.200,00
-	Dinas Kesehatan	32.820.020,00
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	8.068.131.561,79
4	**Persediaan Dinas Kesehatan**	**48.681.541,80**
-	Dinas Pendidikan	61.000,00
-	Dinas Kesehatan	48.620.541,80
E	**PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN**	**8.406.709.768,62**
1	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**	4.132.885.452,63
-	Dinas Pendidikan	4.123.018.452,63
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.867.000,00
2	**Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya**	4.273.824.315,99
-	Dinas Kesehatan	4.273.824.315,99
F	**PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA**	**10.038,00**

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH
1	**Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga**	**10.038,00**
-	Dinas Pangan	10.038,00
G	**PERSEDIAAN NATURA DAN PAKAN**	**496.586.106,00**
1	**Natura**	**496.586.106,00**
-	Dinas Pendidikan	371.791.050,00
-	Dinas Kesehatan	112.519.100,00
-	Rumah Sakit Umum dr.Darsono	12.275.956,00
H	**PERSEDIAAN BIDANG PERIKANAN**	**1.113.200,00**
1	**Bidang Budidaya**	**1.113.200,00**
-	Dinas Pendidikan	1.113.200,00
I	**PERSEDIAAN BIDANG PETERNAKAN**	**84.046.139,00**
1	**Bahan Kesehatan Hewan**	**47.112.659,00**
-	Dinas Pendidikan	40.887.800,00
-	Dinas Kesehatan	6.224.859,00
2	**Pupuk**	**32.691.000,00**
-	Dinas Pendidikan	32.691.000,00
3	**Pakan Ternak**	**3.268.480,00**
-	Dinas Pendidikan	912.000,00
-	Dinas Pertanian	2.356.480,00
4	**Bahan Peternakan**	**152.000,00**
-	Dinas Pendidikan	152.000,00
5	**Bibit Ternak**	**822.000,00**
-	Dinas Pendidikan	140.000,00
-	Dinas Pertanian	682.000,00
JUMLAH		**24.808.593.880,93**

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp8.406.709.768,62 terdiri atas:

1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada SKPD
   - Dinas pendidikan sebesar Rp4.123.018.452,63 berupa barang fisik konstruksi dan fisik non konstruksi yang akan diserahkan kepada sekolah swasta menunggu BAST dan SK Pengelola Barang
   - BPBD sebesar Rp9.867.000,00 berupa masker.
2. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya yang berada pada SKPD
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp4.273.824.315,99 berupa barang penunjang kesehatan

Dari total Persediaan sebesar Rp24.808.593.880,93 tidak termasuk didalamnya sisa persediaan obat*expired* dan rusak sebesar Rp1.208.600.846,99 sudah dikeluarkan dari catatan persediaan yang berada pada SKPD

- Dinas Kesehatan sebesar Rp1.001.005.153,65
- RSUD sebesar Rp110.752.588,34

- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp96.843.105,00

Adapun persediaan obat *expired* dan rusak secara rinci sebagaimana tabel sebagai berikut ini:

Tabel 92 Daftar Obat Expired Dinas Kesehatan Date 2021

(dalam Rupiah)

NO.	PUSKESMAS	OBAT GFK	ALKON KB	TOTAL
1	ARJOSARI	27.173.066,40	10.000,00	27.183.066,40
2	BANDAR	10.494.177,33	2.408.980,00	12.903.157,33
3	BUBAKAN	26.004.025,00	2.498.835,00	28.502.860,00
4	CANDI	24.972.400,00	2.360.380,00	27.332.780,00
5	DONOROJO	14.246.823,00	2.616.135,00	16.862.958,00
6	GEMAHARJO	12.104.843,00	2.567.535,00	14.672.378,00
7	GONDOSARI	17.623.764,00	0,00	17.623.764,00
8	JERUK	10.054.039,00	0,00	10.054.039,00
9	KALAK	11.057.446,00	455.400,00	11.512.846,00
10	KEBONAGUNG	16.652.822,00	137.835,00	16.790.657,00
11	KEDUNGBENDO	6.568.692,74	2.408.980,00	8.977.672,74
12	KETROWONOJOYO	14.592.731,00	0,00	14.592.731,00
13	NAWANGAN	12.580.022,00	4.807.035,00	17.387.057,00
14	NGADIROJO	30.394.022,00	0,00	30.394.022,00
15	PACITAN	12.842.545,00	983.300,00	13.825.845,00
16	PAKIS BARU	16.807.487,00	465.400,00	17.272.887,00
17	PRINGKUKU	15.840.769,00	0,00	15.840.769,00
18	PUNUNG	21.953.582,00	2.521.300,00	24.474.882,00
19	SUDIMORO	10.969.224,00	0,00	10.969.224,00
20	SUKOREJO	31.509.252,00	4.076.735,00	35.585.987,00
21	TANJUNGSARI	37.868.464,00	0,00	37.868.464,00
22	TEGALOMBO	17.798.323,00	759.000,00	18.557.323,00
23	TULAKAN	17.800.619,18	0,00	17.800.619,18
24	WONOKARTO	12.224.539,00	0,00	12.224.539,00
25	GFK	541.794.626,00	0,00	541.794.626,00
	JUMLAH	**971.928.303,65**	**29.076.850,00**	**1.001.005.153,65**

Tabel 93 Daftar Obat Expired Date 2021 RSUD Date 2021

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
1	Actrapid 100 IU Inj	Vial	1,00	144.763,30	144.763,30
2	Adalat Oros 30 mg	Tablet	2,00	3.700,00	7.400,00
3	Allopurinol 300 mg	Tablet	42,00	434,28	18.239,76
4	Allopurinol 300 mg	Tablet	8,00	434,28	3.474,24
5	Almen 5 mg	Tablet	30,00	15.400,00	462.000,00
6	Amikasin Sulfat 250 mg Inj	Vial	1,00	52.272,00	52.272,00
7	Aminophylin 200 mg	Tablet	100,00	247,50	24.750,00
8	Amiodarone 50 mg/ ml Inj	Ampul	5,00	8.700,08	43.500,40
9	Amoxan 500 mg	Capsul	3,00	3.344,00	10.032,00
10	Angintriz	Tablet	29,00	2.805,00	81.345,00
11	Antalgin 500 mg	Tablet	35,00	171,18	5.991,30
12	Antasida Doen	Tablet	4,00	58,00	232,00
13	Arkine 2 mg	Tablet	11,00	660,00	7.260,00
14	Atropini Sulfas 2 ml Inj.	Ampul	27,00	1.639,00	44.253,00

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
15	Atropini Sulfas 2 ml Inj.	Ampul	2,00	1.639,00	3.278,00
16	Atropini Sulfas 2 ml Inj.	Ampul	21,00	1.639,00	34.419,00
17	Atropini Sulfas 2 ml Inj.	Ampul	36,00	1.639,00	59.004,00
18	Berotec MDI 100 mcg / puff Inh.	Can	1,00	83.190,00	83.190,00
19	Betametason Cream 0,1%	Tube	1,00	1.430,00	1.430,00
20	Betametason Cream 0,1%	Tube	16,00	1.430,00	22.880,00
21	Bisacodyl 5 mg	Tablet	105,00	319,00	33.495,00
22	Caladin Lotion 60 ml	Botol	1,00	15.500,00	15.500,00
23	Candepress 8 mg	Tablet	33,00	6.935,50	228.871,50
24	Captopril 25 mg	Tablet	4,00	119,00	476,00
25	Caviplex	Tablet	25,00	440,47	11.011,75
26	Cefadroxil 125 mg / 5 ml Syr	Botol	2,00	5.330,34	10.660,68
27	Cefat 500 mg	Capsul	6,00	10.601,52	63.609,12
28	Cefat Forte 250 mg / 5 ml Syr kering	Botol	2,00	73.672,50	147.345,00
29	Cefazolin 1 gr Inj	Vial	1,00	11.738,00	11.738,00
30	Cefixime dry syr 60 ml	Botol	1,00	12.078,00	12.078,00
31	Cendo Carpine 2 % TM	Botol	1,00	19.332,50	19.332,50
32	Cendo Catarlent 15 ml TM	Botol	5,00	31.160,94	155.804,70
33	Cendo Cenfresh 5 ml TM	Botol	1,00	35.485,31	35.485,31
34	Cendo Gentamycin 0,3% 5 ml TM	Botol	1,00	28.871,59	28.871,59
35	Cendo Hervis 3,5 gr SM	Tube	1,00	37.393,18	37.393,18
36	Cendo Midryatil 0,5% 5 ml TM	Botol	1,00	29.380,45	29.380,45
37	Cendo Tobroson 5 ml TM	Botol	2,00	47.059,39	94.118,78
38	Cendo Tropin 0,5% TM	Botol	3,00	11.447,00	34.341,00
39	Cendo Tropin 0,5% TM	Botol	3,00	11.446,97	34.340,91
40	Cendo Vosama MD	Ampul	43,00	3.586,70	154.228,10
41	Ceptik 100 mg	Capsul	10,00	24.828,39	248.283,90
42	Cetirizine Syr 60 ml	Botol	3,00	8.091,08	24.273,24
43	Cithicolin 250 mg Inj	Ampul	3,00	5.551,70	16.655,10
44	Clofritis 10 mg	Tablet	7,00	1.483,90	10.387,30
45	Colsancetin 1 gr Inj	Vial	2,00	10.157,40	20.314,80
46	Combivent Nebulizer	Ampul	12,00	4.550,00	54.600,00
47	Cotrimoxazol 480 mg	Tablet	38,00	274,21	10.419,98
48	Dialifer 100 mg Inj	Ampul	7,00	30.404,00	212.828,00
49	Disflatyl	Tablet	166,00	527,72	87.601,52
50	Durogesic 12 mcg/h	Lembar	1,00	108.454,06	108.454,06
51	Ephedrine HCl Inj	Ampul	5,00	8.569,00	42.845,00
52	Ephedrine HCl Inj	Ampul	9,00	8.569,00	77.121,00
53	Ephedrine HCl Inj	Ampul	3,00	8.569,00	25.707,00
54	Ephedrine HCl Inj	Ampul	1,00	8.569,00	8.569,00
55	Epinefrin bitatrat Inj.	Ampul	6,00	1.408,00	8.448,00
56	Epinefrin bitatrat Inj.	Ampul	2,00	1.408,00	2.816,00
57	Epinefrin bitatrat Inj.	Ampul	1,00	1.408,00	1.408,00
58	Epinefrin bitatrat Inj.	Ampul	11,00	1.408,00	15.488,00
59	Epinefrin bitatrat Inj.	Ampul	10,00	1.408,00	14.080,00
60	Erysanbe 200 mg	Tablet	4,75	1.640,65	7.793,09
61	Ethambutol 500 mg	Tablet	16,00	558,80	8.940,80
62	Evothyl 300 mg	Capsul	35,00	12.435,50	435.242,50
63	Fargoxin Inj	Ampul	1,00	25.300,00	25.300,00

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
64	Farnormin 50 mg	Tablet	10,00	327,44	3.274,40
65	Farpresin (Vasopressin) 20 mg Inj	Vial	8,00	79.279,00	634.232,00
66	FG Troches	Tablet	56,00	1.281,25	71.750,00
67	Fluconazole 150 mg	Capsul	11,00	18.720,02	205.920,22
68	Forneuro	Capsul	5,00	6.077,50	30.387,50
69	Futaderm Cream 10 gr	Tube	1,50	109.395,00	164.092,50
70	Galepsi 300 mg	Capsul	15,00	10.972,50	164.587,50
71	Galepsi 300 mg	Capsul	23,00	10.972,50	252.367,50
72	Galflux	Tablet	70,00	4.075,50	285.285,00
73	Gitas Inj	Ampul	5,00	29.225,62	146.128,10
74	Glauseta	Tablet	23,00	3.491,95	80.314,85
75	Gliclazide 80 mg	Tablet	42,00	235,00	9.870,00
76	Glyseril Guaiacolat/ GG 100 mg	Tablet	223,00	187,00	41.701,00
77	Glyseril Guaiacolat/ GG 100 mg	Tablet	200,00	198,00	39.600,00
78	Goflex	Tablet	8,00	7.700,00	61.600,00
79	Haloperidol 5 mg	Tablet	5,00	60,00	300,00
80	Ikalep (As. Valproat)	Tablet	360,00	3.557,82	1.280.815,20
81	Ikalep (As. Valproat)	Tablet	82,00	3.557,82	291.741,24
82	Ikaphen 100 mg	Capsul	98,00	1.316,70	129.036,60
83	Ikaphen inj	Ampul	5,00	83.077,50	415.387,50
84	Imodium	Tablet	56,00	7.295,66	408.556,96
85	Inbion	Capsul	8,00	2.241,52	17.932,16
86	Inbion	Capsul	17,00	2.241,52	38.105,84
87	Interpect 15 mg / 5 ml Syr	Botol	3,00	47.994,54	143.983,62
88	Invomit Inj	Ampul	4,00	41.291,25	165.165,00
89	Iopamiro 370/30.	Botol	1,00	226.413,42	226.413,42
90	Isosorbide Dinitrate 1 mg /ml Inj	Ampul	1,00	22.297,00	22.297,00
91	KA-EN 4 B 500 ml Inf	Botol	39,00	21.780,00	849.420,00
92	Kalcinol-N 5 gr	Tube	2,00	10.450,00	20.900,00
93	Kaltrofen 100 mg	Tablet	4,00	4.826,25	19.305,00
94	Ketoprofen 100 mg	Tablet	43,00	1.107,01	47.601,43
95	Kaltrofen 100 mg Supp	Supp	4,00	13.942,50	55.770,00
96	Kaltrofen 100 mg Supp	Supp	7,00	13.942,50	97.597,50
97	Kaltrofen 100 mg Supp	Supp	8,00	13.942,50	111.540,00
98	Kenalog In Orabase Gel	Tube	10,00	57.200,00	572.000,00
99	Kenalog In Orabase Gel	Tube	4,00	57.200,00	228.800,00
100	Ketorolac 10 mg Inj	Ampul	15,00	2.337,59	35.063,85
101	Lameson 125 mg Inj	Vial	11,00	99.275,00	1.092.025,00
102	Lameson 16 mg	Tablet	62,00	7.315,00	453.530,00
103	Lapicef 500 mg	Capsul	6,00	10.972,50	65.835,00
104	Lasix 40 mg	Tablet	31,00	5.398,20	167.344,20
105	Levica 50 mg/ 10 ml Inj	Ampul	3,00	49.500,00	148.500,00
106	Levocetirizine 5 mg	Tablet	27,00	3.657,50	98.752,50
107	Lidocain 2 % inj	Ampul	2,00	1.072,50	2.145,00
108	Lidocain 2 % inj	Ampul	3,00	1.072,50	3.217,50
109	Lidocain 2 % inj	Ampul	2,00	1.072,50	2.145,00
110	Lisinopril 10 mg	Tablet	27,00	259,00	6.993,00
111	Lisinopril 5 mg	Tablet	35,00	220,00	7.700,00
112	Loratadin 10 mg	Tablet	232,00	166,54	38.637,28

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
113	Martos 10 500 ml inf	Botol	21,00	32.033,10	672.695,10
114	Mefinal 500 mg	Tablet	6,00	1.395,08	8.370,48
115	Meptin Swinghaler	Tabung	3,00	82.000,00	246.000,00
116	Merlopam 2 mg	Tablet	28,00	3.500,75	98.021,00
117	Methyl Prednisolon 16 mg	Tablet	22,00	551,00	12.122,00
118	Mg SO4 40 % 25 ml Inf	Botol	1,00	3.796,00	3.796,00
119	Microgynon	Strip	15,00	15.203,10	228.046,50
120	Mucera	Tablet	52,00	1.240,80	64.521,60
121	Mucera	Tablet	50,00	1.240,80	62.040,00
122	N- Epi Inj	Ampul	3,00	79.200,00	237.600,00
123	Natrium Diklofenak 25 mg	Tablet	20,00	136,99	2.739,80
124	Natrium Phenithoina Inj	Ampul	1,00	3.696,82	3.696,82
125	Nephrolit	Capsul	11,00	627,41	6.901,51
126	Neurosanbe Inj	Ampul	2,00	5.716,15	11.432,30
127	Nitrokaf Retard 2,5 mg	Capsul	16,00	1.560,00	24.960,00
128	Nitrokaf Retard 2,5 mg	Capsul	20,00	1.560,00	31.200,00
129	Notrixum 10 mg/ 5 ml Inj	Ampul	3,00	66.000,00	198.000,00
130	Nudep 50 mg	Tablet	12,00	14.630,00	175.560,00
131	Nufit	Tablet	17,00	5.183,75	88.123,75
132	Opus	Tablet	50,00	5.747,50	287.375,00
133	Oxytetracyclin 1 % 3,5 g SM	Tube	3,00	2.667,50	8.002,50
134	Oxytetracyclin 1 % 3,5 g SM	Tube	4,00	2.667,50	10.670,00
135	Oxytetracyclin 3 % 5 gr SK	Tube	5,00	2.007,02	10.035,10
136	Pantoprazole 20 mg	Tablet	50,00	8.360,00	418.000,00
137	Pantoprazole 20 mg	Tablet	56,00	8.360,00	468.160,00
138	Pehacain Inj.	Ampul	3,00	2.801,75	8.405,25
139	Perifas	Tablet	38,00	2.068,00	78.584,00
140	Perifas	Tablet	75,00	2.068,00	155.100,00
141	Permanganas Kalicus 5 gram (PK)	Pot	1,00	4.322,13	4.322,13
142	Pirofel Cream	Tube	1,00	18.496,50	18.496,50
143	Platof	Tablet	11,00	4.065,06	44.715,66
144	Pondex 60 ml Syr	Botol	1,00	11.275,00	11.275,00
145	Pro TB 2.	Tablet	115,00	6.159,31	708.320,65
146	Profolat 400 mcg	Tablet	7,00	55,00	385,00
147	Profolat 400 mcg	Tablet	2,00	55,00	110,00
148	Prolacta DHA Baby	Capsul	6,00	5.390,00	32.340,00
149	Prolacta DHA Baby	Capsul	5,00	5.390,00	26.950,00
150	Prostam SR	Tablet	15,00	9.215,80	138.237,00
151	Prostigmin inj	Ampul	7,00	19.646,00	137.522,00
152	Pyridoxin 10 mg tab (Vit.B6)	Tablet	57,00	131,00	7.467,00
153	Q-cef 60 ml Syr Kering	Botol	1,00	51.205,00	51.205,00
154	Q-cef 60 ml Syr Kering	Botol	7,00	51.205,00	358.435,00
155	Ringers + Dextrose 500 ml Inf (Widrata)	Botol	9,00	8.891,99	80.027,91
156	Ringers + Dextrose 500 ml Inf (Widrata)	Botol	17,00	8.892,00	151.164,00
157	Ringers + Dextrose 500 ml Inf (Widrata)	Botol	40,00	8.892,00	355.680,00
158	Salofalk	Tablet	234,00	3.575,00	836.550,00
159	Sequest	Sachet	22,00	18.562,50	408.375,00
160	Sertraline Hydrochloride 50 mg	Tablet	2,00	1.595,00	3.190,00
161	Sifrol 0,75 mg	Tablet	10,00	13.200,00	132.000,00

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
162	Simvastatin 10 mg	Tablet	74,50	117,00	8.716,50
163	Spiranter 500 mg	Tablet	4,00	7.956,85	31.827,40
164	Spironolacton 100 mg	Tablet	44,00	575,00	25.300,00
165	Starxon 1 gr Inj	Vial	2,00	254.718,75	509.437,50
166	Stenirol 125 mg Inj	Vial	1,00	94.050,00	94.050,00
167	Sulcolon	Capsul	29,00	7.469,00	216.601,00
168	Sulfasalazine 500 mg	Tablet	69,00	1.518,00	104.742,00
169	Sulfitis 500 mg	Tablet	3,00	2.860,00	8.580,00
170	TB Vit 6.	Tablet	13,20	825,00	10.890,00
171	Teosal	Tablet	138,00	209,00	28.842,00
172	Teranol 10 mg	Tablet	10,00	5.747,50	57.475,00
173	Tetracycline 500 mg	Capsul	80,00	323,00	25.840,00
174	Thiamphenicol 500 mg	Capsul	325,00	858,00	278.850,00
175	Thiamycin 500 mg	Capsul	60,00	4.450,87	267.052,20
176	Thyrozol 10 mg	Tablet	6,50	1.286,00	8.359,00
177	Tiaryt Inj	Ampul	2,00	28.600,00	57.200,00
178	Tomit Inj	Ampul	3,00	12.601,91	37.805,73
179	Tramadol Inj	Ampul	10,00	5.500,00	55.000,00
180	Transpulmin Baby Balsam	Tube	1,00	41.717,50	41.717,50
181	Tremenza	Tablet	0,50	1.600,50	800,25
182	Trogyl 500 mg	Tablet	8,00	1.861,20	14.889,60
183	Trogyl 500 mg	Sachet	4,00	11.618,75	46.475,00
184	Trombogel 10 gr	Tube	2,00	36.432,00	72.864,00
185	Urdahex	Capsul	11,60	9.831,25	114.042,50
186	Utrogestan 100 mg	Tablet	10,00	12.540,00	125.400,00
187	Utrogestan 100 mg	Tablet	188,00	12.540,00	2.357.520,00
188	Vagistin Ovula	Ovula	1,00	15.620,00	15.620,00
189	Vagistin Ovula	Ovula	3,00	15.620,00	46.860,00
190	Valisanbe 5 mg Inj	Ampul	3,00	24.000,00	72.000,00
191	Vancomycin 500 mg Inj	Vial	23,00	132.950,00	3.057.850,00
192	Vitamin A (IPI) 2000 ui	Tablet	494,00	111,11	54.888,34
193	Vitamin B 12 (Sianocobalamin) 50 mcg	Tablet	12,00	46,00	552,00
194	Bite Block for Tracheal Tubes 6,0- 6,5	Pcs	2,00	74.360,00	148.720,00
195	Bite Block for Tracheal Tubes 7,0- 7,5	Pcs	4,00	74.360,00	297.440,00
196	Colostomy Bag 2	Pcs	3,00	3.960,00	11.880,00
197	Colostomy Bag 3	Pcs	3,00	3.960,00	11.880,00
198	Condom Cathteter M	Pcs	2,00	6.600,00	13.200,00
199	CVC SET : 2 LUMEN 7FR x 20 cm AGB	Set	2,00	459.111,00	918.222,00
200	Disposible Syringe 50cc L.Tengah with Luer Lock	Pcs	14,00	8.044,96	112.629,44
201	ECG Elektroda	Pcs	12,00	2.475,00	29.700,00
202	ETT no. 5,5mm (PARKER)	Pcs	1,00	24.999,99	24.999,99
203	ETT no. 6,0mm (PARKER)	Pcs	5,00	24.999,99	124.999,95
204	ETT no. 6,5mm (PARKER)	Pcs	2,00	24.999,99	49.999,98
205	ETT Non Kingking curved No.4	Pcs	1,00	117.403,00	117.403,00
206	ETT Non Kingking curved No.4,5	Pcs	1,00	117.403,00	117.403,00
207	ETT Non Kingking curved No.5	Pcs	4,00	117.403,00	469.612,00
208	ETT Non Kingking Curved No.5,5	Pcs	2,00	117.403,00	234.806,00
209	ETT Non Kingking curved No.6,5	Pcs	5,00	117.403,00	587.015,00
210	ETT Oral No. 5,0 Preformed / Palato No Cuff	Pcs	2,00	99.000,00	198.000,00

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
211	ETT Oral No. 5,0 Preformed / Palato With Cuff	Pcs	4,00	106.480,00	425.920,00
212	ETT Oral No. 5,5 Preformed / Palato With Cuff	Pcs	3,00	106.480,00	319.440,00
213	Feeding Tube No. 5	Pcs	5,00	14.081,37	70.406,85
214	Flashcast Pop 15 cm (Gip)	Roll	16,00	37.341,11	597.457,76
215	Flashcast Pop 7,5 cm (Gip)	Roll	19,00	21.126,38	401.401,22
216	Folley Catheter Ch-14 Silicone	Pcs	1,00	188.650,00	188.650,00
217	Guedel / Mayo 100 mm (Merah)	Pcs	2,00	10.560,00	21.120,00
218	Guedel / Mayo 60 mm (Hitam)	Pcs	1,00	10.560,00	10.560,00
219	Guedel / Mayo 70 mm (Putih)	Pcs	1,00	11.440,00	11.440,00
220	IO-Blue 1 ml (Trypan Blue)	Vial	12,00	74.800,00	897.600,00
221	IO-Blue 1 ml (Trypan Blue)	Vial	20,00	74.800,00	1.496.000,00
222	IO-Chol 1 ml (Carbhacol)	Vial	11,00	74.800,00	822.800,00
223	IO-Chol 1 ml (Carbhacol)	Vial	10,00	74.800,00	748.000,00
224	IO-GEL Methyl Cellullose 2 % HPMC 2 ml	PFS	1,00	152.680,00	152.680,00
225	IO-GEL Methyl Cellullose 2 % HPMC 3 ml	PFS	3,00	260.040,00	780.120,00
226	IO-GEL Methyl Cellullose 2 % HPMC 3 ml	PFS	10,00	250.030,00	2.500.300,00
227	IOL Foldable Intraocular Lens Power -20.5	Pcs	2,00	429.000,00	858.000,00
228	IO-LON Hyaluronate Acid	PFS	3,00	607.970,00	1.823.910,00
229	IO-LON Hyaluronate Acid	PFS	1,00	607.970,00	607.970,00
230	IO-LON Hyaluronate Acid	PFS	11,00	607.970,00	6.687.670,00
231	Jarum SE TH 24F Mani	Pak	1,00	94.930,00	94.930,00
232	Jarum SE TH 24F Mani	Pak	1,00	104.500,00	104.500,00
233	Jarum SE TH 32 Mani	Pak	1,00	104.500,00	104.500,00
234	Jarum SE TH 55	Pak	2,00	250.000,00	500.000,00
235	Jarum SE TH 55	Pak	1,00	104.500,00	104.500,00
236	Laryngeal / Crystal Airway Mask No. 2,5	Pcs	1,00	222.904,00	222.904,00
237	Masker Oxygen / Canula Anak	Pcs	8,00	23.650,00	189.200,00
238	Methylen Blue 100 ml	Botol	10,00	20.000,00	200.000,00
239	Nasopharyngeal Airway Standart PVC No. 7,0	Pcs	3,00	149.600,00	448.800,00
240	Poly Propylene 7/0 2x HR 10mm	Pcs	9,00	105.921,75	953.295,75
241	Postofix 10 x 10	Pcs	8,00	14.088,69	112.709,52
242	Straight Knifes	Pcs	1,00	214.700,00	214.700,00
243	Straight Knifes	Pcs	3,00	214.700,00	644.100,00
244	Straight Knifes	Pcs	30,00	214.700,00	6.441.000,00
245	Suction Catheter No. 10 (Hitam)	Pcs	4,00	2.539,90	10.159,60
246	Surflo No. 20 G	Pcs	1,00	8.354,61	8.354,61
247	Surgicel 4 x 8"	Pcs	8,00	160.416,67	1.283.333,36
248	Tensoplast STK Anak 2"	Kit	1,00	167.789,60	167.789,60
249	Tracheostomy Tube With Cuff + Set Size 5.0	Pcs	2,00	255.728,00	511.456,00
250	W- Care AH (Wound Dressing AH)	Pcs	7,00	50.578,00	354.046,00
251	W- Care DC (Wound Dressing DC)	Pcs	4,00	55.176,00	220.704,00
252	Lamivudine 150mg (Progam)	Tablet	24,00	1.560,00	37.440,00
253	OAT Anti TBC kt. Anak	Paket	2,00	248.120,00	496.240,00
254	OAT Anti TBC kt. Anak	Paket	2,00	248.120,00	496.240,00
255	OAT Kat I Intensif Dewasa	Tablet	336,00	1.236,52	415.470,72
256	Triple FDC (TDF+3TC+EFV)	Tablet	4,00	2.801,67	11.206,68
257	Vaksin BCG	Vial	5,00	56.360,00	281.800,00
258	Vaksin BCG	Vial	15,00	56.360,00	845.400,00
259	Vaksin BCG	Vial	5,00	60.140,00	300.700,00

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
260	Vaksin DPT HB Hib	Vial	1,00	84.282,00	84.282,00
261	Vaksin MR	Vial	10,00	151.150,00	1.511.500,00
262	Vaksin Polio 10 Dosis	Vial	10,00	19.350,00	193.500,00
263	ZDV+3T Zidovudine(300) Lamivudine	Tablet	327,00	3.700,00	1.209.900,00
264	ZDV+3T Zidovudine(300) Lamivudine	Tablet	1.090,00	3.700,00	4.033.000,00
265	Zidovudine 100 mg	Capsul	86,40	1.700,00	146.880,00
266	Condom Program	Pcs	1.999,00	358,00	715.642,00
267	DBS Collection Kit	Kit	20,00	17.848,00	356.960,00
268	Rapid Diagnostar DS HIV	Pcs	25,00	13.353,00	333.825,00
269	Rapid Test HIV SD	Pcs	300,00	11.975,00	3.592.500,00
270	Rapid Test HIV SD	Pcs	250,00	11.975,00	2.993.750,00
JUMLAH					**82.002.588,34**

Tabel 94 Daftar Bahan Laboratorium Expired Date 2021 RSUD Date 2021

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	QTY	HARGA	JUMLAH
1	RDT Covid-19	Pcs	210	80.000	16.800.000
2	RDT Covid-19	Pcs	115	40.000	4.600.000
3	SARS-Cov-2 IgM/IgG Antibody Rapid Test ZYBIO	Pcs	175	42.000	7.350.000
	JUMLAH				**28.750.000**

Tabel 95 Daftar Obat Expired Date 2021KBPP

(dalam Rupiah)

NAMA BARANG	HARGA
Alkohol Swab	50.000,00
Pil KB	30.653.400,00
Kondom	1.344.000,00
One Clean	1.051.600,00
Ultra One Test Hamil	319.935,00
Spuit	1.433.700,00
Removal Implan kit	9.390.150,00
Suntik	52.600.320,00
JUMLAH	**96.843.105,00**

1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.143.908.853,75 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 terdiri dari.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.970.847.918,75	8.347.366.953,06	(376.519.034,31)
InvestasiJangkaPanjangPermanen	50.173.060.935,00	49.309.318.893,11	863.742.041,89
Jumlah	**58.143.908.853,75**	**57.656.685.846,17**	**487.223.007,58**

1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Bergulir	9.849.133.800,00	9.849.133.800,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.878.285.881,25)	(1.501.766.846,94)	(376.519.034,31)
Jumlah	**7.970.847.918,75**	**8.347.366.953,06**	**(376.519.034,31)**

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 merupakan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp9.849.133.800,00 dengan nilai penyisihan (Dana Bergulir Diragukan Tertagih) sebesar Rp1.878.285.881,25.

Tabel 96 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir

(dalam Rupiah)

No	Th	Sasaran						Jumlah (Rp)
		Koperasi		Lembaga Keuangan Mikro		Usaha Kecil Mikro		
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	
1	2002	10	200.000.000,00	10	100.000.000,00	66	329.700.000,00	629.700.000,00
2	2003	30	400.000.000,00	10	63.000.000,00	110	320.000.000,00	783.000.000,00
3	2004	15	300.000.000,00	5	50.000.000,00	100	458.000.000,00	808.000.000,00
4	2005	5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	86	480.000.000,00	680.000.000,00
5	2006	7	285.000.000,00	10	100.000.000,00	92	478.000.000,00	863.000.000,00
6	2007	10	368.000.000,00	17	465.000.000,00	181	1.315.000.000,00	2.148.000.000,00
7	2008	-	-	50	50.000.000,00	40	180.000.000,00	230.000.000,00
8	2009	79	125.000.000,00	3	45.000.000,00	27	152.000.000,00	322.000.000,00
9	2010	-	0,00	-	0,00	29	585.433.800,00	585.433.800,00
10	2011	4	70.000.000,00	2	20.000.000,00	31	260.000.000,00	350.000.000,00
11	2012	8	298.000.000,00	13	52.000.000,00	-	0,00	350.000.000,00
12	2013	5	120.000.000,00	1	25.000.000,00	30	205.000.000,00	350.000.000,00
13	2014	1	10.000.000,00	-	0,00	55	340.000.000,00	350.000.000,00
14	2015	5	135.000.000,00	1	20.000.000,00	40	195.000.000,00	350.000.000,00
15	2016	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	60	320.000.000,00	350.000.000,00
16	2017	3	80.000.000,00			29	270.000.000,00	350.000.000,00
17	2018	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
18	2019	-	350.000.000,00	-	0,00	-	0,00	350.000.000,00
19	2020	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
20	2021	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	Jumlah	**183**	**2.906.000.000,00**	**128**	**1.055.000.000,00**	**976**	**5.888.133.800,00**	**9.849.133.800,00**

Dana Bergulir Koperasi yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut berupa kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah , Kelompok Simpan Pinjam Masyarakat dan Koperasi yang berasal dari Bantuan Perkuatan Modal Bergulir dari tahun 2002 s/d 2021 sebesar Rp9.849.133.800,00.Penambahan Investasi Non Permanen Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

Adapun sasaran dari Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dari tahun 2002 s/d 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir Koperasi, yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp9.849.133.800,00 terdapat pada:

1) Rekening Bank yaitu rekening Giro Umum DinasKoperasidan Usaha Mikropada Bank JatimNomorRekening0211016370 sebesar Rp1.778.384.566,00;

2) Nasabah sebesar Rp 8.070.749.234,00.

Penghitungan Penyisihan Dana Bergulir diatur melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah.Penyisihan Dana Bergulir dicatat sebesar nilai Dana Bergulir yang diperkirakan tidak dapat tertagih sesuai umurnya. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Pacitan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0.5%,

2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 3 tahun dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,

3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dari >3 tahun - 5 tahun dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit Belum melunasi, penyisihan 50%,

4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih sebesar Rp 1.878.285.881,25 yang pelaporannya pada Neraca PPKD dan teknisnya dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penyisihan terhadap Investasi Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang posisinya berada pada nasabah sebesar Rp8.070.749.234,17 dengan rincian sebagai berikut.

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori lancar Rp 24.957.500,00
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kurang lancar (10%) Rp 82.959.458,09
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori diragukan (50%) Rp 479.285.730,14
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori macet (100%) Rp 1.291.083.193,02

Adapun NRV atas investasi dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 97 NRV Investasi Dana Bergulir

(dalam Rupiah)

Uraian	Total	Kategori Investasi Dana Bergulir			
		Lancar (0 s/d 1 Th)	KrgLancar (>1 s/d 3 Th)	Diragukan (>3 s/d 5 Th)	Macet (> 5 Th)
Jumlah Investasi Non Permanen	8.070.749.234,17	4.991.500.000,00	829.594.580,88	958.571.460,27	1.291.083.193,02
% Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	(1.878.285.881,25)	(24.957.500,00)	(82.959.458,09)	(479.285.730,14)	(1.291.083.193,02)
NRV atas Investasi Dana Bergulir di Nasabah	6.192.463.352,92	4.966.542.500,00	746.635.122,79	479.285.730,13	0,00

1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Investasi Permanen	**50.173.060.935,00**	**49.309.318.893,11**	**863.742.041,89**

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp**50.173.060.935,00** terdiri dari saldo awal tahun 2020 sebesar Rp49.309.318.893,11, koreksi pencatatan menyesuaikan perhitungan Hasil Audit Independen atas Laporan Keuangan PDAM sebesar Rp1,11,00 dan adanya penambahan penyertaan dari laba PDAM sebesar Rp863.742.043,00

Adapun rincian investasi permanen Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 98 Investasi Permanen

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Desember 2020(Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
BPD Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
BPR Jatim	4.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000.000,00
PDAM	31.742.904.588,11	(1,11)	863.742.043,00	0,00	32.606.646.630,00
Perusda Aneka Usaha	61.346.555,00	0,00	0,00	0,00	61.346.555,00
Jumlah	**49.309.318.893,11**	**(1,11)**	**863.742.043,00**	**0,00**	**50.173.060.935,00**

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2021 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 sebesar 0,99%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya.Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100%.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada PDAM dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00

   Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp13.380.067.750,00. Selanjutnya tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

   Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2012, maka mekanisme pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO, pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek. Namun demikian, untuk tahun 2015 ketersediaan modal pada Bank Jatim masih mencukupi, sehingga belum menerbitkan saham untuk dijual. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah 53.520.271 lembar saham.

Tabel 99 Rincian Investasi Bank Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	2.423.102.608,00		2.423.102.608,00	ProsentaseKepemilikan Se-JawaTimur	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	750.000.000,00		3.173.102.608,00	0,47%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	750.000.000,00		3.923.102.608,00	0,56%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	750.497.648,89		4.673.600.256,89	0,58%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	1.500.000.000,00		6.173.600.256,89	0,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	7.207.067.750,00	600.256,89	13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		13.380.067.750,00	**0,36%**	Cost Metode(MetodeBiaya)

2) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.125.000.000,00 dan tidak ada penambahan investasi tahun 2021 dikarenakan hasil dari analisis investasi yang tidak dapat menyatakan suatu kesimpulan atas kelayakan investasi di BPR Jatim. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah 41.250 lembar saham yaitu 0,99%.

Tabel 100 Investasi Permanen pada BPR Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	525.000.000,00		525.000.000,00	0,46%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	300.000.000,00		825.000.000,00	0,94%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	300.000.000,00		1.125.000.000,00	1,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	300.000.000,00		1.425.000.000,00	1,65%	Cost Metode(MetodeBiaya)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
2011	300.000.000,00		1.725.000.000,00	1,44%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	300.000.000,00		2.025.000.000,00	1,60%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	300.000.000,00		2.325.000.000,00	1,74%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	300.000.000,00		2.625.000.000,00	1,40%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	300.000.000,00		2.925.000.000,00	0,73%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	300.000.000,00		3.225.000.000,00	0,79%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	300.000.000,00		3.525.000.000,00	0,86%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	300.000.000,00		3.825.000.000,00	0,92%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	300.000.000,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		4.125.000.000,00	0,99 %	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		4.125.000.000,00	**0,99%**	Cost Metode(MetodeBiaya)

3) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp32.606.646.630,00

Tabel 101 Investasi Permanen pada PDAM

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi SaldoAwal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan	Saldo 31 Des 2021 (Rp)
PDAM	31.742.904.588,11	(1,11)	863.742.043,00	0,00	32.606.646.630,00
Jumlah	**31.742.904.588,11**	**(1,11)**	**863.742.043,00**	**0,00**	**32.606.646.630,00**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, dijelaskan adanya penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang pada Tahun 2021-2023 sebesar Rp. 2.010.000.000,00.

Pada Tahun 2021 tidak ada penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dikarenakan pada awal Tahun 2021 masih pada tahab melaksanakan kajian investasi sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp32.606.646.630,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp31.742.904.588,11, koreksi atas ekuitas awal sebesar (1,11) menyesuaikan laporan keuangan audited PDAM dan ada penambahan investasi dari laba tahun berjalan sebesar Rp863.742.043,00 yang menambah nilai investasi atas nilaii kepemilikan 100%

Adapun rincian penambahan investasi pada PDAM dari Tahun 2007 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 102 Rincian Investasi PDAM

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	SaldoInvestasi
saldo 2007	6.374.304.823,20		6.374.304.823,20
2008	250.000.000,00		6.624.304.823,20
2009	822.000.000,00		7.446.304.823,20
2010	100.000.000,00		7.546.304.823,20
2011	100.000.000,00	(5.103.266.911,04)	2.543.037.912,16
2012	100.000.000,00	(2.643.037.912,16)	0,00

2013	420.000.000,00		420.000.000,00
2014	100.000.000,00		520.000.000,00
2015	300.000.000,00		820.000.000,00
2016	300.000.000,00		1.120.000.000,00
2017	300.000.000,00		1.420.000.000,00
koreksi	7.746.304.823,20		9.166.304.823,20
2018	300.000.000,00		9.466.304.823,20
2019	300.000.000,00		9.766.304.823,20
koreksi	21.656.930.503,00		31.423.235.326,20
2020	0,00	319.669.261,91	31.742.904.588,11
koreksi		(1,11)	31.742.904.587,00
2021	0,00	863.742.043,00	32.606.646.630,00

Adapun Laporan Keuangan Audited PDAM Tahun Anggaran 2021 disajikan pada **Lampiran 12.**

4) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp61.346.555,00

Berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Surabaya, Nomor 00129/3/0067/AU.2/11/1321-21/1/XII/2019 perihal Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 serta Laporan Auditor Independen dan Management Letter Hasil Audited Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Nomor: 00129A/ML/KAP.BSN/XII/2019 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dengan hasil kesimpulan bahwa Perusahan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sejak awal berdiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, usaha yang dijalankan tidak menguntungkan sehingga gagal mengembangkan modalnya. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan memutuskan untuk menghentikan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), dan untuk segala aset/kekayaan PDAU diserahkan kepada Pemerintah Daerah selaku Pemilik sesuai dengan Surat Bupati Pacitan Nomor 501/029/408.16/2020 Tentang Pemberhentian Operasional PDAU Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Audited PDAU Tahun Anggaran 2018 disajikan pada **Lampiran 13.**

Adapun Aset/Kekayaan yang harus diserahkan:

a. Keuangan
   Adapun aset keuangan yang harus diserahkan berupa:

-	Kas	Rp	54.851,00
-	Bank	Rp	2.466.067,00
-	Piutang	Rp	4.800.000,00
-	Biaya Dibayar Dimuka	Rp	1.500.000,00
-	Aset Tetap (Nilai Wajar)	Rp	32.500.000,00
-	Aset Lain-lain	Rp	20.025.637,00
	Total	Rp	61.346.555,00

Adapun jenis kondisi aset tetap/inventaris PDAU per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

Tabel 103 Rincian Aset Tetap/Inventaris PDAU

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Konsisi
1	Meja Direktur	1	Rusak Ringan
2	Sekat Ruangan	1	Rusak Ringan
3	Kaca Pintu	1	Rusak Ringan
4	Neon Box	1	Rusak Ringan
5	Note Book	2	Baik
6	Kursi Direktur	1	Baik
7	Meja Rapat	1	Rusak Ringan
8	Kursi Rapat	2	Baik
9	Oven Pengering	1	Rusak Berat
10	Oven chip chasava unit agrobisnis	1	Rusak Berat
11	Pembuatan Indik dan perlengkapan chip chasava unit agrobinsnis	1	Rusak Berat
12	widik Unit Agribisnis	1	RusakBerat
13	Bedeng nama unit agrobisnis	1	Rusak Berat
14	Pengadaan Meubelair Kursi Rapat	2	Rusak Ringan
15	Meja kerja 2 Unit	2	Rusak Ringan
16	Pengadaan Mesin fex	1	Rusak Ringan
17	Televisi	1	Rusak Ringan
18	Meja kerja 2 Unit	2	Baik
19	Box Arsip	1	Rusak Ringan
20	Kipas Angin	1	Rusak Berat
21	Meubelair Kursi rapat	2	Baik
22	Mesin Pengolah air siap minum	1	Baik
23	Pembelian Tangga besi 240	1	Baik
24	Pembelian bak besar	1	Baik
25	Pembelian Tangga besi 170	1	Baik
26	Pembelian Tempat sampah dan Gelas Polos	1	Baik
27	Pembelian Tangga besi 171	1	Baik
28	Pembelian Tiang Penyangga Galon	1	Rusak Berat
29	Pembelian Pesawat Telepon	1	Rusak Berat
30	Pembelian Wastafel,sifon,kran,fiser,baut,fiser semen PC dan saringan wasbak	1	Baik
31	Pembelian hairdrayer untuk penyegelan	1	Rusak Berat
32	Etalase KBU (1 Pengisian,1 Pencucian)	1	Rusak Berat
33	Pembelian Mesin Sikat Galon	1	Baik
34	Pembelian Housing Filter Bening, Houseing Filter Rasa, Sprayer, dan SelenoitKran Pengisian	1	Rusak Berat
35	Tandon air	1	Baik
36	Pembelian Printer Canon Pixma MP237 dan infus	1	Rusak Berat
37	Tandon air	1	Baik
38	Pintu Gawang	1	Baik
39	Kamera Digital	2	Baik

1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap	**1.900.050.923.792,08**	**1.889.917.534.410,68**	**10.133.389.381,40**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 meliputi tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Adapun rincian mutasi aset tetap per golongan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 104 Mutasi Aset Tetap

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	**TANAH**	**501.387.325.673,96**	**8.325.613.275,00**	**2.509.235.862,08**	**507.203.703.086,88**
1	Tanah	501.387.325.673,96	8.325.613.275,00	2.509.235.862,08	507.203.703.086,88
KIB B	**PERALATAN DAN MESIN**	**495.194.720.921,10**	**100.758.877.178,57**	**48.694.118.721,71**	**547.259.479.377,96**
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	30.219.151.058,49	13.705.772.583,00	12.620.154.287,00	31.304.769.354,49
3	Alat Angkutan	88.890.215.050,90	6.099.260.487,00	4.668.207.568,00	90.321.267.969,90
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.677.606.275,00	132.635.444,00	133.605.900,00	9.676.635.819,00
5	Alat Pertanian	3.505.815.380,00	795.490.403,00	737.326.750,00	3.563.979.033,00
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	88.714.791.782,03	12.930.832.450,21	3.724.640.746,20	97.920.983.486,04
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13.120.612.212,08	1.346.297.970,90	836.824.427,90	13.630.085.755,08
8	Alat Kedokteran	126.570.217.920,00	16.294.498.335,00	2.035.565.542,95	140.829.150.712,05
9	Alat Laboratorium	37.803.303.104,70	22.830.840.966,86	19.379.821.803,00	41.254.322.268,56
10	Alat Keamanan	894.703.750,00	22.120.000,00	136.956.000,00	779.867.750,00
11	Alat Komputer	86.914.919.913,05	25.520.987.547,50	3.958.657.427,66	108.477.250.032,89
12	Alat Eksplorasi	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
13	Alat Pengeboran	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	26.969.800,00	218.381.000,00	31.625.000,00	213.725.800,00
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	1.401.446.572,00	66.363.300,00	111.251.317,00	1.356.558.555,00
17	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Peralatan Proses/Produksi	302.876.000,00	24.958.560,00	0,00	327.834.560,00
19	Rambu-Rambu	5.420.422.101,53	205.783.000,00	186.835.000,00	5.439.370.101,53
20	Peralatan Olahraga	1.725.070.001,32	564.325.131,10	132.316.952,00	2.157.078.180,42
KIB C	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**870.684.878.696,98**	**73.179.740.351,96**	**18.703.341.820,92**	**925.161.277.228,02**
21	Bangunan Gedung	842.177.277.893,24	72.713.832.106,57	18.431.588.488,31	896.459.521.511,50
22	Monumen	5.432.113.600,00	0,00	0,00	5.432.113.600,00
23	Bangunan Menara	2.418.868.464,64	0,00	0,00	2.418.868.464,64
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.656.618.739,10	465.908.245,39	271.753.332,61	20.850.773.651,88
KIB D	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**1.613.337.379.468,73**	**87.401.365.584,58**	**338.147.500,00**	**1.700.400.597.553,31**

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
25	Jalan dan Jembatan	1.157.306.287.191,50	74.417.672.055,78	0,00	1.231.723.959.247,28
26	Bangunan Air	268.551.354.097,62	11.766.918.147,96	338.147.500,00	279.980.124.745,58
27	Instalasi	20.979.197.431,21	705.676.380,84	0,00	21.684.873.812,05
28	Jaringan	166.500.540.748,40	511.099.000,00	0,00	167.011.639.748,40
KIB E	**ASET TETAP LAINNYA**	**77.803.496.934,19**	**3.522.401.624,96**	**3.640.110.225,72**	**77.685.788.333,43**
29	Bahan Perpustakaan	67.252.110.175,12	1.311.863.085,00	421.592.845,00	68.142.380.415,12
30	Bahan Bercorak Kebudayaan	8.884.987.318,30	247.830.000,00	86.625.600,00	9.046.191.718,30
31	Hewan	180.634.000,00	0,00	34.000.000,00	146.634.000,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	350.182.200,00	0,00	0,00	350.182.200,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.135.183.240,77	1.962.708.539,96	3.097.891.780,72	0,01
KIB F	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**39.272.288.818,07**	**16.208.850.984,78**	**6.308.328.485,99**	**49.172.811.316,86**
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.272.288.818,07	16.208.850.984,78	6.308.328.485,99	49.172.811.316,86
	AKUMULASI PENYUSUTAN	**(1.707.762.556.102,35)**	**(260.150.798.575,87)**	**(61.080.621.573,84)**	**(1.906.832.733.104,38)**
	JUMLAH ASET TETAP	**1.889.917.534.410,68**	**29.246.050.423,98**	**19.112.661.042,58**	**1.900.050.923.792,08**

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.900.050.923.792,08 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**Rp**	**3.597.680.090.513,03**
Penambahan Tahun 2021	Rp	289.396.848.999,85
Jumlah	Rp	3.887.076.939.512,88
Pengurangan Tahun 2021	Rp	(80.193.282.616,42)
Aset Tetap per 31 Desember 2021	Rp	3.806.883.656.896,46
Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Rp	(1.906.832.733.104,38)
Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**1.900.050.923.792,08**

Nilai Aset *extracomtabel* dan akumulasi penyusutan pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagaimana **Lampiran 7** dan **Lampiran 8.**

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan *entry* data dan penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tanah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tanah	**507.203.703.086,88**	**501.387.325.673,96**	**5.816.377.412,92**

Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 105 Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	501.387.325.673,96	8.325.613.275,00	2.509.235.862,08	507.203.703.086,88
JUMLAH	**501.387.325.673,96**	**8.325.613.275,00**	**2.509.235.862,08**	**507.203.703.086,88**

Saldo akhir tersebut termasuk didalamnya terdapat Tanah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dobel Sertifikat atas nama Tumilah dan sudah diklarifikasi oleh BPN untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan menindaklanjuti dengan melepaskan Hak Pakai No. 105/ Kelurahan Sidoharjo Senilai Rp130.000.000,00 yang merupakan Lebih Catat Tanah.

Dengan rincian mutasi aset tanah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 106 Mutasi Tanah Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	29.935.207.687,00	2.200.162.425,00	0,00	32.135.370.112,00
Dinas Kesehatan	8.621.704.935,00	0,00	97.225.000,00	8.524.479.935,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.698.386.000,00	97.225.000,00	0,00	8.795.611.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.666.100.128,00	16.549.750,00	532.782.000,00	113.149.867.878,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.240.954.200,00	3.488.277.800,00	0,00	4.729.232.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Dinas Sosial	3.045.517.000,00	0,00	0,00	3.045.517.000,00
Dinas Pangan	912.500.000,00	0,00	0,00	912.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.244.417.663,00	0,00	0,00	5.244.417.663,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	910.261.000,00	0,00	0,00	910.261.000,00
Dinas Perhubungan	7.121.359.062,00	0,00	0,00	7.121.359.062,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.921.144.012,00	0,00	0,00	3.921.144.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00
Dinas Perpustakaan	472.650.000,00	945.750.000,00	0,00	1.418.400.000,00
Dinas Perikanan	852.185.000,00	135.556.300,00	0,00	987.741.300,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	112.534.489.104,07	532.782.000,00	374.128.887,08	112.693.142.216,99
Dinas Pertanian	19.430.818.750,00	0,00	0,00	19.430.818.750,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.334.066.810,00	0,00	0,00	25.334.066.810,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.887.145.436,94	198.140.000,00	1.447.599.975,00	48.637.685.461,94

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	493.250.000,00	0,00	0,00	493.250.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Inspektorat	261.100.000,00	0,00	0,00	261.100.000,00
Sekretariat Daerah	58.524.161.707,95	0,00	0,00	58.524.161.707,95
Sekretariat DPRD	2.007.850.000,00	0,00	0,00	2.007.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	392.250.000,00	0,00	0,00	392.250.000,00
Kecamatan Donorojo	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
Kecamatan Punung	796.250.000,00	0,00	0,00	796.250.000,00
Kecamatan Pringkuku	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	0,00
Kecamatan Pacitan	40.859.782.178,00	711.170.000,00	0,00	41.570.952.178,00
Kecamatan Kebonagung	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Kecamatan Arjosari	297.000.000,00	0,00	0,00	297.000.000,00
Kecamatan Nawangan	237.450.000,00	0,00	0,00	237.450.000,00
Kecamatan Bandar	181.950.000,00	0,00	0,00	181.950.000,00
Kecamatan Tegalombo	810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00
Kecamatan Tulakan	354.100.000,00	0,00	0,00	354.100.000,00
Kecamatan Ngadirojo	2.717.400.000,00	0,00	0,00	2.717.400.000,00
Kecamatan Sudimoro	333.375.000,00	0,00	0,00	333.375.000,00
JUMLAH	**501.387.325.673,96**	**8.325.613.275,00**	**2.509.235.862,08**	**507.203.703.086,88**

Sedangkan mutasi aset tanah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Tanah				
Saldo Awal			**Rp**	**501.387.325.673,96**
Penambahan			**Rp**	**8.325.613.275,00**
Pengadaan	Rp	3.488.277.800,00		
Mutasi Masuk	Rp	2.005.106.975,00		
Kurang Catat	Rp	2.832.228.500,00		
Pengurangan			**Rp**	**2.509.235.862,08**
Lebih Catat	Rp	130.000.000,00		
Hibah keluar	Rp	374.128.887,08		
Mutasi Keluar	Rp	2.005.106.975,00		
Saldo Akhir Tanah			**Rp**	**507.203.703.086,88**

Penambahan nilai tanah selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp3.488.277.800,00
2) Mutasi masuk tanah senilai Rp2.005.106.975,00 ke:
   (1) Dinas Pendidikan senilai Rp371.849.975,00
   (2) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp97.225.000,00
   (3) Dinas Perpustakaan senilai Rp945.750.000,00
   (4) Dinas Pariwisata senilai 532.782.000,00
   (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp57.500.000,00
3) Kurang catat tanah karena terjadi kekurangan nilai aset tanah berdasarkan hasil *appraisal*Sucofindo senilai Rp2.832.228.500,00 yaitu pada:
   (1) Dinas Pendidikan senilai Rp1.828.312.450,00

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp16.549.750,00

(3) Dinas Perikanan senilai Rp135.556.300,00

(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp140.640.000,00

(5) Kecamatan Pacitan senilai Rp711.170.000,00

Sedangkan pengurangan tanah selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Lebih Catat Tanah senilai Rp130.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan dobel sertifikat atas nama Tumilah dan sudah diklarifikasi oleh BPN.

2) Hibah Tanah senilai Rp374.128.887,08 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan SK Penghapusan BMD Nomor 188.4/20/kpts/408.12/2021.

3) Mutasi keluar tanah senilai Rp2.005.106.975,00 dari :

(1) Dinas Kesehatan senilai Rp97.225.000,00
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp532.782.000,00
(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.317.599.975,00
(4) Kecamatan Pringkuku senilai Rp57.500.000,00

1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Peralatan Dan Mesin	**547.259.479.377,96**	**495.194.720.921,10**	**52.064.758.456,86**

Tabel 107 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	30.219.151.058,49	13.705.772.583,00	12.620.154.287,00	31.304.769.354,49
Alat Angkutan	88.890.215.050,90	6.099.260.487,00	4.668.207.568,00	90.321.267.969,90
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.677.606.275,00	132.635.444,00	133.605.900,00	9.676.635.819,00
Alat Pertanian	3.505.815.380,00	795.490.403,00	737.326.750,00	3.563.979.033,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	88.714.791.782,03	12.930.832.450,21	3.724.640.746,20	97.920.983.486,04
Alat Studio dan Alat Komunikasi	13.120.612.212,08	1.346.297.970,90	836.824.427,90	13.630.085.755,08
Alat Kedokteran	126.570.217.920,00	16.294.498.335,00	2.035.565.542,95	140.829.150.712,05
Alat Laboratorium	37.803.303.104,70	22.830.840.966,86	19.379.821.803,00	41.254.322.268,56
Alat Keamanan	894.703.750,00	22.120.000,00	136.956.000,00	779.867.750,00
Alat Komputer	86.914.919.913,05	25.520.987.547,50	3.958.657.427,66	108.477.250.032,89
Alat Eksplorasi	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Alat Pengeboran	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	26.969.800,00	218.381.000,00	31.625.000,00	213.725.800,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	1.401.446.572,00	66.363.300,00	111.251.317,00	1.356.558.555,00
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	302.876.000,00	24.958.560,00	0,00	327.834.560,00
Rambu-Rambu	5.420.422.101,53	205.783.000,00	186.835.000,00	5.439.370.101,53
Peralatan Olahraga	1.725.070.001,32	564.325.131,10	132.316.952,00	2.157.078.180,42
JUMLAH	**495.194.720.921,10**	**100.758.877.178,57**	**48.694.118.721,71**	**547.259.479.377,96**

Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 108 Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	113.340.667.111,68	58.106.979.065,95	30.512.063.247,00	140.935.582.930,63
Dinas Kesehatan	82.173.632.216,60	9.053.631.918,62	2.666.878.663,95	88.560.385.471,27
Rumah Sakit Umum Daerah	125.744.700.721,30	19.396.464.885,00	6.155.718.597,00	138.985.447.009,30
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.646.742.811,00	335.546.500,00	9.329.000,00	16.972.960.311,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.975.184.825,00	101.636.050,00	202.783.200,00	1.874.037.675,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.306.133.647,75	0,00	0,00	5.306.133.647,75
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.603.980.092,00	54.362.000,00	377.591.840,00	5.280.750.252,00
Dinas Sosial	1.597.995.250,00	391.393.570,00	109.240.250,00	1.880.148.570,00
Dinas Pangan	1.101.687.025,00	9.636.000,00	311.442.000,00	799.881.025,00
Dinas Lingkungan Hidup	13.278.776.147,00	351.093.600,00	49.275.600,00	13.580.594.147,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.159.994.867,00	834.633.000,00	133.399.799,00	3.861.228.068,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.064.904.550,00	132.744.650,00	0,00	1.197.649.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	6.496.709.770,51	895.231.300,00	659.000.500,00	6.732.940.570,51
Dinas Perhubungan	9.728.612.566,00	552.360.600,00	377.094.300,00	9.903.878.866,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.325.736.937,00	231.020.000,00	40.942.000,00	5.515.814.937,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.602.180.994,00	34.815.000,00	0,00	2.636.995.994,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.757.853.065,09	193.886.740,00	0,00	1.951.739.805,09
Dinas Perpustakaan	2.492.975.812,00	179.337.100,00	4.158.000,00	2.668.154.912,00
Dinas Perikanan	5.797.074.670,00	72.838.000,00	38.773.000,00	5.831.139.670,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	4.697.254.360,70	348.486.150,00	418.782.900,00	4.626.957.610,70
Dinas Pertanian	8.346.261.423,80	491.562.000,00	982.410.278,96	7.855.413.144,84
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.638.441.653,00	714.715.746,00	419.766.800,00	4.933.390.599,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.664.219.994,00	13.750.000,00	248.508.700,00	2.429.461.294,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.082.527.831,00	3.896.910.983,00	1.786.961.016,00	17.192.477.798,00
Badan Pendapatan Daerah	2.906.029.615,69	80.765.850,00	275.574.575,00	2.711.220.890,69
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.672.146.970,00	272.644.400,00	92.617.400,00	2.852.173.970,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.265.486.362,00	13.887.500,00	290.000.000,00	989.373.862,00
Inspektorat	1.907.535.027,00	224.944.675,00	333.547.200,00	1.798.932.502,00
Sekretariat Daerah	21.419.233.666,00	1.932.039.921,00	911.071.150,00	22.440.202.437,00

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Sekretariat DPRD	8.030.118.063,00	940.451.400,00	601.445.250,00	8.369.124.213,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.261.642.150,00	157.132.514,00	268.362.500,00	1.150.412.164,00
Kecamatan Donorojo	936.430.563,33	111.290.000,00	31.387.000,00	1.016.333.563,33
Kecamatan Punung	1.136.165.154,33	57.411.000,00	3.861.000,00	1.189.715.154,33
Kecamatan Pringkuku	1.013.051.726,00	46.795.800,00	0,00	1.059.847.526,00
Kecamatan Pacitan	2.918.538.151,00	166.518.300,00	70.704.400,00	3.014.352.051,00
Kecamatan Kebonagung	1.356.687.114,00	88.290.000,00	90.199.182,00	1.354.777.932,00
Kecamatan Arjosari	1.224.231.876,00	29.920.000,00	16.808.000,00	1.237.343.876,00
Kecamatan Nawangan	894.680.388,33	15.000.000,00	0,00	909.680.388,33
Kecamatan Bandar	893.599.813,33	33.440.000,00	67.755.172,80	859.284.640,53
Kecamatan Tegalombo	1.080.618.063,33	75.201.260,00	0,00	1.155.819.323,33
Kecamatan Tulakan	1.246.496.588,33	70.569.000,00	6.050.000,00	1.311.015.588,33
Kecamatan Ngadirojo	1.396.383.905,00	49.540.700,00	130.616.200,00	1.315.308.405,00
Kecamatan Sudimoro	1.011.397.383,00	0,00	0,00	1.011.397.383,00
JUMLAH	**495.194.720.921,10**	**100.758.877.178,57**	**48.694.118.721,71**	**547.259.479.377,96**

Sedangkan mutasi aset peralatan dan mesin terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Peralatan dan Mesin				
Saldo Awal			**Rp**	**495.194.720.921,10**
Penambahan			**Rp**	**100.758.877.178,57**
Pengadaan	Rp	59.673.855.155,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	32.240.000,00		
Reklas dari Persediaan	Rp	11.436.040,00		
Mutasi Masuk	Rp	4.031.723.868,00		
Hibah Masuk	Rp	2.197.499.764,00		
Kurang Catat	Rp	4.900.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	34.807.222.351,57		
Pengurangan			**Rp**	**48.694.118.721,71**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	34.904.929.930,57		
Extracomptabel	Rp	2.400.713.914,38		
Reklas ke Persediaan	Rp	1.621.561.361,00		
Reklas ke Aset Lain	Rp	484.035.000,00		
Lebih Catat	Rp	34.200.000,00		
Penghapusan	Rp	4.999.915.637,76		
Mutasi Keluar	Rp	4.031.723.868,00		
Hibah Keluar	Rp	217.039.010,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**547.259.479.377,96**

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp59.673.855.155,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	29.790.505.133,00
Dinas Kesehatan	Rp	6.374.189.487,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	14.178.150.460,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	326.627.500,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	101.636.050,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	32.362.000,00
Dinas Sosial	Rp	346.242.320,00
Dinas Pangan	Rp	9.636.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	319.402.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	834.633.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	50.967.400,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	889.791.800,00
Dinas Perhubungan	Rp	453.360.600,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	192.575.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	34.815.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	145.235.240,00
Dinas Perpustakaan	Rp	4.983.000,00
Dinas Perikanan	Rp	45.923.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	190.513.400,00
Dinas Pertanian	Rp	256.355.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	619.870.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	2.750.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	1.040.245.491,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	80.765.850,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	261.144.400,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	13.887.500,00
Inspektorat	Rp	132.520.300,00
Sekretariat Daerah	Rp	1.248.715.000,00
Sekretariat DPRD	Rp	905.458.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	103.896.264,00
Kecamatan Donorojo	Rp	111.290.000,00
Kecamatan Punung	Rp	57.411.000,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	46.795.800,00
Kecamatan Pacitan	Rp	150.115.900,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	86.145.000,00
Kecamatan Arjosari	Rp	29.920.000,00
Kecamatan Nawangan	Rp	15.000.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	31.350.000,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	75.201.260,00
Kecamatan Tulakan	Rp	33.928.500,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	49.540.700,00
Jumlah	**Rp**	**59.673.855.155,00**

2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp32.240.000,00 pada SKPD :

   - Dinas Kesehatan senilai Rp6.600.000 dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp600.000,00 dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Kompor gas.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp21.278.000,00 dari Belanja Bahan Habis Pakai.
- Inspektorat Daerah senilai Rp3.762.000,00 dari Belanja Bahan Habis Pakai.

3) Reklas dari Persediaan senilai Rp11.436.040,00 terdiri dari Dinas Kesehatan senilai Rp4.396.040,00 yang berasal dari Mutasi masuk Persediaan dari PPKB dan pada Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp7.040.000,00 berupa tong sampah yang berasal dari mutasi masuk persedian dari DLH.

4) Mutasi masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp 4.031.723.868,00 untuk Peralatan dan Mesin pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Kesehatan	Rp	94.006.300,00
Dinas Sosial	Rp	45.151.250,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	81.777.250,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	11.000.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	14.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	150.932.750,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	20.020.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	2.850.169.772,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	11.500.000,00
Inspektorat	Rp	75.693.375,00
Sekretariat Daerah	Rp	601.231.421,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	45.151.250,00
Kecamatan Tulakan	Rp	30.590.500,00
Jumlah	**Rp**	**4.031.723.868,00**

5) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp2.197.499.764,00 yaitu pada SKPD berikut:

- Dinas Pendidikan senilai Rp1.192.627.000,00 terdiri dari hibah masuk dari Belanja yang bersumber dana APBN yang diberikan kepada beberapa Sekolah Negeri di Kabupaten Pacitan senilai Rp 1.191.202.000,00, dari Komite Sekolah senilai 1.300.000,00 dan dari Yayasan Literasi Indonesia Senilai Rp 125.000,00.

- Dinas Kesehatan senilai Rp 600.075.064,00 terdiri dari hibah masuk dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono senilai Rp239.493.100,00 yang terdiri dari Hibah masuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur senilai Rp195.228.000,00 dan Hibah Donasi senilai Rp 44.265.100,00.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp16.373.500,00 dari Kementerian Investasi Badan Kordinasi Penanaman Modal.

- Dinas Perpustakaan senilai Rp148.931.100,00 dari Perpustakaan Nasional Pusat.

6) Kurang Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp4.900.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.

7) Reklas tambah antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp34.807.222.351,57 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	27.123.846.932,95
Dinas Kesehatan	Rp	1.974.365.027,62
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	4.978.821.325,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	8.319.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	22.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	31.691.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	5.439.500,00
Dinas Perhubungan	Rp	99.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	38.445.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	10.923.000,00
Dinas Perikanan	Rp	26.915.000,00
Dinas Pertanian	Rp	235.207.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	69.925.746,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	11.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	6.495.720,00
Inspektorat	Rp	12.969.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	82.093.500,00
Sekretariat DPRD	Rp	34.993.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	8.085.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	16.402.400,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	2.145.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	2.090.000,00
Kecamatan Tulakan	Rp	6.050.000,00
Jumlah	**Rp**	**34.807.222.351,57**

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Reklas kurang antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp34.904.929.930,57 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	26.721.495.882,95
Dinas Kesehatan	Rp	2.433.506.402,62
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	4.978.821.325,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	8.319.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	22.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	31.691.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk,	Rp	5.439.500,00

Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak		
Dinas Perhubungan	Rp	361.784.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	38.445.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	4.158.000,00
Dinas Perikanan	Rp	28.235.000,00
Dinas Pertanian	Rp	48.451.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	40.260.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	11.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	6.495.720,00
Inspektorat	Rp	12.969.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	82.093.500,00
Sekretariat DPRD	Rp	34.993.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	8.085.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	16.402.400,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	2.145.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	2.090.000,00
Kecamatan Tulakan	Rp	6.050.000,00
JUMLAH	**Rp**	**34.904.929.930,57**

2) Barang *Extracomptable* Tahun 2021 senilai Rp2.400.713.914,38 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	2.077.968.864,05
Dinas Kesehatan	Rp	185.247.900,33
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	3.580.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.010.000,00
Dinas Sosial	Rp	10.469.250,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	14.614.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	1.713.500,00
Dinas Perhubungan	Rp	2.610.300,00
Dinas Perikanan	Rp	10.538.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	495.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	12.999.800,00
Inspektorat	Rp	123.200,00
Sekretariat Daerah	Rp	65.630.500,00
Sekretariat DPRD	Rp	7.000.000,00
Kecamatan Donorojo	Rp	2.250.000,00
Kecamatan Punung	Rp	3.861.000,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	602.000,00
JUMLAH	**Rp**	**2.400.713.914,38**

3) Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan sebesar Rp1.621.561.361,00 terdiri dari Dinas Pendidikan senilai Rp1.565.880.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp48.124.361,00, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp5.060.000,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp2.497.000,00.

4) Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai Rp484.035.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Kendaraan yang akan dilakukan Penjualan Lelang.

5) Lebih Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp34.200.000,00 terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp21.500.000,00 berupa Sepeda Motor dan pada Dinas Perhubungan senilai Rp12.700.000 berupa sepeda motor juga.

6) Penghapusan Aset Tetap untuk Peralatan dan Mesin sesuai SK Bupati Pacitan senilai Rp4.999.915.637,76 pada SKPD:

Dinas Pendidikan	Rp	123.718.500,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	202.783.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	303.078.830,00
Dinas Sosial	Rp	98.771.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	128.339.799,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	418.287.900,00
Dinas Pertanian	Rp	933.959.278,96
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	327.993.800,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	237.508.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	111.339.500,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	81.116.775,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	92.617.400,00
Sekretariat Daerah	Rp	736.690.850,00
Sekretariat DPRD	Rp	559.452.050,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	260.277.500,00
Kecamatan Donorojo	Rp	29.137.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	54.302.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	88.054.182,00
Kecamatan Arjosari	Rp	16.808.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	65.665.172,80
Kecamatan Ngadirojo	Rp	130.014.200,00
JUMLAH	Rp	**4.999.915.637,76**

7) Mutasi keluar Peralatan Mesin senilai Rp4.031.723.868,00 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	23.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	1.173.317.272,00
Dinas Pangan	Rp	311.442.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	651.847.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	1.053.547.796,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	181.458.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	290.000.000,00
Inspektorat	Rp	320.455.000,00

Sekretariat Daerah	Rp	26.656.300,00
JUMLAH	**Rp**	**4.031.723.868,00**

8) Hibah Keluar Peralatan dan Mesin senilai Rp217.039.010,00 Terdiri dari SKPD :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp52.513.010,00 dihibahkan ke Desa Mentoro,Masjid Al Ikhlas Barean Sidoharjo dan Desa Sirnoboyo.
- Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp2.970.000,00 berupa Gerobak Sampah Ke Lingkungan Temon Ploso Pacitan.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp30.013.000,00 berupa Alat Angkut ke Desa Wiyoro Kecamatan Ngadirojo.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp131.543.000,00 berupa Mobil Ambulan ke Desa Ploso Punung.

Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN			**Rp**	**547.259.479.377,96**
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu				
Saldo Awal			**Rp**	**30.219.151.058,49**
Penambahan			**Rp**	**13.705.772.583,00**
Pengadaan	Rp	13.699.453.083,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	6.319.500,00		
Pengurangan			**Rp**	**12.620.154.287,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	12.597.814.669,00		
Extracomptable	Rp	3.871.618,00		
Penghapusan	Rp	18.468.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**31.304.769.354,49**
Alat Angkutan				
Saldo Awal			**Rp**	**88.890.215.050,90**
Penambahan			**Rp**	**6.099.260.487,00**
Pengadaan	Rp	1.739.476.421,00		
Mutasi Masuk	Rp	3.926.717.568,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	433.066.498,00		
Pengurangan			**Rp**	**4.668.207.568,00**
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	484.035.000,00		
Lebih Catat	Rp	34.200.000,00		
Penghapusan	Rp	58.729.000,00		
Mutasi Keluar	Rp	3.926.717.568,00		
Hibah Keluar	Rp	164.526.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**90.321.267.969,90**
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
Saldo Awal			**Rp**	**9.677.606.275,00**
Penambahan			**Rp**	**132.635.444,00**
Pengadaan	Rp	9.776.300,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	122.859.144,00		
Pengurangan			**Rp**	**133.605.900,00**
Extracomptable	Rp	20.367.700,00		
Penghapusan	Rp	109.223.200,00		
Hibah Keluar	Rp	4.015.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**9.676.635.819,00**
Alat Pertanian				
Saldo Awal			**Rp**	**3.505.815.380,00**
Penambahan			**Rp**	**795.490.403,00**
Pengadaan	Rp	511.968.975,00		

Koreksi/Reklas Aset	Rp	283.521.428,00		
Pengurangan			**Rp**	**737.326.750,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	654.508.100,00		
Extracomptable	Rp	36.279.050,00		
Penghapusan	Rp	46.539.600,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**3.563.979.033,00**
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga				
Saldo Awal			**Rp**	**88.714.791.782,03**
Penambahan			**Rp**	**12.930.832.450,21**
Pengadaan	Rp	6.419.231.632,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	31.621.000,00		
Masuk dari Aset Lain		7.040.000,00		
Hibah Masuk	Rp	137.978.400,00		
Kurang Catat	Rp	4.900.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	6.330.061.418,21		
Pengurangan			**Rp**	**3.724.640.746,20**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.417.098.245,00		
Extracomptable	Rp	791.885.472,40		
Reklas Ke Persediaan	Rp	87.200.000,00		
Penghapusan	Rp	1.428.457.028,80		
Saldo Akhir			**Rp**	**97.920.983.486,04**
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
Saldo Awal			**Rp**	**13.120.612.212,08**
Penambahan			**Rp**	**1.346.297.970,90**
Pengadaan	Rp	641.319.100,00		
Hibah Masuk	Rp	2.342.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	702.636.870,90		
Pengurangan			**Rp**	**836.824.427,90**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	149.530.900,00		
Extracomptable	Rp	20.132.000,00		
Reklas ke Persediaan	Rp	2.497.000,00		
Penghapusan	Rp	616.166.517,90		
Hibah Keluar	Rp	48.498.010,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**13.630.085.755,08**
Alat Kedokteran				
Saldo Awal			**Rp**	**126.570.217.920,00**
Penambahan			**Rp**	**16.294.498.335,00**
Pengadaan	Rp	10.966.601.025,00		
Reklas dari Persediaan	Rp	4.396.040,00		
Mutasi Masuk	Rp	78.350.000,00		
Hibah Masuk	Rp	691.044.490,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	4.554.106.780,00		
Pengurangan			**Rp**	**2.035.565.542,95**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.779.095.813,02		
Extracomptable	Rp	110.049.368,93		
Reklas ke Persediaan	Rp	44.637.361,00		
Penghapusan	Rp	23.433.000,00		
Mutasi Keluar	Rp	78.350.000,00		
Hibah Keluar	Rp	-		
Saldo Akhir			**Rp**	**140.829.150.712,05**
Alat Laboratorium				
Saldo Awal			**Rp**	**37.803.303.104,70**
Penambahan			**Rp**	**22.830.840.966,86**
Pengadaan	Rp	20.722.809.135,00		
Hibah Masuk	Rp	148.523.674,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.959.508.157,86		

Pengurangan			**Rp**	**19.379.821.803,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	17.872.010.413,95		
Extracomptable	Rp	1.297.072.389,05		
Reklas Ke Persediaan	Rp	153.000.000,00		
Penghapusan	Rp	57.739.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**41.254.322.268,56**
Alat Keamanan				
Saldo Awal			**Rp**	**894.703.750,00**
Penambahan			**Rp**	**22.120.000,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	22.120.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**136.956.000,00**
Extracomptable	Rp	120.000,00		
Penghapusan	Rp	136.836.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**779.867.750,00**
Alat Komputer				
Saldo Awal			**Rp**	**86.914.919.913,05**
Penambahan			**Rp**	**25.520.987.547,50**
Pengadaan	Rp	4.468.194.134,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	619.000,00		
Mutasi Masuk	Rp	26.656.300,00		
Hibah Masuk	Rp	1.217.611.200,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	19.807.906.913,50		
Pengurangan			**Rp**	**3.958.657.427,66**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	165.184.689,60		
Extracomptable	Rp	27.551.464,00		
Reklas ke Persediaan	Rp	1.334.227.000,00		
Penghapusan	Rp	2.405.037.974,06		
Mutasi Keluar	Rp	26.656.300,00		
Hibah Keluar	Rp	-		
Saldo Akhir			**Rp**	**108.477.250.032,89**
Alat Eksplorasi				
Saldo Awal			**Rp**	**6.600.000,00**
Penambahan			**Rp**	**0,00**
Pengurangan			**Rp**	**0,00**
Saldo Akhir			**Rp**	**6.600.000,00**
Alat Pengeboran				
Saldo Awal			**Rp**	**0,00**
Penambahan			**Rp**	**330.000,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	330.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**330.000,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	-		
Extracomptable	Rp	330.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**0,00**
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
Saldo Awal			**Rp**	**26.969.800,00**
Penambahan			**Rp**	**218.381.000,00**
Pengadaan	Rp	31.625.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	186.756.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**31.625.000,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	31.625.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**213.725.800,00**
Alat Keselamatan Kerja				
Saldo Awal			**Rp**	**1.401.446.572,00**
Penambahan			**Rp**	**66.363.300,00**
Pengadaan	Rp	17.187.500,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	49.175.800,00		

Pengurangan			**Rp**	**111.251.317,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	11.000.000,00		
Extracomptable	Rp	965.000,00		
Penghapusan	Rp	99.286.317,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**1.356.558.555,00**
Peralatan Proses/Produksi				
Saldo Awal			**Rp**	**302.876.000,00**
Penambahan			**Rp**	**24.958.560,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	24.958.560,00		
Pengurangan			**Rp**	**0,00**
Saldo Akhir			**Rp**	**327.834.560,00**
Rambu-Rambu				
Saldo Awal			**Rp**	**5.420.422.101,53**
Penambahan			**Rp**	**205.783.000,00**
Pengadaan	Rp	205.783.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**186.835.000,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	186.835.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**5.439.370.101,53**
Peralatan Olahraga				
Saldo Awal			**Rp**	**1.725.070.001,32**
Penambahan			**Rp**	**564.325.131,10**
Pengadaan	Rp	240.429.850,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	323.895.281,10		
Pengurangan			**Rp**	**132.316.952,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	40.227.100,00		
Extracomptable	Rp	92.089.852,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**2.157.078.180,42**

1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	Rp
Gedung dan Bangunan	**925.161.277.228,02**	**870.684.878.696,98**	**54.476.398.531,04**

Jumlah tersebut merupakan total nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 109 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bangunan Gedung	842.177.277.893,24	72.713.832.106,57	18.431.588.488,31	896.459.521.511,50
Monumen/Bangunan Bersejarah	5.432.113.600,00	0,00	0,00	5.432.113.600,00
Bangunan Menara	2.418.868.464,64	0,00	0,00	2.418.868.464,64
Tugu Tanda Batas	20.656.618.739,10	465.908.245,39	271.753.332,61	20.850.773.651,88
JUMLAH	**870.684.878.696,98**	**73.179.740.351,96**	**18.703.341.820,92**	**925.161.277.228,02**

Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 110 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2021

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	387.112.179.259,71	27.968.192.925,00	5.595.416.632,59	409.484.955.552,12
Dinas Kesehatan	79.618.245.271,26	11.231.611.713,00	1.954.728.803,80	88.895.128.180,46

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	77.834.139.960,11	14.324.574.320,00	7.738.251.875,00	84.420.462.405,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.603.334.127,24	11.977.773.500,00	1.468.272.665,68	20.112.834.961,56
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	621.380.022,00	99.710.000,00	0,00	721.090.022,00
Satuan Polisi Pamong Praja	609.873.661,02	0,00	0,00	609.873.661,02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.227.000,00	0,00	90.210.000,00	188.017.000,00
Dinas Sosial	1.879.650.945,00	53.588.309,85	0,00	1.933.239.254,85
Dinas Pangan	1.442.689.743,64	0,00	0,00	1.442.689.743,64
Dinas Lingkungan Hidup	14.196.665.356,07	195.619.500,00	374.401.717,00	14.017.883.139,07
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.723.910.192,00	0,00	0,00	2.723.910.192,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.292.509.872,00	0,00	0,00	1.292.509.872,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	6.345.466.875,11	0,00	0,00	6.345.466.875,11
Dinas Perhubungan	4.976.280.946,00	98.870.000,00	0,00	5.075.150.946,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.994.414.565,36	0,00	0,00	14.994.414.565,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.796.931.557,24	0,00	0,00	2.796.931.557,24
Dinas Perpustakaan	2.178.788.642,76	3.212.734.423,39	41.420.522,00	5.350.102.544,15
Dinas Perikanan	13.478.306.149,98	614.763.780,75	250.284.000,00	13.842.785.930,73
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	83.105.672.786,92	157.104.570,39	80.618.495,00	83.182.158.862,31
Dinas Pertanian	17.076.458.618,02	517.078.830,00	252.100.780,00	17.341.436.668,02
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71.417.174.715,81	520.560.075,00	625.786.329,85	71.311.948.460,96
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.711.285.313,00	0,00	0,00	4.711.285.313,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.507.573.920,76	347.522.561,97	186.750.000,00	13.668.346.482,73
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.629.942.075,00	48.428.623,00	0,00	3.678.370.698,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	322.236.911,00	0,00	0,00	322.236.911,00
Inspektorat	460.948.100,00	0,00	0,00	460.948.100,00
Sekretariat Daerah	20.049.451.444,11	1.142.529.834,25	0,00	21.191.981.278,36
Sekretariat DPRD	7.811.005.986,00	0,00	0,00	7.811.005.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	720.132.850,00	0,00	45.100.000,00	675.032.850,00
Kecamatan Donorojo	2.456.804.347,92	0,00	0,00	2.456.804.347,92
Kecamatan Punung	1.554.937.905,76	361.019.105,65	0,00	1.915.957.011,41

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Kecamatan Pringkuku	2.021.183.947,26	0,00	0,00	2.021.183.947,26
Kecamatan Pacitan	8.112.704.377,07	147.939.830,61	0,00	8.260.644.207,68
Kecamatan Kebonagung	1.569.610.809,00	0,00	0,00	1.569.610.809,00
Kecamatan Arjosari	2.020.185.017,67	0,00	0,00	2.020.185.017,67
Kecamatan Nawangan	1.032.709.660,00	0,00	0,00	1.032.709.660,00
Kecamatan Bandar	1.578.693.513,48	160.118.449,10	0,00	1.738.811.962,58
Kecamatan Tegalombo	1.686.891.408,18	0,00	0,00	1.686.891.408,18
Kecamatan Tulakan	1.347.423.973,56	0,00	0,00	1.347.423.973,56
Kecamatan Ngadirojo	1.237.255.582,96	0,00	0,00	1.237.255.582,96
Kecamatan Sudimoro	1.271.601.287,00	0,00	0,00	1.271.601.287,00
JUMLAH	**870.684.878.696,98**	**73.179.740.351,96**	**18.703.341.820,92**	**925.161.277.228,02**

Sedangkan mutasi Aset Gedung dan Bangunan yang terjadi karena penyesuaian adalah sebagai berikut.

GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Awal			**Rp**	**870.684.878.696,98**
Penambahan			**Rp**	**73.179.740.351,96**
Pengadaan	Rp	59.211.649.523,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	470.198.722,00		
Masuk dari Aset Lain Lain	Rp	207.499.772,00		
Mutasi Masuk	Rp	838.376.026,85		
Hibah Masuk	Rp	10.076.301.032,00		
Kurang Catat	Rp	282.312.780,75		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	2.093.402.495,36		
Pengurangan			**Rp**	**18.703.341.820,92**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	13.938.307.258,18		
Extracomptable	Rp	17.657.850,00		
Reklas ke Persediaan	Rp	1.770.434.685,30		
Lebih Catat	Rp	269.550.000,00		
Penghapusan	Rp	1.869.016.000,59		
Mutasi Keluar	Rp	838.376.026,85		
Saldo akhir Gedung dan Bangunan			**Rp**	**925.161.277.228,02**

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Pengadaan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp59.211.649.523,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	27.659.389.250,00
Dinas Kesehatan	Rp	10.982.480.491,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	14.324.574.320,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.088.222.468,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	195.619.500,00
Dinas Perpustakaan	Rp	2.745.497.896,00
Dinas Perikanan	Rp	332.451.000,00
Dinas Pertanian	Rp	281.425.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	520.560.075,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp	48.428.623,00
Kecamatan Pacitan	Rp	33.000.000,00
JUMLAH	**Rp**	**59.211.649.523,00**

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset Gedung dan Bangunan berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp470.198.722,00 terdiri dari Dinas Kesehatan senilai Rp249.131.222,00, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp99.710.000,00 serta Dinas Perpustakaan senilai Rp121.357.500,00.

3) Reklas dari Aset Lain lain senilai Rp207.499.772,00 pada Sekretariat Daerah berupa Gedung YABI.

4) Mutasi masuk senilai Rp838.376.026,85untuk Gedung dan Bangunan pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Sosial	Rp	53.588.309,85
Dinas Perhubungan	Rp	98.870.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	250.284.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	186.750.000,00
Kecamatan Punung	Rp	248.883.717,00
JUMLAH	**Rp**	**838.376.026,85**

5) Hibah masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp10.076.301.032,00 yang terdapat pada SKPD berikut.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp9.889.551.032,00 berupa Bangunan Flat / Susun dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp186.750.000,00 berupa Gedung YABI dari Pemerintah Provinsi yang selanjutnya dimutasi ke Sekretariat Daerah.

6) Kurang Catat Gedung dan Bangunan senilai Rp282.312.780,75 berupa Bangunan Gudang.

7) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp2.093.402.495,36pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	308.803.675,00
Dinas Perpustakaan	Rp	95.595.027,39
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	157.104.570,39
Dinas Pertanian	Rp	235.652.930,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	160.772.561,97
Sekretariat Daerah	Rp	748.280.062,25
Kecamatan Punung	Rp	112.135.388,65
Kecamatan Pacitan	Rp	114.939.830,61
Kecamatan Bandar	Rp	160.118.449,10
Jumlah	Rp	**2.093.402.495,36**

Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp13.938.307.258,18pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	2.603.942.275,00
Dinas Kesehatan	Rp	1.898.411.529,80
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	7.738.251.875,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.365.524.380,38
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	26.648.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	40.210.522,00
Dinas Pertanian	Rp	235.652.930,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	29.665.746,00
JUMLAH	**Rp**	**13.938.307.258,18**

2) Merupakan *Extracomptable* senilai Rp17.657.850,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Perpustakaan	Rp	1.210.000,00
Dinas Pertanian	Rp	16.447.850,00
Jumlah	Rp	**17.657.850,00**

3) Aset tetap Gedung dan Bangunan yang direklas ke akun Persediaan sejumlah Rp1.770.434.685,30 terdiri dari Dinas Pendidikan senilai Rp1.667.686.400,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp102.748.285,30 dan akan dihibahkan kepada pihak lain.

4) Lebih Catat Gedung dan Bangunan Senilai Rp269.550.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Gedung Pertokoan/Koperasi.

5) Penghapusan Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp1.869.016.000,59 sesuai SK Penghapusan Bupati Pacitan terdiri dari :

Dinas Pendidikan	1.323.787.957,59
Dinas Kesehatan	56.317.274,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.210.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	80.618.495,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	272.982.274,00
Sekretariat DPRD	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.100.000,00
JUMLAH	**1.869.016.000,59**

6) Mutasi keluar Gedung dan Bangunan TA 2021 senilai Rp838.376.026,85 yaitu pada SKPD sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup	Rp	347.753.717,00
Dinas Perikanan	Rp	250.284.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	53.588.309,85
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	186.750.000,00
Jumlah	Rp	**838.376.026,85**

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

GEDUNG DAN BANGUNAN			**Rp**	**925.161.277.228,02**
Bangunan Gedung				
Saldo Awal			**Rp**	**842.177.277.893,24**
Penambahan			**Rp**	**72.713.832.106,57**
Pengadaan	Rp	59.211.649.523,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	470.198.722,00		
Reklas dari Aset Lain Lain	Rp	207.499.772,00		
Mutasi Masuk	Rp	838.376.026,85		
Hibah Masuk	Rp	10.076.301.032,00		
Kurang Catat	Rp	282.312.780,75		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.627.494.249,97		
Pengurangan			**Rp**	**18.431.588.488,31**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	13.702.654.328,18		
Extracomptable	Rp	17.657.850,00		
Reklas ke Persediaan	Rp	1.770.434.685,30		
Lebih Catat	Rp	269.550.000,00		
Penghapusan	Rp	1.832.915.597,98		
Mutasi Keluar	Rp	838.376.026,85		
Saldo Akhir			**Rp**	**896.459.521.511,50**
Monumen				
Saldo Awal			**Rp**	**5.432.113.600,00**
Penambahan			**Rp**	**0**
Pengurangan			**Rp**	**0**
Saldo Akhir			**Rp**	**5.432.113.600,00**
Bangunan Menara				
Saldo Awal			**Rp**	**2.418.868.464,64**
Penambahan			**Rp**	**0.00**
Pengurangan			**Rp**	**0.00**
Saldo Akhir			**Rp**	**2.418.868.464,64**
Tugu Tanda Batas				
Saldo Awal			**Rp**	**20.656.618.739,10**
Penambahan			**Rp**	**465.908.245,39**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	465.908.245,39		
Pengurangan			**Rp**	**271.753.332,61**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	235.652.930,00		
Penghapusan	Rp	36.100.402,61		
Saldo Akhir			**Rp**	**20.850.773.651,88**

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.700.400.597.553,31**	**1.613.337.379.468,73**	**87.063.218.084,58**

Rincian jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 111 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Jalan dan Jembatan	1.157.306.287.191,50	74.417.672.055,78	0.00	1.231.723.959.247,28
Bangunan Air	268.551.354.097,62	11.766.918.147,96	338.147.500,00	279.980.124.745,58

Instalasi	20.979.197.431,21	705.676.380,84	0.00	21.684.873.812,05
Jaringan	166.500.540.748,40	511.099.000,00	0.00	167.011.639.748,40
JUMLAH	**1.613.337.379.468,73**	**87.401.365.584,58**	**338.147.500,00**	**1.700.400.597.553,31**

Rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per SKPD TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 112 Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	40.315.313.999,33	1.792.866.600,00	35.000.000,00	42.073.180.599,33
Dinas Kesehatan	6.000.550.100,65	964.119.992,80	0.00	6.964.670.093,45
Rumah Sakit Umum Daerah	9.548.728.337,15	0.00	0.00	9.548.728.337,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.373.330.294.951,29	65.056.893.594,00	116.391.500,00	1.438.270.797.045,29
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.946.584.671,00	18.943.342.375,78	0.00	34.889.927.046,78
Satuan Polisi Pamong Praja	33.980.650,00	0.00	0.00	33.980.650,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	9.955.000,00	0.00	9.955.000,00
Dinas Sosial	18.876.000,00	0.00	0.00	18.876.000,00
Dinas Pangan	69.314.500,00	0.00	0.00	69.314.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.162.154.636,00	0.00	0.00	2.162.154.636,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	71.925.000,00	0.00	0.00	71.925.000,00
Dinas Perhubungan	24.266.926.137,00	501.144.000,00	0,00	24.768.070.137,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.860.000,00	0.00	0,00	13.860.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	167.584.000,00	0.00	0,00	167.584.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.000.000,00	0.00	0,00	13.000.000,00
Dinas Perpustakaan	1.363.500,00	33.445.522,00	0,00	34.809.022,00
Dinas Perikanan	18.929.371.338,02	78.320.000,00	0,00	19.007.691.338,02
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	17.661.086.952,59	0.00	0,00	17.661.086.952,59
Dinas Pertanian	97.774.174.960,06	21.278.500,00	186.756.000,00	97.608.697.460,06
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	429.801.340,00	0.00	0.00	429.801.340,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.851.000,00	0.00	0.00	23.851.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.223.344.760,64	0.00	0.00	4.223.344.760,64
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	-
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	57.712.600,00	0.00	0.00	57.712.600,00
Sekretariat Daerah	801.293.295,00	0.00	0.00	801.293.295,00
Sekretariat DPRD	95.852.840,00	0.00	0.00	95.852.840,00
Kecamatan Pacitan	1.346.933.900,00	0.00	0.00	1.346.933.900,00

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Kecamatan Ngadirojo	33.000.000,00	0.00	0.00	33.000.000,00
Kecamatan Sudimoro	500.000,00	0.00	0.00	500.000,00
JUMLAH	**1.613.337.379.468,73**	**87.401.365.584,58**	**338.147.500,00**	**1.700.400.597.553,31**

Sedangkan mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terjadi pada Tahun 2021 karena penyesuaian adalah sebagai berikut.

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
Saldo Awal			**Rp**	**1.613.337.379.468,73**
Penambahan			**Rp**	**87.401.365.584,58**
Pengadaan Aset dari	Rp	51.102.738.057,00		
Belanja Barang Jasa	Rp	255.949.790,00		
Masuk dari Persediaan/Aset Lain	Rp	15.604.552.922,78		
Hibah Masuk	Rp	17.187.167.990,00		
Kurang Catat		77.000.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	3.173.956.824,80		
Pengurangan			**Rp**	**338.147.500,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	303.147.500,00		
Penghapusan	Rp	35.000.000,00		
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan			**Rp**	**1.700.400.597.553,31**

Penambahan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Pengadaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp51.102.738.057,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	47.732.604.104,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	3.299.420.453,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	9.955.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	39.480.000,00
Dinas Pertanian	Rp	21.278.500,00
Jumlah	Rp	**51.102.738.057,00**

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek

2) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Barang Jasa senilai Rp255.949.790,00 pada Dinas Kesehatan senilai Rp17.700.790,00 dari Belanja Penambahan Daya dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp238.249.000,00 dari Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa.

3) Masuk dari Aset Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp15.604.552.922,78 pada Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp15.405.672.922,78 yang berasal dari Reklas dari Persediaan dan Aset Lain lain yang akan diserahkan kepada masyarakat dan Dinas Perhubungan senilai

Rp198.880.000,00 yang berasal dari Reklas dari Belanja Modal Software.

4) Hibah masuk jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp17.187.167.990,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diterima dari Kementerian PUPR dan Perumahan Rakyat.

5) Kurang Catat Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp77.000.000,00 pada Dinas Perikanan.

6) Reklas tambah antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp3.173.956.824,80pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	1.792.866.600,00
Dinas Kesehatan	Rp	946.419.202,80
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	137.121.500,00
Dinas Perhubungan	Rp	262.784.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	33.445.522,00
Dinas Perikanan	Rp	1.320.000,00
JUMLAH	**Rp**	**3.173.956.824,80**

Adapun pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2021 berasal dari:

1) Reklas kurang antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp303.147.500,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	116.391.500,00
Dinas Pertanian	Rp	186.756.000,00
Jumlah	Rp	**303.147.500,00**

2) Penghapusan Aset Tetap untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp35.000.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa Bangunan Pelengkap Air berdasarkan SK Penghapusan BMD Bupati Pacitan.

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				**1.700.400.597.553,31**
Jalan dan Jembatan				
Saldo Awal			**Rp**	**1.157.306.287.191,50**
Penambahan			**Rp**	**74.417.672.055,78**
Pengadaan	Rp	41.709.653.097,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	238.249.000,00		
Reklas dari Aset Lain	Rp	15.249.156.446,78		
Hibah Masuk	Rp	17.187.167.990,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	33.445.522,00		
Pengurangan			**Rp**	**0,00**
Saldo Akhir			**Rp**	**1.231.723.959.247,28**
Bangunan Air				
Saldo Awal			**Rp**	**268.551.354.097,62**
Penambahan			**Rp**	**11766918147,96**
Pengadaan	Rp	9.343.649.960,00		
Reklas dari Aset Lain	Rp	156.516.476,00		
Kurang Catat	Rp	77.000.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	2.189.751.711,96		
Pengurangan			**Rp**	**338.147.500,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	303.147.500,00		

Penghapusan	Rp	35.000.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**279.980.124.745,58**
Instalasi				
Saldo Awal			**Rp**	**20.979.197.431,21**
Penambahan			**Rp**	**705.676.380,84**
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	17.700.790,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	687.975.590,84		
Pengurangan			**Rp**	**0,00**
Saldo Akhir			**Rp**	**21.684.873.812,05**
Jaringan				
Saldo Awal			**Rp**	**166.500.540.748,40**
Penambahan			**Rp**	**511.099.000,00**
Pengadaan	Rp	49.435.000,00		
Reklas dari Aset Lain	Rp	198.880.000,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	262.784.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**0.00**
Saldo Akhir			**Rp**	**167.011.639.748,40**

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap Lainnya	**77.685.788.333,43**	**77.803.496.934,19**	**(117.708.600,76)**

Rincian Aset Tetap Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 113 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bahan Perpustakaan	67.252.110.175,12	1.311.863.085,00	421.592.845,00	68.142.380.415,12
Bahan Bercorak Kesenian	8.884.987.318,30	247.830.000,00	86.625.600,00	9.046.191.718,30
Hewan	180.634.000,00	0,00	34.000.000,00	146.634.000,00
Tanaman	350.182.200,00	0,00	0,00	350.182.200,00
Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.135.183.240,77	1.962.708.539,96	3.097.891.780,72	0,00
JUMLAH	**77.803.496.934,19**	**3.522.401.624,96**	**3.640.110.225,72**	**77.685.788.333,43**

Rincian mutasi aset tetap lainnya Tahun 2021 per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 114 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	74.523.289.080,12	1.325.145.090,00	192.372.750,00	75.656.061.420,12
Dinas Kesehatan	7.500.000,00	13.068.000,00	13.068.000,00	7.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.232.983.240,77	413.762.649,60	1.548.945.890,36	97.800.000,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69.048.000,00	0,00	0,00	69.048.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	59.016.000,00	0,00	0,00	59.016.000,00

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Perhubungan	0,00	198.880.000,00	198.880.000,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan	815.645.513,30	95.595.027,39	95.595.027,39	815.645.513,30
Dinas Perikanan	168.923.000,00	0,00	0,00	168.923.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	333.259.700,00	157.104.570,39	236.237.270,39	254.127.000,00
Dinas Pertanian	146.634.000,00	0,00	0,00	146.634.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	160.772.561,97	160.772.561,97	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	4.999.995,00	4.999.995,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	27.440.000,00	0,00	0,00	27.440.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	38.346.400,00	0,00	34.000.000,00	4.346.400,00
Sekretariat Daerah	263.739.000,00	748.280.062,25	748.280.062,25	263.739.000,00
Sekretariat DPRD	48.618.000,00	0,00	0,00	48.618.000,00
Kecamatan Donorojo	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00
Kecamatan Punung	0,00	112.135.388,65	112.135.388,65	0,00
Kecamatan Pringkuku	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kecamatan Pacitan	57.955.000,00	114.939.830,61	114.939.830,61	57.955.000,00
Kecamatan Bandar	0,00	160.118.449,10	160.118.449,10	0,00
Kecamatan Sudimoro	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
JUMLAH	**77.803.496.934,19**	**3.522.401.624,96**	**3.640.110.225,72**	**77.685.788.333,43**

Sedangkan mutasi Aset Tetap Lainnya terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

ASET TETAP LAINNYA

Saldo Awal			**Rp**	**77.803.496.934,19**
Penambahan			**Rp**	**3.522.401.624,96**
Pengadaan	Rp	1.452.279.235,00		
Mutasi masuk	Rp	1.548.945.890,36		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	521.176.499,60		
Pengurangan			**Rp**	**3.640.110.225,72**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.556.438.790,36		
Extracomptable	Rp	220.547.845,00		
Reklas ke Aset Lain	Rp	198.880.000,00		
Penghapusan	Rp	46.537.700,00		
Mutasi Keluar	Rp	1.548.945.890,36		
Hibah Keluar	Rp	68.760.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**77.685.788.333,43**

Penambahan Nilai aset tetap lainnya selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.452.279.235,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	1.217.731.240,00
Dinas Kesehatan	Rp	13.068.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	198.880.000,00

Rumah Komunikasi dan Informatika	Rp	17.600.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	4.999.995,00
Jumlah	Rp	**1.452.279.235,00**

2) Mutasi masuk Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.548.945.890,36 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Perpustakaan	Rp	95.595.027,39
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	157.104.570,39
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	160.772.561,97
Sekretariat Daerah	Rp	748.280.062,25
Kecamatan Punung	Rp	112.135.388,65
Kecamatan Pacitan	Rp	114.939.830,61
Kecamatan Bandar	Rp	160.118.449,10
Jumlah	**Rp**	**1.548.945.890,36**

3) Reklas tambah antar Aset Tetap Lainnya senilai Rp521.176.499,60 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan		107.413.850,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	413.762.649,60
Jumlah	Rp	**521.176.499,60**

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2021 berasal dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk aset tetap lainnya senilai Rp1.556.438.790,36 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	7.492.900,00
Dinas Perpustakaan	Rp	95.595.027,39
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	157.104.570,39
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	160.772.561,97
Sekretariat Daerah	Rp	748.280.062,25
Kecamatan Punung	Rp	112.135.388,65
Kecamatan Pacitan	Rp	114.939.830,61
Kecamatan Bandar	Rp	160.118.449,10
Jumlah	**Rp**	**1.556.438.790,36**

2) Merupakan *Extracomptable* senilai Rp220.547.845,00pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	184.879.850,00
Dinas Kesehatan	Rp	13.068.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	17.600.000,00
Badan Pendapatan Daerah		4.999.995,00
Jumlah	Rp	**220.547.845,00**

3) Aset Tetap lainnya dari Belanja Modal *Software* direklas ke Aset *Aset Tetap Jaringan* senilai Rp198.880.000,00 pada Dinas Perhubungan.

4) Penghapusan Aset Tetap Lainnya senilai Rp46.537.700,00 berdasarkan SK Penghapusan Bupati Pacitan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp.44.372.700,00 berupa Alat Musik serta pada Kecamatan Donorojo senilai Rp2.165.000,00 berupa Buku Umum.

5) Mutasi Keluar Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.548.945.890,36 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

6) Hibah Keluar Aset Tetap Lainnya senilai Rp68.760.000,00 terdiri dari pengeluaran aset dari SKPD berikut:

- Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan OlahRaga senilai Rp34.760.000,00 berupa Alat Musik dihibahkan ke Desa Pelem Kecamatan Pringkuku dengan Dasar SK Bupati Pacitan.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp34.000.000,00 berupa Sapi Potong dihibahkan ke Sentra Peternak Desa Bandar.

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

ASET TETAP LAINNYA				**79.234.734.223,79**
Buku dan Perpustakaan				
Saldo Awal			**Rp**	**67.252.110.175,12**
Penambahan			**Rp**	**1.311.863.085,00**
Pengadaan	Rp	1.204.449.235,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	107.413.850,00		
Pengurangan			**Rp**	**421.592.845,00**
Extracomptable	Rp	220.547.845,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	198.880.000,00		
Penghapusan	Rp	2.165.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**68.142.380.415,12**
Barang Bercorak Kebudayaan				
Saldo Awal			**Rp**	**8.884.987.318,30**
Penambahan			**Rp**	**247.830.000,00**
Pengadaan	Rp	247.830.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**86.625.600,00**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	7.492.900,00		
Penghapusan	Rp	44.372.700,00		
Hibah Keluar	Rp	34.760.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**9.046.191.718,30**
Hewan				
Saldo Awal			**Rp**	**180.634.000,00**
Penambahan			**Rp**	**0,00**
Pengurangan			**Rp**	**34.000.000,00**
Hibah Keluar	Rp	34.000.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**146.634.000,00**
Tanaman				
Saldo Awal			**Rp**	**350.182.200,00**
Penambahan			**Rp**	**0,00**
Pengurangan			**Rp**	**0,00**
Saldo Akhir			**Rp**	**350.182.200,00**
Barang Koleksi Non Budaya				
Saldo Awal			**Rp**	**400.000,00**
Penambahan			**Rp**	**0,00**
Pengurangan			**Rp**	**0,00**
Saldo Akhir			**Rp**	**400.000,00**
Aset Tetap Dalam Renovasi				
Saldo Awal			**Rp**	**1.135.183.240,77**

Penambahan			**Rp**	**1.962.708.539,96**
Mutasi masuk	Rp	1.548.945.890,36		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	413.762.649,60		
Pengurangan			**Rp**	**3.097.891.780,73**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	1.548.945.890,37		
Mutasi Keluar	Rp	1.548.945.890,36		
Saldo Akhir			**Rp**	**0,00**

Aset Tetap Lainnya berupa ATR (Aset Tetap Renovasi) yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.548.945.890,37 sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 9.**

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**49.172.811.316,86**	**39.272.288.818,07**	**9.900.522.498,79**

Konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2021 sebesar Rp49.172.811.316,86 tersebut merupakan nilai dari saldo awal Tahun 2020 sebesar Rp39.272.288.818,07 ditambah pengakuan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2021 sebesar Rp16.208.850.984,78 dan adanya pengurangan karena proses kapitalisasi sebesar Rp6.308.328.485,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

OPD/Jenis Konstruksi	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja	**15.695.590.429,39**	**16.208.850.984,78**	**6.103.549.577,00**	**25.800.891.837,17**
- Dinas Pendidikan	246.396.150,00	0,00	0,00	246.396.150,00
- Dinas Kesehatan	2.742.923.775,64	1.411.133.702,00	0,00	4.154.057.477,64
- RSUD	6.335.878.227,00	13.819.307.552,00	6.081.055.677,00	14.074.130.102,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	5.982.315.719,21	951.761.730,78	0,00	6.934.077.449,99
- Dinas Pariwisata	360.395.532,54	0,00	157.400.908,99	202.994.623,55
- Dinas Pertanian	22.493.900,00	0,00	22.493.900,00	0,00
- Dinas Perikanan	5.187.125,00	0,00		5.187.125,00
- Dinas lingkungan Hidup	0,00	26.648.000,00	26.648.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	**23.553.850.613,68**	**0,00**	**0,00**	**23.553.850.613,68**
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	23.553.850.613,68	0,00	0,00	23.553.850.613,68
Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya	**22.847.775,00**	**0,00**	**0,00**	**22.847.775,00**
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	20.730.000,00	0,00	20.730.000,00	0,00
- Dinas Perikanan	2.117.775,00			2.117.775,00
JUMLAH	**39.272.288.818,07**	**16.208.850.984,78**	**6.308.328.485,99**	**49.172.811.316,86**

Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	**Dinas Pendidikan**		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :		**246.396.150,00**
	Gedung Bangunan Sekolah yang terdiri dari Ruang Kelas, Ruang Guru, Perpustakaan, Paving, MCK dan lain-lain (Pengadaan Tahun 2020)		246.396.150,00
2	**Dinas Kesehatan**		**4.154.057.477,64**
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :		4.154.057.477,64
	Gedung Kantor Dinas Kesehatan	2.595.715.379,00	
	Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahap II (Tahun 2020)	65.076.000,00	
	Perencanaan Gedung Puskesmas Candi (Tahun 2020)	82.132.396,64	
	Pembangunan Tahap II Gedung kantor Dinas Kesehatan(Tahun 2021)	1.411.133.702,00	
3	**Rumah Sakit dr, Darsono**		**14.074.130.102,00**
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :		14.074.130.102,00
	Pengurugan dan Pematangan Lahan (Tahun 2020)	254.822.550,00	
	Gedung Rawat Inap (Ponek) Tahun 2021	13.819.307.552,00	
4	**Dinas Pekerjaan Umum dan PR**		**30.487.928.063,67**
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung :		6.934.077.449,99
	Pengadaan s/d 2019	**5.778.593.519,21**	
	Gedung Kelurahan Pacitan	2.180.367.635,21	
	Gedung ex. Kantor Camat Ngadirojo	146.585.200,00	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap-2 (2019)	3.250.176.084,00	
	Rehabilitasi EX Kantor Camat Ngadirojo Tahap-2 (2019)	201.464.600,00	
	Pengadaan Tahun 2020	**203.722.200,00**	
	Penataan Kawasan ex. Kantor Kawedanan Lorok di Ngadirojo Tahap 1	203.722.200,00	
	Pengadaan Tahun 2021	**951.761.730,78**	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap IV Tahun 2021	221.957.677,72	
	Rehabilitasi Ex Kantor Camat Ngadirojo Tahap 2 Tahun 2021	205.260.655,45	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung ex. Kawedanan Lorog dan Penataan Kawasan Tahun 2021	524.543.397,61	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan :		23.553.850.613,68
	Pengadaan s/d 2019	**23.527.084.113,68**	
	Jembatan Gunungsari	2.114.313.728,68	
	Jembatan Giwang - Bolang (Dsn. Gedangan Ds. Ketro)	102.798.000,00	
	Jembatan Gantung Dsn. Kraket Ds.Wonodadi Wetan	198.946.000,00	
	Jembatan Gegeran	1.760.517.777,00	
	Jembatan Gunungsari Tahap II	4.355.818.446,00	
	Jembatan Gunungsari Tahap III 150 m x 8,0 m	12.594.330.780,00	
	Jembatan Gegeran Tahap II 150 m x 8,0 m	2.297.823.382,00	
	Jembatan Gantung Kraket Desa Wonodadi di Wetan	102.536.000,00	
	Pengadaan Tahun 2020	**26.766.500,00**	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung Kraket	580.000,00	
	Jembatan Bolang	985.000,00	
	Jembatan Tosari	985.000,00	

NO	URAIAN	JUMLAH	
	Jembatan Gunungsari IV	24.216.500,00	
5	**Dinas Pariwisata dan Olah Raga**		**202.994.623,55**
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :		202.994.623,55
	Lapangan Olah Raga - Ploso	202.994.623,55	
6	**Dinas Perikanan**		**7.304.900,00**
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja		**5.187.125,00**
	Perencanaan Pengadaan Kontruksi BBI Kucur (Tahun 2020)	2.977.975,00	
	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Gerbang BBI Kucur (Tahun 2020)	2.209.150,00	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya		**2.117.775,00**
	Perencanaan Pembangunan Kolam UPR (Tahun 2020)	1.645.600,00	
	Perencanaan Jalan Rabat BBI Kucur (Tahun 2020)	472.175,00	
JUMLAH			**49.172.811.316,86**

Adapun Saldo akhir Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 senilai Rp49.356.860.225,85 berada pada masing-masing SKPD dengan rincian kegiatan sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 10.**

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(1.906.832.733.104,38)**	**(1.707.762.556.102,35)**	**(199.070.177.002,03)**

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang digunakan adalah metode garis lurus.Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan diatas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai berikut.

Tabel 117 Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(1.707.762.556.102,35)**	**(260.150.798.575,87)**	**(61.080.621.573,84)**	**(1.906.832.733.104,38)**

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.

Tabel 118 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam Rupiah)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	**TANAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB B	**PERALATAN DAN MESIN**	**(379.049.604.122,53)**	**(46.563.230.350,97)**	**(10.123.126.321,95)**	**(415.489.708.151,55)**

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	(16.029.133.632,05)	(2.440.670.440,48)	(13.419.000,00)	(18.456.385.072,53)
3	Alat Angkutan	(65.706.223.307,21)	(8.441.163.144,99)	(3.788.324.147,82)	(70.359.062.304,38)
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	(8.937.590.712,35)	(403.072.265,83)	(110.143.304,16)	(9.230.519.674,02)
5	Alat Pertanian	(2.827.953.280,82)	(301.581.453,82)	(58.621.367,50)	(3.070.913.367,14)
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(66.631.064.621,66)	(10.461.871.375,22)	(1.445.185.427,81)	(75.647.750.569,07)
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	(11.195.620.138,66)	(1.224.347.329,62)	(794.150.965,50)	(11.625.816.502,78)
8	Alat Kedokteran	(110.041.627.728,51)	(7.356.425.522,76)	(176.924.406,25)	(117.221.128.845,02)
9	Alat Laboratorium	(32.117.487.695,35)	(2.652.773.073,12)	(235.663.788,33)	(34.534.596.980,14)
10	Alat Keamanan	(622.802.538,54)	(7.915.670,84)	(140.190.666,67)	(490.527.542,71)
11	Alat Komputer	(57.383.128.260,72)	(12.421.874.532,52)	(3.253.113.627,79)	(66.551.889.165,45)
12	Alat Eksplorasi	(6.050.000,00)	(550.000,00)	0,00	(6.600.000,00)
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(2.809.354,17)	(193.498.450,00)	0,00	(196.307.804,17)
16	Alat Keselamatan Kerja	(1.170.212.109,92)	(154.735.396,60)	(99.286.317,00)	(1.225.661.189,52)
18	Peralatan Proses/Produksi	(210.848.552,71)	(57.327.064,17)	0,00	(268.175.616,88)
19	Rambu-Rambu	(4.906.232.498,49)	(209.406.478,55)	0,00	(5.115.638.977,04)
20	Peralatan Olahraga	(1.260.819.691,37)	(236.018.152,45)	(8.103.303,12)	(1.488.734.540,70)
KIB C	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**(230.958.145.759,42)**	**(29.755.485.183,80)**	**(3.623.168.415,20)**	**(257.090.462.528,02)**
21	Bangunan Gedung	(216.007.829.182,55)	(25.699.405.207,51)	(3.604.742.168,04)	(238.102.492.222,02)
22	Monumen/Bangunan Bersejarah	(2.293.185.850,00)	(636.425.825,00)	0,00	(2.929.611.675,00)
23	Bangunan Menara	(1.208.730.808,74)	(256.908.200,83)	0,00	(1.465.639.009,57)
24	Tugu Tanda Batas	(11.448.399.918,13)	(3.162.745.950,46)	(18.426.247,16)	(14.592.719.621,43)
KIB D	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**(1.097.649.822.024,21)**	**(183.692.432.933,45)**	**(47.124.358.444,31)**	**(1.234.217.896.513,35)**
25	Jalan dan Jembatan	(816.426.734.504,60)	(141.341.449.624,99)	(46.629.825.279,07)	(911.138.358.850,52)
26	Bangunan Air	(146.605.087.810,35)	(28.588.274.015,40)	(277.553.041,31)	(174.915.808.784,44)
27	Instalasi	(13.394.097.131,19)	(2.606.020.411,40)	(11.723.546,86)	(15.988.393.995,73)
28	Jaringan	(121.223.902.578,07)	(11.156.688.881,66)	(205.256.577,07)	(132.175.334.882,66)
KIB E	**ASET TETAP LAINNYA**	**(104.984.196,19)**	**(139.650.107,65)**	**(209.968.392,38)**	**(34.665.911,46)**
29	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bahan Bercorak Kesenian	0,00	(34.665.911,46)	0,00	(34.665.911,46)
31	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	(104.984.196,19)	(104.984.196,19)	(209.968.392,38)	0,00
KIB F	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	**(1.707.762.556.102,35)**	**(260.150.798.575,87)**	**(61.080.621.573,84)**	**(1.906.832.733.104,38)**

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

AKUMULASI PENYUSUTAN				
Saldo Awal			**Rp**	**(1.707.762.556.102,35)**
Penambahan			**Rp**	**(260.150.798.575,87)**
Beban Penyusutan	Rp	(240.716.501.888,85)		
Dari Aset Lain	Rp	(14.265.609,92)		
Mutasi Masuk	Rp	(3.416.959.925,14)		
Hibah Masuk	Rp	(121.387.500,00)		
Kurang Catat	Rp	(4.900.000,00)		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(15.876.783.651,95)		
Pengurangan			**Rp**	**(61.080.621.573,84)**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(51.549.421.078,00)		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	(315.796.125,00)		
Lebih Catat	Rp	(143.921.666,67)		
Penghapusan	Rp	(5.454.871.935,70)		
Mutasi Keluar	Rp	(3.416.959.925,14)		
Hibah Keluar	Rp	(199.650.843,33)		
Saldo Akhir			**Rp**	**(1.906.832.733.104,38)**

1.4 Aset Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lainnya	**26.616.832.660,32**	**61.386.654.918,77**	**(34.769.822.258,45)**

Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.577.638.554,70 terdiri dari:

Tabel 119 Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**24.507.527.700,00**	**0,00**	**0,00**	**24.507.527.700,00**
1	Kerjasama Pemanfaatan	23.146.466.900,00	0,00	0,00	23.146.466.900,00
2	Bangun guna serah	1.361.060.800,00	0,00	0,00	1.361.060.800,00
	Aset Tidak Berwujud	**1.061.179.500,00**	**(124.617.365,00)**	**366.547.995,00**	**570.014.140,00**
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.062.582.550,00	366.547.995,00	366.547.995,00	4.062.582.550,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.001.403.050,00)	(491.165.360,00)	-	(3.492.568.410,00)
	Aset Lain-lain	**35.817.947.718,77**	**184.048.908,99**	**34.462.705.807,44**	**1.539.290.820,32**
5	Aset Lain-lain	35.817.947.718,77	184.048.908,99	34.462.705.807,44	1.539.290.820,32
	JUMLAH ASET LAINNYA	**61.386.654.918,77**	**59.431.543,99**	**34.829.253.802,44**	**26.616.832.660,32**

Rincian Aset lainnya Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:

1. Kerja Sama Operasi (KSO)

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi.Objek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria.Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/920/KPTS/408.21/2013.

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/ PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga tahun dan *profit sharing* sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal Rp15.000.262.000,00.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022 Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan senilai sebagai berikut.

-	Ex Cotage Happy Bay	Rp	420.433.000,00
-	Bangunan dan fasilitas lainnya	Rp	4.500.908.900,00
-	Tanah seluas 135.001 m^2	Rp	18.225.125.000,00
	Total	Rp	23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m^2 Rp135.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/ 408.21/2013, sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 120 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Tanah Lingkungan Teleng Ria	1	18.225.125.000,00
2	*Cottage happy bay*	1	420.433.000,00
3	Ruang pamer produk wisata	1	165.502.000,00
4	Amusement park	1	172.165.000,00
5	Gazebo 1 *Amusement park*	1	1.215.000,00
6	Gazebo 2 *Amusement park*	1	1.215.000,00
7	Gazebo 3 *Amusement park*	1	1.518.000,00
8	Gazebo 4 *Amusement park*	1	1.518.000,00
9	Gazebo 5 *Amusement park*	1	1.215.000,00
10	Gazebo 6 *Amusement park*	1	1.215.000,00
11	Gazebo 7 *Amusement park*	1	911.000,00
12	Gazebo 8 *Amusement park*	1	911.000,00
13	Gazebo 9 *Amusement park*	1	2.733.000,00

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
14	Gedung *Baywatch*	1	32.510.000,00
15	Joglo	1	18.539.000,00
16	Kamar bilas 1	1	8.929.000,00
17	Kamar bilas 2	1	8.929.000,00
18	Kios pasar ikan masak	1	95.999.000,00
19	Kios pertokoan	1	101.404.000,00
20	Loket wisata air	1	15.544.000,00
21	Masjid	1	160.231.000,00
22	Mushola wisata air	1	6.716.000,00
23	Panggung sanggar budaya	1	371.018.000,00
24	Bangunan pengolah sampah	1	11.733.000,00
25	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1	539.807.000,00
26	*Shelter* tipe 1	10	57.590.000,00
27	*Shelter* tipe 2	1	8.337.000,00
28	*Shelter* tipe 3	1	13.410.000,00
29	Toilet	1	35.198.000,00
30	Toilet wisata air	1	4.762.000,00
31	*Tribune*	1	76.518.000,00
32	Kolam renang dewasa	1	769.675.000,00
33	Kolam renang anak	1	264.276.900,00
34	Kolam bermain	1	254.813.000,00
35	Loket *water park*	1	213.601.000,00
36	Mushola *water park*	1	69.959.000,00
37	Toilet *water park*	1	33.545.000,00
38	Kios pedagang kaki lima 1	1	166.685.000,00
39	Kios pedagang kaki lima 2	1	49.624.000,00
40	Area parkir	1	277.856.000,00
41	Pintu gerbang dan loket	1	43.904.000,00
42	*Waterboom*	1	424.600.000,00
43	Air mancur	1	15.078.000,00
Jumlah		**52**	**23.146.466.900,00**

2. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) sebesar Rp1.361.060.800,00 merupakan:

- Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)atas aset tanah sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT.HM Sampoerna. Kerjasama dimulai dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera Nomor 181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor 022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun. Kemudian diubah dengan addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09 September 2009 s.d 09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir perjanjian di-*adendum* dalam

Akta Notaris Yanti Komalawati, SH Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan PAD yang dihasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah Daerah.

- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT Esrandev Co. LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang berakhir pada Tahun 2019 dan tidak diperpanjang lagi. Pengurangan Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 telah direklas masuk aset tetap tanah di KIP. Konstruksi yang berada di atas pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dibongkar dan dilelang senilai Rp90.200.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Desember 2019.

Tabel 121 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal (Rp)		Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna	1	1.361.060.800,00	-	-	-	0,00	1	1.361.060.800,00
2	Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh Hotel Pacitan/Wisma Rahayu	1	945.750.000,00	-	-	1	945.750.000,00	0	0,00
	JUMLAH		**2.306.810.800,00**		**-**		**945.750.000,00**		**1.361.060.800,00**

1.4.2 Aset Tidak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 sebesar Rp4.062.582.550,00 berupa *software* antara lain:

Tabel 122 Aset Tidak Berwujud - *Software*

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	604.468.286,00	132.000.000,00	132.000.000,00	604.468.286,00
2	Dinas Kesehatan	135.960.000,00	13.068.000,00	13.068.000,00	135.960.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.870.100,00	0,00	0,00	99.870.100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
6	Dinas Perhubungan		198.880.000,00	198.880.000,00	
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.332.450.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	1.332.450.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.111.264,00	0,00	0,00	99.111.264,00
9	Dinas Perikanan	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	46.794.000,00	0,00	0,00	46.794.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	149.999.300,00	0,00	0,00	149.999.300,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.886.000,00	0,00	0,00	83.886.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	633.390.000,00	0,00	0,00	633.390.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	190.018.400,00	4.999.995,00	4.999.995,00	190.018.400,00
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	618.815.200,00	0,00	0,00	618.815.200,00
	Jumlah	**4.062.582.550,00**	**366.547.995,00**	**366.547.995,00**	**4.062.582.550,00**

Adapun Mutasi aset tidak berwujud – *software* karena penyesuaian sebagai berikut.

SOFTWARE				
Saldo Awal			**Rp**	**4.062.582.550,00**
Penambahan			**Rp**	**366.547.995,00**
Pengadaan Belanja Modal	Rp	366.547.995,00		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	0,00		
Pengurangan			**Rp**	**366.547.995,00**
Extracomptable	Rp	167.667.995,00		
Reklas ke Aset Lain	Rp	198.880.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**4.062.582.550,00**

Penambahan pengurangan nilai aset tidak berwujud – *software* selama Tahun 2021 berasal dari:

(1) Pengadaan Belanja Modal *Software* senilai Rp366.547.995,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	132.000.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	13.068.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	198.880.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	17.600.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	4.999.995,00
Jumlah	Rp	**366.547.995,00**

(2) Pengurangan nilai aset tidak berwujud – *software* selama Tahun 2021 sebesar Rp167.667.995,00 merupakan *Extracomptable* yaitu *software* dari belanja modal pengadaan *software* di bawah batas kapitalisasi dan yang menjadi beban biaya umum pada SKPD sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	Rp	132.000.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	13.068.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	17.600.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp	4.999.995,00
Jumlah	Rp	**167.667.995,00**

(3) Reklas ke Aset Lain Belanja Modal Aset tidak berwujud – software selama tahun 2021 pada Dinas Perhubungan senilai Rp198.880.000,00 yang direklas ke Aset Tetap Jaringan.

1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2021 (Rp)	**31 Desember 2020 (Rp)**	**Kenaikan/ Penurunan (Rp)**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(3.492.568.410,00)**	**(3.001.403.050,00)**	**(491.165.360,00)**

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi sebagai berikut.

Tabel 123 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(3.001.403.050,00)	(491.165.360,00)	(0,00)	(3.492.568.410,00)

Sedangkan rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per golongan di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 124 Rincian Akumulasi Amortisasi per Golongan

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah Rp	Berkurang Rp	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(577.825.286,00)	(26.643.000,00)	0,00	(604.468.286,00)
2	Dinas Kesehatan	(96.778.000,00)	(27.192.000,00)	0,00	(123.970.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(39.948.040,00)	(19.974.020,00)	0,00	(59.922.060,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(30.000.000,00)	(10.000.000,00)	0,00	(40.000.000,00)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	(691.590.000,00)	(266.490.000,00)	0,00	(958.080.000,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(99.111.264,00)		0,00	(99.111.264,00)
7	Dinas Perikanan	(14.256.000,00)	(3.564.000,00)	0,00	(17.820.000,00)
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	(37.435.200,00)	(9.358.800,00)	0,00	(46.794.000,00)
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(119.999.440,00)	(29.999.860,00)	0,00	(149.999.300,00)
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(83.886.000,00)		0,00	(83.886.000,00)
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(623.390.000,00)	(10.000.000,00)	0,00	(633.390.000,00)
12	Badan Pendapatan Daerah	(48.228.620,00)	(38.003.680,00)	0,00	(86.232.300,00)
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	(538.955.200,00)	(49.940.000,00)	0,00	(588.895.200,00)
	Jumlah	**(3.001.403.050,00)**	**(491.165.360,00)**	**0.00**	**(3.492.568.410,00)**

Perubahan akumulasi Amortisasi terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

Saldo Awal			**Rp**	**(3.001.403.050,00)**
Penambahan			**Rp**	**(491.165.360,00)**
Beban Amortisasi	Rp	(491.165.360,00)		
Pengurangan			**Rp**	**0,00**
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	-		
Saldo Akhir			**Rp**	**(3.492.568.410,00)**

1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.355.241.911,33. Perbandingan dengan saldo Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
ASET LAIN-LAIN	**1.539.290.820,32**	**35.817.947.718,77**	**(34.278.656.898,45)**

Pengurangan saldo Aset Lain-lain disebabkan karena adanya aset Lain lain yang akan dihapus karena rusak/tidak layak pakai/direvitalisasi atau akan dihibahkan kepada pihak ketiga sudah ditetapkan SK Penghapusan melalui Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah serta Reklas ke Aset Tetap.

Aset lain-lain dicatat sebesar nilai buku.Rincian mutasi Aset Lain-lain TA 2021 pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2021

(dalam Rupiah)

NO	SATKER	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.479.912.408,40	0,00	3.479.912.408,40	0,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	32.233.204.093,70	0,00	30.877.962.182,37	1.355.241.911,33
3	Dinas Lingkungan Hidup	6.707.250,00	26.648.000,00	6.707.250,00	26.648.000,00
4	Dinas Pertanian	32.276.000,00	0,00	32.276.000,00	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.967.500,00	0,00	10.967.500,00	0,00
6	Sekretariat Daerah	54.880.466,67	0,00	54.880.466,67	0,00
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	157.400.908,99	0,00	157.400.908,99
JUMLAH		**35.817.947.718,77**	**184.048.908,99**	**34.462.705.807,44**	**1.539.290.820,32**

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.550.599.835,28 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebagai berikut,

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	55.929.116,00	-55.929.116,00
Pendapatan Diterima Dimuka	946.432.318,36	888.863.365,73	68.403.895,55
Utang Belanja	3.593.332.574,00	3.713.531.555,40	(120.198.981,4)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.022.651.441,00	(1.022.651.441,00)
Jumlah	**4.550.599.835,28**	**5.680.975.478,13**	**(1.130.375.642,85)**

Rincian mutasi kewajiban jangka pendek TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 126 Kewajiban Jangka Pendek 2021

(dalam Rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	55.929.116,00	0,00	55.929.116,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka	888.863.365,73	572.465.023,84	504.061.128,29	957.267.261,28
Utang Belanja	3.713.531.555,40	3.593.332.574,00	3.713.531.555,40	3.593.332.574,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.022.651.441,00	0,00	1.022.651.441,00	0,00
JUMLAH	**5.680.975.478,13**	**4.165.797.597,84**	**5.296.173.240,69**	**4.550.599.835,28**

2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Saldo utang PFK tahun 2020 sebesar Rp55.929.116,00 merupakan Utang PFK dari kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dibayarkan oleh bendahara BOS pada tahun berikutnya

2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka milik Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 sebesar Rp957.267.261,28. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 127 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2020	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2021
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	116.115.898,25	116.115.898,25	117.865.251,43	117.865.251,43
2	Pajak Reklame Kain	902.646,51	902.646,52	923.790,66	923.790,66
3	Pajak Reklame Berjalan	3.582.230,10	3.582.230,10	9.636.221,48	9.636.221,48
4	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	329.329.166,67	258.204.166,66	230.633.333,33	301.758.333,34
5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	9.273.000,00	10.023.000,00	13.500.000,00	12.750.000,00
6	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	429.660.424,20	115.233.186,76	199.906.426,94	514.333.664,37
TOTAL		888.863.365,73	504.061.128,29	572.465.023,84	957.267.261,28

2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* pada Bapenda sebesar Rp117.865.251,43

Saldo Awal sebesar Rp116.115.898,25 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp116.115.898,25 serta penambahan tahun ini sebesar Rp117.865.251,43

2.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada Bapenda sebesar Rp923.790,66

Saldo Awal sebesar Rp902.646,51 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2021 sebesar Rp902.646,51 dan penambahan tahun ini sebesar Rp923.790,66 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada Bapenda sebesar Rp9.636.221,48

Saldo Awal sebesar Rp3.582.230,10 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2021 sebesar Rp3.582.230,10 dan penambahan tahun ini sebesar Rp9.636.221,48 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp301.758.333,34

Saldo Awal sebesar Rp329.329.166,67 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp258.204.166,67 dan penambahan tahun ini sebesar Rp230.633.333,33 sehingga saldo akhir tahun sebesar Rp301.758.333,34.

2.2.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD sebesar Rp12.750.000,00

Saldo Awal sebesar Rp9.273.000,00 terdapat pengurangan yang menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2021 sebesar Rp7.773.000,00 dan ada penambahan pendapatan baru senilai Rp2.250.000,00 sehingga total pendapatan LO tahun 2021 senilai Rp10.023.000,00.Terdapat sisa pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.500.000,00 dan penambahan baru senilai Rp11.250.000,00 sehingga total saldo akhir tahun 2021 sebesar

Rp12.750.000,00

2.2.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama pada BPKAD sebesar Rp514.333.664,37

Saldo Awal sebesar Rp429.660.424,19 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp115.233.186,76 serta penambahan tahun berjalan sebesar Rp199.906.426,94 sehingga menjadi saldo akhir tahun sebesar Rp514.333.664,37.Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode Tahun 2020 pendapatan diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

(a)Tahun 1995	Rp	5.000.000,00
(b)Tahun 1996	Rp	7.500.000,00
(c)Tahun 1997	Rp	7.300.000,00
(d)Tahun 2000	Rp	2.000.000,00
(e)Tahun 2002	Rp	5.000.000,00
(f)Tahun 2003	Rp	12.500.000,00
(g)Tahun 2004	Rp	15.000.000,00
(h)Tahun 2005	Rp	20.000.000,00
(i)Tahun 2006	Rp	25.000.000,00
(j)Tahun 2007	Rp	35.000.000,00
(k)Tahun 2008	Rp	45.000.000,00
(l)Tahun 2009	Rp	45.000.000,00
(m)Tahun 2010	Rp	5.000.000,00
Jumlah s/d 2010	**Rp**	**229.300.000,00**

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/2011 pembayaran uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh:

3) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.

4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diinstruksikan agar membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali.Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan sampai dengan 31 Desember 2020.

2.3 Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp3.593.332.574,00 merupakan beban Tahun 2021 yang masih belum dibayarkan, yang dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 128 Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2020	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2021
1	**Utang Belanja Pegawai**	**1.497.525.616,00**	**1.497.525.616,00**	**1.470.096.991,00**	**1.470.096.991,00**
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	37.195.133,00	37.195.133,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.497.525.616,00	1.497.525.616,00	1.432.901.858,00	1.432.901.858,00
2	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**2.216.005.939,40**	**2.216.005.939,40**	**937.901.679,00**	**937.901.679,00**
	Utang Belanja Barang	1.854.852.445,40	1.854.852.445,40	164.119.546,00	164.119.546,00
	Utang Belanja Jasa	361.153.494,00	361.153.494,00	761.199.593,00	761.199.593,00
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	12.582.540,00	12.582.540,00
3	**Utang Belanja Bagi Hasil**	**0,00**	**0,00**	**1.185.333.904,00**	**1.185.333.904,00**
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	836.626.788,00	836.626.788,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	348.707.116,00	348.707.116,00
Jumlah		**3.713.531.555,40**	**3.713.531.555,40**	**3.593.332.574,00**	**3.593.332.574,00**

2.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.470.096.991,00 merupakan saldo utang belanja tahun 2021 yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Darsono.

2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp937.901.679,00 merupakan saldo dari Utang Belanja Barang, Utang Belanja Jasa dan Utang Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1) **Utang belanja barang senilai Rp164.119.546,00** merupakan saldo utang belanja barang yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Dr.Darsono.

Tabel 129 Utang Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2020	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2021
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.668.904,00	1.668.904,00	485.063,00	485.063,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-	250.457.032,00	250.457.032,00	132.309.507,00	132.309.507,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2020	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2021
	Bahan-Isi Tabung Gas				
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	660.243.214,40	660.243.214,40	2.268.708,00	2.268.708,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	852.626.769,00	852.626.769,00	27.906.500,00	27.906.500,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.215.196,00	8.215.196,00	1.149.768,00	1.149.768,00
Total		**1.773.211.115,40**	**1.773.211.115,40**	**164.119.546,00**	**164.119.546,00**

2) **Utang Jasa senilaiRp761.199.593,00** merupakan saldo utang barang jasa yang terdapat di beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 130 Utang Belanja Jasa

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pengolahan Sampah	Telepon	Air	Listrik	Internet/TV Berlangganan	Jamkes Non ASN	Total Utang Belanja Jasa
1	Rumah Sakit Umum Daerah	477.900.868,00	66.502.080,00	3.714.089,00	361.700,00	173.384.000,00	7.645.700,00	13.679.693,00	743.188.130,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				46.800,00				46.800,00
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				768.880,00			11.764.400,00	12.533.280,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja					2.011.383,00	1.293.000,00		3.304.383,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah						2.127.000,00		2.127.000,00
Total		**477.900.868,00**	**66.502.080,00**	**3.714.089,00**	**1.177.380,00**	**175.395.383,00**	**11.065.700,00**	**25.444.093,00**	**761.199.593,00**

3) **Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sebesar Rp12.582.540,00** merupakan kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9.087.390,00 dan

Polres Pacitan Sebesar Rp3.495.150,00. Saldo awal nol dan ada reklas rekening dari Utang Belanja Bagi Hasil .

2.3.3 Utang Belanja Bagi Hasil

1) Utang Bagi Hasil pajak

Pada Tahun 2020 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp836.626.788,00

2) **Utang Bagi Hasil Retribusi**

Pada Tahun 2020 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp348.707.116,00.

3. Ekuitas

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Ekuitas	**2.207.162.083.953,35**	**2.161.794.700.411,74**	**45.367.383.541,61**

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total aset dengan total Kewajiban. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.207.162.083.953,35

Saldo akhir tersebut merupakan penurunan dari saldo akhir ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp45.367.383.541,61, yaitu yang terdiri dari :

Surplus pada LO selama tahun berjalan	Rp	213.578.332,34
Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	45.153.805.209,27
Jumlah	Rp	45.367.383.541,61

5.1.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1. Pendapatan-LO	**1.582.257.802.884,74**	**1.479.879.616.944,93**	**102.378.185.939,81**

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Pada Tahun 2021, pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp1.582.257.802.884,74

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LO Tahun 2020 yang sebesar Rp1.479.879.616.944,93, maka Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp102.378.185.939,81 atau sebesar 6,92%.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2021 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 131 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	218.691.519.287,51	165.089.177.800,73	53.602.341.486,78	32,47
2	Pendapatan Transfer	1.252.662.971.924,14	1.243.364.873.887,00	9.298.098.037,14	0,75
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	110.903.311.673,09	71.425.565.257,20	39.477.746.415,89	55,27
Jumlah		**1.582.257.802.884,74**	**1.479.879.616.944,93**	**102.378.185.939,81**	**6,92**

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp218.691.519.287,51 mengalami kenaikan sebesar Rp53.602.341.486,78 atau 32,47% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Rincian masing-masing jenis PAD-LO dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 132 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	36.708.666.692,71	35.440.231.626,02	1.268.435.066,69	3,58
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.618.840.045,00	18.210.875.471,00	(1.592.035.426,00)	-8,74
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.568.011.281,35	2.989.222.323,59	578.788.957,76	19,36
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	161.796.001.268,45	108.448.848.380,12	53.347.152.888,33	49,19
Jumlah		**218.691.519.287,51**	**165.089.177.800,73**	**53.602.341.486,78**	32,47

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Sebesar Rp36.708.666.692,71 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 133 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	324.057.066,00	279.152.187,00	44.904.879,00	16,09
2	Pajak Restoran-LO	2.273.482.029,41	1.849.704.673,98	423.777.355,43	22,91
3	Pajak Hiburan-LO	21.384.078,00	17.986.602,00	3.397.476,00	18,89
4	Pajak Reklame-LO	350.361.268,30	410.942.263,04	(60.580.994,74)	(14,74)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	13.973.859.970,00	12.135.694.507,00	1.838.165.463,00	15,15
6	Pajak Parkir-LO	30.686.753,00	33.491.100,00	(2.804.347,00)	(8,37)
7	Pajak Air Tanah-LO	63.708.497,00	51.545.737,00	12.162.760,00	23,60
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	264.226.350,00	449.111.233,00	(184.884.883,00)	(41,17)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	18.086.258.646,00	17.765.574.764,00	320.683.882,00	1,81
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.320.642.035,00	2.447.028.559,00	(1.126.386.524,00)	(46,03)
	Jumlah	**36.708.666.692,71**	**35.440.231.626,02**	**1.268.435.066,69**	**0,36**

1) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp324.057.066,00 terdiri dari.

Tabel 134 Rincian Pajak Hotel Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	265.662.004,00	260.927.687,00	4.734.317,00	1,81
2	Pajak Losmen-LO	0,00	18.224.500,00	-18.224.500,00	-100,00
3	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	32.671.562,00	0	32.671.562,00	100,00
4	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO	25.723.500,00	0	25.723.500,00	100,00
	Jumlah	**324.057.066,00**	**279.152.187,00**	**44.904.879,00**	**16,09**

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel-LO mengalami kenaikan sebesar Rp44.904.879,00 atau 16,09% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

2) Pajak Restoran-LO

Realisasi Pajak Restoran-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.273.482.029,41 terdiri dari:

Tabel 135 Rincian Pajak Restoran Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	111.210.295,00	88.617.984,00	22.592.311,00	25,49
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	64.053.000,00	56.424.500,00	7.628.500,00	13,52
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	2.098.218.734,41	1.704.662.189,98	393.556.544,43	23,09
	Jumlah	**2.273.482.029,41**	**1.849.704.673,98**	**423.777.355,43**	**22,91**

Terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun 2021 sebesar Rp423.777.355,43 atau 22,91% dibandingkan dengan Tahun 2020.

3) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp21.384.078,00 yang terdiri dari:

Tabel 136 Rincian Pajak Hiburan - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	17.043.000,00	11.625.600,00	5.417.400,00	46,60
2	Pajak Permainan Billiard dan Bowling-LO		298.500,00	(298.500,00)	(100,00)
3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO	4.341.078,00	5.496.502,00	(1.155.424,00)	(21,02)
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO		566.000,00	(566.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**21.384.078,00**	**17.986.602,00**	**3.397.476,00**	18,89

Terdapat kenaikan realisasi atas pendapatan Pajak Hiburan-LO sebesar Rp3.397.476,00 atau 18,89% dibandingkan dengan Tahun 2020.

4) Pajak Reklame-LO

Realisasi Pajak Reklame-LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp350.361.268,30 yaitu terdiri dari:

Tabel 137 Pajak Reklame - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	292,310,629.82	331,750,969.37	(39,440,339.55)	(11.89)
2	Pajak Reklame Kain-LO	43,432,386.86	67,130,280.67	(23,697,893.81)	(35.30)
3	Pajak Reklame Berjalan-LO	14,618,251.62	12,061,013.00	2,557,238.62	21.20
Jumlah		**350,361,268.30**	**410,942,263.04**	**(60,580,994.74)**	**(14.74)**

Terdapat Penurunan atas realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2021 sebesar Rp60.580.994,74 atau 14,74% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020.

5) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp13.973.859.970. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.838.165.463,00 atau 15,15% dibandingkan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.135.694.507,00

6) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp30.686.735,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.804.347,00 atau 8,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp33.491.100,00.

7) Pajak Air Tanah-LO

Pajak air tanah-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp63.708.497,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.162.760,00 atau 23,60% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp51.545.737,00.

8) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO

Pajak mineral bukan logam batuan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp264.226.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp184.884.883,00 atau 41,17% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp449.111.233,00.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp18.086.258.646,00 mengalami peningkatan sebesar Rp320.683.882,00 atau 1,81% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp17.765.574.764,00.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp1.320.642.035,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.126.386,524,00 atau 46,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.447.028.559,00.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 49,27% atau sebesar Rp18.086.258.646,00 diperoleh dari Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2021.

Dari total saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp36.708.666.692,71 terdiri dari penerimaan kas sejumlah

Rp32.732.511.658,84 dan transaksi non kas sebesar Rp3.976.155.033,87 dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Penambahan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp3.855.554.259,00.
- Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp120.600.774,87.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp16.618.840.045,00 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari

Tabel 138 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.799.757.600,00	6.647.048.800,00	(1.847.291.200,00)	(27,79)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.893.385.000,00	1.873.344.500,00	20.040.500,00	1,07
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.842.317.000,00	2.801.533.000,00	40.784.000,00	1,46
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	380.090.000,00	293.010.000,00	87.080.000,00	29,72
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	17.690.000,00	0,00	17.690.000,00	100,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	566.877.500,00	585.489.500,00	(18.612.000,00)	(3,18)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	728.608.601,00	213.982.850,00	514.625.751,00	240,50
9	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	353.338.974,00	194.965.675,00	158.373.299,00	81,23
10	Retribusi Terminal-LO	60.083.000,00	28.855.000,00	31.228.000,00	108,22
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	10.513.000,00	3.072.000,00	7.441.000,00	242,22
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa-LO	0,00	8.670.000,00	(8.670.000,00)	(100,00)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	16.900.000,00	14.050.000,00	2.850.000,00	20,28
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	4.662.983.000,00	5.138.119.000,00	(475.136.000,00)	(9,25)
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	278.011.370,00	406.525.146,00	(128.513.776,00)	(31,61)
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	785.000,00	2.210.000,00	(1.425.000,00)	(64,48)
Jumlah		**16.618.840.045,00**	**18.210.875.471,00**	**(1.592.035.426,00)**	(8,74)

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut, sebesar 28,88% dihasilkan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang total realisasinya mencapai Rp4.799.757.600,00. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020, Retribusi Daerah-LO mengalami penurunan sebesar Rp1.592.035.426,00 atau 8,74%. Penurunan terbesar pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar Rp1.847.291.200,00 atau 74,50% dari total penurunan seluruh Pendapatan Retribusi Daerah.

Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp16.618.840.045,00 terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp15.731.881.981,63 dan transaksi non kas sebesar Rp886.958.063,37. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Penambahan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp886.873.963,37.
- Pengurangan piutang masuk beban jasa Rp84.100,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

sebesar Rp3.568.011.281,35 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 139 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD**	**2.704.269.238,35**	**2.669.553.062,20**	**34.716.176,15**	**1,30**
	- Bank Jatim	2.614.465.238,35	2.579.677.062,20	**34.788.176,15**	**1,35**
	- Bank Perkreditan Rakyat	89.804.000,00	89.876.000,00	**(72.000,00)**	**(0,08)**
2	**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO**	**863.742.043,00**	**319.669.261,39**	**544.072.781,61**	**170,20)**
	- PDAM	863.742.043,00	319.669.261,39	**544.072.781,61**	170,20
Jumlah		**3.568.011.281,35**	**2.989.222.323,59**	**578.788.957,76**	**19,36)**

Dari jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.614.465.238,35. Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa deviden atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp34.788.176,15atau 1,35%. Penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurun sebesar Rp89.804.000,00 dan mengalami penurunan sebesar 72.000,00 atau 0,08%dari tahun sebelumnya

Sedangkan penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas atas penyertaan modal pada BUMD mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp544.072.781,61 atau 170,20% dari tahun sebelumnya

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.568.011.281,35 merupakan penerimaan berupa kas sebesar Rp2.704.269.238,35. Sedangkan penerimaan non kas atas rugi atau laba pada PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah sebesar Rp863.742.043,00

1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun 2021 sebesar Rp161.796.001.268. Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 140 Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	143.056.145,04	241.751.000,00	(98.694.854,96)	(40,83)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	765.050.217,82	0,00	765.050.217,82	0,00
3	Jasa Giro-LO	327.307.951,37	405.720.359,26	(78.412.407,89)	(19,33)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	332.970.833,33	423.841.666,67	(90.870.833,34)	(21,44)
5	Pendapatan Bunga-LO	4.907.982.857,67	5.827.818.561,54	(919.835.703,87)	(15,78)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	158.820.516,00	0,00	158.820.516,00	100,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	110.985.178,63	318.428.703,98	(207.443.525,35)	(65,15)
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	228.384.298,00	182.704.558,00	45.679.740,00	25,00
9	Pendapatan dari BLUD-LO	154.820.123.270,59	80.906.982.405,18	73.913.140.865,41	91,36
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	19.038.335.021,00	(19.038.335.021,00)	(100,00)
11	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00
12	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	0,00	1.103.266.104,49	(1.103.266.104,49)	(100,00)
Jumlah		**161.796.001.268,45**	**108.448.848.380,12**	**53.347.152.888,33**	49,19

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

pada Tahun 2021 sebesar Rp143.056.145,04 mengalami penurunan sebesar Rp98.694.854,96 atau 40,83% dibandingkan Tahun 2020.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp765.050.217,82 mengalami kenaikan 100 % dibandingkan Tahun 2020.

3) Jasa Giro - LO

Jasa Giro - LO pada Tahun 2021 sebesar Rp327.307.951,37 mengalami penurunan sebesar Rp78.412.407,89 atau 19,33% dibandingkan Tahun 2020.

4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO

Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp332.970.833,33 dan terjadi penurunan sebesar Rp90.870.833,34 atau sebesar 21,44% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pelaku usaha masih hati-hati untuk menambah modal usaha dan dari pengelola dana bergulir masih harus selektif dalam memberikan modal usaha.

5) Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga - LO pada Tahun 2021 sebesar Rp4.907.982.857,67 yang terdiri dari:

Tabel 141 Rincian Pendapatan Bunga - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	4.907.982.857,67	5.827.818.561,54	(919.835.703,87)	(15,78)
Jumlah		**4.907.982.857,67**	**5.827.818.561,54**	**(919.835.703,87)**	(15,78)

Pendapatan tersebut menurun sebesar Rp919.835.703,87 atau 15,78% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Lo terealisasi sebesar Rp158.820.516,00 atau meningkat sebesar sebesar 100% dari tahun 2020

7) Pendapatan Denda Pajak - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO pada Tahun 2021 sebesar Rp110.985.178,63 yang terdiri dari,

Tabel 142 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	2.781.722,00	1.852.571,00	929.151,00	50,15
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	665.515,00	226.477,00	439.038,00	193,86
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	141.429,00	-	141.429,00	100,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	14.647.587,00	6.503.403,00	8.144.184,00	125,23
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	223.593,00	73.508,00	150.085,00	204,18
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	330.577,00	148.885,00	181.692,00	122,04
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	397.752,00	9.227.556,00	(8.829.804,00)	(95,69)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	91.797.002,88	121.435.130,98	(29.638.128,10)	(24,41)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	0,75	178.961.173,00	(178.961.172,25)	(100,00)
Jumlah		**110.985.178,63**	**318.428.703,98**	**(207.443.525,35)**	**(65,15)**

Terdapat penurunan sebesar Rp207.443.525,35 atau 65,15% dibandingkan Tahun 2021 .Penurunan terbesar pada Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

8) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO pada Tahun 2021 sebesar Rp228.384.298,00 yang terdiri dari:

Tabel 143 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	228.384.298,00	182.704.558,00	45.679.740,00	25,00
	Jumlah	**228.384.298,00**	**182.704.558,00**	**45.679.740,00**	25,00

Terdapat kenaikan sebesar Rp45.679.740,00 atau 25% dibandingkan Tahun 2020.

9) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO pada Tahun 2021 sebesar Rp154.820.123.270,59 yang terdiri dari:

Tabel 144 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan dari BLUD-LO	154.820.123.270,59	80.906.982.405,18	73.913.140.865,41	91,36
	Jumlah	**154.820.123.270,59**	**80.906.982.405,18**	**73.913.140.865,41**	**91,36**

Terdapat kenaikan sebesar Rp73.913.140.865,41 atau 91,36% dibandingkan Tahun 2020.

10) Pendapatan JKN - LO

Pendapatan JKN - LO pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar.

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pada Puskesmas di Kecamatan se-Kabupaten Pacitan yang terdiri dari.

Tabel 145 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	19.038.335.021,00	(19.038.335.021,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**19.038.335.021,00**	(19.038.335.021,00)	(100,00)

Terdapat penurunan sebesar Rp19.038.335.021,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2020.

11) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (inkracht) sebesar Rp1.320.000,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2020

12) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah- LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO pada Tahun 2021 sebesar

Tabel 146 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya-LO	0,00	1.103.266.104,49	(1.103.266.104,49)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**1.103.266.104,49**	**(1.103.266.104,49)**	**(100,00)**

Terdapat penurunan sebesar Rp1.103.266.104,49 atau 100% dibandingkan Tahun 2020.

Dari total saldo PAD Lainnya sebesar Rp162.027.530.311,37, terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp147.864.262.389,09 dan transaksi non kas sebesar Rp14.163.267.922,28. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Pendapatan Hibah BLUD berupa barang senilai Rp505.888.192,00
- Penambahan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp12.888.988.439,42,
- Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp768.262.590,86 yang menambah saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO, dan
- Pelunasan piutang menjadi beban jasa bank Rp128.700,00

Dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang dirinci pada Tabel 124 di atas, sebesar 95,55% dihasilkan dari objek penerimaan pendapatan BLUD yaitu RSUD dr. Darsono yang total penerimaannya mencapai Rp154.820.123.270,59. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2020, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami kenaikan sejumlah Rp53.347.152.888,33 atau 49,19%.

Untuk Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.592.035.426,00 dikarenakan adanya realisasi yang tidak memenuhi target dari beberapa objek terutama pada pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan Kabupaten Pacitan menurun drastis sebesar Rp475.136.000 Karena Ditutupnya Tempat-Tempat Wisata.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai sebesar Rp1.252.662.971.924,14. Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.298.098.037,14 atau 0,75% dibandingkan Tahun 2020

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 147 Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.123.303.427.529,00	909.460.329.156,00	213.843.098.373,00	23,51
2	Transfer Pemerintah Pusat lainnya	28.354.469.000,00	241.344.910.524,00	(212.990.441.524,00)	(88,25)
3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	101.005.075.395,14	92.559.634.207,00	8.445.441.188,14	9,12
Jumlah		**1.252.662.971.924,14**	**1.243.364.875.907,00**	**9.298.098.037,14**	**0,75**

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan senilai Rp1.123.303.427.529,00 menurut obyek penerimaan terdiri atas:

Tabel 148 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	40.166.104.937,00	38.437.519.928,00	1.728.585.009,00	4,50
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	62.843.585.093,00	35.437.765.871,00	27.405.819.222,00	77,34

3	Dana Alokasi Umum	731.754.165.000,00	739.879.366.000,00	(8.125.201.000,00)	(1,10)
4	Dana Alokasi Khusus	288.539.572.499,00	95.705.677.357,00	192.833.895.142,00	201,49
Jumlah		**1.123.303.427.529,00**	**909.460.329.156,00**	**213.843.098.373,00**	**23,51**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah Rp1.123.303.427.529,00 tersebut terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2021 sebesar Rp40.166.104.937,00 yang terdiri dari.

Tabel 149 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH PBB-LO	6.558.972.328,00	4.785.198.902,00	1.773.773.426,00	37,07
2	DBH PPh Pasal 21-LO	12.814.144.467,00	0,00	12.814.144.467,00	100,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.923.301.189,00	15.844.836.525,00	(13.921.535.336,00)	(87,86)
4	DBH CHT-LO	18.869.686.953,00	17.807.484.501,00	1.062.202.452,00	5,96
Jumlah		**40.166.104.937,00**	**38.437.519.928,00**	**1.728.585.009,00**	**4,50**

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp62.843.585.093,00, yaitu terdiri dari:

Tabel 150 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	56.796.182.846,00	30.381.098.207,00	26.415.084.639,00	86,95
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	1.077.875.887,00	2.765.293.225,00	(1.687.417.338,00)	(61,02)
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	27.552.000,00	43.951.426,00	(16.399.426,00)	(37,31)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	6.773.000,00	50.275.325,00	(43.502.325,00)	(86,53)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.467.665.656,00	744.964.365,00	2.722.701.291,00	365,48
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	339.216.704,00	438.284.173,00	(99.067.469,00)	(22,60)
7	DBH SDA Perikanan-LO	1.128.319.000,00	1.013.899.150,00	114.419.850,00	11,29
Jumlah		**62.843.585.093,00**	**35.437.765.871,00**	**27.405.819.222,00**	**77,34**

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 adalah sebesar Rp62.843.585.093,00, terdapat kenaikan sebesar Rp27.405.819.222,00 atau 77,34% dibandingkan Tahun 2020.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Tahun 2021 sebesar Rp731.754.165.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp-8.125.201.000,00atau1,10%dibandingkan dengan Tahun 2020.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sebesar Rp288.539.572.499,00 merupakan Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari:

- Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp	103.027.786.121,00
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	185.511.786.378,00
	Rp	288.539.572.499,00

Dari total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Perimbangan LO sebesar Rp1.123.303.427.529,00, terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp1.130.204.605.402,00 selisih sebesar

Rp6.901.177.873,00 merupakan penerimaan piutang yang tidak masuk di LO

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya senilai Rp28.354.469.000.00 merupakan Dana Penyesuaian Tahun 2021

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp28.354.469.000,00.

Terjadi penurunan sebesar Rp159.503.280.524,00 atau 84,91% dikarenakan Dana Penyesuaian Tahun 2020 sebesar Rp187.857.749.524,00 masuk ke kelompok Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Tabel 151 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0.00	143.475.785.000,00	(143.475.785.000,00)	(100,00)
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	221.125.000,00	(221.125.000,00)	(100,00)
3	**DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	10.144.691.750,00	(10.144.691.750,00)	(100,00)
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	2.077.715.000,00	(2.077.715.000,00)	(100,00)
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	0,00	0,00	
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	29.313.115.389,00	(29.313.115.389,00)	(100,00)
8	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	477.972.500,00	(477.972.500,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik -Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.908.256.885,00	(1.908.256.885,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	0,00	239.088.000,00	(239.088.000,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	
13	Dana Insentif Daerah (DID)	28.354.469.000,00	0,00	28.354.469.000,00	
Jumlah		**28.354.469.000,00**	**187.857.749.524,00**	(159.503.280.524,00)	(84,91)

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp101.005.075.416,14 yang terdiri atas:

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp101.005.075.416,14.

Terjadi kenaikan sebesar Rp8.445.441.189,14 atau 9,12% dari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 152 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.464.103.538,00	78.590.785.207,00	16.873.318.331,00	21,47
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.540.971.857,14	13.968.849.000,00	(8.427.877.142,86)	(60,33)
Jumlah		**101.005.075.416,14**	**92.559.634.207.,00**	8.445.441.189,14	9,12

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp95.464.103.538,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.873.318.331,00 atau 21,47% dibandingkan Tahun 2020.

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan ini merupakan pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar Rp5.540.971.857,14. Dibandingkan dengan Tahun 2020, penerimaan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp8.427.877.142,86 atau 60,33%.

Dari total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp101.005.075.395,14, terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp101.297.651.471,14 terjadi selisih sebesar Rp292.576.076,00 merupakan penambahan piutang sebesar Rp7.250.848.664,00 dan pelunasan piutang sebesar Rp7.543.424.740.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Trasfer-LO mengalami kenaikan sebesar Rp9.298.098.037,14 atau 0,75% dibandingkan Tahun 2020.

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 senilai Rp110.903.311.673,09 mengalami kenaikan sebesar Rp39.477.746.415,89 atau 55,27% yang terdiri dari:

Tabel 153 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah-LO	39.440.484.629,00	13.763.325.257,20	25.677.159.371,8	186,56
3	Pendapatan Lainnya	71.462.827.044,09	57.662.240.000,00	13.800.587.044,09	23,93
Jumlah		**110.903.311.673,09**	**71.425.565.257,20**	**39.477.746.415,89**	55,27

1.3.1 Pendapatan Hibah– LO

Pendapatan Hibah -LO Tahun 2021 sebesar Rp39.440.484.629,00 merupakan pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 154 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	30.141.569.686,00	6.210.120.543,20	23.931.449.142,80	385,36
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	8.325.324.572,00	7.548.704.714,00	776.619.858,00	10,29
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	312.893.117,00	4.500.000,00	308.393.117,00	6.853,18
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	660.697.254,00	0,00	660.697.254,00	100,00
Jumlah		**39.440.484.629,00**	**13.763.325.257,20**	**25.677.159.371,80**	**186,56**

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp30.141.569.686,00 berupa penerimaan kas sebesar Rp1.008.000.000.00 Sedangkan berupa barang senilai Rp29.133.569.686,00yang diterima oleh beberapa SKPD sebagai berikut:

   1. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.191.202.000,00 terdiri dari:
      - Hibah Pusat Peralatan Dan Mesin SD Negeri 1 Gondang, SD Negeri 1 Mendolo Lor, SD Negeri 1 Mlati, SD Negeri 1 Sidomulyo, SD Negeri 1 Tambakrejo, SD Negeri 1 Watupatok, SD Negeri 2 Sekar, SD Negeri 3 Ploso, Dan SD Negeri Watukarung Rp837.882.000,00
      - Hibah Pusat Peralatan Dan Mesin SMP Negeri 5 Ngadirojo Satu Atap, SMP Negeri Satu Atap 3 Arjosari, SMP Negeri 3 Kebonagung Satu Atap, Dan SMP Negeri 4 Arjosari Satu Atap Rp353,320,000,00
   2. Dinas Kesehatan sebesar Rp288.075.064,00 terdiri dari:
      hibah masuk dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berupa alat penunjang dan alat laboratorium sebesar Rp127.823.674,00
      Hibah masuk alat kedokteran dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp56.283.260,00
      Hibah Masuk tas obat vaksin dan thermometer dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal P2P Rp20.700.000,00
      Hibah masuk lansia kit dari Kemenkes RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Rp17.578.990,00

Hibah masuk tabung 02 dan oxygen concentrator dari Kementerian Perindustrian RI Rp65.689.140,00

3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp27.076.719.022,00 terdiri dari:
   - Hibah Masuk Bangunan Flat/ Rumah Susun Jumlah 1 Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2019 sebesar Rp9.889.551.032,00
   - Hibah Masuk Jembatan Jumlah 4 Dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp17.187.167.990,00

4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp412.269.000 merupakan Hibah APBN berupa Blangko Kependudukan

5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp16,373,500,00 berupa Hibah dari Kementrian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal peralatan komputer dan jaringan

6 Dinas Perpustakaan sebesar Rp 148.931.100,00 berupa peralatan komputer jaringan dan alat rumah tangga

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp8.325.324.572,00 merupakan hibah berupa barang yang berada pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.226.806.865,00
   - hibah oxygen concentrator dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp312.000.000,00
   - hibah masuk obat dari Provinsi sebesar Rp6.914.806.865,00
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebesar Rp Rp1.098.517.707,00 Hibah Masuk (Obat-Obatan) dan mutasi masuk thermogun dari Provinsi

3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO Rp312.893.117,00 merupakan hibah berupa barang yang berada pada beberapa SKPD sebagai berikut

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.300.000,00 Hibah Masuk dari Komite Sekolah
2. BPKAD sebesar Rp311.593.117,00
   Hibah Masuk Gedung YABIRp65.362.500,00
   Hibah Masuk Thermogun dari KPU tahap 1 sebesar Rp167.795.865,00
   Hibah Masuk Thermogun dari KPU tahap 2 sebesar Rp78.434.752,00

4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LORp660.697.254,00 merupakan hibah berupa barang yang berada pada beberapa SKPD sebagai berikut

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp125.000,00 Hibah Masuk Yayasan Literasi Anak Indonesia berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp660.572.254,00 obat hibah masuk dari lintas sektor

1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya sejumlah Rp71.462.827.044,09 Tahun 2021 merupakan pendapatan hibah.

Pendapatan Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp71.462.827.044,09 mengalami kenaikan sebesar Rp13.800.587.044,09 atau 23,93% dikarenakan ada reklas rekening FKTP dari rekening PAD (Lain-lain PAD yang Sah- LO) dan adanya pendapatan atas pengembalian tahun lalu yang signifikan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 155 Rincian Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS -LO	47.700.990.000,00	57.662.240.000,00	(9.961.250.000)	(17,28)
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	5.695.350.211,09	0,00	5.695.350.211,09	100
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP non BLUD-LO	18.066.486.833,00	0,00	18.066.486.833,00	100
Jumlah		**71.462.827.044,09**	**57.662.240.000,00**	**13.800.587.044,09**	**23,93**

	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
2. Beban	**1.567.220.192.362,96**	**1.525.639.163.733,89**	**41.581.028.629,07**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Tahun 2021 beban terealisasi sebesar Rp1.567.220.192.362,96. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.525.639.163.733,89 tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp41.581.028.629,07 atau sebesar 2,73%. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 156 Beban Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	700.712.448.457,77	636.133.907.404,00	64.578.541.053,77	10,15
2	Beban Persediaan	138.000.240.944,42	81.274.908.670,79	56.725.332.273,63	69,79
3	Beban Jasa	143.908.302.269,61	220.145.004.695,52	(76.236.702.425,91)	(34,63)
4	Beban Pemeliharaan	14.391.030.452,12	8.290.991.533,80	6.100.038.918,32	73,57
5	Beban Perjalanan Dinas	38.019.490.430,00	41.856.514.505,25	(3.837.024.075,25)	(9,17)
6	Beban Bunga	0	0	0,00	0’00
7	Beban Subsidi	0	0	0,00	0’00
8	Beban Hibah	141.190.540.141,61	94.602.887.792,55	46.587.652.349,06	49,25
9	Beban Bantuan Sosial	3.588.908.900,00	10.749.680.534,00	(7.160.771.634,00)	(66,61)
10	Beban Penyusutan	241.612.151.794,18	229.311.322.531,38	12.300.829.262,80	5,36
11	Beban Transfer	142.732.793.953,20	180.321.315.575,56	(37.588.521.622,36)	(20,85)
12	Beban Lain-lain	3.064.285.020,05	22.952.630.491,04	(19.888.345.470,99)	(86,65)
Jumlah		**1.567.220.192.362,96**	**1.525.639.163.733,89**	**41.581.028.629,07**	**2,73**

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp700.712.448.457,77 mengalami kenaikan sebesar Rp64.578.541.053,77 atau 10,15% dari realisasi tahun sebelumnya. Beban Pegawai terdiri dari.

Tabel 157 Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	451.903.613.526,00	597.945.028.329,00	(146.041.414.803,00)	(24,42)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	28.067.946.283,00	17.829.881.639,00	10.238.064.644,00	57,42
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	194.216.999.194,29	0,00	194.216.999.194,29	100,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.018.427.989,00	0,00	18.018.427.989,00	100,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	396.397.740,00	0,00	396.397.740,00	100,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	851.960.000,00	6.196.430.950,00	(5.344.470.950,00)	(86,25)
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	1.547.857.821,00	(1.547.857.821,00)	(100,00)
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	536.949.255,00	(536.949.255,00)	(100,00)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Uang Lembur	0,00	791.338.000,00	(791.338.000,00)	(100,00)
10	Beban BOS	0,00	11.286.421.410,00	(11.286.421.410,00)	(100,00)
11	Beban Pegawai BLUD	7.257.103.725,48	0,00	7.257.103.725,48	100,00
JUMLAH		**700.712.448.457,77**	**636.133.907.404,00**	64.578.541.053,77	**10,15**

Dibandingkan dengan Tahun 2020, kenaikan belanja pegawai Tahun 2021 terbesar yaitu pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Beban Gaji dan Tunjangan.

2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2021 sebesar Rp451.903.613.526,00 yang terdiri dari:

Tabel 158 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	343.987.963.742,00	349.584.626.328,00	(5.596.662.586,00)	(1,60)
2	Tunjangan Keluarga - LO	30.590.283.840,00	31.032.145.533,00	(441.861.693,00)	(1,42)
3	Tunjangan Jabatan - LO	6.336.920.110,00	8.527.889.000,00	(2.190.968.890,00)	(25,69)
4	Tunjangan Fungsional - LO	21.965.946.970,00	23.321.387.750,00	(1.355.440.780,00)	(5,81)
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	5.446.341.500,00	4.411.381.688,00	1.034.959.812,00	23,46
6	Tunjangan Beras - LO	18.250.615.309,00	15.506.296.917,00	2.744.318.392,00	17,70
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.051.793.406,00	2.185.311.720,00	(133.518.314,00)	(6,11)
8	Pembulatan Gaji - LO	4.947.664,00	6.233.107,00	(1.285.443,00)	(20,62)
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	20.446.834.631,00	14.317.924.775,00	6.128.909.856,00	42,81
10	Uang Paket - LO	-	84.766.500,00	(84.766.500,00)	(100,00)
11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO	-	28.272.825,00	(28.272.825,00)	(100,00)
12	Tunjangan Komisi - LO	-	55.814.850,00	(55.814.850,00)	(100,00)
13	Tunjangan Badan Anggaran - LO	-	28.272.825,00	(28.272.825,00)	(100,00)
14	Tunjangan Badan Kehormatan - LO	-	7.856.100,00	(7.856.100,00)	(100,00)
15	Tunjangan Perumahan - LO	-	4.091.150.000,00	(4.091.150.000,00)	(100,00)
16	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	-	10.710.000,00	(10.710.000,00)	(100,00)
17	Tunjangan Profesi Guru - LO	-	136.271.171.140,00	(136.271.171.140,00)	(100,00)
18	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	-	2.873.417.271,00	(2.873.417.271,00)	(100,00)
19	Tunjangan Reses	-	1.396.500.000,00	(1.396.500.000,00)	(100,00)
20	Tunjangan Transportasi	-	3.977.100.000,00	(3.977.100.000,00)	(100,00)
21	Dana Operasional	-	226.800.000,00	(226.800.000,00)	(100,00)
22	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	-
23	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	705.937.828,00	-	705.937.828,00	100,00
24	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.116.028.526,00	-	2.116.028.526,00	100,00
25	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-
Jumlah		**451.903.613.526,00**	**597.945.028.329,00**	**(146.041.414.803,00)**	**(24,42)**

Terdapat penurunan sebesar Rp146.041.414.803,00, atau 24,42% dari Tahun 2020.

2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2021 sebesar Rp28.067.946.283,00 yang terdiri dari:

Tabel 159 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	14.332.084.997,00	17.149.381.639,00	(2.817.296.642,00)	(16,43)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	13.735.861.286,00	0,00	13.735.861.286,00	100,00
2	Tambahan Penghasilan Guru - LO	0,00	680.500.000,00	(680.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		**28.067.946.283,00**	**17.829.881.639,00**	**10.238.064.644,00**	57,42

Terdapat kenaikan sebesar Rp10.238.064.644,00 atau 57,42% dari realisasi Tahun 2020.

2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2021 sebesar Rp194.216.999.194,29 yang terdiri dari :

Tabel 160 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	892.362.903,00	0,00	892.362.903,00	100,00
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	260.294.998,00	0,00	260.294.998,00	100,00
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	150.111.179.489,00	0,00	150.111.179.489,00	100,00
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	948.250.000,00	0,00	948.250.000,00	100,00
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	33.140.457.803,29	0,00	33.140.457.803,29	100,00
6	Beban Honorarium	8.344.914.000,00	0,00	8.344.914.000,00	100,00
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	519.540.001,00	0,00	519.540.001,00	100,00
Jumlah		194.216.999.194,29	**0,00**	194.216.999.194,29	**100,00**

Terdapat kenaikan sebesar Rp194.216.999.194,29 atau 100% dari realisasi Tahun 2020.

2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021 sebesar Rp18.018.427.989,00 yang terdiri dari:

Tabel 161 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Uang Representasi DPRD	991.410.000,00	0.00	991.410.000,00	100
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	93.865.800,00	0.00	93.865.800,00	100
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	109.933.560,00	0.00	109.933.560,00	100
4	Beban Uang Paket DPRD	85.113.000,00	0.00	85.113.000,00	100
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.437.544.500,00	0.00	1.437.544.500,00	100
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139.080.375,00	0.00	139.080.375,00	100
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.607.000.000,00	0.00	5.607.000.000,00	100
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.386.000.000,00	0.00	1.386.000.000,00	100
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan	42.294,00	0.00	42.294,00	100
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.228.688.460,00	0.00	4.228.688.460,00	100

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.936.600.000,00	0.00	3.936.600.000,00	100
12	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	0.00	3.150.000,00	100
Jumlah		**18.018.427.989,00**	0.00	**18.018.427.989,00**	**100**

Terdapat kenaikan sebesar Rp18.018.427.989,00 atau 100% dari realisasi Tahun 2020.

2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 sebesar Rp396.397.740,00 yang terdiri dari :

Tabel 162 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	100,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.318.000,00	0,00	3.318.000,00	100,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.370.000,00	0,00	98.370.000,00	100,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.693.420,00	0,00	3.693.420,00	100,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.786.380,00	0,00	1.786.380,00	100,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.620,00	0,00	1.620,00	100,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.359.040,00	0,00	5.359.040,00	100,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	112.320,00	100,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	336.960,00	100,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	200.895.000,00	0,00	200.895.000,00	100,00
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	27.925.000,00	0,00	27.925.000,00	100,00
Jumlah		**396.397.740,00**	**0,00**	**396.397.740,00**	**100,00**

Terdapat kenaikan sebesar Rp396.397.740,00 atau 100% dari realisasi Tahun 2020.

2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 163 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD – LO		5.596.500.000,00	(5.596.500.000,00)	(100,00)
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	599.960.000,00	581.935.000,00	18.025.000,00	3,10
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Lainnya – LO		17.995.950,00	(17.995.950,00)	(100,00)
4	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	0,00	252.000.000,00	100,00
Jumlah		**851.960.000,00**	**6.196.430.950,00**	**(5.344.470.950,00)**	(86,25)

Terdapat penurunan sebesar Rp5.344.470.950,00 atau 86,25% dari Tahun 2020.

2.1.7 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp0 Terdapat penurunan sebesar Rp1.547.857.821,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.1.8 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp0 Terdapat penurunan sebesar Rp536.949.255,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.1.9 Uang Lembur

Uang Lembur Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Terdapat penurunan sebesar Rp791.338.000,00 atau 100% dari beban Tahun 2020.

2.1.10 Beban BOS

Beban BOS Tahun 2020 sebesar Rp0. Terdapat penurunan sebesar Rp11.286.421.410,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.1.11 Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD sebesar Rp7.257.103.725,48. Terdapat kenaikan sebesar 100% dari Tahun 2020

2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2021 senilai Rp 138.000.240.944,42 terdiri dari.

Tabel 164 Beban Persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	137.958.352.944,42	21.549.374.269,04	116.408.978.675,38	540,20
2	Beban Persediaan Bahan/ Material		17.544.658.499,87	(17.544.658.499,87)	(100,00)
3	Beban Penggantian Suku Cadang		1.624.889.281,00	(1.624.889.281,00)	(100,00)
4	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		586.874.260,00	(586.874.260,00)	(100,00)
5	Beban Cetak		6.245.237.122,03	(6.245.237.122,03)	(100,00)
6	Beban Makanan dan Minuman		11.876.594.789,00	(11.876.594.789,00)	(100,00)
7	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		1.108.453.250,00	(1.108.453.250,00)	(100,00)
8	Belanja Pakaian Kerja		1.813.375.194,85	(1.813.375.194,85)	(100,00)
9	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		1.239.577.100,00	(1.239.577.100,00)	(100,00)
10	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		17.635.874.905,00	(17.635.874.905,00)	(100,00)
11	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
12	Beban Barang Tak Habis Pakai	41.888.000,00	0,00	41.888.000,00	100,00
Jumlah		**138.000.240.944,42**	**81.274.908.670,79**	**56.725.332.273,63**	**69,79**

Tahun 2021 terdapat kenaikan Beban Persediaan sebesar Rp56.725.332.273,63 atau 69,79% dari beban tahun lalu. kenaikan terbesar dari total kenaikan Beban Persediaan terjadi pada Beban Pakai Habis yaitu sebesar Rp137.958.352.944,42 atau 540,20% dari beban tahun sebelumnya.

2.2.1 Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2021 sebesar Rp137.958.352.944,42 yang terdiri dari.

Tabel 165 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	4.691.622.411,70	6.120.661.094,23	(1.429.038.682,53)	(23,35)
2	Beban Persediaan dokumen/ administrasi tender	0,00	5.475.000,00	(5.475.000,00)	(100)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.648.670.729,00	1.295.223.027,00	353.447.702,00	27,29
4	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	256.352.060,00	178.423.000,00	77.929.060,00	43,68
5	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	1.666.406.863,00	(1.666.406.863,00)	(100)
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	2.935.668.589,00	(2.935.668.589,00)	(100)
7	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	0,00	33.581.400,00	(33.581.400,00)	(100)
8	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	3.680.322.861,00	145.331.000,00	3.534.991.861,00	2432,37
9	Beban Persediaan Peralatan Penunjang Kesehatan	0,00	8.949.028.715,81	(8.949.028.715,81)	(100)
10	Beban Persediaan Pengadaan blanko Cek/Giro	0,00	10.072.000,00	(10.072.000,00)	(100)
11	Beban Persediaan Dokumentasi/ Dekorasi	0,00	209.503.580,00	(209.503.580,00)	(100)
12	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.514.604.205,00	0,00	4.514.604.205,00	100
13	Beban Bahan-Bahan Kimia	7.283.467.912,00	0,00	7.283.467.912,00	100
14	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.100.010.168,00	0,00	3.100.010.168,00	100
15	Beban Bahan-Bahan Baku	140.243.830,00	0,00	140.243.830,00	100
16	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	185.754.996,00	0,00	185.754.996,00	100
17	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	24.956.400,00	0,00	24.956.400,00	100
18	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	109.802.270,68	0,00	109.802.270,68	100
19	Beban Bahan-Bahan Lainnya	817.642.346,00	0,00	817.642.346,00	100
20	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	571.053.136,00	0,00	571.053.136,00	100
21	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	213.482.500,00	0,00	213.482.500,00	100
22	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	23.540.000,00	0,00	23.540.000,00	100
23	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	340.050.595,00	0,00	340.050.595,00	100
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.504.375.920,67	0,00	4.504.375.920,67	100
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.469.399.098,55	0,00	11.469.399.098,55	100
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	3.482.128.116,60	0,00	3.482.128.116,60	100
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.844.400.711,58	0,00	5.844.400.711,58	100
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	923.235.650,00	0,00	923.235.650,00	100
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.185.150,00	0,00	25.185.150,00	100
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	1.188.687.872,00	0,00	1.188.687.872,00	100
31	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.655.635.358,65	0,00	9.655.635.358,65	100
32	Beban Obat-Obatan-Obat	28.801.181.421,01	0,00	28.801.181.421,01	100
33	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan	22.708.439.202,08	0,00	22.708.439.202,08	100

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
	Lainnya				
34	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	112.817.885,30	0,00	112.817.885,30	100
35	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lai	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	362.268.830,00	0,00	362.268.830,00	100
37	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.835.756.845,00	0,00	1.835.756.845,00	100
38	Beban Natura dan Pakan-Paka	332.478.890,00	0,00	332.478.890,00	100
39	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	528.000,00	0,00	528.000,00	100
40	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.261.373.807,00	0,00	11.261.373.807,00	100
42	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	650.966.904,00	0,00	650.966.904,00	100
43	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.636.807.950,00	0,00	1.636.807.950,00	100
44	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.119.985.869,60	0,00	3.119.985.869,60	100
45	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	490.938.765,00	0,00	490.938.765,00	100
46	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	100
47	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	36.671.250,00	0,00	36.671.250,00	100
48	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.817.500,00	0,00	9.817.500,00	100
49	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	100
50	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	239.035.990,00	0,00	239.035.990,00	100
51	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.680.000,00	0,00	64.680.000,00	100
52	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0	0,00	0,00	0,00
53	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	0,00	0,00	0,00
54	Beban Pakaian KORPRI	16.816.250,00	0,00	16.816.250,00	100
55	Beban Pakaian Adat Daerah	46.134.000,00	0,00	46.134.000,00	100
56	Beban Pakaian Batik Tradisional	552.530.180,00	0,00	552.530.180,00	100
57	Beban Pakaian Olahraga	841.906.107,00	0,00	841.906.107,00	100
58	Beban Pakaian Paskibraka	17.963.000,00	0,00	17.963.000,00	100
59	Beban Pakaian Jas/Safari	16.280.000,00	0,00	16.280.000,00	100
Jumlah		**137.958.352.944,42**	**21.549.374.269,04**	**116.408.978.675,38**	**540,20**

Terjadi kenaikan sebesar Rp116.408.978.675,38 atau 540,20% dari beban habis pakai Tahun 2020.

2.2.2 Beban Persediaan Bahan/Material

Beban Persediaan Bahan/Material Tahun 2021 sebesar Rp0. Terjadi penurunan sebesar Rp17.544.658.499,87 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.3 Beban Penggantian Suku Cadang

Beban Penggantian Suku Cadang pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp0. Beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.624.889,87 atau 100% dari beban Tahun 2020.

2.2.4 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun 2021 sebesar Rp0. mengalami penurunan sebesar Rp586.874.260,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.5 Beban Cetak

Beban Cetak Tahun 2021 sebesar Rp0. mengalami penurunan sebesar Rp6.245.237.122,03 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.6 Beban Makanan dan Minuman

Beban Makanan dan Minuman Tahun 2021 sebesar Rp0. mengalami penurunan sebesar Rp11.876.594.789,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.7 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2021 sebesar Rp0. mengalami penurunan sebesar Rp1.108.453.250,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.8 Beban Pakaian Kerja

Beban Pakaian Kerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp0. Beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.813.375.194,85 atau 100% dari beban tahun lalu.

2.2.9 Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu

Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu Tahun 2021 sebesar Rp0, beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.239.577.100,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.10 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2020 sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar Rp17.635.874.905,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.11 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2021 sebesar Rp0, Mengalami penurunan sebesar Rp50.000.000,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.2.12 Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2021 sebesar Rp41.888.000,00 Terdiri dari :

Tabel 166 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	24.114.200,00		24.114.200,00	100,00
2	Beban Pipa-Pipa Lainnya	17.773.800,00		17.773.800,00	100,00
Jumlah		**41.888.000,00**	**0,00**	**41.888.000,00**	100,00

2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun 2021 mencapai Rp143.908.302.269,61. Terjadi penurunan sebesar Rp76.236.702.425,91 atau 34,63% dari beban Tahun 2020. Beban Jasa tersebut dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 167 Beban Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	110.386.239.781,00	59.307.431.369,92	51.078.808.411,08	86,13
2	Beban Premi Asuransi	14.302.434.375,00	3.935.155.731,00	10.367.278.644,00	263,45
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		1.146.785.149,00	(1.146.785.149,00)	(100,00)
4	Beban Penggandaan		2.631.144.163,00	(2.631.144.163,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir		1.001.828.350,00	(1.001.828.350,00)	(100,00)
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas		941.218.400,00	(941.218.400,00)	(100,00)
7	Beban Sewa Alat Berat		9.999.000,00	(9.999.000,00)	(100,00)
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		1.676.133.970,00	(1.676.133.970,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Konsultasi		2.961.546.625,00	(2.961.546.625,00)	(100,00)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		220.000.000,00	(220.000.000,00)	(100,00)
11	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	683.620.832,00	1.482.290.000,00	(798.669.168,00)	(53,88)
12	Honorarium PNS	0,00	21.818.360.662,00	(21.818.360.662,00)	(100,00)
13	Honorarium Non PNS	0,00	1.515.302.300,00	(1.515.302.300,00)	(100,00)
14	Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit	11.494.175.101,61	84.751.693.281,60	(73.257.518.179,99)	(86,44)
15	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	28.167.290.385,00	(28.167.290.385,00)	(100,00)
16	Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	438.920.100,00	(438.920.100,00)	(100,00)
17	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	8.139.905.209,00	(8.139.905.209,00)	(100,00)
18	Beban Sewa Tanah	335.750.000,00	0,00	335.750.000,00	100,00
19	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.099.110.070,00	0,00	1.099.110.070,00	100,00
20	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	482.725.700,00	0,00	482.725.700,00	100,00
21	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	23.827.650,00	0,00	23.827.650,00	100,00
22	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.261.662.650,00	0,00	3.261.662.650,00	100,00
23	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.216.159.000,00	0,00	1.216.159.000,00	100,00
24	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	474.706.250,00	0,00	474.706.250,00	100,00
25	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	147.890.860,00	0,00	147.890.860,00	100,00
Jumlah		**143.908.302.269,61**	**220.145.004.695,52**	**(76.236.702.425,91)**	(34,63)

2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2021 sebesar Rp110.386.239.781,00 yang terdiri dari:

Tabel 168 Beban Jasa Kantor Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Jasa telepon	0,00	626.404.671,00	(626.404.671,00)	(100,00)
2	Beban Jasa air	0,00	170.103.180,00	(170.103.180,00)	(100,00)
3	Beban Jasa listrik	0,00	9.129.781.103,00	(9.129.781.103,00)	(100,00)
4	Beban Jasa surat kabar/majalah	335.533.000,00	277.316.400,00	58.216.600,00	20,99
5	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	3.117.260.532,00	1.239.855.562,00	1.877.404.970,00	151,42
6	Beban Jasa paket/pengiriman	44.554.725,00	5.868.000,00	38.686.725,00	659,28
7	Beban Jasa Sertifikasi	0,00	14.812.320,00	(14.812.320,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Transaksi Keuangan	84.100,00	335.600,00	(251.500,00)	(74,94)
9	Beban Jasa administrasi pemungutan Pajak daerah dan PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa administrasi penyelesaian perkara	0,00	12.600.000,00	(12.600.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
11	Beban *Software*	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
12	Beban Pemasangan iklan	1.263.294.000,00	628.868.800,00	634.425.200,00	100,88
13	Beban Layanan Kesehatan	0,00	16.624.365.268,00	(16.624.365.268,00)	(100,00)
14	Beban Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Jasa Media	0,00	178.309.000,00	(178.309.000,00)	(100,00)
16	Beban Akomodasi	0,00	116.248.807,00	(116.248.807,00)	(100,00)
17	Beban Jasa Laundry	0,00	70.431.050,00	(70.431.050,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Medis/Paramedis	0,00	5.590.196.796,00	(5.590.196.796,00)	(100,00)
19	Beban Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	0,00	1.116.100.330,00	(1.116.100.330,00)	(100,00)
20	Beban Jasa Cleaning Service	0,00	825.902.416,00	(825.902.416,00)	(100,00)
21	Beban Jasa Teknis	0,00	6.276.236.299,18	(6.276.236.299,18)	(100,00)
22	Beban Jasa Pihak Ketiga	0,00	4.126.330.420,74	(4.126.330.420,74)	(100,00)
23	Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	0,00	244.500.000,00	(244.500.000,00)	(100,00)
24	Beban Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	31.350.000,00	(31.350.000,00)	(100,00)
25	Beban Uang untuk diberikan kepada siswa / pelajar	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Jasa Profesi	0,00	14.700.000,00	(14.700.000,00)	(100,00)
27	Belanja Biaya Retribusi	0,00	42.985.902,00	(42.985.902,00)	(100,00)
28	Beban Insentif Nakes Yang Menangani COVID-19	11.055.000.527,00	11.933.829.445,00	(878.828.918,00)	(7,36)
29	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.757.502.000,00	0,00	2.757.502.000,00	100,00
30	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.508.399.000,00	0,00	3.508.399.000,00	100,00
31	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampinga	531.500.000,00	0,00	531.500.000,00	100,00
33	Beban Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
34	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00	100,00
35	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	13.965.000,00	0,00	13.965.000,00	100,00
36	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.657.500.000,00	0,00	1.657.500.000,00	100,00
37	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	392.500.000,00	0,00	392.500.000,00	100,00
38	Beban Jasa Tenaga Pendidik	20.841.294.000,00	0,00	20.841.294.000,00	100,00
39	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	9.474.770.035,00	0,00	9.474.770.035,00	100,00
40	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	104.238.912,00	0,00	104.238.912,00	100,00
41	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.155.564.295,00	0,00	3.155.564.295,00	100,00
42	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.448.250.000,00	0,00	1.448.250.000,00	100,00
43	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.900.600.000,00	0,00	6.900.600.000,00	100,00
44	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	275.100.000,00	0,00	275.100.000,00	100,00
45	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Panga	126.500.000,00	0,00	126.500.000,00	100,00
46	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	834.140.400,00	0,00	834.140.400,00	100,00
47	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan	24.440.000,00	0,00	24.440.000,00	100,00

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
	Kebudayaan				
48	Beban Jasa Tenaga Administrasi	11.907.777.852,00	0,00	11.907.777.852,00	100,00
49	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	981.829.000,00	0,00	981.829.000,00	100,00
50	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	683.300.000,00	0,00	683.300.000,00	100,00
51	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.833.006.379,00	0,00	2.833.006.379,00	100,00
52	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.544.502.942,00	0,00	3.544.502.942,00	100,00
53	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.289.990.000,00	0,00	1.289.990.000,00	100,00
54	Beban Jasa Tenaga Supir	188.900.000,00	0,00	188.900.000,00	100,00
55	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	690.600.000,00	0,00	690.600.000,00	100,00
56	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	65.200.000,00	0,00	65.200.000,00	100,00
57	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	100,00
58	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	885.055.770,00	0,00	885.055.770,00	100,00
59	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	71.359.100,00	0,00	71.359.100,00	100,00
60	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
61	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	122.634.885,00	0,00	122.634.885,00	100,00
62	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	899.599.500,00	0,00	899.599.500,00	100,00
63	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	68.947.500,00	0,00	68.947.500,00	100,00
64	Beban Jasa Kalibrasi	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	100,00
65	Beban Jasa Pengolahan Sampah	809.458.992,00	0,00	809.458.992,00	100,00
66	Beban Jasa Pengukuran Tanah	106.269.111,00	0,00	106.269.111,00	100,00
67	Beban Jasa Jalan/Tol	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00	100,00
68	Beban Tagihan Telepon	472.228.722,00	0,00	472.228.722,00	100,00
69	Beban Tagihan Air	262.069.272,00	0,00	262.069.272,00	100,00
70	Beban Tagihan Listrik	11.176.113.842,00	0,00	11.176.113.842,00	100,00
71	Beban Penambahan Daya	4.492.500,00	0,00	4.492.500,00	100,00
72	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perijinan	349.750.388,00	0,00	349.750.388,00	100,00
73	Beban Pengolahan Air Limbah	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
74	Beban Lembur	1.828.983.250,00	0,00	1.828.983.250,00	100,00
75	Beban Medical Check Up	37.977.750,00	0,00	37.977.750,00	100,00
76	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	3.125.162.500,00	0,00	3.125.162.500,00	100,00
Jumlah		**110.386.239.781,00**	**59.307.431.369,92**	**51.078.808.411,08**	**86,13**

Terjadi kenaikan sebesar Rp51.078.808.411,08 atau 86.13% dari tahun sebelumnya.

2.3.2 Beban Premi Asuransi

Beban Premi Asuransi Tahun 2021 sebesar Rp14.302.434.375,00 yang terdiri dari:

Tabel 169 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.275.599.932,00		2.275.599.932,00	100,00
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.601.113.400,00		10.601.113.400,00	100,00
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.218.926.200,00		1.218.926.200,00	100,00
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non AS	158.287.818,00	3.935.155.731,00	(3.776.867.913,00)	(95,98)
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non AS	48.507.025,00		48.507.025,00	100,00
Jumlah		**14.302.434.375,00**	**3.935.155.731,00**	**10.367.278.644,00**	**263,45**

Terjadi kenaikan sebesar Rp10.367.278.644,00 atau 263,45% dari tahun sebelumnya.

2.3.3 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.146.785.149,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.3.4 Beban Penggandaan

Beban Pengadaan sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp2.631.144.163,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.3.5 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.001.828.350,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.6 Beban sewa Sarana Mobilitas

Beban Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp941.218.400,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.7 Beban Sewa Alat Berat

Beban Sewa Alat Berat sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp9.999.000,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.3.8 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.676.133.970,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.3.9 Beban Jasa Konsultasi

Beban Jasa Konsultasi Sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp2.961.546.625,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.10 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp220.000.000,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.11 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2021 sebesar Rp683.620.832,00 yang terdiri dari :

Tabel 170 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	341.581.307,00	675.292.300,00	(333.710.993,00)	(49,42)
2	Beban bimbingan teknis	259.539.525,00	22.619.100,00	236.920.425,00	1.047,44
3	Beban Diklat Kepemimpinan	82.500.000,00	784.378.600,00	(701.878.600,00)	(89,48)
Jumlah		**683.620.832,00**	**1.482.290.000,00**	**(798.669.168,00)**	**(53,88)**

Terjadi penurunan sebesar Rp798.669.168,00 atau 53,88%dari tahun sebelumnya.

2.3.12 Beban Honorarium PNS

Beban Honorarium PNS sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp21.818.360.662,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.13 Beban Honorarium Non PNS

Beban Honorarium Non PNS sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.515.302.300,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.14 Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD

Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD sebesar Rp11.494.175.101,61. Terjadi penurunan sebesar Rp73.257.518.179,99 atau 2,30% dari Tahun 2020

2.3.15 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp28.167.290.385,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.16 Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp438.920.100,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.17 Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp8.139.905.209,00 atau 100% dari Tahun 2020

2.3.18 Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Tahun 2021 sebesar Rp335.750.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 171 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	100,00
2	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	225.750.000,00	0,00	225.750.000,00	100,00
3	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	-	100,00
Jumlah		**335.750.000,00**	**0,00**	**335.750.000,00**	100,00

Terjadi kenaikan sebesar Rp335.750.000,00 atau 100%dari tahun sebelumnya.

2.3.19 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.099.110.070 yang terdiri dari :

Tabel 172 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Excavator	7.392.000,00	0,00	7.392.000,00	100,00
2	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.181.900,00	0,00	2.181.900,00	100,00
3	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	500.332.100,00	0,00	500.332.100,00	100,00
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.110.000,00	0,00	24.110.000,00	100,00
6	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	100,00
7	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	220.825.000,00	0,00	220.825.000,00	100,00
8	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
9	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	156.497.070,00	0,00	156.497.070,00	100,00
10	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
12	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
13	Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	100,00
14	Beban Sewa Personal Computer	171.072.000,00	0,00	171.072.000,00	100,00
15	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah		**1.099.110.070,00**	**0,00**	**1.099.110.070,00**	100,00

Terjadi kenaikan sebesar Rp1.009.110.070,00 atau 100% dari Tahun 2020.

2.3.20 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp482.725.700,00 yang terdiri dari:

Tabel 173 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	406.365.700,00	0,00	406.365.700,00	100,00
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	76.360.000,00	0,00	76.360.000,00	100,00
Jumlah		**482.725.700,00**	**0,00**	**482.725.700,00**	100,00

Terjadi penurunan sebesar Rp482.725.700,00 atau 100% dari Tahun Sebelumnya.

2.3.21 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.827.650,00 yang terdiri dari :

Tabel 174 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	10.895.500,00	0,00	10.895.500,00	100,00
2	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	12.932.150,00	0,00	12.932.150,00	100,00
Jumlah		**23.827.650,00**	**0,00**	**23.827.650,00**	100,00

Terjadi kenaikan sebesar Rp23.827.650,00 atau 100% dari Tahun Sebelumnya.

2.3.22 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2021 sebesar Rp3.261.662.650,00 yang terdiri dari **:**

Tabel 175 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur	127.535.500,00	0,00	127.535.500,00	100,00
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	14.597.000,00	0,00	14.597.000,00	100,00
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.535.000,00	0,00	10.535.000,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Banguna	326.402.700,00	0,00	326.402.700,00	100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	528.652.800,00	0,00	528.652.800,00	100,00

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	800.892.950,00	0,00	800.892.950,00	100,00
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan da	577.329.500,00	0,00	577.329.500,00	100,00
10	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	494.529.750,00	0,00	494.529.750,00	100,00
11	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	76.450.000,00	0,00	76.450.000,00	100,00
12	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.508.600,00	0,00	10.508.600,00	100,00
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	65.537.800,00	0,00	65.537.800,00	100,00
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	100,00
15	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	104.690.300,00	0,00	104.690.300,00	100,00
16	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnia	26.014.750,00	0,00	26.014.750,00	100,00
17	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	27.390.000,00	0,00	27.390.000,00	100,00
18	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Banguna	0,00	0,00	0,00	100,00
19	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	100,00
20	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	27.346.000,00	0,00	27.346.000,00	100,00
Jumlah		**3.261.662.650,00**	**0,00**	**3.261.662.650,00**	100,00

Terjadi kenaikan sebesar Rp3.261.662.650,00 atau 100% dari Tahun sebelumnya.

2.3.23 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2021 sebesar Rp1.216.159.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 176 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Pedesaan	136.653.000,00	0,00	136.653.000,00	100,00
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	114.422.000,00	0,00	114.422.000,00	100,00
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	75.900.000,00	0,00	75.900.000,00	100,00
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	39.842.000,00	0,00	39.842.000,00	100,00
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	378.939.000,00	0,00	378.939.000,00	100,00

6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	29.755.000,00	0,00	29.755.000,00	100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	206.260.000,00	0,00	206.260.000,00	100,00
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	234.388.000,00	0,00	234.388.000,00	100.00
Jumlah		**1.216.159.000,00**	**0,00**	**1.216.159.000,00**	**100,00**

Terjadi kenaikan sebesar Rp1.216.159.000,00 atau 100,00 % dari tahun sebelumnya.

2.3.24 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2021 sebesar Rp474.706.250,00 yang terdiri dari :

Tabel 177 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.406.250,00	0,00	1.406.250,00	100,00
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	100,00
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	147.850.000,00	0,00	147.850.000,00	100,00
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	306.425.000,00	0,00	306.425.000,00	100,00
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Jumlah		**474.706.250,00**	**0,00**	**474.706.250,00**	**100,00**

2.3.25 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp147.890.860,00 terdiri dari:

Tabel 178 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16.362.000,00	0,00	16.362.000,00	100
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	100
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.909.200,00	0,00	1.909.200,00	100
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	100
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.111.860,00	0,00	1.111.860,00	100
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	692.400,00	0,00	692.400,00	100

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	68.000.400,00	0,00	68.000.400,00	100
Jumlah		**147.890.860,00**	**0,00**	**147.890.860,00**	**100**

2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp14.391.030.452,12 mengalami kenaikan sebesar Rp6.100.038.918,32 atau 73,57% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 179 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	4.228.000,00	0,00	4.228.000,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.657.445.041,00	1.414.615.399,00	**5.242.829.642,00**	370,63
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.119.355.831,12	2.099.372.334,80	**3.019.983.496,32**	143,85
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.594.801.580,00	4.770.098.800,00	**(2.175.297.220,00)**	(45,60)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.200.000,00	6.905.000,00	**8.295.000,00**	120,13
Jumlah		**14.391.030.452,12**	**8.290.991.533,80**	**6.100.038.918,32**	**73,57**

2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp38.019.490.430,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp3.837.024.075,25 atau 9,17% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 180 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Perjalanan Dinas Biasa	14.167.617.730,00	0,00	14.167.617.730,00	**100,00**
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.919.324.700,00	41.856.514.505,25	(18.937.189.805,25)	(45,24)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	718.701.000,00	0,00	718.701.000,00	100,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	213.847.000,00	0,00	213.847.000,00	100,00
Jumlah		38.019.490.430,00	41.856.514.505,25	(3.837.024.075,25)	(9,17)

2.6 Beban Bunga

Tidak ada Beban Bunga di Tahun 2021.

2.7 Beban Subsidi

Tidak ada Beban Subsidi di Tahun 2021.

2.8 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp141.190.540.141,61 mengalami kenaikan sebesar Rp46.587.652.349,06 atau 49,25% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 181 Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	1.303.632.865,00	3.245.441.680,00	(1.941.808.815,00)	(59,83)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0,00	773.160.780,55	(773.160.780,55)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00	0,00	0,00	0.00
4	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.881.296.372,00	(2.881.296.372,00)	(100,00)
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	138.866.140.316,61	86.682.222.000,00	52.183.918.316,61	60,20

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.020.766.960,00	1.020.766.960,00	0,00	0,00
Jumlah		**141.190.540.141,61**	**94.602.887.792,55**	46.587.652.349,06	**49,25**

2.8.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah

Beban Hibah kepada Pemerintah Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.303.632.865,00 yang merupakan Hibah yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang :

- Pembangunan Gedung Serbaguna Kejaksaan Pacitan senilai Rp559.159.765,00 dan Rehab Gedung Polres Bayang Karya Pacitan senilai Rp706.159.000,00
- Pembayaran Pengawasan Pembangunan Gedung Kejaksaan pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang) senilai Rp38.314.100,00.

2.8.2 Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp138.866.140.316,61. Beban tersebut merupakan hibah dari APBD Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari

1) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp43.356.091.031,68 terdiri dari :
   - Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.732.522.000,00
   - Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp36.623.569.031,68
2) Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp26.191.789.719,79 terdiri dari :
   - Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp24.084.098.000,00
   - Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.107.691.719,79
3) Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp69.318.259.565,14 terdiri dari :
   - Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp11.499.478.010,00
   - Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp57.818.781.555,14

2.8.3 Beban Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Beban Hibah kepada Partai Politik Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.020.766.960. Beban tersebut merupakan beban hibah dari APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.

2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp3.588.908.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.160.771.634,00 atau 66,61% dibandingkan dengan beban tahun lalu.

Penurunan Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 merupakan penurunan beban terbesar dikarenakan menyesuaikan pelaksanaan program kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang pelaksanaannya di masing masing SKPD sesuai program kegiatan yang membidangi.

2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2021 sebesar Rp241.612.151.794,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.300.829.262,80 atau 5,367% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 182 Beban Penyusutan Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	241.207.667.248,85	228.775.738.913,45	12.431.928.335,40	5,43
2	Beban Penyisihan Piutang	404.484.545,33	535.583.617,93	(131.099.072,60)	(24,48)
Jumlah		**241.612.151.794,18**	**229.311.322.531,38**	12.300.829.262,80	5,36

2.10.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan aset tidak berwujud berupa *Software* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp241.207.667.248,85dan terdapat kenaikan sebesar Rp12.431.928.335,40 atau 5,43% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 183 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	491.165.360,00	508.180.812,80	(17.015.452,80)	(3,35)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	11.629.804,17	228.267.558.100,65	(228.255.928.296,4)	(99,99)
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.650.502.743,17	0,00	41.650.502.743,17	100,00
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.185.339.157,72	0,00	25.185.339.157,72	100,00
5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	173.869.030.183,79	0,00	173.869.030.183,79	100,00
Jumlah		**241.207.667.248,85**	**228.775.738.913,45**	**12.431.928.335,40**	5,43

2.10.2 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp404.484.545,33 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp131.099.072,60 atau 24,48%dari tahun sebelumnya yang terdiri dari.

Tabel 184 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	189.596.899,42	214.358.451,34	(24.761.551,92)	(11,55)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	835.466,08	32.237.595,50	(31.402.129,42)	(97,41)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	177.797.936,51	251.270.447,39	(73.472.510,88)	(29,24)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	36.254.243,32	37.717.123,70	(1.462.880,38)	(3,88)
Jumlah		**404.484.545,33**	**535.583.617,93**	**(131.099.072,60)**	(24,48)

Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2021, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

-	Piutang Pajak Hotel	Rp	86.130,00
-	Piutang Pajak Restoran	Rp	997.237,50
-	Piutang Pajak Hiburan	Rp	2.479.777,00
-	Piutang Pajak Reklame	Rp	98.895,00
-	Piutang PPJ	Rp	5.730.187,05
-	Piutang Pajak Parkir	Rp	104.977,50
-	Piutang Pajak Air Tanah	Rp	40.680,05
-	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp	180.059.015,32
	Jumlah	**Rp**	**189.596.899,42**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp	835.420,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	46,08
Piutang Hasil Sewa BMD		
Jumlah	**Rp**	**835.466,08**

Beban Penyisihan Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

-	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	Rp	1.524.250,00
-	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Rp	35.187.187,50
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	Rp	85.365.585,77
-	Piutang BLUD (RSUD)	Rp	55.720.913,24
	Jumlah	**Rp**	**177.797.936,51**

Beban Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih atas piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp36.254.243,32.

2.11 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2021 sebesar Rp142.732.793.953,20 mengalami penurunan sebesar Rp37.588.521.622,36 atau 20,85% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu sebesar Rp180.321.315.575,56. Rincian Beban Transfer tersebut terdiri dari:

Tabel 185 Beban Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.557.195.500,00	3.506.223.364,00	50.972.136,00	1,45
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.203.146.750,00	985.002.732,00	218.144.018,00	22,15
3	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan		341.307.180,00	(341.307.180,00)	(100,00)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	137.972.451.703,20	175.488.782.299,56	(37.516.330.596,36)	(21,38)
Jumlah		**142.732.793.953,20**	**180.321.315.575,56**	**(37.588.521.622,36)**	**(20,85)**

Beban transfer Tahun 2021 merupakan pengeluaran kas dari APBD sebesar Rp141.547.460.049,20 dan transaksi non kas sebesar Rp1.185.333.904,00 berupa :

- Penambahan Utang Bagi hasil Pajak	Rp	836.626.788,00
- Penambahan Utang Bagi Hasil Retribusi	Rp	348.707.116,00
- Utang Retribusi Parkir Berlangganan yang belum ditransfer kepada Dinas Pendapatan Jatim dan Polres Pacitan		
Jumlah	**Rp**	**1.185.333.904,00**

Koreksi pencatatan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa atas Dana Desa yang tidak masuk dalam LO sebesar Rp151.108.021.000,00

2.12 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp3.064.285.020,05 yang terdiri dari

Tabel 186 Beban Lain - Lain Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Dana Bergulir	425.638.710,67	223.348.970,33	202.289.740,34	90,57
2	Beban Lain-lain	2.638.646.309,38	22.729.281.520,71	(20.090.635.211,33)	(88,39)
Jumlah		**3.064.285.020,05**	**22.952.630.491,04**	(19.888.345.470,99)	(86,65)

Dibandingkan saldo tahun lalu sebesar Rp5.483.841.273,10, tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp19.888.345.470,99 atau 86,65%.

2.12.1 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir tahun berjalan adalah sebesar Rp425.638.710,67 merupakan Pembebanan atas penyisihan dana bergulir diragukan tertagih yang dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2020.

2.12.2 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain tahun berjalan adalah sebesar Rp2.638.646.309,38 merupakan *Extracomptable* dari Belanja Modal.

<u>Kegiatan Non Operasional</u>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(2.649.491.961,44)**	**(78.545.210.075,57)**	**75.895.718.114,13**

Selama Tahun 2021 terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.649.491.961,44. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp78.545.210.075,57, tahun ini mengalami kenaikan defisit sebesar Rp75.895.718.114,13 atau 96,63% Defisit tersebut merupakan selisih dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terhadap defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 187 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	399.103.850,28	405.715.314,69	(6.611.464,41	(1,63)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	(3.048.595.811,72)	(78.950.925.390,26)	75.902.329.578,54	96,14
Jumlah		**(2.649.491.961,44)**	**(78.545.210.075,57)**	75.895.718.114,13	96,63

1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp399.103.850,28 merupakan pendapatan dari penyisihan piutang awal yang dilunasi pada tahun 2021.Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya.Karena terdapat pengguguran/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tidak tertagih yang sudah dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional

1.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2021 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.048.595.811,72. . Dibandingkan tahun lalu sebesar Rp78.950.925.390,26 tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp75.895.718.114,13 atau 96,63%. Defisit tersebut terdiri dari:

Tabel 188 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit Pelepasan Aset Lancar-Lo	1.208.600.846,99	82.229.346,61	1.126.371.500,38	1369,79
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.839.994.964,73	78.868.696.043,65	(77.028.701.078,92)	(97,67)
Jumlah		**3.048.595.811,72**	**78.950.925.390,26**	(75.902.329.578,54)	(96,14)

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya –LO

Defisit sebesar Rp1.839.994.964,73 tersebut merupakan penghapusan Aset Aset Lainnya.

Defisit Pelepasan Aset Lancar

Defisit Pelepasan/Penghapusan Persediaan sebesar Rp1.208.600.846,99 tersebut merupakan penghapusan persediaan *expired*.

Pos Luar Biasa

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Beban Luar Biasa	**12.174.540.228,00**	**0, 00**

Pada Tahun 2021 sebesar Rp12.174.540.228,00. Atau sebesar 100% dibandingkan tahun lalu dikarenakan pada waktu tahun 2020. Beban tak terduga meliputi: beban untuk penanganan darurat akibat bencana, beban untuk pengembalian Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan merupakan beban sosial tidak direncanakan yang diajukan oleh SKPD Penanggung jawab kepada PPKD.

5.1.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2021 adalah Rp259.551.727.359,50.

1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.694.904.219.182,75 yang terdiri dari:

1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	35.571.955.001,23
1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	16.829.943.993,00
1.1.3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	2.704.269.238,35
1.1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Rp	156.362.477.032,94
1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	45.946.433.886,00
1.1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	63.964.434.017,00
1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	731.754.165.000,00
1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	288.539.572.499,00
1.1.9	Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	179.462.490.000,00
1.1.10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	95.756.679.614,00
1.1.11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	5.540.971.857,14
1.1.12	Penerimaan Hibah	Rp	72.470.827.044,09
	Jumlah Arus Masuk Kas	**Rp**	**1.694.904.219.182,75**

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp5.540.971.857,14 sebagaimana tersebut di atas merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.435.352.491.823,25 yang terdiri dari:

1.2.1	Pembayaran Pegawai	Rp	685.105.320.296,77
1.2.2	Pembayaran Barang	Rp	407.624.438.104,96
1.2.3	Pembayaran Hibah	Rp	33.286.776.563,32
1.2.4	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	3.588.908.900,00
1.2.5	Pembayaran Tidak Terduga	Rp	12.174.540.228,00
1.2.6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	3.301.504.626,00
1.2.7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.190.530.401,00
1.2.8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan	Rp	289.080.472.703,20
	Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp**	**1.435.352.491.823,25**

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp289.080.472.703,20 merupakan pembayaran Bantuan Keuangan.

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp194.418.525.997,93 Tahun 2021 sebesar Rp259.551.727.359,50. mengalami kenaikan sebesar Rp65.133.201.361,57.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2021 adalah (Rp174.708.335.670,00). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari aktivitas investasi.

2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah kas masuk dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp220.464.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1	Penjualan Atas Peralatan Mesin	Rp	197.871.100,00
2.1.2	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	Rp	22.593.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp**	**220.464.100,00**

2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah Rp174.928.799.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

2.2.1	Perolehan Tanah	Rp	3.488.277.800,00
2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	59.673.855.155,00
2.2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	59.211.649.523,00
2.2.4	Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	51.102.738.057,00
2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	1.452.279.235,00
2.2.6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
2.2.7	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	Rp	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp**	**174.928.799.770,00**

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu sebesar Rp140.058.487.669,00, pada tahun berjalan adalah sebesar Rp174.708.335.670,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.649.848.001,00.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.000.000,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Piutang Pinjaman *Revolving*).

3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00. Jumlah total tersebut didapat dari:

4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris yang merupakan arus kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp58.175.666.013,00 yang terdiri dari:

Potongan PFK dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp58.175.666.013,00), dengan rincian Rp4.313.489.740,00 utang PPh Pasal 21 (PNSD), sebesar Rp5.650.131.356.,00Penerimaan PFK 1 % Gaji PNSD, sebesar Rp 25.098.135.169,00, Penerimaan PFK 8 % Gaji PNSD, sebesar Rp20.283.323.266,00 Penerimaan PFK 4% Gaji PNSD, sebesar Rp707.646.119,00 JKK dan sebesar Rp 2.122.940.363,00 merupakan JKM

4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp58.175.666.013,00 yang terdiri dari pembayaran potongan PFK dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) Tahun 2021

5. Saldo Akhir Kas (Laporan Arus Kas)

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp181.401.426.519,17 yang terdiri dari saldo awal kas tahun 2020 sebesar Rp96.552.034.829,67 ditambah kenaikan kas tahun 2020 sebesar Rp84.849.391.689,50
Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari:

5.1	Kas di Kas Daerah	Rp	107.939.174.117,39
5.2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	16.824.643,00
5.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
5.4	Kas di BLUD	Rp	72.694.637.634,94
5.5	Kas di Bendahara JKN	Rp	442.643.980,84
5.6	Kas di Bendahara Dana Bos	Rp	308.146.143,00
Saldo Akhir Kas		**Rp**	**181.401.426.519,17**

Saldo akhir kas di laporan Arus Kas sebesar Rp181.401.426.519,17, sama dengan saldo kas di Neraca sebesar Rp181.401.426.519,17.

5.1.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas dana merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp2.207.162.083.935,35 terdiri dari:

Tabel 189 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Ekuitas Awal	2.161.794.700.411,74	2.340.151.840.558,09	(178.357.140.146,35)
Surplus/Defisit - LO	213.578.332,34	(124.304.756.864,53)	124.518.335.196,87
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	45.153.805.209,27	(54.052.383.281,82)	99.206.188.491,09
JUMLAH	**2.207.162.083.953,35**	**2.161.794.700.411,74**	**45.367.383.541,61**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. EkuitasAwal

Ekuitas Awal sebesar Rp2.161.794.700.411,74 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2020 pada Neraca *Audited* tahun 2020.

2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2021 sebesar Rp213.578.332,34 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2021 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Pacitan 9.868.903.383,41 Tahun 2021 yang berasal dari:

PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	218.691.519.287,51
Pendapatan Transfer LO	Rp	1.252.662.971.924,14
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	Rp	110.903.311.673,09
Total Pendapatan LO	**Rp**	**1.582.257.802.884,74**
BEBAN		
Beban Operasi	Rp	1.183.279.731.160,91
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	241.207.667.248,85
Beban Transfer	Rp	142.732.793.953,20
Beban Tidak Terduga	Rp	12.174.540.228,00
Total Beban	**Rp**	**1.579.394.732.590,96**
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	2.863.070.293,78
Surplus Non Operasional LO	Rp	399.103.850,28
Defisit Non Operasional - LO	Rp	(3.048.595.811,72)
Surplus/Defisit	Rp	**213.578.332,34**

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2021, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sejumlah Rp45.153.805.209,27 terdiri dari:

Koreksi Aset			Rp	**2.898.942.647,42**
Koreksi Penambahan	Rp	**3.191.541.280,75**		
Dinas Pendidikan	Rp	1.828.312.450,00		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	16.549.750,00		
Dinas Perikanan	Rp	494.869.080,75		
Kecamatan Pacitan	Rp	711.170.000,00		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	140.640.000,00		

Koreksi Pengurangan			Rp	**292.598.633,33**		
Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Rp	159.828.333,33		
Dinas Pendidikan			Rp	2.770.300,00		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Rp	130.000.000,00		
Koreksi Aset Lain-Lain					Rp	**6.582.225.137,09**
Koreksi Penambahan	Rp	**9.868.903.383,41**				
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	9.868.903.383,41				
Koreksi Pengurangan			Rp	**3.286.678.246,32**		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Rp	3.286.678.246,32		
Koreksi Akumulasi Penyusutan					Rp	**35.672.637.426,05**
Koreksi Penambahan	Rp	**45.144.743.548,07**				
Dinas Pendidikan	Rp	45.791.091,25				
Dinas Kesehatan	Rp	11.517.167,09				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	44.354.280.581,27				
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	3.310.433,33				
Dinas Perhubungan	Rp	429.003.512,50				
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	66.544.313,33				
Dinas Perikanan	Rp	42.576.245,84				
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	78.876.233,04				
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	12.907.840,01				
Badan Pendapatan Daerah	Rp	58.310.041,67				
Sekretariat Daerah	Rp	13.073.213,95				
Kecamatan Punung	Rp	18.430.507,55				
Kecamatan Pacitan	Rp	3.484.029,98				
Kecamatan Bandar	Rp	6.638.337,26				
Koreksi Pengurangan			Rp	**9.472.106.122,02**		
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Rp	8.212.762.754,87		
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			Rp	1.211.600.188,47		
Dinas Pertanian			Rp	46.492.139,89		
Dinas Perpustakaan			Rp	966.038,79		
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah			Rp	285.000,00		
Koreksi Piutang	Rp				Rp	**(0,18)**
Koreksi Pengurangan	Rp			**0,18**		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp			0,18		
Koreksi Penyertaan Modal					Rp	**(1,11)**
Koreksi Pengurangan			**Rp**	**1,11**		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Rp	1,11		
					Rp	**45.153.805.209,27**

4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.207.162.083.953,35. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.367.383.541,61 jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.161.794.700.411,74.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis Akrual pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan antara saldo Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pada Tahun 2021, Pendapatan-LRA sebesar Rp1.695.124.683.282,75 sedangkan pada Pendapatan-LO sebesar Rp1.582.257.802.884,74. Selisih sebesar Rp112.866.880.398,01 terdiri dari:

Tabel 190 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	211.689.109.365,52	218.691.519.287,51	(7.002.409.921,99)
2	Pendapatan Transfer	1.410.964.746.873,14	1.252.662.971.924,14	158.301.774.949,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.470.827.044,09	110.903.311.673,09	(38.432.484.629,00)
	Jumlah	**1.695.124.683.282,75**	**1.582.257.802.884,74**	**112.866.880.398,01**

Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah Rp112.866.880.398,01 adalah:

1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar (Rp7.002.409.921,99) terdiri dari:

Tabel 191 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	35.571.955.001,23	36.708.666.692,71	(1.136.711.691,48)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.829.943.993,00	16.618.840.045,00	211.103.948,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.704.269.238,35	3.568.011.281,35	(863.742.043,00)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	156.582.941.132,94	161.796.001.268,45	(5.213.060.135,51)
	Jumlah	**211.689.109.365,52**	**218.691.519.287,51**	**(7.002.409.921,99)**

1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Selisih Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp(1.136.711.691,48) dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 192 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengurangan Diterima Dimuka (+)	Penambahan Piutang (+)	Penambahan Diterima Dimuka (-)	Pelunasan Piutang (-)	Koreksi/ Reklas	Total Selisih
1	Pajak Hotel	0,00	(4.249.000,00)	0,00	3.198.000,00	0,00	(1.051.000,00)
2	Pajak Restoran	0,00	(12.336.000,00)	0,00	9.112.500,00	8.213.082,82	4.989.582,82
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	(120.600.774,87)	(4.481.000,00)	128.425.263,57	3.482.000,00	0,00	6.825.488,70
5	Pajak Penerangan	-	(1.146.037.410,00)	-	-	-	(1.146.037.410,00)

	Jalan						
6	Pajak Parkir	-	(440.700,00)	-	391.200,00	-	(49.500,00)
7	Pajak Air Tanah	-	(683.365,00)	-	494.748,00	-	(188.617,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-	-
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	(2.687.326.784,00)	-	2.686.126.548,00	-	(1.200.236,00)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**(120.600.774,87)**	**(3.855.554.259,00)**	**128.425.263,57**	**2.702.804.996,00**	**8.213.082,82**	**(1.136.711.691,48)**

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp120.600.774,87, Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika ada penerimaan kas, sedangkan pada Tahun 2021 diakui sebagai Pendapatan LO.

Adapun penambahan Piutang sebesar Rp3.855.554.259,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena belum ada penerimaan kas tahun ini (pengakuan Pendapatan LRA nya akan dilakukan pada saat kas diterima).

Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp128.425.263,57, karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2021 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan Pendapatan LO nya akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Penerimaan kas Tahun 2021 dari pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp2.702.804.996,00 diakui sebagai Pendapatan pada LRA saja karena pengakuan Pendapatan-LO nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Adapun Pendapatan LRA yang tidak menjadi Pendapatan LO sebesar Rp8.213.082,82 merupakan Pajak Jasa Boga/ Katering yang dipungut oleh Bendahara BOS pada Tahun lalu yang disetorkan ke Kas BUD tahun ini.

1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih Retribusi Daerah sebesar Rp211.103.948,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 193 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Penambahan Piutang (Pengakuan LO)	Pelunasan Piutang (Pengakuan LRA)	Pengurangan Piutang masuk beban jasa bank (Pengakuan LO)	Total Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	(242.135.000,00)	381.249.000,00	(84.100,00)	139.029.900,00
2	Retribusi Jasa Usaha	(407.893.147,00)	445.883.931,00	0,00	37.990.784,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	(236.845.816,37)	270.929.080,37	0,00	34.083.264,00
	Jumlah	**(886.873.963,37)**	**1.098.062.011,37**	**(84.100,00)**	**211.103.948,00**

Penambahan piutang sebesar Rp886.873.963,37 diakui sebagai Pendapatan LO, karena belum ada penerimaan kas (pengakuan Pendapatan LRA akan dilakukan pada saat kas diterima).

Penerimaan kas Tahun 2021 dari pengurangan piutang tahun 2020 sebesar Rp1.098.062.011,37 diakui sebagai Pendapatan LRA karena pengakuan Pendapatan LO telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Adapun Pengurangan Piutang 2020 yang pengakuan pendapatan LO nya dipotong untuk pembayaran Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (biaya transfer) terjadi pada pos Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp84.100,00.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.704.269.238,35 merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Transaksi tersebut merupakan transaksi kas yang diakui pada LRA maupun LO. Pada Transaksi LO sebesar Rp863.742.043,00 merupakan Bagian Laba PDAM yang Menambah Investasi.

1.4 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

Selisih Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp5.213.060.135,51) dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 194 Penjelasan Selisih Saldo Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Hibah Masuk (Barang) / Pendapatan BLUD berupa barang (Pengakuan LO)	Pengurangan Diterima Dimuka (Pengakuan LO)	Penambahan Piutang (Pengakuan LO)	Penambahan Diterima Dimuka (Pengakuan LRA)	Pelunasan Piutang (Pengakuan LRA)	Pengurangan Piutang masuk beban jasa bank(Pengakuan LO)	Koreksi /Reklas	Total Selisih
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	95.000.000,00	-	220.464.100,00	315.464.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	(429.660.424,19)	(257.523.500,00)	514.333.664,37	15.696.000,00	-	1.520.000,00	(155.634.259,82)
3	Jasa Giro	-	(329.329.166,67)	(326.396.250,60)	301.758.333,34	370.315.053,64	-	(0,18)	16.347.969,53
4	Pendapatan Bunga	-	-	-	-	2.003.424,66	-	-	2.003.424,66
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	(1.108.330.290,82)	-	1.061.448.392,94	-	-	(46.881.897,88)
7	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pendapatan BLUD	(505.888.192,00)	(9.273.000,00)	(11.197.588.398,00)	12.750.000,00	6.355.768.818,00	(128.700,00)	-	(5.344.359.472,00)
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lain-Lain PAD yang sah Lainya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**(505.888.192,00)**	**(768.262.590,86)**	**(12.889.838.439,42)**	**828.841.997,71**	**7.900.231.689,24**	**(128.700,00)**	**221.984.099,82**	**(5.213.060.135,51)**

Pendapatan hibah masuk berupa barang senilai Rp505.888.192,00 tidak masuk pada Pendapatan LRA karena bukan transaksi kas. Hibah tersebut merupakan Pendapatan Hibah barang yang diterima oleh RSUD.

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp768.262.590,86, Pendapatan LRA diakui pada tahun sebelumnya yaitu pada saat terjadi penerimaan kas, sedangkan pada Tahun 2021 diakui sebagai Pendapatan LO.

Adapun penambahan Piutang sebesar Rp12.889.838.439,42 diakui sebagai Pendapatan LO, karena belum ada penerimaan kas (pengakuan Pendapatan LRA akan dilakukan pada saat kas diterima).

Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp828.841.997,71, karena penerimaan kasnya di Tahun 2021 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan Pendapatan LO-nya akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Penerimaan kas Tahun 2021 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar Rp7.900.231.689,24 diakui sebagai Pendapatan LRA, hal tersebut dikarenakan pengakuan Pendapatan LO telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Adapun Pengurangan Piutang Tahun 2020 yang pendapatannya dipotong untuk pembayaran Beban Jasa Transaksi Keuangan (biaya transfer) terjadi pada pos Pendapatan Pendapatan BLUD sebesar Rp128.700,00.

Reklas sebesar Rp221.984.099,82 terdiri dari reklas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp220.464.100,00 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.520.000,00 dan Jasa Giro sebesar (Rp0,18).

2. Selisih Pendapatan Transfer

Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp158.301.774.949,00 terdiri dari.

Tabel 195 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.130.204.605.402,00	1.123.303.427.529,00	6.901.177.873,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	179.462.490.000,00	28.354.469.000,00	151.108.021.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	101.297.651.471,14	101.005.075.395,14	292.576.076,00
	Jumlah	**1.410.964.746.873,14**	**1.252.662.971.924,14**	**158.301.774.949,00**

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp6.901.177.873,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 196 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pelunasan Piutang (Pengakuan LRA)	Total Selisih
1	Bagi Hasil Pajak	6.901.177.873,00	6.901.177.873,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0,00
	Jumlah	**6.901.177.873,00**	**6.901.177.873,00**

Transaksi pengurangan piutang sebesar Rp6.901.177.873,00 mengakibatkan saldo pendapatan pada LO lebih besar dari saldo pendapatan LRA.

2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp151.108.021.000,00 merupakan Pendapatan Dana Desa yang pengakuannya hanya pada LRA.

2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan sebesar Rp292.576.076,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 197 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penambahan Piutang (Pengakuan LO)	Pelunasan Piutang (Pengakuan LRA)	Total Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(7.250.848.664,00)	7.543.424.740,00	292.576.076,00
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**(7.250.848.664,00)**	**7.543.424.740,00**	**292.576.076,00**

Penambahan Piutang sebesar Rp7.250.848.664,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena belum ada penerimaan kas (pengakuan Pendapatan LRA akan dilakukan pada saat kas diterima).

Penerimaan kas Tahun 2021 dari pengurangan piutang tahun lalu sebesar Rp7.543.424.740,00 diakui sebagai Pendapatan LRA karena pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun lalu.

3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar (Rp38.432.484.629,00) terdiri dari:

Tabel 198 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah	1.008.000.000,00	39.440.484.629,00	(38.432.484.629,00)
2	Pendapatan Lainnya	71.462.827.044,09	71.462.827.044,09	0,00
	Jumlah	**72.470.827.044,09**	**110.903.311.673,09**	**(38.432.484.629,00)**

Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Selisih Pendapatan Hibah sebesar Rp38.432.484.629,00 merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap dan Barang Habis Pakai sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 1.3.1 Pendapatan Hibah. Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena bersifat non kas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA (penerimaan kas) sebesar Rp1.695.124.683.282,75 diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp1.582.257.802.884,74. Selisih sebesar Rp112.866.880.398,01 dirinci sebagai berikut :

Dari Pendapatan LRA (penerimaan kas) sebesar Rp1.695.124.683.282,75, menjadi transaksi LO sebesar Rp1.516.683.496.529,22. Transaksi kas bukan merupakan transaksi LO sebesar Rp178.441.186.753,53 dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan Diterima Dimuka	Rp	957.267.261,28
Pelunasan Piutang	Rp	26.145.701.309,61
Pendapatan LRA tidak menjadi Pendapatan LO (Dana Desa)	Rp	151.108.021.000,00
Reklas	Rp	230.197.182,64
Jumlah	**Rp**	**178.441.186.753,53**

Sedangkan Pendapatan LO yang merupakan penerimaan non kas sebesar Rp63.961.700.752,80 terdiri dari :

Penambahan Piutang	Rp	(24.883.115.325,79)

Pengurangan Diterima Dimuka	Rp	(888.863.365,73)
Hibah Masuk (Barang)	Rp	(38.938.372.821,00)
Pendapatan LO bukan Pendapatan LRA (Bagian Laba yang Menambah Investasi)	Rp	(863.742.043,00)
Pengurangan Piutang masuk beban jasa bank	Rp	(212.800,00)
Jumlah	**Rp**	**(65.574.306.355,52)**

5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)

Penerapan Basis Akrual Pada Beban termasuk didalamnya Beban Luar Biasa (LO) serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) akan tampak pada perbedaan saldo pengeluaran berupa saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban (termasuk Beban Luar Biasa) pada Laporan Operasional (LO).

Belanja dan Transfer pada LRA adalah sebesar Rp1.610.281.291.593,25 sedangkan Beban (termasuk Beban Luar Biasa) pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.579.394.732.590,96. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp30.886.559.002,29 yang terdiri dari.

Tabel 199 Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja - Beban Pegawai	685.105.320.296,77	700.712.448.457,77	(15.607.128.161,00)
2	Belanja Barang - Beban Persediaan	111.874.794.169,00	138.000.240.944,42	(26.125.446.775,42)
3	Belanja Barang - Beban Jasa	250.999.275.686,84	143.908.302.269,61	107.090.973.417,23
4	Belanja Barang - Beban Pemeliharaan	7.153.556.818,12	14.391.030.452,12	(7.237.473.634,00)
5	Belanja Barang - Beban Perjalanan Dinas	37.596.811.431,00	38.019.490.430,00	(422.678.999,00)
6	Belanja - Beban Hibah	33.286.776.563,32	141.190.540.141,61	(107.903.763.578,29)
7	Bantuan Sosial - Beban Bantuan Sosial	3.588.908.900,00	3.588.908.900,00	0,00
8	Belanja Modal	174.928.799.770,00	0,00	174.928.799.770,00
9	Beban Penyusutan	0,00	241.612.151.794,18	(241.612.151.794,18)
10	Transfer - Beban Transfer	293.572.507.730,20	142.732.793.953,20	150.839.713.777,00
11	Beban Lain-lain	0,00	3.064.285.020,05	(3.064.285.020,05)
12	Belanja Tak Terduga - Beban Luar Biasa	12.174.540.228,00	12.174.540.228,00	0,00
	Jumlah	**1.610.281.291.593,25**	**1.579.394.732.590,96**	**30.886.559.002,29**

1. Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp(15.607.128.161,00) merupakan transaksi non Kas pada LO berupa penambahan utang belanja BLUD sebesar (Rp1.470.096.991,00) dan reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp(14.137.031.170,00).

2. Selisih Belanja Barang dengan Beban Persediaan

Selisih Belanja Barang (Khusus Belanja- Beban Persediaan sebesar (Rp26.125.446.775,42) terdiri dari:

Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja Barang Pakai Habis	111.832.906.169,00	137.958.352.944,42	(26.125.446.775,42)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	41.888.000,00	41.888.000,00	0,00
	Jumlah	**111.874.794.169,00**	**138.000.240.944,42**	**(26.125.446.775,42)**

Selisih Belanja Barang Habis Pakai dengan Beban Barang Pakai Habis tersebut terdiri dari :

Belanja LRA/transaksi kas tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

-	Sisa Persediaan dari Pengadaan	Rp	15.278.301.086,26
-	Persediaan Tidak menjadi Beban (Dimutasi/Dihapus/Direklas)	Rp	2.983.058.474,79
-	Belanja Persediaan Dikapitalisasi	Rp	32.240.000,00
-	Penghapusan	Rp	1.001.005.153,65
	Jumlah	**Rp**	**19.294.604.714,70**

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

-	Penggunaan Sisa Persediaan / Persediaan Awal	Rp	(21.321.637.095,28)
-	Penggunaan Persediaan dari Hibah /Mutasi	Rp	(8.554.634.599,05)
-	Penambahan Utang	Rp	(164.119.546,00)
-	Reklas (-/+)	Rp	(15.379.660.249,79)
	Jumlah	**Rp**	**(45.420.051.490,12)**

3. Selisih Belanja Jasa; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Belanja Barang dan Jasa BOS; Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Jasa

Selisih Belanja Jasa; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Belanja Barang dan Jasa BOS; Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Jasa sebesar Rp107.090.973.417,23 terdiri dari :

Tabel 201 Rincian Selisih Saldo Belanja/Beban/Beban Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja/Beban Jasa Kantor	93.395.695.975,00	110.386.239.781,00	(16.990.543.806,00)
2	Belanja/Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.290.669.975,00	14.302.434.375,00	(11.764.400,00)
3	Belanja/BebanSewa Tanah	335.750.000,00	335.750.000,00	0,00
4	Belanja/Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.085.360.070,00	1.099.110.070,00	(13.750.000,00)
5	Belanja/Beban Sewa Gedung dan Bangunan	482.725.700,00	482.725.700,00	0,00
6	Belanja/Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	23.827.650,00	23.827.650,00	0,00
7	Belanja/Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.621.269.150,00	3.261.662.650,00	359.606.500,00
8	Belanja/Beban/ Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.216.159.000,00	1.216.159.000,00	0,00
9	Belanja/Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
10	Belanja/Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	683.620.832,00	683.620.832,00	0,00
11	Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	474.706.250,00	474.706.250,00	0,00
12	Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	147.890.860,00	147.890.860,00	0,00
13	Belanja/Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.592.520.230,00	0,00	11.592.520.230,00
14	Belanja/Beban Barang dan Jasa BOS	39.738.625.852,00	0,00	39.738.625.852,00
15	Belanja/Beban Barang dan Jasa BLUD	83.910.454.142,84	11.494.175.101,61	72.416.279.041,23
	Jumlah	**250.999.275.686,84**	**143.908.302.269,61**	**107.090.973.417,23**

2.1 Selisih Belanja dengan Beban Jasa Kantor

Selisih Belanja dan Beban Jasa Kantor sebesar Rp(16.990.543.806,00) dapat dijelaskan :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

-	Pengurangan Utang Belanja/Utang Belanja Awal	Rp	56.904.659,00
-	Belanja Barjas Dikapitalisasi	Rp	17.700.790,00

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

- Beban Jasa bank dari pengurangan piutang	Rp	(84.100,00)
- Penambahan Utang Belanja/Utang Belanja Akhir	Rp	(6.247.063,00)
- Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	(17.058.818.092,00)
Jumlah	**Rp**	**(16.990.543.806,00)**

2.1 Selisih Belanja dengan Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Selisih Belanja dengan Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar (Rp11.764.400,00) tersebut merupakan penambahan utang belanja tahun 2021 yang merupakan transaksi non kas dan tidak diakui pada LRA.

2.2 Selisih Belanja dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Selisih Belanja dan Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar (Rp13.750.000,00) tersebut akibat reklas kode rekening Beban Barang dan Jasa BOS ke Belanja dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin.

2.3 Selisih Belanja dengan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Selisih Belanja dan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp359.606.500,00 merupakan kapitalisasi beberapa belanja yang terdiri dari :

- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Rp	37.196.500,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Rp	49.324.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Rp	84.161.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Rp	188.925.000,00
Jumlah	**Rp**	**359.606.500,00**

2.4 Selisih Belanja dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Selisih Belanja dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp11.592.520.230,00 adalah Reklas ke beban barang dan hibah.

2.5 Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BOS

2.6 Selisih Belanja dan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp39.738.625.852,00 merupakan reklas Beban Barang dan Jasa BOS ke Beban Barang dan Jasa yang lain pada Dinas Pendidikan.**Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BLUD**

Selisih Belanja dan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp72.416.279.041,23 dapat dijelaskan

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

- Pengurangan Utang Belanja/Utang Belanja Awal	Rp	3.656.626.896,40
- Beban dibayar dimuka Akhir	Rp	25.025.000,00
- Penghapusan dari pengadaan	Rp	110.752.588,34
- Reklas	Rp	69.412.972.719,49
Jumlah	**Rp**	**73.205.377.204,23**

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

- Penambahan Utang Belanja/Utang Belanja Akhir	Rp	(743.188.130,00)
- Beban dibayar dimuka Awal	Rp	(45.781.333,00)
- Beban Jasa bank dari pengurangan piutang	Rp	(128.700,00)
Jumlah	**Rp**	**(789.098.163,00)**

4. Selisih Belanja Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan

Selisih Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar (Rp7.237.473.634,00) terdiri dari :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban LO(Pengakuan LRA) :

-	Belanja Barjas Dikapitalisasi	Rp	348.841.222,00

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO) :

-	Reklas dari Beban selain beban Pemeliharaan	Rp	(7.586.314.856,00)
	Jumlah	**Rp**	**(7.237.473.634,00)**

5. Selisih Belanja Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Dinas

Selisih Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas sebesar (Rp422.678.999,00) merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Beban Barang dan Jasa BLUD pada RSUD.

6. Belanja - Beban Hibah

Selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar (Rp107.903.763.578,29) terdiri dari :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

-	Sisa Persediaan dari Pengadaan 2021	Rp	41.613.365.568,62
-	Pengurangan Utang Awal	Rp	105.624.760,00
	Jumlah	**Rp**	**41.718.990.328,62**

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

-	Sisa Persediaan 2020 / Persediaan Awal	Rp	(18.540.625.819,87)
-	Penambahan Utang Tahun 2021	Rp	(12.582.540,00)
-	Reklas	Rp	(66.296.738.081,00)
-	Beban Hibah Barang	Rp	(64.772.807.466,04)
	Jumlah	**Rp**	**(149.622.753.906,91)**

7. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp174.928.799.770,00 tidak dilaporkan dalam Beban LO, akan tetapi dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp131.983.563.802,63 selisihnya sebesar Rp8.074.923.866,37 tidak dikapitalisasi.

8. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan sebesar (Rp241.612.151.794,18) tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban penyusutan tersebut merupakan penambahan saldo akumulasi penyusutan aset tetap selama periode Tahun 2021. Beban tersebut terdiri dari.

-	Beban Penyisihan Piutang	Rp	(404.484.545,33)
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	(241.207.667.248,85)
	Jumlah	**Rp**	**(241.612.151.794,18)**

9. Transfer - Beban Transfer

Selisih Belanja Transfer dengan Beban Transfer sebesar Rp150.839.713.777,00 terdiri dari :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

	Pengurangan Utang Belanja/Utang		
-	Belanja Awal	Rp	917.026.681,00
-	Belanja LRA tidak menjadi Beban LO	Rp	151.108.021.000,00

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

	Penambahan Utang Belanja/Utang		
-	Belanja Akhir	Rp	(1.185.333.904,00)
	Jumlah	**Rp**	**150.839.713.777,00**

Belanja LRA yang tidak menjadi Beban LO tersebut di atas adalah Realisasi Dana Desa.

10. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan pengakuan beban yang bersifat non kas sehingga tidak dilaporkan dalam LRA, akan tetapi dilaporkan pada LO sebesar (Rp3.064.285.020,05). Beban tersebut terdiri dari:

9.1	Beban Lain-Lain	Rp	(2.638.646.309,38)
9.2	Beban Penyisihan Dana Bergulir	Rp	(425.638.710,67)
	Jumlah	**Rp**	**(3.064.285.020,05)**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Belanja dan Transfer pada LRA (penerimaan kas) sebesar Rp1.610.281.291.593,25 yang diakui sebagai Beban pada LO adalah sebesar Rp1.217.738.391.443,19. Selisih sebesar Rp392.542.900.150,06 dirinci sebagai berikut :

-	Sisa Persediaan Awal Tidak menjadi Beban (Dimutasi/Direklas/Dihapus/Tidak Digunakan)	Rp	2.983.058.474,79
-	Sisa Persediaan dari Pengadaan 2021	Rp	56.891.666.654,88
-	Pengurangan Utang Belanja Awal	Rp	4.736.182.996,40
-	Belanja Dikapitalisasi	Rp	758.388.512,00
-	Penambahan Beban Dibayar Dimuka	Rp	25.025.000,00
-	Belanja LRA tidak menjadi Beban LO (Dana Desa)	Rp	151.108.021.000,00
-	Belanja LRA tidak menjadi Beban LO (Belanja Modal)	Rp	174.928.799.770,00
-	Penghapusan dari pengadaan (+)	Rp	1.111.757.741,99
	Jumlah	**Rp**	**392.542.900.150,06**

Sedangkan Beban LO sebesar (Rp361.656.341.147,77) merupakan beban non kas yang terdiri dari :

-	Beban Jasa bank dari pengurangan pendapatan LRA	Rp	(212.800,00)
-	Penggunaan Sisa Persediaan Awal	Rp	(39.862.262.915,15)
-	Penggunaan Persediaan dari Hibah/Mutasi	Rp	(8.554.634.599,05)
-	Penambahan Utang Belanja Tahun 2021	Rp	(3.593.332.574,00)
-	Pengurangan Beban dibayar dimuka Awal	Rp	(45.781.333,00)
-	Reklas	Rp	(150.872.646,30)
-	Beban Penyisihan Piutang	Rp	(404.484.545,33)
-	Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	(240.716.501.888,85)
-	Beban Amortisasi	Rp	(491.165.360,00)
-	Beban Hibah Barang	Rp	(64.772.807.466,04)
-	Beban Lain-Lain/Belanja Modal tidak dikapitalisasi	Rp	(3.064.285.020,05)
	Jumlah	**Rp**	**(361.656.341.147,77)**

5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan tampak pada:

1. Penambahan Kas karena adanya SILPA Tahun Lalu sebesar Rp96.552.034.829,67, dan
2. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun Lalu) sebesar Rp6.000.000,00 merupakan Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman atas Piutang *Revolving* (pada Dinas Pertanian).

5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp2.649.491.961,44) merupakan selisih dari :

-	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp	399.103.850,28

Dikurangi

-	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain – Lain - LO	Rp	1.839.994.964,73
-	Defisit Pelepasan/Penghapusan Persediaan -LO	Rp	1.208.600.846,99

Jumlah	**Rp**	**3.048.595.811,72**

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp399.103.850,28 merupakan pendapatan dari penyisihan piutang awal yang dilunasi pada Tahun 2021. Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya. Karena terdapat pengurangan/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tak tertagih yang sudah dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2021 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.048.595.811,72. Yang terdiri dari:

2.1 Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO

Defisit sebesar Rp1.839.994.964,73 tersebut merupakan penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

2.2 Defisit Pelepasan/Penghapusan Persediaan-LO

Defisit sebesar Rp1.208.600.846,99 tersebut merupakan penghapusan persediaan *expired*.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta**.**

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu seluas 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 202 Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan
1	Donorojo	12	109,09
2	Punung	13	108,81
3	Pringkuku	13	132,93
4	Pacitan	25	77,11
5	Kebonagung	19	124,85
6	Arjosari	17	117,06
7	Nawangan	9	124,06
8	Bandar	8	117,34
9	Tegalombo	11	149,26
10	Tulakan	16	161,62
11	Ngadirojo	18	95,91
12	*Sudimoro*	*10*	*71,86*

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara 07º 55’ - 08º 17’ Lintang Selatan 110º dan 55’ - 111º 25’ Bujur Timur. Kabupaten Pacitan terletak di sebelah selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Pacitan memiliki tujuh wilayah kecamatan yang memiliki pesisir sepanjang kurang lebih 70,1 km. Adapun dari sisi ketinggian wilayah, Kabupaten Pacitan masuk dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggiannya mencapai 1231 meter dari permukaan laut yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar adalah untuk pertanian, luasnya mencapai kurang lebih 9,38% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

Gambar 8 Peta Administratif Kabupaten Pacitan

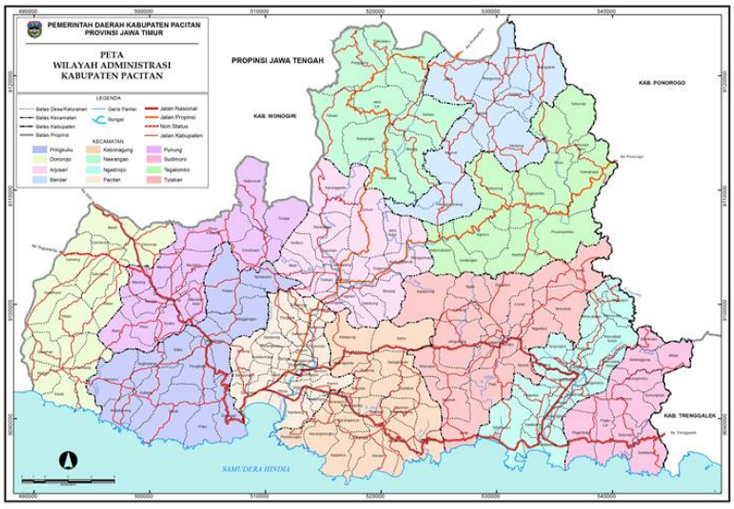

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut.

1) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km^2 atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
2) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km^2 atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
3) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km^2 atau 24% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
4) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km^2 atau 52% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
5) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km^2 atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Grindulu, DAS Baksoko, DAS Lorog, DAS Pagotan, dan DAS Bawur. Luas DAS kurang lebih 1.500 km^2 dengan panjang kurang lebih 52 km. Berdasarkan keadaan alamnya yang sebagian besar berupa perbukitan, sumber air di Kabupaten Pacitan relatif sedikit. Sumber air terdapat di daerah-daerah dataran di sepanjang sungai yang mengalir arah Utara ke Selatan, dan di sepanjang pantai.

Iklim Kabupaten Pacitan adalah tropis tipe Monsoon dengan dua musim yaitu Musim Hujan (MH) berlangsung dari bulan Oktober - April dan Musim Kemarau (MK) dari bulan Mei - September. Pada musim hujan, curah hujan bulanan lebih dari 150 mm/bulan (151 – 511 mm/bln) sedangkan pada musim kemarau curah hujan adalah antara 33 – 90 mm/bln. Suhu udara berkisar antara 22,6^{o}C – 32,1^{o}C dengan suhu udara rata-rata adalah 28°C. Kelembaban udara tahunan berkisar antara 68%-96% dengan kelembaban rata-rata 77%. Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada Bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm^3.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha

- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

6.1.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 203 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

USIA	L	%	P	%	JUMLAH	%
0-4Thn	10.936	1,83	10.236	1,71	21.174	3,54
5-9Thn	16.903	2,83	15.947	2,67	32.853	5,50
10-14Thn	20.602	3,45	19.415	3,25	40.020	6,70
15-19Thn	19.733	3,30	18.469	3,09	38.205	6,39
20-24Thn	21.816	3,65	20.586	3,44	42.406	7,10
25-29Thn	22.103	3,70	20.580	3,44	42.687	7,14
30-34Thn	20.751	3,47	19.928	3,33	40.682	6,81
35-39Thn	22.280	3,73	21.320	3,57	43.604	7,30
40-44Thn	20.979	3,51	20.267	3,39	41.250	6,90
45-49Thn	19.751	3,31	19.986	3,34	39.740	6,65
50-54Thn	23.739	3,97	23.973	4,01	47.716	7,98
55-59Thn	20.665	3,46	21.633	3,62	42.301	7,08
60-64Thn	19.089	3,19	20.017	3,35	39.109	6,54
65>Thn	40.442	6,77	45.434	7,60	85.883	14,37
JUMLAH	**299.789**	**50,17**	**297.791**	**49,83**	**597.630**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2021 mencapai 597.630 jiwa terdiri atas 299.789 jiwa penduduk laki – laki dan 297.791 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 417.700 jiwa atau mencapai 69,90 % total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 204 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Pertanian/ Perkebunan / Peternakan	189.989	41,40
2	Perikanan / Kelautan	1.371	0,30
3	Pertambangan/ Industri	154	0,03
4	Perdagangan	3.482	0,76
5	Angkutan/ Transportasi	877	0,19
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	346	0,08
7	Jasa – jasa	38.024	8,29
8	Pemerintahan	10.953	2,39
9	Kesehatan	380	0,08
10	Pendidikan	2.400	0,52
11	Keagamaan	27	0,01
12	Lain – lain	75	0,02

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
	- Pensiunan	4.187	0,91
	- Belum/tdk bekerja	85.098	18,55
	- Mengurus rumah tangga	34.425	7,50
	- Pelajar mahasiswa	87.071	18,98
	JUMLAH	**458.859**	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ Peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 41,40 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktivitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Table 205 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak mempunyai ijazah	92.614	15,50
2	Tamat SD	219.310	36,70
3	Tamat SLTP	120.986	20,25
4	Tamat SLTA/ sederajat	93.620	15,67
5	Tamat D2	2.500	0,42
6	Tamat D3/ Akademi	2.783	0,47
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	21.054	3,52
Jumlah		**597.580**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

6.1.3 Kondisi Demografi

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama empat tahun terakhir yang disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 206 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020-2021

USIA	2020			2021			Pertumbuhan
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	(%)
0-4Thn	9.159	8.660	17.819	10.936	10.236	21.172	18,82
5-9Thn	16.761	15.787	32.548	16.903	15.947	32.850	0,93
10-14Thn	20.582	19.413	39.995	20.602	19.415	40.017	0,06
15-19Thn	19.770	18.491	38.261	19.733	18.469	38.202	-0,15
20-24Thn	21.840	20.609	42.449	21.816	20.586	42.402	-0,11
25-29Thn	22.210	20.715	42.925	22.103	20.580	42.683	-0,56
30-34Thn	20.849	19.981	40.830	20.751	19.928	40.679	-0,37
35-39Thn	22.337	21.355	43.692	22.280	21.320	43.600	-0,21
40-44Thn	21.001	20.300	41.301	20.979	20.267	41.246	-0,13
45-49Thn	19.815	20.009	39.824	19.751	19.986	39.737	-0,22
50-54Thn	23.830	24.087	47.917	23.739	23.973	47.712	-0,43
55-59Thn	20.789	21.745	42.534	20.665	21.633	42.298	-0,55
60-64Thn	19.228	20.113	39.341	19.089	20.017	39.106	-0,60

USIA	2020			2021			Pertumbuhan (%)
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
65>Thn	41.553	46.484	88.037	40.442	45.434	85.876	-2,45
Jumlah	**299.724**	**297.749**	**597.473**	**299.789**	**297.791**	**597.580**	**0,02**

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2021

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,02 %, komponen usia penduduk yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah usia 0-4 tahun sebesar 18,82 %, sedangkan yang mengalami penurunan angka pertumbuhan penduduk adalah usia produktif yaitu usia 15 tahun keatas sebesar 5,80%. Walaupun tidak mengalami bonus demografi, namun tidak menjadikan masalah karena bonus demografi diibaratkan pedang bermata dua, dapat menjadi berkah atau bencana untuk bangsa. Artinya dalam menghadapi bonus demografi kita harus kembali kepada sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia berkarakter sehat, cerdas, dan produktif akan membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi penduduknya.

Tabel 207 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Donorojo	16.396	18.140	34.536
2	Punung	15.932	17.501	33.433
3	Pringkuku	14.274	15.715	29.989
4	Pacitan	39.258	41.349	80.607
5	Kebonagung	20.384	21.620	42.004
6	Arjosari	19.136	20.175	39.311
7	Nawangan	22.271	23.241	45.512
8	Bandar	21.393	21.687	43.080
9	Tegalombo	24.398	25.202	49.600
10	Tulakan	38.580	39.374	77.954
11	Ngadirojo	22.785	23.660	46.445
12	Sudimoro	15.385	15.532	30.917
Kab. Pacitan		**270.192**	**283.196**	**553.388**

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

Disisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat). Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 208 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha	2014		2015		2016*		2017	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	228.860	66,28	201.770	57,69	n/a	n/a	196.345	56,21
Pertambangan dan Penggalian	1.561	0,45	4.389	1,25	n/a	n/a	1.476	0,42
Industri	30.112	8,72	45.490	13,01	n/a	n/a	33.781	9,67
Listrik, Gas dan Air bersih	419	0,12	421	0,12	n/a	n/a	677	0,19
Konstruksi	16.742	4,85	13.793	3,94	n/a	n/a	33.029	9,46
Perdagangan, Hotel dan Restoran	34.474	9,98	44.837	12,82	n/a	n/a	40.853	11,70
Angkutan dan Telekomunikasi	5.459	1,58	4.711	1,35	n/a	n/a	3.705	1,06
Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.255	0,94	2.871	0,82	n/a	n/a	5.473	1,57
Jasa-jasa	24.388	7,06	31.477	9,00	n/a	n/a	33.941	9,72
Jumlah	**345.270**	**100**	349.759	**100**	**n/a**	**n/a**	349.280	**100**

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian adalah yang terbesar, lebih dari separuh penduduk yang bekerja bertumpu pada sektor ini. Jika dibandingkan dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi lain (seperti sektor Industri, Perdagangan dan Jasa-jasa), sebagaimana terdapat pada grafik di bawah ini.

Gambar 9 Grafik Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

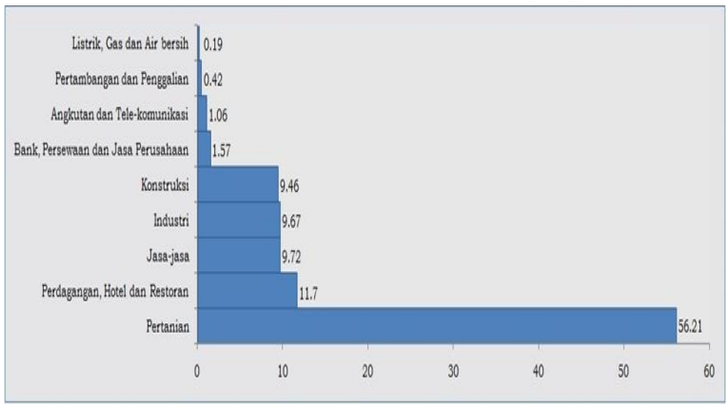

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Sementara itu komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui pada tabel berikut.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, struktur organisasi pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

1. Bupati Pacitan;
2. Sekretaris Daerah Pacitan;
3. Wakil Bupati Pacitan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
6. Asisten Administrasi Umum;
7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
10. Bagian Perekonomian;
11. Bagian Pembangunan;
12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Bagian Umum;
14. Bagian Organisasi;
15. Bagian Hubungan Masyarakat;
15. Dinas Pendidikan;
16. Dinas Kesehatan;
17. Rumah Sakit Umum Daerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Sosial;
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Dinas Perhubungan;
25. Dinas Lingkungan Hidup;
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;

28. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
32. Dinas Komunikasi dan Informatika;
33. Dinas Perpustakaan ;
34. Dinas Pangan;
35. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
36. Dinas Pertanian;
37. Dinas Perikanan;
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Sekretariat Daerah;
40. Sekretariat DPRD;
41. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
42. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
43. Inspektorat;
44. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
45. Badan Pendapatan Daerah;
46. Kecamatan Donorojo;
47. Kecamatan Punung;
48. Kecamatan Pringkuku;
49. Kecamatan Pacitan;
50. Kecamatan Kebonagung;
51. Kecamatan Arjosari;
52. Kecamatan Nawangan;
53. Kecamatan Bandar;
54. Kecamatan Tegalombo;
55. Kecamatan Tulakan;
56. Kecamatan Ngadirojo;
57. Kecamatan Sudimoro;
58. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
59. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
60. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1) Dua Sekretariat, yaitu:
   a) Sekretariat Daerah;
   b) Sekretariat DPRD;
2. Satu Inspektorat:
   a) Inspektorat
3. Enam Badan, yaitu:
   a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
   b) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   d) Badan Pendapatan Daerah;
   e) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
   f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dua Puluh (20) Dinas, yaitu:
   a) Dinas Pendidikan;
   b) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
   c) Dinas Kesehatan;
   d) Dinas Sosial;
   e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
   f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h) Satuan Polisi Pamong Praja

i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

j) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

l) Dinas Komunikasi dan Informatika;

m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

o) Dinas Perhubungan;

p) Dinas Lingkungan Hidup;

q) Dinas Pangan;

r) Dinas Perikanan;

s) Dinas Pertanian;

t) Dinas Perpustakaan.

5. Satu Lembaga Lain, yaitu:

   a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

   a) Kecamatan Pacitan;

   b) Kecamatan Kebonagung;

   c) Kecamatan Pringkuku;

   d) Kecamatan Punung;

   e) Kecamatan Donorojo;

   f) Kecamatan Tulakan;

   g) Kecamatan Ngadirojo;

   h) Kecamatan Sudimoro;

   i) Kecamatan Arjosari;

   j) Kecamatan Tegalombo;

   k) Kecamatan Nawangan;

   l) Kecamatan Bandar.

7. Satu RSUD

   a) RSUD dr. Darsono

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi Dengan Instansi *Vertikal* di Daerah;
4. Pembinaan Batas Wilayah;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Pengelolaan Kawasan Khusus;
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang efektif menyelenggaraan tugas pemerintahannya Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2021 adalah sengketa terkait kepegawaian, melalui perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Penggugat :

1) Savitri Susilowati, A.Md. melawan Bupati Pacitan,
dengan Nomor Perkara 38/G/2021/PTUN.SBY terhadap Keputusan Bupati Pacitan Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor : 188.45/1405/KPTS/408.12/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdri. Savitri Susilowati, A.Md, tanggal 21 Desember 2018.

2) Sdr. Kunardi S.Sos melawan Bupati Pacitan,
dengan Nomor Perkara 39/G/2021/PTUN.Sby terhadap Keputusan Bupati Pacitan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.45/474/KPTS/408.12/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. KUNARDI, S.Sos., yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020.

Terhadap perkara tersebut prosesnya melalui 2 (dua) jalur yaitu secara Non litigasi dan secara litigasi / jalur pengadilan.

1. Perkara Nomor 38/G/2021/PTUN.SBY a.n Sdri. Savitri Susilowati, A.Md.

1) Non Litigasi
   - Penggugat (Savitri Susilowati, A.Md) mengajukan Upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat (Bupati Pacitan) pada tanggal 3 Februari 2021;
   - Atas Surat Permohonan Keberatan tersebut Tergugat memberikan surat balasan melalui surat Bupati Pacitan Nomor 800/116/408.54/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Jawaban Pemohon Keberatan. Yang diterima oleh Penggugat tanggal 2 Maret 2021;
   - tanggal 4 Maret 2021 Penggugat mengajukan Upaya Banding administrasi kepada DPRD Kabupaten Pacitan, DPRD telah mengirimkan surat jawaban dengan Nomor 170/370/408.25/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Jawaban Permohonan Banding Administratif;

2) Pengadilan Tata Usaha Negara
   - Penggugat melakukan upaya hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2021/PTUN.Sby.
   - Gugatan dinyatakan tidak terima oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor 38/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY tanggal 21 April 2021, amarnya berbunyi sebagai berikut:
     - Menetapkan Gugatan tidak diterima (Niet ontvankelijke Verklaard); dan
     - Membebankan kepada Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 394.000,00.
   - Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perlawanan tanggal 28 April 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Nomor 38/G/PLW/2021/PTUN.Sby.
   - Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Hari senin tanggal 14 Juni 2021 bahwa menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya, menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby, dan Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00. yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 38/G/PLW/2021/PTUN.Sby.

2. Perkara Nomor 39/G/2021/PTUN.SBY a.n Sdr. Kunardi, S.Sos.

1) Non Litigasi
   - Penggugat (Kunardi, S.Sos) mengajukan Upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat (Bupati) pada tanggal 2 Desember 2020;
   - Atas Surat Permohonan Keberatan tersebut Tergugat memberikan surat balasan melalui surat Bupati Pacitan Nomor 800/047/408.54/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Jawaban Permohonan Keberatan;

- tanggal 4 Maret 2021 Penggugat mengajukan Upaya Banding administrasi kepada DPRD Kabupaten Pacitan, dan pada tanggal 16 Maret 2021 DPRD telah mengirimkan jawaban dengan inti pokok jawaban permohonan DPRD telah mengirimkan surat jawaban dengan Nomor 170/371/408.25/2021 Perihal Jawaban Permohonan Banding Administratif;

2) Pengadilan Tata Usaha Negara
   - Penggugat melakukan upaya hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2021/PTUN.Sby.
   - Gugatan dinyatakan tidak terima oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor 39/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY tanggal 21 April 2021, amarnya berbunyi sebagai berikut:
     - Menetapkan Gugatan tidak diterima (Niet ontvankelijke Verklaard); dan
     - Membebankan kepada Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 394.000,00.
   - Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perlawanan tanggal 28 April 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Nomor 39/G/PLW/2021/PTUN.Sby.
   - Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Hari senin tanggal 14 Juni 2021 bahwa menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby, dan Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00. yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 39/G/PLW/2021/PTUN.Sby.

6.4 Catatan Penting Lainnya Terkait Pandemi Covid-19

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan langkah–langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

   Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/408.12/2020

2. Melakukan Percepatan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengamanan sosial/*social safety net* dengan rincian sebagai berikut:

   1) Penanganan Kesehatan

      Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bidang kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.881.782.049 dan terealisasi sebesar Rp56.045.813.650 atau 71% yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Darsono, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, dan Kecamatan.

   2) Penanganan Dampak Ekonomi

      Untuk penanganan dampak ekonomi dialokasikan anggaran sebesar Rp270.200.000 dan terealisasi sebesar Rp254.975.850 atau 94% yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

   3) Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/*Sosial Safety Net*

      Penanganan dampak sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.317.200.000 dan terealisasi sebesar Rp1.317.200.000 atau 100% yang dilaksanakan Dinas Sosial dan BPKAD sebagai PPKD.

Adapun rincian Kinerja Bidang Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial untuk pencegahan dan / atau Penanganan Covid-19 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 11**

VII. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang seiring dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Secara umum sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan akan dijadikan modal dalam rangka melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif selama proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan meskipun di tengah situasi pandemi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi namun proses ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan yang lebih baik.

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	904.133.113.289,00	177.997.661.618,00	0	0	1.082.130.774.907,00	852.712.947.004,61	158.477.158.276,00	0	0	1.011.190.105.280,61	(70.940.669.626,39)	93.44
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	517.251.546.145,00	64.035.705.510,00	0	0	581.287.251.655,00	501.070.173.117,00	58.667.625.623,00	0	0	559.737.798.740,00	(21.549.452.915,00)	96.29
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan	517.251.546.145,00	64.035.705.510,00	0	0	581.287.251.655,00	501.070.173.117,00	58.667.625.623,00	0	0	559.737.798.740,00	(21.549.452.915,00)	96.29
1.01.1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	443.020.023.433,00	110.521.600,00	0	0	443.130.545.033,00	429.081.106.863,00	110.140.000,00	0	0	429.191.246.863,00	(13.939.298.170,00)	96.85
1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	65.871.336.045,00	63.925.183.910,00	0	0	129.796.519.955,00	63.709.999.554,00	58.557.485.623,00	0	0	122.267.485.177,00	(7.529.034.778,00)	94.20
1.01.1.01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
1.01.1.01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.360.186.667,00	0	0	0	8.360.186.667,00	8.279.066.700,00	0	0	0	8.279.066.700,00	(81.119.967,00)	99.03
1.01.1.01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	289.352.682.887,00	55.814.300.573,00	0	0	345.166.983.460,00	257.281.674.961,61	45.872.462.758,00	0	0	303.154.137.719,61	(42.012.845.740,39)	87.83
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	161.166.460.496,00	23.224.301.273,00	0	0	184.390.761.769,00	132.871.924.558,29	17.369.737.978,00	0	0	150.241.662.536,29	(34.149.099.232,71)	81.48
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.470.619.084,00	1.475.721.580,00	0	0	58.946.340.664,00	53.391.266.096,00	1.467.081.792,00	0	0	54.858.347.888,00	(4.087.992.776,00)	93.06
1.02.1.02.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	92.403.923.979,00	21.745.675.693,00	0	0	114.149.599.672,00	70.156.910.048,29	15.899.752.186,00	0	0	86.056.662.234,29	(28.092.937.437,71)	75.39
1.02.1.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.811.001.808,00	2.904.000,00	0	0	8.813.905.808,00	7.153.400.864,00	2.904.000,00	0	0	7.156.304.864,00	(1.657.600.944,00)	81.19
1.02.1.02.01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	247.280.200,00	0	0	0	247.280.200,00	231.379.450,00	0	0	0	231.379.450,00	(15.900.750,00)	93.57

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.233.635.425,00	0	0	0	2.233.635.425,00	1.938.968.100,00	0	0	0	1.938.968.100,00	(294.667.325,00)	86.81
1.02.1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO	128.186.222.391,00	32.589.999.300,00	0	0	160.776.221.691,00	124.409.750.403,32	28.502.724.780,00	0	0	152.912.475.183,32	(7.863.746.507,68)	95.11
1.02.1.02.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	118.031.300.491,00	4.000.000.000,00	0	0	122.031.300.491,00	116.749.872.044,32	3.998.631.405,00	0	0	120.748.503.449,32	(1.282.797.041,68)	98.95
1.02.1.02.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	912.021.900,00	28.589.999.300,00	0	0	29.502.021.200,00	688.478.231,00	24.504.093.375,00	0	0	25.192.571.606,00	(4.309.449.594,00)	85.39
1.02.1.02.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.242.900.000,00	0	0	0	9.242.900.000,00	6.971.400.128,00	0	0	0	6.971.400.128,00	(2.271.499.872,00)	75.42
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.242.815.847,00	54.196.537.172,00	0	0	88.439.353.019,00	32.395.964.784,00	50.147.454.072,00	0	0	82.543.418.856,00	(5.895.934.163,00)	93.33
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.242.815.847,00	54.196.537.172,00	0	0	88.439.353.019,00	32.395.964.784,00	50.147.454.072,00	0	0	82.543.418.856,00	(5.895.934.163,00)	93.33
1.03.1.03.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.185.111.994,00	370.134.490,00	0	0	8.555.246.484,00	7.844.251.028,00	325.857.500,00	0	0	8.170.108.528,00	(385.137.956,00)	95.50
1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.689.489.472,00	10.552.321.601,00	0	0	12.241.811.073,00	1.643.383.660,00	9.009.644.960,00	0	0	10.653.028.620,00	(1.588.782.453,00)	87.02
1.03.1.03.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.684.452.939,00	0	0	0	6.684.452.939,00	5.542.547.711,00	0	0	0	5.542.547.711,00	(1.141.905.228,00)	82.92
1.03.1.03.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.676.045.000,00	0	0	0	3.676.045.000,00	3.675.876.400,00	0	0	0	3.675.876.400,00	(168.600,00)	100.00
1.03.1.03.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.219.672.865,00	344.608.275,00	0	0	1.564.281.140,00	1.203.248.700,00	334.005.000,00	0	0	1.537.253.700,00	(27.027.440,00)	98.27
1.03.1.03.01.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.675.743.598,00	1.416.465.892,00	0	0	3.092.209.490,00	1.635.447.765,00	1.406.574.500,00	0	0	3.042.022.265,00	(50.187.225,00)	98.38

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1.03.1.03.01.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	758.476.619,00	0	0	758.476.619,00	0	681.647.968,00	0	0	681.647.968,00	(76.828.651,00)	89.87
1.03.1.03.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.936.373.729,00	40.753.695.995,00	0	0	50.690.069.724,00	9.732.018.050,00	38.388.954.144,00	0	0	48.120.972.194,00	(2.569.097.530,00)	94.93
1.03.1.03.01.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	85.000.000,00	0	0	0	85.000.000,00	83.740.500,00	0	0	0	83.740.500,00	(1.259.500,00)	98.52
1.03.1.03.01.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.090.926.250,00	834.300,00	0	0	1.091.760.550,00	1.035.450.970,00	770.000,00	0	0	1.036.220.970,00	(55.539.580,00)	94.91
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.243.273.767,00	3.555.867.293,00	0	0	47.799.141.060,00	43.526.897.997,00	3.401.056.503,00	0	0	46.927.954.500,00	(871.186.560,00)	98.18
1.04.1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	44.243.273.767,00	3.555.867.293,00	0	0	47.799.141.060,00	43.526.897.997,00	3.401.056.503,00	0	0	46.927.954.500,00	(871.186.560,00)	98.18
1.04.1.04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.346.756.697,00	103.489.210,00	0	0	3.450.245.907,00	2.924.830.272,00	101.636.050,00	0	0	3.026.466.322,00	(423.779.585,00)	87.72
1.04.1.04.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	338.000.000,00	0	0	0	338.000.000,00	287.473.025,00	0	0	0	287.473.025,00	(50.526.975,00)	85.05
1.04.1.04.01.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.260.000.000,00	0	0	0	1.260.000.000,00	1.236.207.500,00	0	0	0	1.236.207.500,00	(23.792.500,00)	98.11
1.04.1.04.01.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.017.000.000,00	0	0	0	2.017.000.000,00	2.005.817.700,00	0	0	0	2.005.817.700,00	(11.182.300,00)	99.45
1.04.1.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	37.281.517.070,00	3.452.378.083,00	0	0	40.733.895.153,00	37.072.569.500,00	3.299.420.453,00	0	0	40.371.989.953,00	(361.905.200,00)	99.11
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.206.176.352,00	46.615.000,00	0	0	12.252.791.352,00	11.783.593.614,00	42.317.000,00	0	0	11.825.910.614,00	(426.880.738,00)	96.52
1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	9.472.728.280,00	0	0	0	9.472.728.280,00	9.090.631.276,00	0	0	0	9.090.631.276,00	(382.097.004,00)	95.97
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.174.369.820,00	0	0	0	6.174.369.820,00	5.843.209.481,00	0	0	0	5.843.209.481,00	(331.160.339,00)	94.64
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.273.489.550,00	0	0	0	3.273.489.550,00	3.223.639.400,00	0	0	0	3.223.639.400,00	(49.850.150,00)	98.48

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1.05.1.05.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	24.868.910,00	0	0	0	24.868.910,00	23.782.395,00	0	0	0	23.782.395,00	(1.086.515,00)	95.63
1.05.1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.733.448.072,00	46.615.000,00	0	0	2.780.063.072,00	2.692.962.338,00	42.317.000,00	0	0	2.735.279.338,00	(44.783.734,00)	98.39
1.05.1.05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.246.185.822,00	0	0	0	1.246.185.822,00	1.236.503.262,00	0	0	0	1.236.503.262,00	(9.682.560,00)	99.22
1.05.1.05.02.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.487.262.250,00	46.615.000,00	0	0	1.533.877.250,00	1.456.459.076,00	42.317.000,00	0	0	1.498.776.076,00	(35.101.174,00)	97.71
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.836.618.291,00	348.636.070,00	0	0	7.185.254.361,00	6.654.642.531,00	346.242.320,00	0	0	7.000.884.851,00	(184.369.510,00)	97.43
1.06.1.06.01	Dinas Sosial	6.836.618.291,00	348.636.070,00	0	0	7.185.254.361,00	6.654.642.531,00	346.242.320,00	0	0	7.000.884.851,00	(184.369.510,00)	97.43

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.379.507.331,00	123.554.450,00	0	0	3.503.061.781,00	3.235.658.058,00	123.537.200,00	0	0	3.359.195.258,00	(143.866.523,00)	95.89
1.06.1.06.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	201.532.550,00	22.375.000,00	0	0	223.907.550,00	195.677.800,00	21.505.000,00	0	0	217.182.800,00	(6.724.750,00)	97.00
1.06.1.06.01.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.451.798.710,00	155.989.320,00	0	0	2.607.788.030,00	2.422.324.828,00	155.026.520,00	0	0	2.577.351.348,00	(30.436.682,00)	98.83
1.06.1.06.01.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	644.276.900,00	46.220.100,00	0	0	690.497.000,00	643.647.950,00	46.173.600,00	0	0	689.821.550,00	(675.450,00)	99.90
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	125.000.000,00	0	0	0	125.000.000,00	123.760.795,00	0	0	0	123.760.795,00	(1.239.205,00)	99.01
1.06.1.06.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	34.502.800,00	497.200,00	0	0	35.000.000,00	33.573.100,00	0	0	0	33.573.100,00	(1.426.900,00)	95.92
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	73.857.031.191,00	10.683.625.697,00	0	0	84.540.656.888,00	70.015.405.953,57	9.620.754.836,00	0	0	79.636.160.789,57	(4.904.496.098,43)	94.20
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.558.489.736,00	0	0	0	3.558.489.736,00	3.290.866.042,00	0	0	0	3.290.866.042,00	(267.623.694,00)	92.48
2.07.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.558.489.736,00	0	0	0	3.558.489.736,00	3.290.866.042,00	0	0	0	3.290.866.042,00	(267.623.694,00)	92.48
2.07.2.11.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.000.000.000,00	0	0	0	1.000.000.000,00	955.558.750,00	0	0	0	955.558.750,00	(44.441.250,00)	95.56
2.07.2.11.01.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.544.243.936,00	0	0	0	2.544.243.936,00	2.321.391.492,00	0	0	0	2.321.391.492,00	(222.852.444,00)	91.24
2.07.2.11.01.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.07.2.11.01.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	14.245.800,00	0	0	0	14.245.800,00	13.915.800,00	0	0	0	13.915.800,00	(330.000,00)	97.68
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN	260.557.355,00	0	0	0	260.557.355,00	260.285.392,00	0	0	0	260.285.392,00	(271.963,00)	99.90
2.08.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	260.557.355,00	0	0	0	260.557.355,00	260.285.392,00	0	0	0	260.285.392,00	(271.963,00)	99.90

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
2.08.2.08.01.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	87.560.375,00	0	0	0	87.560.375,00	87.434.880,00	0	0	0	87.434.880,00	(125.495,00)	99.86
2.08.2.08.01.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	11.580.400,00	0	0	0	11.580.400,00	11.574.850,00	0	0	0	11.574.850,00	(5.550,00)	99.95
2.08.2.08.01.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	107.013.180,00	0	0	0	107.013.180,00	106.879.912,00	0	0	0	106.879.912,00	(133.268,00)	99.88
2.08.2.08.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.08.2.08.01.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	15.455.600,00	0	0	0	15.455.600,00	15.450.600,00	0	0	0	15.450.600,00	(5.000,00)	99.97
2.08.2.08.01.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	38.947.800,00	0	0	0	38.947.800,00	38.945.150,00	0	0	0	38.945.150,00	(2.650,00)	99.99
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.411.112.010,00	12.375.000,00	0	0	3.423.487.010,00	3.161.227.224,32	9.636.000,00	0	0	3.170.863.224,32	(252.623.785,68)	92.62
2.09.2.03.01	Dinas Pangan	3.411.112.010,00	12.375.000,00	0	0	3.423.487.010,00	3.161.227.224,32	9.636.000,00	0	0	3.170.863.224,32	(252.623.785,68)	92.62
2.09.2.03.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.999.991.340,00	6.600.000,00	0	0	2.006.591.340,00	1.798.960.836,00	5.170.000,00	0	0	1.804.130.836,00	(202.460.504,00)	89.91
2.09.2.03.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	152.996.800,00	0	0	0	152.996.800,00	146.077.738,32	0	0	0	146.077.738,32	(6.919.061,68)	95.48
2.09.2.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.142.801.240,00	5.775.000,00	0	0	1.148.576.240,00	1.103.208.500,00	4.466.000,00	0	0	1.107.674.500,00	(40.901.740,00)	96.44
2.09.2.03.01.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	17.387.600,00	0	0	0	17.387.600,00	17.172.000,00	0	0	0	17.172.000,00	(215.600,00)	98.76
2.09.2.03.01.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.935.030,00	0	0	0	97.935.030,00	95.808.150,00	0	0	0	95.808.150,00	(2.126.880,00)	97.83
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	687.000.000,00	3.501.050.000,00	0	0	4.188.050.000,00	382.770.461,00	3.488.277.800,00	0	0	3.871.048.261,00	(317.001.739,00)	92.43
2.10.1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	687.000.000,00	3.501.050.000,00	0	0	4.188.050.000,00	382.770.461,00	3.488.277.800,00	0	0	3.871.048.261,00	(317.001.739,00)	92.43
2.10.1.04.01.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	72.204.000,00	0	0	0	72.204.000,00	48.695.341,00	0	0	0	48.695.341,00	(23.508.659,00)	67.44

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
2.10.1.04.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	53.880.000,00	3.501.050.000,00	0	0	3.554.930.000,00	45.600.000,00	3.488.277.800,00	0	0	3.533.877.800,00	(21.052.200,00)	99.41
2.10.1.04.01.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	560.916.000,00	0	0	0	560.916.000,00	288.475.120,00	0	0	0	288.475.120,00	(272.440.880,00)	51.43
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.459.082.219,00	540.845.267,00	0	0	10.999.927.486,00	9.653.057.421,00	515.022.100,00	0	0	10.168.079.521,00	(831.847.965,00)	92.44
2.11.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	10.459.082.219,00	540.845.267,00	0	0	10.999.927.486,00	9.653.057.421,00	515.022.100,00	0	0	10.168.079.521,00	(831.847.965,00)	92.44
2.11.2.05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.271.270.729,00	48.440.000,00	0	0	6.319.710.729,00	5.699.018.221,00	47.168.000,00	0	0	5.746.186.221,00	(573.524.508,00)	90.92
2.11.2.05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	202.303.000,00	0	0	0	202.303.000,00	164.275.500,00	0	0	0	164.275.500,00	(38.027.500,00)	81.20
2.11.2.05.01.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	166.978.890,00	0	0	0	166.978.890,00	154.705.400,00	0	0	0	154.705.400,00	(12.273.490,00)	92.65
2.11.2.05.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	442.197.600,00	254.781.267,00	0	0	696.978.867,00	410.226.060,00	234.031.500,00	0	0	644.257.560,00	(52.721.307,00)	92.44
2.11.2.05.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	16.765.000,00	0	0	0	16.765.000,00	13.980.900,00	0	0	0	13.980.900,00	(2.784.100,00)	83.39
2.11.2.05.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	80.038.100,00	0	0	0	80.038.100,00	78.814.000,00	0	0	0	78.814.000,00	(1.224.100,00)	98.47
2.11.2.05.01.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	38.677.000,00	0	0	0	38.677.000,00	35.589.000,00	0	0	0	35.589.000,00	(3.088.000,00)	92.02

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
2.11.2.05.01.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	46.000.000,00	0	0	0	46.000.000,00	44.923.320,00	0	0	0	44.923.320,00	(1.076.680,00)	97.66
2.11.2.05.01.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	12.110.000,00	0	0	0	12.110.000,00	11.882.050,00	0	0	0	11.882.050,00	(227.950,00)	98.12
2.11.2.05.01.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.182.741.900,00	237.624.000,00	0	0	3.420.365.900,00	3.039.642.970,00	233.822.600,00	0	0	3.273.465.570,00	(146.900.330,00)	95.71
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEN	4.046.869.530,00	884.632.660,00	0	0	4.931.502.190,00	3.749.798.221,00	834.633.000,00	0	0	4.584.431.221,00	(347.070.969,00)	92.96
2.12.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.046.869.530,00	884.632.660,00	0	0	4.931.502.190,00	3.749.798.221,00	834.633.000,00	0	0	4.584.431.221,00	(347.070.969,00)	92.96
2.12.2.06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.004.203.130,00	333.727.460,00	0	0	4.337.930.590,00	3.716.489.521,00	307.303.000,00	0	0	4.023.792.521,00	(314.138.069,00)	92.76
2.12.2.06.01.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.12.2.06.01.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	26.920.000,00	22.440.000,00	0	0	49.360.000,00	23.100.000,00	22.440.000,00	0	0	45.540.000,00	(3.820.000,00)	92.26
2.12.2.06.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	15.746.400,00	528.465.200,00	0	0	544.211.600,00	10.208.700,00	504.890.000,00	0	0	515.098.700,00	(29.112.900,00)	94.65
2.12.2.06.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.620.576.070,00	50.994.000,00	0	0	6.671.570.070,00	6.587.529.327,00	50.967.400,00	0	0	6.638.496.727,00	(33.073.343,00)	99.50
2.13.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.620.576.070,00	50.994.000,00	0	0	6.671.570.070,00	6.587.529.327,00	50.967.400,00	0	0	6.638.496.727,00	(33.073.343,00)	99.50
2.13.2.07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.005.888.394,00	50.994.000,00	0	0	3.056.882.394,00	2.999.135.398,00	50.967.400,00	0	0	3.050.102.798,00	(6.779.596,00)	99.78
2.13.2.07.01.02	PROGRAM PENATAAN DESA	83.440.000,00	0	0	0	83.440.000,00	82.501.308,00	0	0	0	82.501.308,00	(938.692,00)	98.88
2.13.2.07.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	49.743.500,00	0	0	0	49.743.500,00	(256.500,00)	99.49

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
2.13.2.07.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.645.682.776,00	0	0	0	2.645.682.776,00	2.633.170.732,00	0	0	0	2.633.170.732,00	(12.512.044,00)	99.53
2.13.2.07.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	835.564.900,00	0	0	0	835.564.900,00	822.978.389,00	0	0	0	822.978.389,00	(12.586.511,00)	98.49
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG	9.927.067.380,00	1.188.528.000,00	0	0	11.115.595.380,00	9.167.006.070,00	889.791.800,00	0	0	10.056.797.870,00	(1.058.797.510,00)	90.47
2.14.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.927.067.380,00	1.188.528.000,00	0	0	11.115.595.380,00	9.167.006.070,00	889.791.800,00	0	0	10.056.797.870,00	(1.058.797.510,00)	90.47
2.14.2.08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.626.479.335,00	0	0	0	2.626.479.335,00	2.502.701.629,00	0	0	0	2.502.701.629,00	(123.777.706,00)	95.29
2.14.2.08.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.14.2.08.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.235.875.045,00	1.188.528.000,00	0	0	8.424.403.045,00	6.599.990.641,00	889.791.800,00	0	0	7.489.782.441,00	(934.620.604,00)	88.91
2.14.2.08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	64.713.000,00	0	0	0	64.713.000,00	64.313.800,00	0	0	0	64.313.800,00	(399.200,00)	99.38
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14.654.953.066,00	695.302.800,00	0	0	15.350.255.866,00	14.534.150.485,00	691.720.600,00	0	0	15.225.871.085,00	(124.384.781,00)	99.19
2.15.2.09.01	Dinas Perhubungan	14.654.953.066,00	695.302.800,00	0	0	15.350.255.866,00	14.534.150.485,00	691.720.600,00	0	0	15.225.871.085,00	(124.384.781,00)	99.19
2.15.2.09.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.138.628.600,00	70.482.100,00	0	0	12.209.110.700,00	12.044.868.071,00	70.018.300,00	0	0	12.114.886.371,00	(94.224.329,00)	99.23
2.15.2.09.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.516.324.466,00	624.820.700,00	0	0	3.141.145.166,00	2.489.282.414,00	621.702.300,00	0	0	3.110.984.714,00	(30.160.452,00)	99.04
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.661.684.770,00	194.420.300,00	0	0	4.856.105.070,00	4.557.856.467,00	191.975.000,00	0	0	4.749.831.467,00	(106.273.603,00)	97.81
2.16.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.661.684.770,00	194.420.300,00	0	0	4.856.105.070,00	4.557.856.467,00	191.975.000,00	0	0	4.749.831.467,00	(106.273.603,00)	97.81

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
2.16.2.10.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.841.009.070,00	1.980.000,00	0	0	2.842.989.070,00	2.771.942.654,00	1.650.000,00	0	0	2.773.592.654,00	(69.396.416,00)	97.56
2.16.2.10.01.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	619.759.700,00	133.090.300,00	0	0	752.850.000,00	585.680.813,00	131.285.000,00	0	0	716.965.813,00	(35.884.187,00)	95.23
2.16.2.10.01.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.200.916.000,00	59.350.000,00	0	0	1.260.266.000,00	1.200.233.000,00	59.040.000,00	0	0	1.259.273.000,00	(993.000,00)	99.92
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENG	4.580.050.017,00	34.887.000,00	0	0	4.614.937.017,00	4.377.257.500,00	34.815.000,00	0	0	4.412.072.500,00	(202.864.517,00)	95.60
2.17.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.580.050.017,00	34.887.000,00	0	0	4.614.937.017,00	4.377.257.500,00	34.815.000,00	0	0	4.412.072.500,00	(202.864.517,00)	95.60
2.17.2.11.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.252.002.017,00	34.887.000,00	0	0	3.286.889.017,00	3.051.337.550,00	34.815.000,00	0	0	3.086.152.550,00	(200.736.467,00)	93.89
2.17.2.11.01.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	14.000.000,00	0	0	0	14.000.000,00	13.999.750,00	0	0	0	13.999.750,00	(250,00)	100.00
2.17.2.11.01.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	13.724.600,00	0	0	0	13.724.600,00	(1.275.400,00)	91.50
2.17.2.11.01.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.17.2.11.01.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	528.058.000,00	0	0	0	528.058.000,00	527.557.850,00	0	0	0	527.557.850,00	(500.150,00)	99.91
2.17.2.11.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	155.000.000,00	0	0	0	155.000.000,00	154.989.950,00	0	0	0	154.989.950,00	(10.050,00)	99.99
2.17.2.11.01.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	615.990.000,00	0	0	0	615.990.000,00	615.647.800,00	0	0	0	615.647.800,00	(342.200,00)	99.94
2.17.2.11.01.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.712.019.250,00	145.985.900,00	0	0	3.858.005.150,00	3.431.961.897,00	145.235.240,00	0	0	3.577.197.137,00	(280.808.013,00)	92.72
2.18.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.712.019.250,00	145.985.900,00	0	0	3.858.005.150,00	3.431.961.897,00	145.235.240,00	0	0	3.577.197.137,00	(280.808.013,00)	92.72

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
2.18.2.12.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.114.137.250,00	145.425.900,00	0	0	3.259.563.150,00	2.908.608.317,00	145.235.240,00	0	0	3.053.843.557,00	(205.719.593,00)	93.69
2.18.2.12.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	25.000.000,00	0	0	0	25.000.000,00	24.888.250,00	0	0	0	24.888.250,00	(111.750,00)	99.55
2.18.2.12.01.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.18.2.12.01.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	160.980.000,00	0	0	0	160.980.000,00	136.974.850,00	0	0	0	136.974.850,00	(24.005.150,00)	85.09
2.18.2.12.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	371.902.000,00	560.000,00	0	0	372.462.000,00	321.490.480,00	0	0	0	321.490.480,00	(50.971.520,00)	86.31
2.18.2.12.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40.000.000,00	0	0	0	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	40.000.000,00	0,00	100.00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.814.027.471,00	0	0	0	1.814.027.471,00	1.739.290.756,25	0	0	0	1.739.290.756,25	(74.736.714,75)	95.88
2.19.3.02.01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	1.814.027.471,00	0	0	0	1.814.027.471,00	1.739.290.756,25	0	0	0	1.739.290.756,25	(74.736.714,75)	95.88
2.19.3.02.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	499.027.471,00	0	0	0	499.027.471,00	492.060.150,00	0	0	0	492.060.150,00	(6.967.321,00)	98.60
2.19.3.02.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.015.000.000,00	0	0	0	1.015.000.000,00	947.230.606,25	0	0	0	947.230.606,25	(67.769.393,75)	93.32
2.19.3.02.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	0	0	0	300.000.000,00	300.000.000,00	0	0	0	300.000.000,00	0,00	100.00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	96.600.000,00	17.600.000,00	0	0	114.200.000,00	96.316.000,00	17.600.000,00	0	0	113.916.000,00	(284.000,00)	99.75
2.20.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	96.600.000,00	17.600.000,00	0	0	114.200.000,00	96.316.000,00	17.600.000,00	0	0	113.916.000,00	(284.000,00)	99.75
2.20.2.10.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	96.600.000,00	17.600.000,00	0	0	114.200.000,00	96.316.000,00	17.600.000,00	0	0	113.916.000,00	(284.000,00)	99.75
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.663.200,00	1.336.800,00	0	0	3.000.000,00	409.000,00	600.000,00	0	0	1.009.000,00	(1.991.000,00)	33.63
2.21.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.663.200,00	1.336.800,00	0	0	3.000.000,00	409.000,00	600.000,00	0	0	1.009.000,00	(1.991.000,00)	33.63

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
2.21.2.10.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.663.200,00	1.336.800,00	0	0	3.000.000,00	409.000,00	600.000,00	0	0	1.009.000,00	(1.991.000,00)	33.63
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.917.759.500,00	0	0	0	1.917.759.500,00	1.843.191.315,00	0	0	0	1.843.191.315,00	(74.568.185,00)	96.11
2.22.1.01.01	Dinas Pendidikan	1.917.759.500,00	0	0	0	1.917.759.500,00	1.843.191.315,00	0	0	0	1.843.191.315,00	(74.568.185,00)	96.11
2.22.1.01.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	437.100.000,00	0	0	0	437.100.000,00	420.131.085,00	0	0	0	420.131.085,00	(16.968.915,00)	96.12
2.22.1.01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	129.050.000,00	0	0	0	129.050.000,00	123.686.380,00	0	0	0	123.686.380,00	(5.363.620,00)	95.84
2.22.1.01.01.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.201.609.500,00	0	0	0	1.201.609.500,00	1.151.116.850,00	0	0	0	1.151.116.850,00	(50.492.650,00)	95.80
2.22.1.01.01.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	150.000.000,00	0	0	0	150.000.000,00	148.257.000,00	0	0	0	148.257.000,00	(1.743.000,00)	98.84
2.22.1.01.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.270.811.617,00	3.410.667.970,00	0	0	6.681.479.587,00	3.006.714.775,00	2.745.497.896,00	0	0	5.752.212.671,00	(929.266.916,00)	86.09
2.23.2.17.01	Dinas Perpustakaan	3.270.811.617,00	3.410.667.970,00	0	0	6.681.479.587,00	3.006.714.775,00	2.745.497.896,00	0	0	5.752.212.671,00	(929.266.916,00)	86.09
2.23.2.17.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.818.477.087,00	0	0	0	2.818.477.087,00	2.582.049.775,00	0	0	0	2.582.049.775,00	(236.427.312,00)	91.61
2.23.2.17.01.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	452.334.530,00	3.410.667.970,00	0	0	3.863.002.500,00	424.665.000,00	2.745.497.896,00	0	0	3.170.162.896,00	(692.839.604,00)	82.06
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	176.708.000,00	5.000.000,00	0	0	181.708.000,00	175.717.600,00	4.983.000,00	0	0	180.700.600,00	(1.007.400,00)	99.45
2.24.2.17.01	Dinas Perpustakaan	176.708.000,00	5.000.000,00	0	0	181.708.000,00	175.717.600,00	4.983.000,00	0	0	180.700.600,00	(1.007.400,00)	99.45
2.24.2.17.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	98.254.500,00	0	0	0	98.254.500,00	98.027.000,00	0	0	0	98.027.000,00	(227.500,00)	99.77
2.24.2.17.01.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	78.453.500,00	5.000.000,00	0	0	83.453.500,00	77.690.600,00	4.983.000,00	0	0	82.673.600,00	(779.900,00)	99.07
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	52.101.892.342,00	2.380.990.266,00	0	0	54.482.882.608,00	48.819.933.935,87	2.268.376.875,00	0	0	51.088.310.810,87	(3.394.571.797,13)	93.77
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.041.495.566,00	380.535.005,00	0	0	6.422.030.571,00	5.948.161.371,00	378.374.000,00	0	0	6.326.535.371,00	(95.495.200,00)	98.51
3.25.3.01.01	Dinas Perikanan	6.041.495.566,00	380.535.005,00	0	0	6.422.030.571,00	5.948.161.371,00	378.374.000,00	0	0	6.326.535.371,00	(95.495.200,00)	98.51

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
3.25.3.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.947.893.521,00	0	0	0	2.947.893.521,00	2.872.057.976,00	0	0	0	2.872.057.976,00	(75.835.545,00)	97.43
3.25.3.01.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.053.911.900,00	26.035.000,00	0	0	2.079.946.900,00	2.039.571.700,00	26.035.000,00	0	0	2.065.606.700,00	(14.340.200,00)	99.31
3.25.3.01.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	785.110.010,00	20.000.000,00	0	0	805.110.010,00	783.318.850,00	19.888.000,00	0	0	803.206.850,00	(1.903.160,00)	99.76
3.25.3.01.01.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	254.580.135,00	334.500.005,00	0	0	589.080.140,00	253.212.845,00	332.451.000,00	0	0	585.663.845,00	(3.416.295,00)	99.42
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.831.030.338,00	240.112.200,00	0	0	9.071.142.538,00	8.201.674.271,87	190.513.400,00	0	0	8.392.187.671,87	(678.954.866,13)	92.52
3.26.3.02.01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	8.831.030.338,00	240.112.200,00	0	0	9.071.142.538,00	8.201.674.271,87	190.513.400,00	0	0	8.392.187.671,87	(678.954.866,13)	92.52
3.26.3.02.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.507.097.788,00	140.894.028,00	0	0	5.647.991.816,00	5.131.135.246,87	140.325.900,00	0	0	5.271.461.146,87	(376.530.669,13)	93.33
3.26.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	534.000.000,00	81.968.172,00	0	0	615.968.172,00	518.157.430,00	33.000.000,00	0	0	551.157.430,00	(64.810.742,00)	89.48
3.26.3.02.01.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	430.000.000,00	0	0	0	430.000.000,00	414.286.466,00	0	0	0	414.286.466,00	(15.713.534,00)	96.35
3.26.3.02.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.359.932.550,00	17.250.000,00	0	0	2.377.182.550,00	2.138.095.129,00	17.187.500,00	0	0	2.155.282.629,00	(221.899.921,00)	90.67
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.607.439.798,00	597.783.506,00	0	0	26.205.223.304,00	23.727.670.139,00	559.059.400,00	0	0	24.286.729.539,00	(1.918.493.765,00)	92.68
3.27.3.03.01	Dinas Pertanian	25.607.439.798,00	597.783.506,00	0	0	26.205.223.304,00	23.727.670.139,00	559.059.400,00	0	0	24.286.729.539,00	(1.918.493.765,00)	92.68
3.27.3.03.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.535.237.934,00	268.556.000,00	0	0	11.803.793.934,00	10.926.114.954,00	234.410.000,00	0	0	11.160.524.954,00	(643.268.980,00)	94.55
3.27.3.03.01.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.384.053.084,00	329.227.506,00	0	0	5.713.280.590,00	4.559.034.185,00	324.649.400,00	0	0	4.883.683.585,00	(829.597.005,00)	85.48
3.27.3.03.01.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.693.523.780,00	0	0	0	7.693.523.780,00	7.448.725.750,00	0	0	0	7.448.725.750,00	(244.798.030,00)	96.82

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
3.27.3.03.01.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	140.000.000,00	0	0	0	140.000.000,00	120.691.300,00	0	0	0	120.691.300,00	(19.308.700,00)	86.21
3.27.3.03.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	343.500.000,00	0	0	0	343.500.000,00	282.672.950,00	0	0	0	282.672.950,00	(60.827.050,00)	82.29
3.27.3.03.01.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	511.125.000,00	0	0	0	511.125.000,00	390.431.000,00	0	0	0	390.431.000,00	(120.694.000,00)	76.39
3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	(500.000,00)	0.00
3.29.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	(500.000,00)	0.00
3.29.2.12.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	(500.000,00)	0.00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.320.852.595,00	539.829.535,00	0	0	3.860.682.130,00	3.092.289.204,00	531.460.075,00	0	0	3.623.749.279,00	(236.932.851,00)	93.86
3.30.3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.320.852.595,00	539.829.535,00	0	0	3.860.682.130,00	3.092.289.204,00	531.460.075,00	0	0	3.623.749.279,00	(236.932.851,00)	93.86
3.30.3.06.01.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	34.966.180,00	0	0	0	34.966.180,00	31.449.100,00	0	0	0	31.449.100,00	(3.517.080,00)	89.94
3.30.3.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.240.628.405,00	528.911.595,00	0	0	2.769.540.000,00	2.115.640.550,00	520.560.075,00	0	0	2.636.200.625,00	(133.339.375,00)	95.19
3.30.3.06.01.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	290.000.000,00	0	0	0	290.000.000,00	266.021.100,00	0	0	0	266.021.100,00	(23.978.900,00)	91.73
3.30.3.06.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	87.860.500,00	0	0	0	87.860.500,00	(12.139.500,00)	87.86
3.30.3.06.01.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	430.258.010,00	10.917.940,00	0	0	441.175.950,00	390.322.954,00	10.900.000,00	0	0	401.222.954,00	(39.952.996,00)	90.94
3.30.3.06.01.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	225.000.000,00	0	0	0	225.000.000,00	200.995.000,00	0	0	0	200.995.000,00	(24.005.000,00)	89.33
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.285.916.245,00	622.730.020,00	0	0	8.908.646.265,00	7.835.516.150,00	608.970.000,00	0	0	8.444.486.150,00	(464.160.115,00)	94.79
3.31.3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.285.916.245,00	622.730.020,00	0	0	8.908.646.265,00	7.835.516.150,00	608.970.000,00	0	0	8.444.486.150,00	(464.160.115,00)	94.79

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
3.31.3.06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.610.196.245,00	622.730.020,00	0	0	8.232.926.265,00	7.175.096.675,00	608.970.000,00	0	0	7.784.066.675,00	(448.859.590,00)	94.55
3.31.3.06.01.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	645.720.000,00	0	0	0	645.720.000,00	631.524.475,00	0	0	0	631.524.475,00	(14.195.525,00)	97.80
3.31.3.06.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	28.895.000,00	0	0	0	28.895.000,00	(1.105.000,00)	96.32
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	14.657.800,00	0	0	0	14.657.800,00	14.622.800,00	0	0	0	14.622.800,00	(35.000,00)	99.76
3.32.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.657.800,00	0	0	0	14.657.800,00	14.622.800,00	0	0	0	14.622.800,00	(35.000,00)	99.76
3.32.2.11.01.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	14.657.800,00	0	0	0	14.657.800,00	14.622.800,00	0	0	0	14.622.800,00	(35.000,00)	99.76
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	74.234.057.633,00	2.670.634.140,00	0	0	76.904.691.773,00	63.303.616.897,00	2.154.173.200,00	0	0	65.457.790.097,00	(11.446.901.676,00)	85.12
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	37.182.026.251,00	1.761.620.140,00	0	0	38.943.646.391,00	27.755.032.577,00	1.248.715.000,00	0	0	29.003.747.577,00	(9.939.898.814,00)	74.48
4.01.4.05.04	Sekretariat Daerah	37.182.026.251,00	1.761.620.140,00	0	0	38.943.646.391,00	27.755.032.577,00	1.248.715.000,00	0	0	29.003.747.577,00	(9.939.898.814,00)	74.48
4.01.4.05.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.038.290.141,00	1.258.480.740,00	0	0	21.296.770.881,00	18.415.584.444,00	1.144.082.900,00	0	0	19.559.667.344,00	(1.737.103.537,00)	91.84
4.01.4.05.04.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.880.815.000,00	52.080.000,00	0	0	8.932.895.000,00	7.960.696.333,00	52.052.100,00	0	0	8.012.748.433,00	(920.146.567,00)	89.70
4.01.4.05.04.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.262.921.110,00	451.059.400,00	0	0	8.713.980.510,00	1.378.751.800,00	52.580.000,00	0	0	1.431.331.800,00	(7.282.648.710,00)	16.43
4.02	SEKRETARIAT DPRD	37.052.031.382,00	909.014.000,00	0	0	37.961.045.382,00	35.548.584.320,00	905.458.200,00	0	0	36.454.042.520,00	(1.507.002.862,00)	96.03
4.02.4.05.05	Sekretariat DPRD	37.052.031.382,00	909.014.000,00	0	0	37.961.045.382,00	35.548.584.320,00	905.458.200,00	0	0	36.454.042.520,00	(1.507.002.862,00)	96.03
4.02.4.05.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.483.375.494,00	909.014.000,00	0	0	25.392.389.494,00	23.454.628.796,00	905.458.200,00	0	0	24.360.086.996,00	(1.032.302.498,00)	95.93
4.02.4.05.05.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.568.655.888,00	0	0	0	12.568.655.888,00	12.093.955.524,00	0	0	0	12.093.955.524,00	(474.700.364,00)	96.22
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	52.657.848.370,00	1.481.742.932,00	12.874.193.270,00	295.440.518.931,00	362.454.303.503,00	51.193.233.821,00	1.452.221.859,00	12.174.540.228,00	293.572.507.730,20	358.392.503.638,20	(4.061.799.864,80)	98.88

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
5.01	PERENCANAAN	5.872.665.737,00	2.750.000,00	0	0	5.875.415.737,00	5.565.724.864,00	2.750.000,00	0	0	5.568.474.864,00	(306.940.873,00)	94.78
5.01.4.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.872.665.737,00	2.750.000,00	0	0	5.875.415.737,00	5.565.724.864,00	2.750.000,00	0	0	5.568.474.864,00	(306.940.873,00)	94.78
5.01.4.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.058.318.447,00	2.750.000,00	0	0	3.061.068.447,00	2.945.611.932,00	2.750.000,00	0	0	2.948.361.932,00	(112.706.515,00)	96.32
5.01.4.01.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.335.067.540,00	0	0	0	1.335.067.540,00	1.160.018.332,00	0	0	0	1.160.018.332,00	(175.049.208,00)	86.89
5.01.4.01.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.479.279.750,00	0	0	0	1.479.279.750,00	1.460.094.600,00	0	0	0	1.460.094.600,00	(19.185.150,00)	98.70
5.02	KEUANGAN	14.603.476.604,00	1.151.160.620,00	12.874.193.270,00	295.440.518.931,00	324.069.349.425,00	13.944.122.868,00	1.126.011.336,00	12.174.540.228,00	293.572.507.730,20	320.817.182.162,20	(3.252.167.262,80)	99.00
5.02.4.02.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKD)	0	0	12.874.193.270,00	295.440.518.931,00	308.314.712.201,00	0	0	12.174.540.228,00	293.572.507.730,20	305.747.047.958,20	(2.567.664.242,80)	99.17
5.02.4.02.00.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	12.874.193.270,00	295.440.518.931,00	308.314.712.201,00	0	0	12.174.540.228,00	293.572.507.730,20	305.747.047.958,20	(2.567.664.242,80)	99.17
5.02.4.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.823.740.175,00	1.065.193.620,00	0	0	9.888.933.795,00	8.481.349.963,00	1.040.245.491,00	0	0	9.521.595.454,00	(367.338.341,00)	96.29
5.02.4.02.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.375.432.728,00	1.065.193.620,00	0	0	5.440.626.348,00	4.239.201.200,00	1.040.245.491,00	0	0	5.279.446.691,00	(161.179.657,00)	97.04
5.02.4.02.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.570.984.686,00	0	0	0	3.570.984.686,00	3.380.127.248,00	0	0	0	3.380.127.248,00	(190.857.438,00)	94.66
5.02.4.02.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	877.322.761,00	0	0	0	877.322.761,00	862.021.515,00	0	0	0	862.021.515,00	(15.301.246,00)	98.26
5.02.4.02.02	Badan Pendapatan Daerah	5.779.736.429,00	85.967.000,00	0	0	5.865.703.429,00	5.462.772.905,00	85.765.845,00	0	0	5.548.538.750,00	(317.164.679,00)	94.59
5.02.4.02.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.551.550.429,00	0	0	0	3.551.550.429,00	3.383.548.350,00	0	0	0	3.383.548.350,00	(168.002.079,00)	95.27
5.02.4.02.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.228.186.000,00	85.967.000,00	0	0	2.314.153.000,00	2.079.224.555,00	85.765.845,00	0	0	2.164.990.400,00	(149.162.600,00)	93.55
5.03	KEPEGAWAIAN	26.416.364.983,00	303.218.082,00	0	0	26.719.583.065,00	26.377.220.244,00	302.148.023,00	0	0	26.679.368.267,00	(40.214.798,00)	99.85
5.03.4.03.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	26.416.364.983,00	303.218.082,00	0	0	26.719.583.065,00	26.377.220.244,00	302.148.023,00	0	0	26.679.368.267,00	(40.214.798,00)	99.85

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
5.03.4.03.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.270.796.413,00	252.286.652,00	0	0	25.523.083.065,00	25.257.876.124,00	251.834.023,00	0	0	25.509.710.147,00	(13.372.918,00)	99.95
5.03.4.03.01.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.145.568.570,00	50.931.430,00	0	0	1.196.500.000,00	1.119.344.120,00	50.314.000,00	0	0	1.169.658.120,00	(26.841.880,00)	97.76
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.271.938.000,00	10.722.000,00	0	0	3.282.660.000,00	2.967.808.030,00	7.425.000,00	0	0	2.975.233.030,00	(307.426.970,00)	90.63
5.04.4.03.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.271.938.000,00	10.722.000,00	0	0	3.282.660.000,00	2.967.808.030,00	7.425.000,00	0	0	2.975.233.030,00	(307.426.970,00)	90.63
5.04.4.03.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.271.938.000,00	10.722.000,00	0	0	3.282.660.000,00	2.967.808.030,00	7.425.000,00	0	0	2.975.233.030,00	(307.426.970,00)	90.63
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.493.403.046,00	13.892.230,00	0	0	2.507.295.276,00	2.338.357.815,00	13.887.500,00	0	0	2.352.245.315,00	(155.049.961,00)	93.82
5.05.4.04.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.493.403.046,00	13.892.230,00	0	0	2.507.295.276,00	2.338.357.815,00	13.887.500,00	0	0	2.352.245.315,00	(155.049.961,00)	93.82
5.05.4.04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.004.915.196,00	13.892.230,00	0	0	2.018.807.426,00	1.860.424.665,00	13.887.500,00	0	0	1.874.312.165,00	(144.495.261,00)	92.84
5.05.4.04.01.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	488.487.850,00	0	0	0	488.487.850,00	477.933.150,00	0	0	0	477.933.150,00	(10.554.700,00)	97.84
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.382.915.848,00	132.540.600,00	0	0	5.515.456.448,00	4.678.275.708,00	132.520.300,00	0	0	4.810.796.008,00	(704.660.440,00)	87.22
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	5.382.915.848,00	132.540.600,00	0	0	5.515.456.448,00	4.678.275.708,00	132.520.300,00	0	0	4.810.796.008,00	(704.660.440,00)	87.22
6.01.4.05.01	Inspektorat Daerah	5.382.915.848,00	132.540.600,00	0	0	5.515.456.448,00	4.678.275.708,00	132.520.300,00	0	0	4.810.796.008,00	(704.660.440,00)	87.22
6.01.4.05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.255.875.488,00	132.540.600,00	0	0	4.388.416.088,00	3.815.693.058,00	132.520.300,00	0	0	3.948.213.358,00	(440.202.730,00)	89.97
6.01.4.05.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	800.586.360,00	0	0	0	800.586.360,00	622.026.250,00	0	0	0	622.026.250,00	(178.560.110,00)	77.70
6.01.4.05.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	326.454.000,00	0	0	0	326.454.000,00	240.556.400,00	0	0	0	240.556.400,00	(85.897.600,00)	73.69
7	UNSUR KEWILAYAHAN	35.652.114.332,00	735.289.380,00	0	0	36.387.403.712,00	34.258.035.955,00	719.698.160,00	0	0	34.977.734.115,00	(1.409.669.597,00)	96.13
7.01	KECAMATAN	35.652.114.332,00	735.289.380,00	0	0	36.387.403.712,00	34.258.035.955,00	719.698.160,00	0	0	34.977.734.115,00	(1.409.669.597,00)	96.13
7.01.4.05.07	Kecamatan Donorojo	2.446.846.749,00	111.290.000,00	0	0	2.558.136.749,00	2.277.019.767,00	111.290.000,00	0	0	2.388.309.767,00	(169.826.982,00)	93.36

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
7.01.4.05.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.174.272.249,00	111.290.000,00	0	0	2.285.562.249,00	2.012.075.267,00	111.290.000,00	0	0	2.123.365.267,00	(162.196.982,00)	92.90
7.01.4.05.07.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.877.000,00	0	0	0	25.877.000,00	24.947.000,00	0	0	0	24.947.000,00	(930.000,00)	96.41
7.01.4.05.07.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.242.500,00	0	0	0	50.242.500,00	50.242.500,00	0	0	0	50.242.500,00	0,00	100.00
7.01.4.05.07.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.320.000,00	0	0	0	119.320.000,00	116.270.000,00	0	0	0	116.270.000,00	(3.050.000,00)	97.44
7.01.4.05.07.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.535.000,00	0	0	0	20.535.000,00	20.535.000,00	0	0	0	20.535.000,00	0,00	100.00
7.01.4.05.07.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.600.000,00	0	0	0	56.600.000,00	52.950.000,00	0	0	0	52.950.000,00	(3.650.000,00)	93.55
7.01.4.05.08	Kecamatan Punung	2.150.827.433,00	58.189.910,00	0	0	2.209.017.343,00	2.093.250.585,00	57.411.000,00	0	0	2.150.661.585,00	(58.355.758,00)	97.36
7.01.4.05.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.867.527.133,00	24.869.910,00	0	0	1.892.397.043,00	1.812.776.585,00	24.861.000,00	0	0	1.837.637.585,00	(54.759.458,00)	97.11
7.01.4.05.08.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.805.000,00	0	0	0	49.805.000,00	49.805.000,00	0	0	0	49.805.000,00	0,00	100.00
7.01.4.05.08.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.905.300,00	13.850.000,00	0	0	63.755.300,00	48.739.000,00	13.850.000,00	0	0	62.589.000,00	(1.166.300,00)	98.17
7.01.4.05.08.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.030.000,00	15.620.000,00	0	0	117.650.000,00	101.970.000,00	14.850.000,00	0	0	116.820.000,00	(830.000,00)	99.29
7.01.4.05.08.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.625.000,00	3.850.000,00	0	0	33.475.000,00	29.625.000,00	3.850.000,00	0	0	33.475.000,00	0,00	100.00
7.01.4.05.08.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.935.000,00	0	0	0	51.935.000,00	50.335.000,00	0	0	0	50.335.000,00	(1.600.000,00)	96.92
7.01.4.05.09	Kecamatan Pringkuku	2.112.334.464,00	46.795.800,00	0	0	2.159.130.264,00	2.043.104.074,00	46.795.800,00	0	0	2.089.899.874,00	(69.230.390,00)	96.79

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
7.01.4.05.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.815.378.464,00	46.795.800,00	0	0	1.862.174.264,00	1.746.642.674,00	46.795.800,00	0	0	1.793.438.474,00	(68.735.790,00)	96.31
7.01.4.05.09.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.849.000,00	0	0	0	45.849.000,00	45.697.500,00	0	0	0	45.697.500,00	(151.500,00)	99.67
7.01.4.05.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.635.000,00	0	0	0	42.635.000,00	42.527.500,00	0	0	0	42.527.500,00	(107.500,00)	99.75
7.01.4.05.09.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0,00	100.00
7.01.4.05.09.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.115.000,00	0	0	0	29.115.000,00	29.059.900,00	0	0	0	29.059.900,00	(55.100,00)	99.81
7.01.4.05.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79.357.000,00	0	0	0	79.357.000,00	79.176.500,00	0	0	0	79.176.500,00	(180.500,00)	99.77
7.01.4.05.10	Kecamatan Pacitan	10.892.800.575,00	186.550.260,00	0	0	11.079.350.835,00	10.453.428.132,00	183.115.900,00	0	0	10.636.544.032,00	(442.806.803,00)	96.00
7.01.4.05.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.153.377.065,00	145.726.320,00	0	0	5.299.103.385,00	4.791.274.670,00	142.432.900,00	0	0	4.933.707.570,00	(365.395.815,00)	93.10
7.01.4.05.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126.309.710,00	37.685.140,00	0	0	163.994.850,00	124.951.400,00	37.548.000,00	0	0	162.499.400,00	(1.495.450,00)	99.09
7.01.4.05.10.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.450.672.000,00	3.138.800,00	0	0	5.453.810.800,00	5.378.509.062,00	3.135.000,00	0	0	5.381.644.062,00	(72.166.738,00)	98.68
7.01.4.05.10.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	98.081.000,00	0	0	0	98.081.000,00	(1.919.000,00)	98.08
7.01.4.05.10.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.980.500,00	0	0	0	23.980.500,00	23.219.500,00	0	0	0	23.219.500,00	(761.000,00)	96.83
7.01.4.05.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.461.300,00	0	0	0	38.461.300,00	37.392.500,00	0	0	0	37.392.500,00	(1.068.800,00)	97.22
7.01.4.05.11	Kecamatan Kebonagung	2.143.958.134,00	90.926.750,00	0	0	2.234.884.884,00	2.022.811.675,00	86.145.000,00	0	0	2.108.956.675,00	(125.928.209,00)	94.37

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
7.01.4.05.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.882.835.134,00	90.926.750,00	0	0	1.973.761.884,00	1.771.023.075,00	86.145.000,00	0	0	1.857.168.075,00	(116.593.809,00)	94.09
7.01.4.05.11.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.419.000,00	0	0	0	30.419.000,00	30.048.100,00	0	0	0	30.048.100,00	(370.900,00)	98.78
7.01.4.05.11.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.706.000,00	0	0	0	51.706.000,00	48.967.200,00	0	0	0	48.967.200,00	(2.738.800,00)	94.70
7.01.4.05.11.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.450.000,00	0	0	0	100.450.000,00	100.057.850,00	0	0	0	100.057.850,00	(392.150,00)	99.61
7.01.4.05.11.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.530.000,00	0	0	0	25.530.000,00	25.390.250,00	0	0	0	25.390.250,00	(139.750,00)	99.45
7.01.4.05.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.018.000,00	0	0	0	53.018.000,00	47.325.200,00	0	0	0	47.325.200,00	(5.692.800,00)	89.26
7.01.4.05.12	Kecamatan Arjosari	2.438.162.560,00	30.465.000,00	0	0	2.468.627.560,00	2.306.173.091,00	29.920.000,00	0	0	2.336.093.091,00	(132.534.469,00)	94.63
7.01.4.05.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.079.859.060,00	30.465.000,00	0	0	2.110.324.060,00	1.962.969.391,00	29.920.000,00	0	0	1.992.889.391,00	(117.434.669,00)	94.44
7.01.4.05.12.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.749.000,00	0	0	0	40.749.000,00	32.751.250,00	0	0	0	32.751.250,00	(7.997.750,00)	80.37
7.01.4.05.12.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96.853.500,00	0	0	0	96.853.500,00	94.182.600,00	0	0	0	94.182.600,00	(2.670.900,00)	97.24
7.01.4.05.12.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.855.000,00	0	0	0	134.855.000,00	133.722.000,00	0	0	0	133.722.000,00	(1.133.000,00)	99.16
7.01.4.05.12.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.642.000,00	0	0	0	37.642.000,00	36.717.000,00	0	0	0	36.717.000,00	(925.000,00)	97.54
7.01.4.05.12.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.204.000,00	0	0	0	48.204.000,00	45.830.850,00	0	0	0	45.830.850,00	(2.373.150,00)	95.08
7.01.4.05.13	Kecamatan Nawangan	2.505.620.935,00	15.000.000,00	0	0	2.520.620.935,00	2.392.569.887,00	15.000.000,00	0	0	2.407.569.887,00	(113.051.048,00)	95.51

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
7.01.4.05.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.141.805.935,00	15.000.000,00	0	0	2.156.805.935,00	2.028.976.887,00	15.000.000,00	0	0	2.043.976.887,00	(112.829.048,00)	94.77
7.01.4.05.13.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.550.000,00	0	0	0	66.550.000,00	66.542.200,00	0	0	0	66.542.200,00	(7.800,00)	99.99
7.01.4.05.13.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.790.000,00	0	0	0	44.790.000,00	44.788.800,00	0	0	0	44.788.800,00	(1.200,00)	100.00
7.01.4.05.13.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	123.000.000,00	0	0	0	123.000.000,00	122.999.600,00	0	0	0	122.999.600,00	(400,00)	100.00
7.01.4.05.13.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	49.788.400,00	0	0	0	49.788.400,00	(211.600,00)	99.58
7.01.4.05.13.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79.475.000,00	0	0	0	79.475.000,00	79.474.000,00	0	0	0	79.474.000,00	(1.000,00)	100.00
7.01.4.05.14	Kecamatan Bandar	2.132.483.247,00	31.412.480,00	0	0	2.163.895.727,00	2.080.060.925,00	31.350.000,00	0	0	2.111.410.925,00	(52.484.802,00)	97.57
7.01.4.05.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.796.349.262,00	31.412.480,00	0	0	1.827.761.742,00	1.745.779.120,00	31.350.000,00	0	0	1.777.129.120,00	(50.632.622,00)	97.23
7.01.4.05.14.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.112.130,00	0	0	0	53.112.130,00	53.029.530,00	0	0	0	53.029.530,00	(82.600,00)	99.84
7.01.4.05.14.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.350.220,00	0	0	0	47.350.220,00	46.578.350,00	0	0	0	46.578.350,00	(771.870,00)	98.37
7.01.4.05.14.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.224.060,00	0	0	0	120.224.060,00	119.286.700,00	0	0	0	119.286.700,00	(937.360,00)	99.22
7.01.4.05.14.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.633.855,00	0	0	0	40.633.855,00	40.625.725,00	0	0	0	40.625.725,00	(8.130,00)	99.98
7.01.4.05.14.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.813.720,00	0	0	0	74.813.720,00	74.761.500,00	0	0	0	74.761.500,00	(52.220,00)	99.93
7.01.4.05.15	Kecamatan Tegalombo	1.873.556.543,00	80.976.260,00	0	0	1.954.532.803,00	1.823.232.267,00	75.201.260,00	0	0	1.898.433.527,00	(56.099.276,00)	97.13

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
7.01.4.05.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.530.420.963,00	8.939.260,00	0	0	1.539.360.223,00	1.481.383.867,00	8.939.260,00	0	0	1.490.323.127,00	(49.037.096,00)	96.81
7.01.4.05.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.565.980,00	30.387.500,00	0	0	69.953.480,00	39.565.750,00	24.612.500,00	0	0	64.178.250,00	(5.775.230,00)	91.74
7.01.4.05.15.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.509.250,00	11.512.000,00	0	0	93.021.250,00	80.491.450,00	11.512.000,00	0	0	92.003.450,00	(1.017.800,00)	98.91
7.01.4.05.15.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	115.411.400,00	11.000.000,00	0	0	126.411.400,00	115.303.500,00	11.000.000,00	0	0	126.303.500,00	(107.900,00)	99.91
7.01.4.05.15.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.931.400,00	5.250.000,00	0	0	42.181.400,00	36.921.400,00	5.250.000,00	0	0	42.171.400,00	(10.000,00)	99.98
7.01.4.05.15.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	69.717.550,00	13.887.500,00	0	0	83.605.050,00	69.566.300,00	13.887.500,00	0	0	83.453.800,00	(151.250,00)	99.82
7.01.4.05.16	Kecamatan Tulakan	2.602.443.568,00	34.132.120,00	0	0	2.636.575.688,00	2.558.304.711,00	33.928.500,00	0	0	2.592.233.211,00	(44.342.477,00)	98.32
7.01.4.05.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.291.785.238,00	34.132.120,00	0	0	2.325.917.358,00	2.248.161.871,00	33.928.500,00	0	0	2.282.090.371,00	(43.826.987,00)	98.12
7.01.4.05.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.029.387,00	0	0	0	40.029.387,00	39.968.200,00	0	0	0	39.968.200,00	(61.187,00)	99.85
7.01.4.05.16.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.242.720,00	0	0	0	42.242.720,00	42.074.150,00	0	0	0	42.074.150,00	(168.570,00)	99.60
7.01.4.05.16.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	124.099.775,00	0	0	0	124.099.775,00	123.977.090,00	0	0	0	123.977.090,00	(122.685,00)	99.90
7.01.4.05.16.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.235.500,00	0	0	0	39.235.500,00	39.164.100,00	0	0	0	39.164.100,00	(71.400,00)	99.82
7.01.4.05.16.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65.050.948,00	0	0	0	65.050.948,00	64.959.300,00	0	0	0	64.959.300,00	(91.648,00)	99.86
7.01.4.05.17	Kecamatan Ngadirojo	2.455.085.435,00	49.550.800,00	0	0	2.504.636.235,00	2.419.368.400,00	49.540.700,00	0	0	2.468.909.100,00	(35.727.135,00)	98.57

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
7.01.4.05.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.210.270.053,00	49.550.800,00	0	0	2.259.820.853,00	2.174.840.600,00	49.540.700,00	0	0	2.224.381.300,00	(35.439.553,00)	98.43
7.01.4.05.17.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.837.780,00	0	0	0	27.837.780,00	27.702.400,00	0	0	0	27.702.400,00	(135.380,00)	99.51
7.01.4.05.17.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.137.000,00	0	0	0	22.137.000,00	22.050.000,00	0	0	0	22.050.000,00	(87.000,00)	99.61
7.01.4.05.17.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.920.000,00	0	0	0	116.920.000,00	116.886.050,00	0	0	0	116.886.050,00	(33.950,00)	99.97
7.01.4.05.17.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.700.000,00	0	0	0	28.700.000,00	28.700.000,00	0	0	0	28.700.000,00	0,00	100.00
7.01.4.05.17.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.220.602,00	0	0	0	49.220.602,00	49.189.350,00	0	0	0	49.189.350,00	(31.252,00)	99.94
7.01.4.05.18	Kecamatan Sudimoro	1.897.994.689,00	0	0	0	1.897.994.689,00	1.788.712.441,00	0	0	0	1.788.712.441,00	(109.282.248,00)	94.24
7.01.4.05.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.589.111.689,00	0	0	0	1.589.111.689,00	1.480.976.441,00	0	0	0	1.480.976.441,00	(108.135.248,00)	93.20
7.01.4.05.18.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.333.300,00	0	0	0	43.333.300,00	43.277.000,00	0	0	0	43.277.000,00	(56.300,00)	99.87
7.01.4.05.18.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.525.000,00	0	0	0	13.525.000,00	13.525.000,00	0	0	0	13.525.000,00	0,00	100.00
7.01.4.05.18.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0,00	100.00
7.01.4.05.18.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.448.500,00	0	0	0	24.448.500,00	24.368.500,00	0	0	0	24.368.500,00	(80.000,00)	99.67
7.01.4.05.18.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	127.576.200,00	0	0	0	127.576.200,00	126.565.500,00	0	0	0	126.565.500,00	(1.010.700,00)	99.21

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Bertambah/ Berkurang	%
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.825.952.825,00	111.677.750,00	0	0	4.937.630.575,00	4.623.994.590,00	103.896.264,00	0	0	4.727.890.854,00	(209.739.721,00)	95.75
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.825.952.825,00	111.677.750,00	0	0	4.937.630.575,00	4.623.994.590,00	103.896.264,00	0	0	4.727.890.854,00	(209.739.721,00)	95.75
8.01.4.05.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.825.952.825,00	111.677.750,00	0	0	4.937.630.575,00	4.623.994.590,00	103.896.264,00	0	0	4.727.890.854,00	(209.739.721,00)	95.75
8.01.4.05.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.230.453.230,00	111.677.750,00	0	0	2.342.130.980,00	2.138.324.207,00	103.896.264,00	0	0	2.242.220.471,00	(99.910.509,00)	95.73
8.01.4.05.06.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	39.264.000,00	0	0	0	39.264.000,00	33.837.850,00	0	0	0	33.837.850,00	(5.426.150,00)	86.18
8.01.4.05.06.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	93.395.000,00	0	0	0	93.395.000,00	93.021.000,00	0	0	0	93.021.000,00	(374.000,00)	99.60
8.01.4.05.06.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.418.812.355,00	0	0	0	1.418.812.355,00	1.418.760.960,00	0	0	0	1.418.760.960,00	(51.395,00)	100.00
8.01.4.05.06.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	66.301.740,00	0	0	0	66.301.740,00	63.644.450,00	0	0	0	63.644.450,00	(2.657.290,00)	95.99
8.01.4.05.06.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	977.726.500,00	0	0	0	977.726.500,00	876.406.123,00	0	0	0	876.406.123,00	(101.320.377,00)	89.64
JUMLAH		**1.202.844.925.830,00**	**196.194.162.383,00**	**12.874.193.270,00**	**295.440.518.931,00**	**1.707.353.800.414,00**	**1.129.605.443.865,05**	**174.928.799.770,00**	**12.174.540.228,00**	**293.572.507.730,20**	**1.610.281.291.593,25**	**(97.072.508.820,75)**	**94.31**

USULAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH										JUMLAH
		PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAJAK HIBURAN	PAJAK REKLAME	PAJAK PENERANGAN JALAN	PAJAK PARKIR	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PBB P-2	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH	**30.960.621,00**	**201.604.297,00**	**2.094.508,00**	**37.882.892,00**	**1.232.628.352,00**	**3.076.184,00**	**6.298.951,00**	**42.021.526,00**	**1.607.877.434,00**	**137.059.861,00**	**3.301.504.626,00**
I	**KECAMATAN DONOROJO**	**1.888.140,00**	**14.671.661,00**	**141.828,00**	**2.900.124,00**	**89.105.664,00**	**209.961,00**	**403.368,00**	**16.980.822,00**	**127.276.241,00**	**10.077.553,00**	**263.655.362,00**
1	Desa Widoro	154.245,00	1.189.863,00	11.819,00	296.021,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.557.732,00	637.930,00	19.471.300,00
2	Desa Sawahan	154.245,00	1.189.863,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.516.212,00	637.930,00	18.328.980,00
3	Desa Kalak	154.245,00	1.189.863,00	11.819,00	202.403,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.476.570,00	637.930,00	20.296.520,00
4	Desa Sendang	191.445,00	1.358.343,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	19.660,00	66.900,00	151.885,00	9.191.981,00	917.930,00	19.530.656,00
5	Desa Klepu	154.245,00	1.189.863,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.829.267,00	637.930,00	20.642.035,00
6	Desa Gedompol	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.148.087,00	637.930,00	20.960.854,00
7	Desa Cemeng	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.174.286,00	637.930,00	20.987.053,00
8	Desa Gendaran	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.385.526,00	637.930,00	19.198.293,00
9	Desa Sukodono	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	262.421,00	7.425.472,00	26.509,00	30.588,00	151.885,00	9.868.740,00	637.930,00	19.759.471,00
10	Desa Sekar	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.326.095,00	755.330,00	21.256.262,00
11	Desa Donorojo	154.245,00	1.414.694,00	11.819,00	468.311,00	7.425.472,00	22.087,00	30.588,00	15.310.087,00	12.287.106,00	2.662.923,00	39.787.332,00
12	Desa Belah	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	304.421,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	13.514.639,00	637.930,00	23.436.606,00
II	**KECAMATAN PUNUNG**	**2.005.185,00**	**15.682.413,00**	**153.647,00**	**2.973.563,00**	**96.531.136,00**	**228.151,00**	**439.551,00**	**1.974.505,00**	**135.462.048,00**	**10.835.820,00**	**266.286.019,00**
1	Desa Bomo	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.794.450,00	637.930,00	20.607.216,00
2	Desa Sooko	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.530.209,00	727.930,00	19.432.975,00
3	Desa Punung	154.245,00	1.366.081,00	11.819,00	579.991,00	7.425.472,00	17.593,00	64.708,00	151.885,00	13.013.155,00	2.158.580,00	24.943.529,00
4	Desa Mendolo Kidul	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	38.375,00	151.885,00	8.611.144,00	647.930,00	18.441.697,00
5	Desa Mendolo Lor	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.017.709,00	777.930,00	20.970.475,00
6	Desa Kendal	154.245,00	1.195.761,00	11.819,00	209.621,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.581.368,00	637.930,00	18.414.434,00
7	Desa Piton	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.897.196,00	677.930,00	19.749.962,00
8	Desa Wareng	154.245,00	1.202.441,00	11.819,00	211.721,00	7.425.472,00	37.363,00	30.588,00	151.885,00	9.554.897,00	1.317.930,00	20.098.361,00
9	Desa Mantren	154.245,00	1.209.381,00	11.819,00	203.271,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.555.177,00	694.010,00	20.451.593,00
10	Desa Ploso	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	15.097.140,00	637.930,00	24.909.906,00
11	Desa Gondosari	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	207.191,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.599.000,00	643.930,00	20.429.736,00
12	Desa Tinatar	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.123.593,00	637.930,00	18.936.359,00
13	Desa Kebonsari	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.087.010,00	637.930,00	18.899.776,00
III	**KECAMATAN PRINGKUKU**	**6.353.616,00**	**17.719.467,00**	**153.647,00**	**2.726.337,00**	**96.531.136,00**	**263.260,00**	**416.621,00**	**1.974.505,00**	**132.549.106,00**	**12.917.422,00**	**271.605.117,00**
1	Desa Watukarung	4.502.676,00	3.386.275,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	48.052,00	45.829,00	151.885,00	8.840.813,00	2.773.786,00	27.381.828,00
2	Desa Dersono	154.245,00	1.201.421,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	21.709,00	30.588,00	151.885,00	9.032.698,00	637.930,00	18.862.988,00
3	Desa Sugihwaras	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.101.075,00	637.930,00	17.913.841,00
4	Desa Jlubang	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.280.320,00	637.930,00	19.093.086,00
5	Desa Candi	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	202.403,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	14.451.602,00	1.097.530,00	24.731.150,00
6	Desa Poko	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.883.527,00	651.930,00	19.710.293,00
7	Desa Dadapan	154.245,00	1.199.501,00	11.819,00	204.071,00	7.425.472,00	32.029,00	34.324,00	151.885,00	9.121.708,00	1.027.782,00	19.362.836,00
8	Desa Pringkuku	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	322.685,00	7.425.472,00	19.765,00	30.588,00	151.885,00	12.656.513,00	1.248.996,00	23.211.829,00

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH										JUMLAH
		PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAJAK HIBURAN	PAJAK REKLAME	PAJAK PENERANGAN JALAN	PAJAK PARKIR	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PBB P-2	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Desa Sobo	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.980.040,00	637.930,00	17.792.806,00
10	Desa Ngadirejan	154.245,00	1.223.521,00	11.819,00	240.189,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.474.983,00	1.570.444,00	21.298.891,00
11	Desa Glinggangan	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.169.201,00	637.930,00	18.981.967,00
12	Desa Pelem	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.991.912,00	637.930,00	21.804.678,00
13	Desa Tamanasri	154.245,00	1.189.861,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.564.714,00	719.374,00	21.458.924,00
IV	**KECAMATAN PACITAN**	**3.825.320,00**	**24.171.120,00**	**368.999,00**	**6.058.871,00**	**148.509.440,00**	**674.360,00**	**1.480.428,00**	**3.578.804,00**	**197.731.442,00**	**23.991.885,00**	**410.390.669,00**
1	Desa Kembang	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.325.629,00	1.738.426,00	21.238.892,00
2	Desa Sukoharjo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.069.729,00	1.060.930,00	19.305.496,00
3	Desa Kayen	154.245,00	1.201.902,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	44.033,00	151.885,00	10.245.463,00	773.090,00	20.218.875,00
4	Desa Sirnoboyo	154.245,00	1.195.022,00	11.819,00	217.821,00	7.425.472,00	25.777,00	42.854,00	151.885,00	10.993.500,00	1.258.930,00	21.477.325,00
5	Desa Arjowinangun	537.585,00	1.279.822,00	116.958,00	506.039,00	7.425.472,00	74.293,00	105.743,00	151.885,00	10.115.892,00	2.313.810,00	22.627.499,00
6	Desa Bangunsari	176.365,00	1.270.942,00	11.819,00	457.265,00	7.425.472,00	15.745,00	650.286,00	151.885,00	12.563.404,00	2.218.776,00	24.941.959,00
7	Desa Sedeng	154.245,00	1.238.122,00	39.299,00	202.421,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.469.407,00	1.195.803,00	19.922.987,00
8	Desa Sumberharjo	229.125,00	1.189.862,00	11.819,00	228.821,00	7.425.472,00	22.495,00	38.922,00	151.885,00	9.101.088,00	677.930,00	19.077.419,00
9	Desa Tanjungsari	168.285,00	1.255.622,00	11.819,00	1.128.702,00	7.425.472,00	290.611,00	63.647,00	692.989,00	11.537.562,00	3.813.820,00	26.388.529,00
10	Desa Menadi	400.285,00	1.212.782,00	11.819,00	252.965,00	7.425.472,00	25.009,00	50.702,00	151.885,00	10.436.583,00	731.930,00	20.699.432,00
11	Desa Mentoro	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	573.725,00	7.425.472,00	15.745,00	78.063,00	151.885,00	11.743.112,00	1.502.310,00	22.846.238,00
12	Desa Purworejo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	210.221,00	7.425.472,00	15.745,00	41.868,00	151.885,00	10.046.858,00	1.034.690,00	20.282.665,00
13	Desa Nanggungan	154.245,00	1.230.542,00	11.819,00	320.321,00	7.425.472,00	15.745,00	49.021,00	151.885,00	8.909.379,00	681.930,00	18.950.359,00
14	Desa Widoro	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	202.421,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.599.782,00	1.007.930,00	18.789.749,00
15	Desa Semanten	154.245,00	1.197.882,00	11.819,00	196.381,00	7.425.472,00	15.745,00	31.241,00	151.885,00	10.544.938,00	733.930,00	20.463.538,00
16	Desa Sambong	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.231.826,00	695.930,00	19.102.593,00
17	Desa Banjarsari	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	39.344,00	151.885,00	8.663.726,00	637.930,00	18.485.249,00
18	Desa Bolosingo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.900.391,00	637.930,00	18.713.158,00
19	Desa Ponggok	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.816.317,00	637.930,00	18.629.084,00
20	Desa Tambakrejo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.416.856,00	637.930,00	18.229.623,00
V	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	**2.930.655,00**	**22.702.618,00**	**224.561,00**	**3.897.815,00**	**141.083.968,00**	**299.155,00**	**592.720,00**	**2.885.815,00**	**151.861.182,00**	**12.348.370,00**	**338.826.859,00**
1	Desa Plumbungan	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.436.137,00	637.930,00	17.248.904,00
2	Desa Karangnongko	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.092.308,00	637.930,00	15.905.075,00
3	Desa Kalipelus	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.013.687,00	637.930,00	18.826.454,00
4	Desa Katipugal	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.925.825,00	637.930,00	16.738.592,00
5	Desa Klesem	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.402.326,00	637.930,00	19.215.093,00
6	Desa Sidomulyo	154.245,00	1.201.542,00	11.819,00	203.321,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	13.248.721,00	639.930,00	23.083.268,00
7	Desa Worawari	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.085.002,00	637.930,00	15.897.769,00
8	Desa Mantren	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.200.290,00	637.930,00	19.013.057,00
9	Desa Gawang	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.872.502,00	637.930,00	18.685.269,00
10	Desa Karanganyar	154.245,00	1.204.102,00	11.819,00	195.221,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.083.043,00	637.930,00	15.910.050,00
11	Desa Kebonagung	154.245,00	1.224.662,00	11.819,00	314.873,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.353.785,00	637.930,00	17.321.004,00
12	Desa Purwoasri	154.245,00	1.191.502,00	11.819,00	204.096,00	7.425.472,00	15.745,00	42.136,00	151.885,00	8.468.817,00	837.130,00	18.502.847,00
13	Desa Banjarejo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.351.881,00	637.930,00	17.164.647,00
14	Desa Gembuk	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.949.458,00	637.930,00	18.762.224,00

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH										JUMLAH
		PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAJAK HIBURAN	PAJAK REKLAME	PAJAK PENERANGAN JALAN	PAJAK PARKIR	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PBB P-2	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Desa Sanggrahan	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.086.460,00	637.930,00	15.899.226,00
16	Desa Punjung	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.246.460,00	637.930,00	18.059.226,00
17	Desa Wonogondo	154.245,00	1.203.482,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.835.174,00	657.930,00	16.681.560,00
18	Desa Ketepung	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.112.540,00	644.430,00	19.931.806,00
19	Desa Ketro	154.245,00	1.209.122,00	11.819,00	247.216,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.096.766,00	637.930,00	15.980.788,00
VI	**KECAMATAN ARJOSARI**	**2.622.165,00**	**20.334.854,00**	**200.923,00**	**3.698.132,00**	**126.233.024,00**	**267.665,00**	**612.988,00**	**2.582.045,00**	**139.807.330,00**	**11.127.148,00**	**307.486.274,00**
1	Desa Mlati	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.473.879,00	637.930,00	18.286.645,00
2	Desa Sedayu	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.184.974,00	637.930,00	18.997.740,00
3	Desa Tremas	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.090.060,00	661.930,00	15.926.826,00
4	Desa Arjosari	154.245,00	1.252.162,00	11.819,00	537.580,00	7.425.472,00	15.745,00	89.454,00	151.885,00	8.378.833,00	716.168,00	18.733.363,00
5	Desa Gunungsari	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.492.122,00	637.930,00	18.304.888,00
6	Desa Pagotan	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	58.223,00	151.885,00	6.634.891,00	637.930,00	16.475.292,00
7	Desa Gembong	154.245,00	1.197.542,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	37.079,00	151.885,00	8.461.093,00	720.130,00	18.370.230,00
8	Desa Borang	154.245,00	1.208.082,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.320.954,00	707.930,00	19.221.940,00
9	Desa Gegeran	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	228.820,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.007.993,00	637.930,00	17.854.359,00
10	Desa Kedungbendo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	196.936,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.855.636,00	637.930,00	17.670.118,00
11	Desa Mangunharjo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	196.936,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.627.090,00	637.930,00	18.441.572,00
12	Desa Jetis Kidul	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.042.868,00	637.930,00	17.855.634,00
13	Desa Temon	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.669.443,00	665.830,00	16.510.109,00
14	Desa Jatimalang	154.245,00	1.208.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.355.412,00	637.930,00	18.187.178,00
15	Desa Gayuhan	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.080.207,00	637.930,00	16.892.973,00
16	Desa Karangrejo	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.725.315,00	637.930,00	18.538.081,00
17	Desa Karanggede	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.406.560,00	637.930,00	21.219.326,00
VII	**KECAMATAN NAWANGAN**	**1.457.605,00**	**10.790.518,00**	**106.369,00**	**1.871.136,00**	**66.829.248,00**	**141.705,00**	**297.051,00**	**1.366.965,00**	**110.239.591,00**	**6.295.118,00**	**199.395.306,00**
1	Desa Gondang	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	199.420,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.523.107,00	637.930,00	21.340.073,00
2	Desa Mujing	154.245,00	1.214.022,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	12.455.670,00	637.930,00	22.292.596,00
3	Desa Sempu	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.773.130,00	637.930,00	20.585.896,00
4	Desa Nawangan	154.245,00	1.245.662,00	11.819,00	291.806,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.798.135,00	637.930,00	21.763.287,00
5	Desa Tokawi	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	14.095.250,00	637.930,00	23.908.016,00
6	Desa Jetis Lor	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.640.351,00	917.930,00	20.733.117,00
7	Desa Penggung	154.245,00	1.189.862,00	11.819,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	14.448.021,00	694.130,00	24.316.987,00
8	Desa Pakis Baru	223.645,00	1.191.662,00	11.818,00	208.590,00	7.425.472,00	15.745,00	52.347,00	151.885,00	12.221.374,00	645.730,00	22.148.268,00
9	Desa Ngromo	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	12.284.553,00	847.678,00	22.307.066,00
XIII	**KECAMATAN BANDAR**	**1.233.960,00**	**9.596.796,00**	**94.544,00**	**1.730.018,00**	**59.403.776,00**	**125.960,00**	**245.007,00**	**1.215.080,00**	**57.895.734,00**	**6.593.497,00**	**138.134.372,00**
1	Desa Petungsinarang	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.993.932,00	637.930,00	16.806.697,00
2	Desa Ngunut	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	196.620,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.083.041,00	637.930,00	15.897.206,00
3	Desa Bandar	154.245,00	1.221.082,00	11.818,00	324.522,00	7.425.472,00	15.745,00	30.891,00	151.885,00	6.108.217,00	2.089.987,00	17.533.864,00
4	Desa Kledung	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.085.644,00	675.930,00	15.936.409,00
5	Desa Tumpuk	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.093.071,00	637.930,00	15.905.836,00
6	Desa Watupatok	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.284.609,00	637.930,00	21.097.374,00
7	Desa Bangunsari	154.245,00	1.199.782,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.155.019,00	637.930,00	18.977.704,00

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH										JUMLAH
		PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAJAK HIBURAN	PAJAK REKLAME	PAJAK PENERANGAN JALAN	PAJAK PARKIR	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PBB P-2	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Desa Jeruk	154.245,00	1.226.622,00	11.818,00	232.776,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.092.201,00	637.930,00	15.979.282,00
IX	**KECAMATAN TEGALOMBO**	**1.696.695,00**	**13.157.822,00**	**129.998,00**	**2.444.064,00**	**81.680.192,00**	**173.195,00**	**361.247,00**	**2.015.045,00**	**119.223.132,00**	**8.677.495,00**	**229.558.885,00**
1	Desa Kebondalem	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	45.074,00	151.885,00	8.394.421,00	637.930,00	18.221.672,00
2	Desa Gedangan	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	39.901,00	151.885,00	7.857.821,00	729.933,00	17.771.902,00
3	Desa Ngreco	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.786.605,00	671.986,00	19.633.426,00
4	Desa Kasihan	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.381.116,00	637.930,00	20.193.881,00
5	Desa Pucangombo	154.245,00	1.196.422,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	13.348.747,00	1.037.530,00	23.567.672,00
6	Desa Gemaharjo	154.245,00	1.225.862,00	11.818,00	232.728,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	496.195,00	14.169.127,00	1.018.533,00	24.780.313,00
7	Desa Ploso	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	12.110.321,00	637.930,00	21.923.086,00
8	Desa Tegalombo	154.245,00	1.216.642,00	11.818,00	454.356,00	7.425.472,00	15.745,00	31.568,00	151.885,00	11.236.126,00	1.391.933,00	22.089.790,00
9	Desa Kemuning	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.840.047,00	637.930,00	20.652.812,00
10	Desa Tahunan	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.973.577,00	637.930,00	21.786.342,00
11	Desa Tahunan Baru	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.125.224,00	637.930,00	18.937.989,00
X	**KECAMATAN TULAKAN**	**2.467.920,00**	**19.091.932,00**	**189.088,00**	**3.444.644,00**	**118.807.552,00**	**251.920,00**	**489.408,00**	**3.195.160,00**	**164.736.874,00**	**11.596.932,00**	**324.271.430,00**
1	Desa Jetak	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.934.567,00	637.930,00	19.747.332,00
2	Desa Nglaran	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.359.691,00	637.930,00	21.172.456,00
3	Desa Wonoanti	154.245,00	1.197.082,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.535.952,00	637.930,00	20.355.937,00
4	Desa Padi	154.245,00	1.185.082,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.883.408,00	637.930,00	19.691.393,00
5	Desa Kluwih	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.107.541,00	637.930,00	17.920.306,00
6	Desa Bungur	154.245,00	1.241.562,00	11.818,00	253.390,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.211.215,00	677.930,00	19.173.850,00
7	Desa Tulakan	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	456.774,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.562.636,00	689.930,00	18.688.955,00
8	Desa Jatigunung	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	196.620,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.940.746,00	1.427.930,00	21.544.911,00
9	Desa Kalikuning	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	13.055.217,00	647.930,00	22.877.982,00
10	Desa Gasang	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.091.744,00	637.930,00	17.904.509,00
11	Desa Ngile	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.621.078,00	637.930,00	19.433.843,00
12	Desa Bubakan	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.258.898,00	637.930,00	19.071.663,00
13	Desa Losari	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.145.293,00	637.930,00	19.958.058,00
14	Desa Ngumbul	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.568.982,00	637.930,00	19.381.747,00
15	Desa Wonosidi	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	916.885,00	11.414.310,00	847.850,00	22.201.995,00
16	Desa Ketro	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	15.045.596,00	926.062,00	25.146.493,00
XI	**KECAMATAN NGADIROJO**	**2.936.910,00**	**21.664.236,00**	**212.724,00**	**4.089.032,00**	**133.658.496,00**	**283.410,00**	**654.682,00**	**2.733.930,00**	**160.859.685,00**	**15.750.884,00**	**342.843.989,00**
1	Desa Sidomulyo	233.205,00	1.192.902,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	12.364.975,00	637.930,00	22.259.740,00
2	Desa Hadiwarno	154.245,00	1.326.442,00	11.818,00	221.974,00	7.425.472,00	15.745,00	47.788,00	151.885,00	6.106.112,00	1.107.806,00	16.569.287,00
3	Desa Tanjungpuro	154.245,00	1.203.002,00	11.818,00	250.880,00	7.425.472,00	15.745,00	36.618,00	151.885,00	9.060.631,00	847.930,00	19.158.226,00
4	Desa Hadiluwih	154.245,00	1.194.622,00	11.818,00	198.020,00	7.425.472,00	15.745,00	31.222,00	151.885,00	9.247.180,00	908.250,00	19.338.459,00
5	Desa Pagerejo	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	211.180,00	7.425.472,00	15.745,00	60.883,00	151.885,00	10.412.962,00	797.930,00	20.431.982,00
6	Desa Wiyoro	235.785,00	1.233.502,00	11.818,00	370.532,00	7.425.472,00	15.745,00	69.870,00	151.885,00	12.481.113,00	2.778.730,00	24.774.452,00
7	Desa Ngadirojo	154.245,00	1.220.882,00	11.818,00	432.976,00	7.425.472,00	15.745,00	41.245,00	151.885,00	9.968.219,00	878.930,00	20.301.417,00
8	Desa Bogoharjo	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.045.725,00	637.930,00	17.858.490,00
9	Desa Cokrokembang	154.245,00	1.204.402,00	11.818,00	256.050,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	11.478.160,00	714.930,00	21.443.295,00
10	Desa Bodag	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.280.963,00	637.930,00	19.093.728,00

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PAJAK DAERAH										JUMLAH
		PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAJAK HIBURAN	PAJAK REKLAME	PAJAK PENERANGAN JALAN	PAJAK PARKIR	PAJAK AIR TANAH	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PBB P-2	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Desa Tanjung Lor	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.084.841,00	637.930,00	15.897.606,00
12	Desa Nogosari	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.344.941,00	637.930,00	18.157.706,00
13	Desa Cangkring	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.109.612,00	1.217.930,00	17.502.377,00
14	Desa Wonodadi Kulon	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.402.563,00	671.878,00	19.249.276,00
15	Desa Wonodadi Wetan	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	7.754.982,00	637.930,00	17.567.747,00
16	Desa Wonokarto	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.669.808,00	723.130,00	18.567.773,00
17	Desa Wonoasri	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.126.983,00	637.930,00	17.939.748,00
18	Desa Wonosobo	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	6.919.915,00	637.930,00	16.732.680,00
XII	**KECAMATAN SUDIMORO**	**1.542.450,00**	**12.020.860,00**	**118.180,00**	**2.049.156,00**	**74.254.720,00**	**157.442,00**	**305.880,00**	**1.518.850,00**	**110.235.069,00**	**6.847.737,00**	**209.050.344,00**
1	Desa Pager Kidul	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	228.820,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.798.951,00	712.450,00	20.719.836,00
2	Desa Pager Lor	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	10.470.286,00	637.930,00	20.283.051,00
3	Desa Sukorejo	154.245,00	1.309.962,00	11.818,00	248.440,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	27.234.476,00	699.847,00	37.282.478,00
4	Desa Sudimoro	154.245,00	1.190.322,00	11.818,00	203.956,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.511.754,00	649.930,00	19.345.715,00
5	Desa Ketanggung	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	8.872.905,00	637.930,00	18.685.670,00
6	Desa Klepu	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.745,00	30.588,00	151.885,00	9.045.591,00	637.930,00	18.858.356,00
7	Desa Gunung Rejo	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.743,00	30.588,00	151.885,00	8.218.131,00	637.930,00	18.030.894,00
8	Desa Karang Mulyo	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.743,00	30.588,00	151.885,00	8.906.261,00	637.930,00	18.719.024,00
9	Desa Sembowo	154.245,00	1.189.862,00	11.818,00	195.220,00	7.425.472,00	15.743,00	30.588,00	151.885,00	7.193.424,00	637.930,00	17.006.187,00
10	Desa Sumberejo	154.245,00	1.191.542,00	11.818,00	196.620,00	7.425.472,00	15.743,00	30.588,00	151.885,00	9.983.290,00	957.930,00	20.119.133,00

Lampiran 3

USULAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA

(dalam Rupiah)

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR			RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				RETRIBUSI SELAIN PELAYANAN PASAR DAN TEMPAT REKREASI OLAHRAGA	JUMLAH
		40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL	TOTAL	40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL		
1	2	3			8	4			5	6
TOTAL		**60.878.812,00**	**221.404.708,00**	**282.283.520,00**	**1.963.072,00**	**200.886.464,00**	**328.905.004,00**	**529.791.468,00**	**378.455.413,00**	**1.190.530.401,00**
I	**KECAMATAN DONOROJO**	**3.943.001,00**	**16.005.180,00**	**19.948.181,00**	**338.349,00**	**95.397.523,00**	**23.776.272,00**	**119.173.795,00**	**27.358.200,00**	**166.480.176,00**
1	Desa Widoro	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	1.718.400,00	1.981.356,00	3.699.756,00	2.279.850,00	7.313.371,00
2	Desa Sawahan	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
3	Desa Kalak	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
4	Desa Sendang	-	1.333.765,00	1.333.765,00	253.770,00	93.679.123,00	1.981.356,00	95.660.479,00	2.279.850,00	99.274.094,00
5	Desa Klepu	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
6	Desa Gedompol	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
7	Desa Cemeng	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
8	Desa Gendaran	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
9	Desa Sukodono	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
10	Desa Sekar	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
11	Desa Donorojo	3.943.001,00	1.333.765,00	5.276.766,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	9.537.972,00
12	Desa Belah	-	1.333.765,00	1.333.765,00	7.689,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.850,00	5.594.971,00
II	**KECAMATAN PUNUNG**	**14.122.722,00**	**17.338.906,00**	**31.461.628,00**	**254.468,00**	**43.007.206,00**	**25.757.619,00**	**68.764.825,00**	**29.638.050,00**	**129.864.503,00**
1	Desa Bomo	-	1.333.762,00	1.333.762,00	152.369,00	41.102.843,00	1.981.355,00	43.084.198,00	2.279.850,00	46.697.810,00
2	Desa Sooko	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.689,00	-	1.981.357,00	1.981.357,00	2.279.850,00	5.594.969,00
3	Desa Punung	10.447.881,00	1.333.762,00	11.781.643,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	16.042.848,00
4	Desa Mendolo Kidul	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
5	Desa Mendolo Lor	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
6	Desa Kendal	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
7	Desa Piton	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
8	Desa Wareng	-	1.333.762,00	1.333.762,00	17.530,00	1.904.363,00	1.981.357,00	3.885.720,00	2.279.850,00	7.499.332,00
9	Desa Mantren	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
10	Desa Ploso	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
11	Desa Gondosari	3.674.841,00	1.333.762,00	5.008.603,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	9.269.808,00
12	Desa Tinatar	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
13	Desa Kebonsari	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
III	**KECAMATAN PRINGKUKU**	**945.761,00**	**17.338.906,00**	**18.284.667,00**	**241.828,00**	**38.628.886,00**	**25.757.619,00**	**64.386.505,00**	**29.638.054,00**	**112.309.226,00**

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR			RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				RETRIBUSI SELAIN PELAYANAN PASAR DAN TEMPAT REKREASI OLAHRAGA	JUMLAH
		40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL	TOTAL	40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL		
1	2	3			8	4			5	6
1	Desa Watukarung	-	1.333.762,00	1.333.762,00	97.090,00	24.342.323,00	1.981.357,00	26.323.680,00	2.279.850,00	29.937.292,00
2	Desa Dersono	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
3	Desa Sugihwaras	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
4	Desa Jlubang	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
5	Desa Candi	-	1.333.762,00	1.333.762,00	60.170,00	14.286.563,00	1.981.357,00	16.267.920,00	2.279.850,00	19.881.532,00
6	Desa Poko	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
7	Desa Dadapan	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
8	Desa Pringkuku	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
9	Desa Sobo	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
10	Desa Ngadirejan	945.761,00	1.333.762,00	2.279.523,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	6.540.728,00
11	Desa Glinggangan	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.850,00	5.594.967,00
12	Desa Pelem	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
13	Desa Tamanasri	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
IV	**KECAMATAN PACITAN**	**17.187.923,00**	**26.675.244,00**	**43.863.167,00**	**172.321,00**	**7.030.683,00**	**39.627.100,00**	**46.657.783,00**	**45.597.040,00**	**136.117.990,00**
1	Desa Kembang	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
2	Desa Sukoharjo	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
3	Desa Kayen	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
4	Desa Sirnoboyo	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
5	Desa Arjowinangun	12.521.041,00	1.333.762,00	13.854.803,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	18.116.010,00
6	Desa Bangunsari	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
7	Desa Sedeng	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
8	Desa Sumberharjo	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
9	Desa Tanjungsari	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
10	Desa Menadi	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
11	Desa Mentoro	1.841.841,00	1.333.762,00	3.175.603,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	7.436.810,00
12	Desa Purworejo	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
13	Desa Nanggungan	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
14	Desa Widoro	-	1.333.762,00	1.333.762,00	26.249,00	7.030.683,00	1.981.355,00	9.012.038,00	2.279.852,00	12.625.652,00
15	Desa Semanten	2.825.041,00	1.333.762,00	4.158.803,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	8.420.010,00
16	Desa Sambong	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
17	Desa Banjarsari	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
18	Desa Bolosingo	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
19	Desa Ponggok	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
20	Desa Tambakrejo	-	1.333.762,00	1.333.762,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.969,00
V	**KECAMATAN KEBONAGUNG**	**-**	**25.341.510,00**	**25.341.510,00**	**146.072,00**	**-**	**37.645.745,00**	**37.645.745,00**	**43.317.204,00**	**106.304.459,00**

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR			RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				RETRIBUSI SELAIN PELAYANAN PASAR DAN TEMPAT REKREASI OLAHRAGA	JUMLAH
		40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL	TOTAL	40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL		
1	2	3			8	4			5	6
1	Desa Plumbungan	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
2	Desa Karangnongko	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
3	Desa Kalipelus	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
4	Desa Katipugal	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
5	Desa Klesem	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
6	Desa Sidomulyo	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
7	Desa Worawari	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
8	Desa Mantren	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
9	Desa Gawang	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
10	Desa Karanganyar	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
11	Desa Kebonagung	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
12	Desa Purwoasri	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
13	Desa Banjarejo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
14	Desa Gembuk	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
15	Desa Sanggrahan	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
16	Desa Punjung	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
17	Desa Wonogondo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
18	Desa Ketepung	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
19	Desa Ketro	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.972,00
VI	**KECAMATAN ARJOSARI**	**5.190.601,00**	**22.673.971,00**	**27.864.572,00**	**224.097,00**	**13.654.283,00**	**33.683.035,00**	**47.337.318,00**	**38.757.501,00**	**113.959.391,00**
1	Desa Mlati	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
2	Desa Sedayu	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
3	Desa Tremas	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
4	Desa Arjosari	5.190.601,00	1.333.763,00	6.524.364,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	10.785.572,00
5	Desa Gunungsari	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
6	Desa Pagotan	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
7	Desa Gembong	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
8	Desa Borang	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
9	Desa Gegeran	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
10	Desa Kedungbendo	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
11	Desa Mangunharjo	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
12	Desa Jetis Kidul	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
13	Desa Temon	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
14	Desa Jatimalang	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
15	Desa Gayuhan	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
16	Desa Karangrejo	-	1.333.763,00	1.333.763,00	101.089,00	13.654.283,00	1.981.355,00	15.635.638,00	2.279.853,00	19.249.254,00
17	Desa Karanggede	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR			RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				RETRIBUSI SELAIN PELAYANAN PASAR DAN TEMPAT REKREASI OLAHRAGA	JUMLAH
		40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL	TOTAL	40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL		
1	2	3			8	4			5	6
VII	**KECAMATAN NAWANGAN**	**3.691.721,00**	**12.003.870,00**	**15.695.591,00**	**69.192,00**	**-**	**17.832.204,00**	**17.832.204,00**	**20.518.678,00**	**54.046.473,00**
1	Desa Gondang	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	5.594.972,00
2	Desa Mujing	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	5.594.972,00
3	Desa Sempu	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	5.594.972,00
4	Desa Nawangan	3.691.721,00	1.333.763,00	5.025.484,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	9.286.693,00
5	Desa Tokawi	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	5.594.972,00
6	Desa Jetis Lor	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.854,00	5.594.973,00
7	Desa Penggung	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	5.594.973,00
8	Desa Pakis Baru	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	5.594.973,00
9	Desa Ngromo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	5.594.973,00
VII	**KECAMATAN BANDAR**	**4.292.001,00**	**10.670.103,00**	**14.962.104,00**	**61.504,00**	**-**	**15.850.840,00**	**15.850.840,00**	**18.238.824,00**	**49.051.768,00**
1	Desa Petungsinarang	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
2	Desa Ngunut	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
3	Desa Bandar	4.292.001,00	1.333.762,00	5.625.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.854,00	9.886.972,00
4	Desa Kledung	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
5	Desa Tumpuk	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
6	Desa Watupatok	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
7	Desa Bangunsari	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.853,00	5.594.971,00
8	Desa Jeruk	-	1.333.763,00	1.333.763,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.970,00
IX	**KECAMATAN TEGALOMBO**	**-**	**14.671.404,00**	**14.671.404,00**	**84.568,00**	**-**	**21.794.916,00**	**21.794.916,00**	**25.078.372,00**	**61.544.692,00**
1	Desa Kebondalem	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
2	Desa Gedangan	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
3	Desa Ngreco	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
4	Desa Kasihan	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
5	Desa Pucangombo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
6	Desa Gemaharjo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
7	Desa Ploso	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
8	Desa Tegalombo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
9	Desa Kemuning	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
10	Desa Tahunan	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
11	Desa Tahunan Baru	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
X	**KECAMATAN TULAKAN**	**4.592.841,00**	**21.340.223,00**	**25.933.064,00**	**123.008,00**	**-**	**31.701.696,00**	**31.701.696,00**	**36.477.633,00**	**94.112.393,00**

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR			RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				RETRIBUSI SELAIN PELAYANAN PASAR DAN TEMPAT REKREASI OLAHRAGA	JUMLAH
		40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL	TOTAL	40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL		
1	2	3			8	4			5	6
1	Desa Jetak	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
2	Desa Nglaran	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
3	Desa Wonoanti	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
4	Desa Padi	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
5	Desa Kluwih	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
6	Desa Bungur	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
7	Desa Tulakan	4.592.841,00	1.333.763,00	5.926.604,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	10.187.813,00
8	Desa Jatigunung	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
9	Desa Kalikuning	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
10	Desa Gasang	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
11	Desa Ngile	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
12	Desa Bubakan	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
13	Desa Losari	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
14	Desa Ngumbul	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
15	Desa Wonosidi	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
16	Desa Ketro	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
XI	**KECAMATAN NGADIROJO**	**6.912.241,00**	**24.007.751,00**	**30.919.992,00**	**170.785,00**	**3.167.883,00**	**35.664.408,00**	**38.832.291,00**	**41.037.337,00**	**110.789.620,00**
1	Desa Sidomulyo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
2	Desa Hadiwarno	-	1.333.764,00	1.333.764,00	40.089,00	3.167.883,00	1.981.356,00	5.149.239,00	2.279.852,00	8.762.855,00
3	Desa Tanjungpuro	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
4	Desa Hadiluwih	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
5	Desa Pagerejo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
6	Desa Wiyoro	6.912.241,00	1.333.763,00	8.246.004,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.853,00	12.507.213,00
7	Desa Ngadirojo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
8	Desa Bogoharjo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
9	Desa Cokrokembang	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
10	Desa Bodag	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
11	Desa Tanjung Lor	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
12	Desa Nogosari	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
13	Desa Cangkring	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
14	Desa Wonodadi Kulon	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
15	Desa Wonodadi Wetan	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
16	Desa Wonokarto	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
17	Desa Wonoasri	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00
18	Desa Wonosobo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.356,00	1.981.356,00	2.279.852,00	5.594.972,00

NO	KECAMATAN / DESA	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR			RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				RETRIBUSI SELAIN PELAYANAN PASAR DAN TEMPAT REKREASI OLAHRAGA	JUMLAH
		40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL	TOTAL	40 % POTENSI	60% BAGI RATA	TOTAL		
1	2	3			8	4			5	6
XII	**KECAMATAN SUDIMORO**	**-**	**13.337.640,00**	**13.337.640,00**	**76.880,00**	**-**	**19.813.550,00**	**19.813.550,00**	**22.798.520,00**	**55.949.710,00**
1	Desa Pager Kidul	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
2	Desa Pager Lor	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
3	Desa Sukorejo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
4	Desa Sudimoro	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
5	Desa Ketanggung	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
6	Desa Klepu	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
7	Desa Gunung Rejo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
8	Desa Karang Mulyo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
9	Desa Sembowo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00
10	Desa Sumberejo	-	1.333.764,00	1.333.764,00	7.688,00	-	1.981.355,00	1.981.355,00	2.279.852,00	5.594.971,00

REKAP REALISASI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN/ DESA	BANTUAN KEUANGAN	ALOKASI DANA DESA	DANA DESA	JUMLAH
DONOROJO				
WIDORO	1.176.200.000,00	573.568.914,00	836.763.000,00	2.586.531.914,00
SAWAHAN	1.200.000,00	553.955.353,00	792.434.000,00	1.347.589.353,00
KALAK	1.200.000,00	604.940.449,00	836.089.000,00	1.442.229.449,00
SENDANG	197.130.000,00	577.803.081,00	1.196.026.000,00	1.970.959.081,00
KLEPU	340.218.488,00	793.748.810,00	869.336.000,00	2.003.303.298,00
GEDOMPOL	418.813.320,00	642.816.484,00	863.226.000,00	1.924.855.804,00
CEMENG	90.240.720,00	721.343.380,00	840.525.000,00	1.652.109.100,00
GENDARAN	75.840.000,00	505.708.140,00	770.754.000,00	1.352.302.140,00
SUKODONO	29.190.000,00	618.348.487,00	1.088.857.000,00	1.736.395.487,00
SEKAR	25.275.120,00	618.494.179,00	829.519.000,00	1.473.288.299,00
DONOROJO	1.200.000,00	626.129.198,00	1.063.478.000,00	1.690.807.198,00
BELAH	147.307.920,00	643.318.549,00	794.121.000,00	1.584.747.469,00
PRINGKUKU				
DERSONO	251.984.500,00	855.460.416,00	895.975.000,00	2.003.419.916,00
SUGIHWARAS	131.758.400,00	618.952.331,00	750.395.000,00	1.501.105.731,00
WATUKARUNG	327.750.000,00	532.887.317,00	1.051.990.000,00	1.912.627.317,00
JLUBANG	258.965.640,00	613.153.867,00	813.313.000,00	1.685.432.507,00
CANDI	122.700.000,00	730.855.748,00	830.779.000,00	1.684.334.748,00
POKO	533.020.000,00	535.440.691,00	780.954.000,00	1.849.414.691,00
DADAPAN	82.180.000,00	514.045.257,00	788.887.000,00	1.385.112.257,00
PRINGKUKU	304.425.000,00	530.471.481,00	848.129.000,00	1.683.025.481,00
SOBO	1.200.000,00	464.870.631,00	689.509.000,00	1.155.579.631,00
NGADIREJAN	444.375.000,00	546.986.088,00	769.138.000,00	1.760.499.088,00
GLINGGANGAN	666.502.000,00	561.809.112,00	806.106.000,00	2.034.417.112,00
PELEM	691.620.000,00	623.964.648,00	837.186.000,00	2.152.770.648,00
TAMANASRI	248.445.000,00	601.255.076,00	864.862.000,00	1.714.562.076,00
PUNUNG				
BOMO	187.800.000,00	646.852.779,00	804.764.000,00	1.639.416.779,00
SOOKA	348.446.000,00	554.984.641,00	778.220.000,00	1.681.650.641,00
PUNUNG	341.755.000,00	642.378.490,00	841.104.000,00	1.825.237.490,00
MENDOLO KIDUL	155.145.000,00	477.974.874,00	782.285.000,00	1.415.404.874,00
PITON	28.119.000,00	605.015.744,00	801.851.000,00	1.434.985.744,00
KENDAL	156.820.000,00	444.541.323,00	750.024.000,00	1.351.385.323,00
WARENG	240.790.000,00	525.335.716,00	1.029.944.000,00	1.796.069.716,00
MANTREN	209.256.320,00	560.916.310,00	783.338.000,00	1.553.510.630,00
MENDOLO LOR	523.680.000,00	533.388.785,00	797.694.000,00	1.854.762.785,00
PLOSO	985.545.000,00	670.980.350,00	981.540.000,00	2.638.065.350,00
GONDOSARI	1.167.450.000,00	674.599.207,00	867.164.000,00	2.709.213.207,00
KEBONSARI	200.950.000,00	483.821.307,00	808.820.000,00	1.493.591.307,00
TINATAR	360.420.000,00	495.479.062,00	835.362.000,00	1.691.261.062,00
PACITAN				
KEMBANG	1.200.000,00	533.424.863,00	785.381.000,00	1.320.005.863,00
SUKOHARJO	1.200.000,00	435.724.296,00	716.001.000,00	1.152.925.296,00
KAYEN	374.400.000,00	499.976.820,00	750.843.000,00	1.625.219.820,00
SIRNOBOYO	980.855.000,00	481.034.610,00	731.828.000,00	2.193.717.610,00
ARJOWINANGUN	1.200.000,00	485.584.956,00	707.224.000,00	1.194.008.956,00
BANGUNSARI	292.032.880,00	511.030.631,00	839.712.000,00	1.642.775.511,00
SEDENG	805.674.048,00	553.637.443,00	756.940.000,00	2.116.251.491,00
SUMBERHARJO	26.200.000,00	391.186.545,00	746.938.000,00	1.164.324.545,00
TANJUNGSARI	-	519.462.733,00	722.922.000,00	1.242.384.733,00
MENADI	19.860.000,00	439.463.688,00	723.134.000,00	1.182.457.688,00
MENTORO	206.460.000,00	420.776.244,00	731.203.000,00	1.358.439.244,00
PURWOREJO	141.150.000,00	397.836.777,00	760.247.000,00	1.299.233.777,00
NANGGUNGAN	288.674.000,00	443.726.262,00	732.369.000,00	1.464.769.262,00
WIDORO	163.556.000,00	413.525.984,00	713.549.000,00	1.290.630.984,00
SEMANTEN	530.514.015,20	462.969.928,00	716.488.000,00	1.709.971.943,20
SAMBONG	94.500.000,00	678.833.386,00	898.370.000,00	1.671.703.386,00
BANJARSARI	1.200.000,00	392.527.416,00	737.690.000,00	1.131.417.416,00
BOLOSINGO	1.200.000,00	441.289.846,00	729.456.000,00	1.171.945.846,00
PONGGOK	131.820.000,00	512.725.778,00	833.914.000,00	1.478.459.778,00
TAMBAKREJO	1.200.000,00	429.403.002,00	766.855.000,00	1.197.458.002,00
KEBONAGUNG				
PLUMBUNGAN	146.760.000,00	450.146.922,00	802.526.000,00	1.399.432.922,00
KARANGNONGKO	220.500.000,00	580.449.113,00	803.557.000,00	1.604.506.113,00
KALIPELUS	178.480.000,00	504.059.004,00	786.518.000,00	1.469.057.004,00
KARANGANYAR	374.400.000,00	576.076.022,00	782.197.000,00	1.732.673.022,00
KATIPUGAL	174.755.000,00	510.230.691,00	776.581.000,00	1.461.566.691,00
KLESEM	145.292.700,00	572.255.712,00	823.119.000,00	1.540.667.412,00
SIDOMULYO	476.404.214,00	713.550.413,00	906.486.000,00	2.096.440.627,00

KECAMATAN/ DESA	BANTUAN KEUANGAN	ALOKASI DANA DESA	DANA DESA	JUMLAH
WORAWARI	337.085.000,00	519.949.126,00	808.820.000,00	1.665.854.126,00
MANTREN	141.160.000,00	473.402.646,00	780.154.000,00	1.394.716.646,00
GAWANG	514.350.000,00	529.913.704,00	800.311.000,00	1.844.574.704,00
KEBONAGUNG	178.470.000,00	400.872.509,00	614.783.000,00	1.194.125.509,00
PURWOASRI	57.750.000,00	515.510.761,00	731.886.000,00	1.305.146.761,00
BANJARJO	327.750.000,00	465.964.530,00	750.869.000,00	1.544.583.530,00
GEMBUK	262.440.000,00	547.306.625,00	854.900.000,00	1.664.646.625,00
SANGGRAHAN	239.115.000,00	544.595.386,00	818.924.000,00	1.602.634.386,00
PUNJUNG	113.160.000,00	555.881.849,00	787.706.000,00	1.456.747.849,00
WONOGONDO	803.580.000,00	478.359.291,00	762.546.000,00	2.044.485.291,00
KETEPUNG	178.470.000,00	541.187.887,00	797.898.000,00	1.517.555.887,00
KETRO	816.375.000,00	555.931.485,00	839.223.000,00	2.211.529.485,00
ARJOSARI				
MLATI	68.492.030,00	653.809.701,00	774.607.000,00	1.496.908.731,00
SEDAYU	172.740.088,00	615.256.841,00	813.336.000,00	1.601.332.929,00
TREMAS	1.200.000,00	518.610.951,00	771.814.000,00	1.291.624.951,00
ARJOSARI	113.160.000,00	454.582.227,00	688.188.000,00	1.255.930.227,00
GUNUNGSARI	24.525.000,00	452.019.370,00	761.983.000,00	1.238.527.370,00
PAGUTAN	66.510.000,00	478.148.301,00	775.203.000,00	1.319.861.301,00
GEMBONG	1.200.000,00	535.543.548,00	856.283.000,00	1.393.026.548,00
BORANG	285.770.000,00	514.029.706,00	858.370.000,00	1.658.169.706,00
GEGERAN	57.180.000,00	441.671.321,00	779.046.000,00	1.277.897.321,00
KEDUNGBENDO	1.200.000,00	538.151.429,00	809.751.000,00	1.349.102.429,00
MANGUNHARJO	1.200.000,00	457.068.264,00	811.766.000,00	1.270.034.264,00
JETISKIDUL	1.200.000,00	431.075.288,00	801.003.000,00	1.233.278.288,00
TEMON	151.420.000,00	568.047.502,00	1.051.740.000,00	1.771.207.502,00
KARANGGEDE	326.550.000,00	639.897.552,00	1.005.900.000,00	1.972.347.552,00
GAYUHAN	122.490.000,00	473.976.856,00	755.538.000,00	1.352.004.856,00
KARANGREJO	1.200.000,00	522.342.457,00	799.013.000,00	1.322.555.457,00
JATIMALANG	24.525.000,00	451.419.351,00	767.659.000,00	1.243.603.351,00
NAWANGAN				
GONDANG	616.980.000,00	554.287.929,00	957.340.000,00	2.128.607.929,00
MUJING	463.035.000,00	594.626.755,00	1.486.845.000,00	2.544.506.755,00
SEMPU	551.670.000,00	593.959.970,00	1.446.571.000,00	2.592.200.970,00
NAWANGAN	654.305.000,00	596.930.828,00	1.401.536.000,00	2.652.771.828,00
TOKAWI	374.400.000,00	585.003.577,00	1.651.085.000,00	2.610.488.577,00
JETIS LOR	313.755.000,00	583.117.045,00	1.068.139.000,00	1.965.011.045,00
PENGGUNG	450.920.000,00	630.645.146,00	1.691.666.000,00	2.773.231.146,00
PAKIS BARU	733.620.000,00	523.985.533,00	1.165.507.000,00	2.423.112.533,00
NGROMO	308.916.000,00	492.025.765,00	1.219.530.000,00	2.020.471.765,00
BANDAR				
PETUNGSINARANG	828.915.000,00	595.770.437,00	1.377.834.000,00	2.802.519.437,00
NGUNUT	682.512.000,00	565.773.021,00	1.022.980.000,00	2.271.265.021,00
BANDAR	661.362.000,00	589.840.378,00	1.378.781.000,00	2.629.983.378,00
KLEDUNG	467.705.000,00	522.988.306,00	1.022.115.000,00	2.012.808.306,00
TUMPUK	617.960.000,00	569.278.052,00	1.465.005.000,00	2.652.243.052,00
WATUPATOK	712.225.000,00	543.473.204,00	931.017.000,00	2.186.715.204,00
BANGUNSARI	745.812.000,00	570.359.132,00	1.018.537.000,00	2.334.708.132,00
JERUK	365.070.000,00	645.303.805,00	1.434.206.000,00	2.444.579.805,00
TEGALOMBO				
KEBONDALEM	1.200.000,00	473.147.187,00	1.121.860.000,00	1.596.207.187,00
GEDANGAN	24.525.000,00	430.413.568,00	844.801.000,00	1.299.739.568,00
NGRECO	94.500.000,00	567.399.512,00	1.472.572.000,00	2.134.471.512,00
KASIHAN	262.440.000,00	656.967.183,00	1.301.324.000,00	2.220.731.183,00
PUCANGOMBO	89.835.000,00	550.363.568,00	1.422.950.000,00	2.063.148.568,00
GEMAHARJO	481.695.000,00	614.334.461,00	1.027.682.000,00	2.123.711.461,00
PLOSO	616.980.000,00	630.603.454,00	1.491.404.000,00	2.738.987.454,00
TEGALOMBO	33.855.000,00	517.580.997,00	902.736.000,00	1.454.171.997,00
KEMUNING	197.130.000,00	567.334.212,00	1.353.472.000,00	2.117.936.212,00
TAHUNAN	87.975.000,00	510.452.777,00	1.122.052.000,00	1.720.479.777,00
TAHUNAN BARU	108.495.000,00	477.732.576,00	852.713.000,00	1.438.940.576,00
TULAKAN				
JETAK	225.125.000,00	521.332.755,00	1.021.440.000,00	1.767.897.755,00
NGLARAN	141.150.000,00	550.505.693,00	975.826.000,00	1.667.481.693,00
WONOANTI	304.435.000,00	544.805.286,00	952.794.000,00	1.802.034.286,00
PADI	360.405.000,00	539.655.964,00	1.076.457.000,00	1.976.517.964,00
KLUWIH	654.300.000,00	426.857.095,00	780.128.000,00	1.861.285.095,00
BUNGUR	178.470.000,00	497.301.921,00	1.066.557.000,00	1.742.328.921,00
TULAKAN	612.315.000,00	491.017.732,00	814.324.000,00	1.917.656.732,00
JATIGUNUNG	724.285.000,00	618.600.297,00	1.280.131.000,00	2.623.016.297,00
GASANG	169.150.000,00	438.138.888,00	799.528.000,00	1.406.816.888,00
KALIKUNING	453.760.000,00	611.696.659,00	1.424.480.000,00	2.489.936.659,00
NGILE	1.053.420.000,00	524.035.244,00	927.665.000,00	2.505.120.244,00
BUBAKAN	268.115.000,00	598.108.853,00	958.042.000,00	1.824.265.853,00

KECAMATAN/ DESA	BANTUAN KEUANGAN	ALOKASI DANA DESA	DANA DESA	JUMLAH
LOSARI	313.755.000,00	576.526.618,00	1.057.568.000,00	1.947.849.618,00
NGUMBUL	430.380.000,00	508.048.475,00	1.082.247.000,00	2.020.675.475,00
WONOSIDI	607.660.000,00	548.145.473,00	1.090.589.000,00	2.246.394.473,00
KETRO	586.360.000,00	721.505.695,00	1.099.966.000,00	2.407.831.695,00
NGADIROJO				
SIDOMULYO	61.850.000,00	614.822.641,00	848.821.000,00	1.525.493.641,00
HADIWARNO	89.835.000,00	569.712.096,00	782.508.000,00	1.442.055.096,00
TANJUNGPURO	1.200.000,00	439.640.733,00	780.292.000,00	1.221.132.733,00
HADILUWIH	94.500.000,00	499.383.322,00	795.215.000,00	1.389.098.322,00
PAGEREJO	668.300.000,00	630.430.567,00	853.118.000,00	2.151.848.567,00
WIYORO	1.200.000,00	383.928.887,00	698.258.000,00	1.083.386.887,00
NGADIROJO	57.200.000,00	469.389.741,00	766.230.000,00	1.292.819.741,00
BOGOHARJO	61.845.000,00	476.501.153,00	791.537.000,00	1.329.883.153,00
COKROKEMBANG	304.445.000,00	480.837.209,00	743.638.000,00	1.528.920.209,00
BODAG	164.475.000,00	456.957.408,00	853.491.000,00	1.474.923.408,00
TANJUNGLOR	529.290.000,00	460.926.730,00	826.485.000,00	1.816.701.730,00
NOGOSARI	164.475.000,00	460.888.267,00	836.192.000,00	1.461.555.267,00
CANGKRING	38.520.000,00	441.318.679,00	754.696.000,00	1.234.534.679,00
WONODADI WETAN	1.200.000,00	538.148.023,00	775.881.000,00	1.315.229.023,00
WONODADI KULON	402.390.000,00	549.586.162,00	981.166.000,00	1.933.142.162,00
WONOKARTO	481.700.000,00	493.110.194,00	778.596.000,00	1.753.406.194,00
WONOSOBO	43.200.000,00	488.459.144,00	816.987.000,00	1.348.646.144,00
WONOASRI	136.500.000,00	493.646.595,00	835.049.000,00	1.465.195.595,00
SUDIMORO				
PAGERKIDUL	187.800.000,00	504.626.001,00	810.075.000,00	1.502.501.001,00
PAGERLOR	257.780.000,00	508.194.201,00	822.825.000,00	1.588.799.201,00
SUKOREJO	950.230.000,00	463.380.156,00	1.055.351.000,00	2.468.961.156,00
SUDIMORO	575.005.000,00	635.668.801,00	1.207.283.000,00	2.417.956.801,00
KETANGGUNG	271.775.000,00	521.670.605,00	843.175.000,00	1.636.620.605,00
KLEPU	94.500.000,00	540.238.766,00	914.719.000,00	1.549.457.766,00
SEMBOWO	206.460.000,00	471.518.492,00	925.995.000,00	1.603.973.492,00
KARANGMULYO	131.820.000,00	531.683.839,00	931.660.000,00	1.595.163.839,00
GUNUNGREJO	38.520.000,00	464.900.201,00	829.604.000,00	1.333.024.201,00
SUMBEREJO	1.330.725.000,00	538.580.837,00	807.443.000,00	2.676.748.837,00
TOTAL	48.622.289.403,20	89.350.162.300,00	151.108.021.000,00	289.080.472.703,20

Lampiran 5

LAPORAN PENYALURAN PENCAIRAN DANA DESA
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN		ALOKASI KE DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	BLT DD I	BLT DD II	BLT DD III	BLT DD IV	BLT DD V	BLT DD VI	BLT DD VII	BLT DD VIII	BLT DD IX	BLT DD X	BLT DD XI	BLT DD XII	REALISASI PENYALURAN	REALISASI PENYERAPAN/BELANJA DESA	SISA	PROSENTASE
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH				
1	2	3	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	50	51	52	53
1	DONOROJO	1	Widoro	309.205.200	309.205.200	157.152.600	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	836.763.000	859.708.650	(22.945.650)	102,74%
		2	Sawahan	220.973.600	220.973.600	120.086.800	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	792.434.000	761.410.700	31.023.300	96,09%
		3	Kalak	248.935.600	248.935.600	133.017.800	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	836.089.000	726.628.800	109.460.200	86,91%
		4	Sendang	439.410.400	439.410.400	223.605.200	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	1.196.026.000	1.159.234.000	36.792.000	96,92%
		5	Klepu	245.734.400	245.734.400	133.067.200	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	869.336.000	797.578.400	71.757.600	91,75%
		6	Gedompol	253.790.400	253.790.400	136.045.200	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	863.226.000	775.712.250	87.513.750	89,86%
		7	Cemeng	189.210.000	189.210.000	109.305.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	840.525.000	829.044.000	11.481.000	98,63%
		8	Gendaran	278.301.600	278.301.600	142.150.800	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	770.754.000	771.612.500	(858.500)	100,11%
		9	Sukodono	411.542.800	411.542.800	208.171.400	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	1.088.857.000	1.053.907.000	34.950.000	96,79%
		10	Sekar	231.307.600	231.307.600	125.703.800	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	829.519.000	726.547.021	102.971.979	87,59%
		11	Donorojo	453.286.800	293.391.200		26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	1.063.478.000	977.524.400	85.953.600	91,92%
		12	Belah	133.148.400	133.148.400	85.024.200	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	794.121.000	750.771.000	43.350.000	94,54%
2	PRINGKUKU	1	Dersono	290.890.000	290.890.000	152.195.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	895.975.000	853.857.000	42.118.000	95,30%
		2	Sugihwaras	235.658.000	235.658.000	124.279.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	750.395.000	684.103.000	66.292.000	91,17%
		3	Watukarung	362.296.000	362.296.000	186.998.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	1.051.990.000	999.430.000	52.560.000	95,00%
		4	Jlubang	278.825.200	278.825.200	144.062.600	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	813.313.000	799.066.700	14.246.300	98,25%
		5	Candi	279.811.600	279.811.600	145.155.800	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	830.779.000	716.359.100	114.419.900	86,23%
		6	Poko	183.381.600	183.381.600	104.590.800	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	780.954.000	679.130.800	101.823.200	86,96%
		7	Dadapan	206.054.800	206.054.800	113.977.400	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	788.887.000	794.097.000	(5.210.000)	100,66%
		8	Pringkuku	301.751.600	301.751.600	154.625.800	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	848.129.000	765.173.500	82.955.500	90,22%
		9	Sobo	248.803.600	248.803.600	127.101.800	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	689.509.000	660.672.638	28.836.362	95,82%
		10	Ngadirejan	211.655.200	211.655.200	115.427.600	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	769.138.000	666.562.475	102.575.525	86,66%
		11	Glinggangan	184.442.400	184.442.400	106.021.200	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	806.106.000	804.750.000	1.356.000	99,83%
		12	Pelem	252.374.400	252.374.400	134.437.200	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	837.186.000	755.727.500	81.458.500	90,27%
		13	Tamanasri	276.944.800	276.944.800	145.372.400	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	864.862.000	862.315.800	2.546.200	99,71%
3	PUNUNG	1	Bomo	213.905.600	213.905.600	117.752.800	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	804.764.000	731.406.000	73.358.000	90,88%
		2	Sooka	242.288.000	242.288.000	128.044.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	778.220.000	773.224.500	4.995.500	99,36%
		3	Punung	226.941.600	226.941.600	124.420.800	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	841.104.000	825.174.355	15.929.645	98,11%
		4	Mendolo Kidul	279.914.000	279.914.000	143.257.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	782.285.000	711.952.070	70.332.930	91,01%
		5	Piton	277.240.400	277.240.400	142.970.200	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	801.851.000	680.782.000	121.069.000	84,90%
		6	Kendal	255.009.600	255.009.600	132.004.800	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	750.024.000	695.324.500	54.699.500	92,71%
		7	Wareng	353.477.600	353.477.600	182.588.800	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	1.029.944.000	1.014.596.500	15.347.500	98,51%
		8	Mantren	241.335.200	241.335.200	127.867.600	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	783.338.000	772.800.350	10.537.650	98,65%

NO	KECAMATAN		ALOKASI KE DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	BLT DD I	BLT DD II	BLT DD III	BLT DD IV	BLT DD V	BLT DD VI	BLT DD VII	BLT DD VIII	BLT DD IX	BLT DD X	BLT DD XI	BLT DD XII	REALISASI PENYALURAN	REALISASI PENYERAPAN/BELANJA DESA	SISA	PROSENTASE
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH				
1	2	3	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	50	51	52	53
		9	Mendolo Lor	178.077.600	178.077.600	103.138.800	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	797.694.000	713.313.515	84.380.485	89,42%
		10	Ploso	358.116.000	358.116.000	182.508.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	981.540.000	1.006.456.625	(24.916.625)	102,54%
		11	Gondosari	247.865.600	247.865.600	133.832.800	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	867.164.000	869.845.350	(2.681.350)	100,31%
		12	Kebonsari	232.028.000	232.028.000	125.164.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	808.820.000	844.912.600	(36.092.600)	104,46%
		13	Tinatar	244.144.800	244.144.800	131.072.400	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	835.362.000	795.120.140	40.241.860	95,18%
4	PACITAN	1	Kembang	248.152.400	248.152.400	130.676.200	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	785.381.000	726.142.150	59.238.850	92,46%
		2	Sukoharjo	208.400.400	208.400.400	112.000.200	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	716.001.000	770.787.200	(54.786.200)	107,65%
		3	Kayen	210.337.200	210.337.200	114.168.600	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	750.843.000	693.709.000	57.134.000	92,39%
		4	Sirnoboyo	255.231.200	255.231.200	131.365.600	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	731.828.000	617.427.000	114.401.000	84,37%
		5	Arjowinangun	174.889.600	174.889.600	98.244.800	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	707.224.000	704.996.350	2.227.650	99,69%
		6	Bangunsari	227.884.800	227.884.800	124.742.400	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	839.712.000	766.925.816	72.786.184	91,33%
		7	Sedeng	218.776.000	218.776.000	117.788.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	756.940.000	679.235.500	77.704.500	89,73%
		8	Sumberharjo	237.275.200	237.275.200	124.787.600	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	746.938.000	686.798.501	60.139.499	91,95%
		9	Tanjungsari	184.168.800	184.168.800	102.584.400	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	722.922.000	650.770.000	72.152.000	90,02%
		10	Menadi	199.253.600	199.253.600	108.626.800	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	723.134.000	769.734.000	(46.600.000)	106,44%
		11	Mentoro	259.481.200	259.481.200	133.040.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	731.203.000	704.142.700	27.060.300	96,30%
		12	Purworejo	185.598.800	185.598.800	104.649.400	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	760.247.000	732.480.950	27.766.050	96,35%
		13	Nanggungan	192.447.600	192.447.600	106.273.800	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	732.369.000	718.631.350	13.737.650	98,12%
		14	Widoro	223.919.600	223.919.600	118.109.800	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	713.549.000	638.687.800	74.861.200	89,51%
		15	Semanten	252.095.200	252.095.200	129.497.600	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	716.488.000	655.729.637	60.758.363	91,52%
		16	Sambong	320.348.000	320.348.000	164.074.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	898.370.000	903.497.000	(5.127.000)	100,57%
		17	Banjarsari	191.576.000	191.576.000	106.138.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	737.690.000	726.673.314	11.016.686	98,51%
		18	Bolosingo	264.782.400	264.782.400	135.091.200	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	729.456.000	599.108.300	130.347.700	82,13%
		19	Ponggok	282.565.600	282.565.600	146.382.800	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	833.914.000	835.602.900	(1.688.900)	100,20%
		20	Tambakrejo	273.742.000	273.742.000	140.171.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	766.855.000	693.080.130	73.774.870	90,38%
5	KEBONAGUNG	1	Plumbungan	298.510.400	298.510.400	151.505.200	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	802.526.000	748.106.200	54.419.800	93,22%
		2	Karangnongko	285.422.800	285.422.800	146.311.400	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	803.557.000	699.536.000	104.021.000	87,05%
		3	Kalipelus	308.607.200	308.607.200	154.903.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	786.518.000	805.984.556	(19.466.556)	102,48%
		4	Karanganyar	278.378.800	278.378.800	142.639.400	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	782.197.000	746.577.000	35.620.000	95,45%
		5	Katipugal	286.632.400	286.632.400	145.716.200	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	776.581.000	880.273.750	(103.692.750)	113,35%
		6	Klesem	303.747.600	303.747.600	154.423.800	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	823.119.000	813.580.100	9.538.900	98,84%
		7	Sidomulyo	322.094.400	322.094.400	165.097.200	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	906.486.000	908.353.250	(1.867.250)	100,21%
		8	Worawari	259.028.000	259.028.000	135.964.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	808.820.000	743.512.900	65.307.100	91,93%
		9	Mantren	295.561.600	295.561.600	149.430.800	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	780.154.000	741.414.900	38.739.100	95,03%
		10	Gawang	303.624.400	303.624.400	153.462.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	800.311.000	796.713.000	3.598.000	99,55%
		11	Kebonagung	239.913.200	239.913.200	120.556.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	614.783.000	739.679.840	(124.896.840)	120,32%

NO	KECAMATAN		ALOKASI KE DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	BLT DD I	BLT DD II	BLT DD III	BLT DD IV	BLT DD V	BLT DD VI	BLT DD VII	BLT DD VIII	BLT DD IX	BLT DD X	BLT DD XI	BLT DD XII	REALISASI PENYALURAN	REALISASI PENYERAPAN/BELANJA DESA	SISA	PROSENTASE
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH				
1	2	3	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	50	51	52	53
		12	Purwoasri	276.254.400	276.254.400	139.777.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	731.886.000	721.397.590	10.488.410	98,57%
		13	Banjarjo	280.847.600	280.847.600	142.373.800	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	750.869.000	661.084.000	89.785.000	88,04%
		14	Gembuk	331.460.000	331.460.000	166.780.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	854.900.000	785.202.000	69.698.000	91,85%
		15	Sanggrahan	270.569.600	270.569.600	140.984.800	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	818.924.000	771.594.580	47.329.420	94,22%
		16	Punjung	274.582.400	274.582.400	141.341.200	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	787.706.000	755.601.003	32.104.997	95,92%
		17	Wonogondo	299.018.400	299.018.400	150.109.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	762.546.000	744.592.496	17.953.504	97,65%
		18	Ketepung	281.659.200	281.659.200	144.579.600	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	797.898.000	714.971.298	82.926.702	89,61%
		19	Ketro	317.689.200	317.689.200	160.644.600	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	839.223.000	868.273.200	(29.050.200)	103,46%
6	ARJOSARI	1	Mlati	260.342.800	260.342.800	135.121.400	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	774.607.000	700.991.800	73.615.200	90,50%
		2	Sedayu	149.834.400	149.834.400	92.467.200	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	813.336.000	791.882.500	21.453.500	97,36%
		3	Tremas	284.725.600	284.725.600	144.762.800	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	771.814.000	598.962.750	172.851.250	77,60%
		4	Arjosari	252.775.200	252.775.200	128.637.600	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	688.188.000	613.536.950	74.651.050	89,15%
		5	Gunungsari	198.293.200	198.293.200	109.796.600	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	761.983.000	750.283.000	11.700.000	98,46%
		6	Pagutan	239.581.200	239.581.200	126.840.600	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	775.203.000	811.894.000	(36.691.000)	104,73%
		7	Gembong	189.513.200	189.513.200	110.056.600	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	856.283.000	766.295.250	89.987.750	89,49%
		8	Borang	295.348.000	295.348.000	152.474.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	858.370.000	791.640.450	66.729.550	92,23%
		9	Gegeran	259.118.400	259.118.400	134.809.200	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	779.046.000	710.776.280	68.269.720	91,24%
		10	Kedungbendo	202.400.400	202.400.400	113.350.200	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	809.751.000	720.710.170	89.040.830	89,00%
		11	Mangunharjo	236.206.400	236.206.400	126.953.200	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	811.766.000	725.625.000	86.141.000	89,39%
		12	Jetis kidul	281.401.200	281.401.200	144.600.600	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	801.003.000	735.178.000	65.825.000	91,78%
		13	Temon	387.696.000	387.696.000	197.148.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	1.051.740.000	1.011.920.000	39.820.000	96,21%
		14	Karanggede	292.860.000	292.860.000	157.380.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	1.005.900.000	943.016.000	62.884.000	93,75%
		15	Gayuhan	261.715.200	261.715.200	134.907.600	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	755.538.000	603.715.015	151.822.985	79,91%
		16	Karangrejo	259.605.200	259.605.200	135.802.600	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	799.013.000	623.060.000	175.953.000	77,98%
		17	Jatimalang	248.563.600	248.563.600	130.131.800	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	767.659.000	666.534.550	101.124.450	86,83%
7	NAWANGAN	1	Gondang	279.436.000	279.436.000	150.068.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	957.340.000	948.211.695	9.128.305	99,05%
		2	Mujing	444.738.000	444.738.000	237.369.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1.486.845.000	1.429.234.100	57.610.900	96,13%
		3	Sempu	419.628.400	419.628.400	225.714.200	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	1.446.571.000	1.419.436.250	27.134.750	98,12%
		4	Nawangan	401.614.400	401.614.400	216.707.200	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	1.401.536.000	1.401.501.500	34.500	100,00%
		5	Tokawi	388.934.000	388.934.000	221.617.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	54.300.000	1.651.085.000	1.645.765.600	5.319.400	99,68%
		6	Jetis Lor	256.255.600	256.255.600	145.227.800	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	1.068.139.000	1.003.918.180	64.220.820	93,99%
		7	Penggung	510.166.400	510.166.400	271.733.200	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	1.691.666.000	1.662.755.000	28.911.000	98,29%
		8	Pakis Baru	338.702.800	338.702.800	182.101.400	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	1.165.507.000	1.165.451.700	55.300	100,00%
		9	Ngromo	409.812.000	409.812.000	212.706.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	1.219.530.000	1.210.554.500	8.975.500	99,26%
8	BANDAR	1	Petungsinarang	293.133.600	293.133.600	172.366.800	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	1.377.834.000	1.520.739.000	(142.905.000)	110,37%
		2	Ngunut	103.192.000	103.192.000	82.196.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	61.200.000	1.022.980.000	1.000.729.000	22.251.000	97,82%

NO	KECAMATAN		ALOKASI KE DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	BLT DD I	BLT DD II	BLT DD III	BLT DD IV	BLT DD V	BLT DD VI	BLT DD VII	BLT DD VIII	BLT DD IX	BLT DD X	BLT DD XI	BLT DD XII	REALISASI PENYALURAN	REALISASI PENYERAPAN/BELANJA DESA	SISA	PROSENTASE
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH				
1	2	3	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	50	51	52	53
		3	Bandar	371.512.400	371.512.400	203.756.200	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	1.378.781.000	1.364.171.750	14.609.250	98,94%
		4	Kledung	260.346.000	260.346.000	145.023.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	1.022.115.000	922.615.000	99.500.000	90,27%
		5	Tumpuk	427.002.000	427.002.000	229.401.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	1.465.005.000	1.132.172.151	332.832.849	77,28%
		6	Watupatok	103.906.800	103.906.800	78.803.400	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	53.700.000	931.017.000	900.806.900	30.210.100	96,76%
		7	Bangunsari	270.914.800	270.914.800	149.107.400	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000	1.018.537.000	889.375.600	129.161.400	87,32%
		8	Jeruk	369.682.400	369.682.400	205.241.200	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	1.434.206.000	1.318.433.100	115.772.900	91,93%
9	TEGALOMBO	1	Kebondalem	367.744.000	367.744.000	191.972.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	1.121.860.000	980.764.745	141.095.255	87,42%
		2	Gedangan	261.420.400	261.420.400	138.360.200	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	844.801.000	758.243.261	86.557.739	89,75%
		3	Ngreco	560.528.800	560.528.800	283.114.400	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	1.472.572.000	1.280.393.500	192.178.500	86,95%
		4	Kasihan	238.529.600	238.529.600	147.464.800	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	1.301.324.000	1.277.309.000	24.015.000	98,15%
		5	Pucangombo	387.680.000	387.680.000	211.990.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	36.300.000	1.422.950.000	1.280.386.100	142.563.900	89,98%
		6	Gemaharjo	421.309.200	271.572.800		27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	1.027.682.000	953.168.100	74.513.900	92,75%
		7	Ploso	529.061.600	529.061.600	271.280.800	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	1.491.404.000	1.300.275.800	191.128.200	87,18%
		8	Tegalombo	140.594.400	140.594.400	92.347.200	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	902.736.000	880.170.477	22.565.523	97,50%
		9	Kemuning	286.388.800	286.388.800	168.694.400	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	1.353.472.000	1.335.096.000	18.376.000	98,64%
		10	Tahunan	313.820.800	313.820.800	170.410.400	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	1.122.052.000	1.070.925.576	51.126.424	95,44%
		11	Tahunan Baru	290.085.200	290.085.200	150.142.600	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	852.713.000	996.619.500	(143.906.500)	116,88%
10	TULAKAN	1	Jetak	321.576.000	321.576.000	169.488.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	1.021.440.000	836.944.000	184.496.000	81,94%
		2	Nglaran	345.330.400	345.330.400	177.165.200	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	975.826.000	975.826.000	-	100,00%
		3	Wonoanti	306.117.600	306.117.600	160.558.800	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	952.794.000	916.514.000	36.280.000	96,19%
		4	Padi	355.582.800	355.582.800	185.291.400	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.076.457.000	803.082.100	273.374.900	74,60%
		5	Kluwih	277.551.200	277.551.200	142.225.600	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	780.128.000	733.775.367	46.352.633	94,06%
		6	Bungur	312.622.800	312.622.800	167.711.400	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	1.066.557.000	1.009.699.000	56.858.000	94,67%
		7	Tulakan	301.729.600	301.729.600	153.264.800	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	814.324.000	728.460.500	85.863.500	89,46%
		8	Jatigunung	422.052.400	422.052.400	220.026.200	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	1.280.131.000	1.156.425.665	123.705.335	90,34%
		9	Gasang	274.811.200	274.811.200	141.905.600	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	799.528.000	710.079.450	89.448.550	88,81%
		10	Kalikuning	419.792.000	419.792.000	224.896.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1.424.480.000	1.414.416.860	10.063.140	99,29%
		11	Ngile	311.066.000	311.066.000	161.533.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	927.665.000	900.797.000	26.868.000	97,10%
		12	Bubakan	302.216.800	302.216.800	159.208.400	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	958.042.000	824.673.600	133.368.400	86,08%
		13	Losari	352.527.200	352.527.200	183.313.600	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	1.057.568.000	950.389.000	107.179.000	89,87%
		14	Ngumbul	345.898.800	345.898.800	181.649.400	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	1.082.247.000	1.007.835.250	74.411.750	93,12%
		15	Wonosidi	425.735.600	425.735.600	213.917.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.090.589.000	926.826.000	163.763.000	84,98%
		16	Ketro	328.986.400	328.986.400	175.593.200	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	1.099.966.000	1.069.839.500	30.126.500	97,26%
11	NGADIROJO	1	Sidomulyo	306.528.400	306.528.400	156.564.200	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	848.821.000	825.055.700	23.765.300	97,20%
		2	Hadiwarno	278.503.200	278.503.200	142.701.600	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	782.508.000	733.942.000	48.566.000	93,79%
		3	Tanjungpuro	267.116.800	267.116.800	138.058.400	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	780.292.000	738.849.000	41.443.000	94,69%

NO	KECAMATAN		ALOKASI KE DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	BLT DD I	BLT DD II	BLT DD III	BLT DD IV	BLT DD V	BLT DD VI	BLT DD VII	BLT DD VIII	BLT DD IX	BLT DD X	BLT DD XI	BLT DD XII	REALISASI PENYALURAN	REALISASI PENYERAPAN/BELANJA DESA	SISA	PROSENTASE
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH				
1	2	3	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	50	51	52	53
		4	Hadiluwih	222.086.000	222.086.000	120.643.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	795.215.000	736.684.000	58.531.000	92,64%
		5	Pagerejo	209.247.200	209.247.200	117.823.600	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	853.118.000	827.609.850	25.508.150	97,01%
		6	Wiyoro	171.303.200	171.303.200	96.451.600	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	698.258.000	643.902.900	54.355.100	92,22%
		7	Ngadirojo	261.492.000	261.492.000	135.246.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	766.230.000	732.559.950	33.670.050	95,61%
		8	Bogoharjo	295.614.800	295.614.800	149.907.400	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	791.537.000	643.396.850	148.140.150	81,28%
		9	Cokrokembang	258.455.200	258.455.200	133.127.600	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	743.638.000	682.676.000	60.962.000	91,80%
		10	Bodag	222.896.400	222.896.400	123.298.200	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000	853.491.000	812.036.301	41.454.699	95,14%
		11	Tanjunglor	261.594.000	261.594.000	137.697.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	826.485.000	653.744.800	172.740.200	79,10%
		12	Nogosari	193.476.800	193.476.800	110.838.400	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	836.192.000	766.755.000	69.437.000	91,70%
		13	Cangkring	234.378.400	234.378.400	123.939.200	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	754.696.000	702.687.000	52.009.000	93,11%
		14	Wonodadi Wetan	289.352.400	289.352.400	146.776.200	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	775.881.000	607.892.500	167.988.500	78,35%
		15	Wonodadi Kulon	305.466.400	305.466.400	161.433.200	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	981.166.000	973.122.000	8.044.000	99,18%
		16	Wonokarto	227.438.400	227.438.400	122.119.200	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	778.596.000	752.719.364	25.876.636	96,68%
		17	Wonosobo	286.294.800	286.294.800	147.197.400	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	816.987.000	780.409.600	36.577.400	95,52%
		18	Wonoasri	287.519.600	287.519.600	148.409.800	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	835.049.000	816.589.500	18.459.500	97,79%
12	SUDIMORO	1	Pagekidul	249.030.000	249.030.000	132.015.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	810.075.000	720.200.000	89.875.000	88,91%
		2	Pagerlor	302.130.000	302.130.000	153.765.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	822.825.000	758.847.000	63.978.000	92,22%
		3	Sukorejo	405.640.400	405.640.400	204.470.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.055.351.000	800.994.900	254.356.100	75,90%
		4	Sudimoro	461.913.200	461.913.200	233.056.600	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.207.283.000	1.043.579.800	163.703.200	86,44%
		5	Ketanggung	314.770.000	314.770.000	159.635.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	843.175.000	800.319.100	42.855.900	94,92%
		6	Klepu	355.387.600	355.387.600	178.743.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	914.719.000	844.839.000	69.880.000	92,36%
		7	Sembowo	358.398.000	358.398.000	180.399.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	925.995.000	743.900.000	182.095.000	80,34%
		8	Karangmulyo	351.664.000	351.664.000	177.932.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	931.660.000	796.152.600	135.507.400	85,46%
		9	Gunungrejo	199.841.600	199.841.600	113.120.800	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	829.604.000	749.605.200	79.998.800	90,36%
		10	Sumberejo	303.477.200	303.477.200	153.688.600	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	807.443.000	673.148.000	134.295.000	83,37%
	TOTAL			47.233.340.400,00	46.923.708.400,00	24.504.172.200,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	151.108.021.000,00	141.529.486.007,00	9.578.534.993,00	

REKAPITULASI SISA KAS DI BENDAHARA DANA BOS

(dalam Rupiah)

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO BOS 2020	SALDO TAHUN 2021	RINCIAN SALDO	
						TUNAI	BANK
1	20511491	SD NEGERI 1 BORANG	NEGERI	2.910.300,00	84.458,00	84.458,00	-
2	20511530	SD NEGERI 1 GEMBONG	NEGERI	694.162,00	160.780,00	160.780,00	-
3	20511526	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	NEGERI	1.951.200,00	108.032,00	108.032,00	-
4	20511409	SD NEGERI 1 JETISKIDUL	NEGERI	2.001.000,00	79.000,00	79.000,00	-
5	20511416	SD NEGERI 1 KARANGGEDE	NEGERI	72.000,00	790.747,00	790.747,00	-
6	20511390	SD NEGERI 1 KARANGREJO	NEGERI	2.408.307,00	2.665.757,00	2.665.757,00	-
7	20511396	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	NEGERI	960.590,00	482.370,00	482.370,00	-
8	20510876	SD NEGERI 1 MLATI	NEGERI	1.894.064,00	-	-	-
9	20510779	SD NEGERI 1 SEDAYU	NEGERI	10.423.000,00	2.075.663,00	2.075.663,00	-
10	20511058	SD NEGERI 1 TEMON	NEGERI	19.724.850,00	212.820,00	197.970,00	14.850,00
11	20511490	SD NEGERI 2 BORANG	NEGERI	13.213.530,00	118.860,00	118.860,00	-
12	20511529	SD NEGERI 2 GEMBONG	NEGERI	259.000,00	83.000,00	83.000,00	-
13	20511515	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	NEGERI	1.055.198,00	32.105,00	32.105,00	-
14	20511408	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	NEGERI	2.003.273,00	-	-	-
15	20511415	SD NEGERI 2 KARANGGEDE	NEGERI	445.500,00	8.867,00	8.867,00	-
16	20511389	SD NEGERI 2 KARANGREJO	NEGERI	2.120.600,00	3.031.328,00	3.031.328,00	-
17	20511395	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO	NEGERI	971.260,00	222.110,00	222.110,00	-
18	20510875	SD NEGERI 2 MLATI	NEGERI	2.862.900,00	2.000,00	2.000,00	-
19	20510787	SD NEGERI 2 SEDAYU	NEGERI	2.222.000,00	2.132.500,00	2.132.500,00	-
20	20511057	SD NEGERI 2 TEMON	NEGERI	24.600,00	1.100.053,00	1.100.053,00	-
21	20511514	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI	NEGERI	831.350,00	23.350,00	23.350,00	-
22	20511414	SD NEGERI 3 KARANGGEDE	NEGERI	843.300,00	-	-	-
23	20511436	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	NEGERI	5.077.800,00	242.000,00	242.000,00	-
24	20510874	SD NEGERI 3 MLATI	NEGERI	512.000,00	180.000,00	180.000,00	-
27	20511055	SD NEGERI 4 TEMON	NEGERI	292.400,00	148.650,00	148.650,00	-
28	20511288	SD NEGERI ARJOSARI	NEGERI	25.062.238,00	464.168,00	464.168,00	-
29	20511482	SD NEGERI GAYUHAN	NEGERI	473.000,00	169.374,00	169.374,00	-
30	20511536	SD NEGERI GEGERAN	NEGERI	158.600,00	442.520,00	442.520,00	-
31	20555441	SD NEGERI JATIMALANG	NEGERI	2.772.850,00	769.400,00	769.400,00	-
32	20555439	SD NEGERI MANGUNHARJO	NEGERI	4.029.000,00	44.764,00	44.764,00	-
33	20510927	SD NEGERI PAGUTAN	NEGERI	1.277.600,00	7.500,00	7.500,00	-
34	20511026	SD NEGERI TREMAS	NEGERI	1.791.000,00	32.721,00	32.721,00	-
35	20555440	SD NEGERI 1 BANDAR	NEGERI	8.689.200,00	-	-	-
36	20511257	SD NEGERI 1 BANGUNSARI	NEGERI	37.906.000,00	-	-	-
37	20511523	SD NEGERI 1 JERUK	NEGERI	2.479.400,00	-	-	-
38	20511459	SD NEGERI 1 KLEDUNG	NEGERI	6.179.000,00	141.100,00	141.100,00	-
39	20510863	SD NEGERI 1 NGUNUT	NEGERI	2.170.130,00	-	-	-
40	20510896	SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG	NEGERI	2.069.502,00	46.250,00	46.250,00	-
41	20511031	SD NEGERI 1 TUMPUK	NEGERI	200.000,00	-	-	-
42	20511037	SD NEGERI 1 WATUPATOK	NEGERI	2.673.381,00	113.385,00	113.004,00	381,00
44	20511274	SD NEGERI 2 BANGUNSARI	NEGERI	7.246.000,00	-	-	-
45	20511522	SD NEGERI 2 JERUK	NEGERI	2.405.632,00	36.000,00	36.000,00	-
46	20511458	SD NEGERI 2 KLEDUNG	NEGERI	-	-	-	-
47	20510852	SD NEGERI 2 NGUNUT	NEGERI	3.841.317,00	-	-	-
48	20510904	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG	NEGERI	935.768,00	80.595,00	80.595,00	-
49	20511032	SD NEGERI 2 TUMPUK	NEGERI	600.000,00	-	-	-
50	20511036	SD NEGERI 2 WATUPATOK	NEGERI	2.326.400,00	539.200,00	539.200,00	-
51	20511260	SD NEGERI 3 BANDAR	NEGERI	6.417.100,00	5.000,00	5.000,00	-
52	20511273	SD NEGERI 3 BANGUNSARI	NEGERI	1.300.000,00	-	-	-
53	20511521	SD NEGERI 3 JERUK	NEGERI	7.284.900,00	199.400,00	199.400,00	-
54	20511457	SD NEGERI 3 KLEDUNG	NEGERI	1.575.000,00	-	-	-
55	20510935	SD NEGERI 3 NGUNUT	NEGERI	4.791.962,00	423.400,00	423.400,00	-
56	20510905	SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG	NEGERI	827.026,00	33.517,00	33.517,00	-
57	20511040	SD NEGERI 3 TUMPUK	NEGERI	164.300,00	-	-	-
58	20511035	SD NEGERI 3 WATUPATOK	NEGERI	4.326.700,00	6.922,00	6.922,00	-
59	20511520	SD NEGERI 4 JERUK	NEGERI	317.071,00	-	-	-
60	20510924	SD NEGERI 4 NGUNUT	NEGERI	2.473.300,00	-	-	-
61	20510913	SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG	NEGERI	3.000,00	50.000,00	50.000,00	-
62	20511258	SD NEGERI 5 BANDAR	NEGERI	587.750,00	-	-	-
63	20511519	SD NEGERI 5 JERUK	NEGERI	15.987.750,00	8.867.900,00	8.867.900,00	-
64	20510912	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG	NEGERI	300.000,00	-	-	-
65	20511270	SD NEGERI 1 BELAH	NEGERI	1.001.458,00	540.277,00	540.277,00	-
67	20511469	SD NEGERI 1 DONOROJO	NEGERI	1.055.000,00	940.372,00	940.372,00	-
68	20511478	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	NEGERI	4.890.012,00	87.676,00	-	87.676,00
69	20511539	SD NEGERI 1 GENDARAN	NEGERI	1.039.800,00	9.600,00	9.600,00	-
70	20511405	SD NEGERI 1 KALAK	NEGERI	3.700,00	-	-	-
71	20551732	SD NEGERI 1 KLEPU	NEGERI	1.155.873,00	1.868.777,00	1.868.777,00	-
72	20510776	SD NEGERI 1 SAWAHAN	NEGERI	34.500,00	-	-	-
73	20510784	SD NEGERI 1 SEKAR	NEGERI	1.282.758,00	805.618,00	805.618,00	-
74	20510839	SD NEGERI 1 SENDANG	NEGERI	878.200,00	4.000,00	4.000,00	-
75	20510812	SD NEGERI 1 SUKODONO	NEGERI	2.723.084,00	143.000,00	143.000,00	-
76	20511033	SD NEGERI 1 WIDORO	NEGERI	2.186.660,00	-	-	-
77	20511269	SD NEGERI 2 BELAH	NEGERI	6.956.400,00	656.304,00	656.304,00	-
78	20511499	SD NEGERI 2 CEMENG	NEGERI	4.304.040,00	1.015.000,00	1.015.000,00	-
79	20511468	SD NEGERI 2 DONOROJO	NEGERI	499.800,00	45.345,00	45.345,00	-
80	20511477	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	NEGERI	254.500,00	-	-	-
81	20511547	SD NEGERI 2 GENDARAN	NEGERI	1.355.300,00	185.262,00	185.262,00	-
82	20511404	SD NEGERI 2 KALAK	NEGERI	23.050.000,00	-	-	-
83	20511431	SD NEGERI 2 KLEPU	NEGERI	17.964.836,00	900.611,00	900.611,00	-
84	20510778	SD NEGERI 2 SAWAHAN	NEGERI	976.208,00	-	-	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO BOS 2020	SALDO TAHUN 2021	RINCIAN SALDO	
						TUNAI	BANK
86	20510838	SD NEGERI 2 SENDANG	NEGERI	800.000,00	-	-	-
87	20510820	SD NEGERI 2 SUKODONO	NEGERI	30.316.758,00	17.325,00	17.325,00	-
88	20511022	SD NEGERI 2 WIDORO	NEGERI	1.534.470,00	77.070,00	77.070,00	-
89	20511268	SD NEGERI 3 BELAH	NEGERI	333.000,00	-	-	-
90	20511498	SD NEGERI 3 CEMENG	NEGERI	3.000.000,00	981.700,00	981.700,00	-
91	20511467	SD NEGERI 3 DONOROJO	NEGERI	1.354.505,00	6.049,00	6.049,00	-
92	20511466	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	NEGERI	5.038.600,00	-	-	-
93	20551733	SD NEGERI 3 KLEPU	NEGERI	324.128,00	186.055,00	186.055,00	-
94	20510837	SD NEGERI 3 SENDANG	NEGERI	351.600,00	214.600,00	214.600,00	-
95	20510821	SD NEGERI 3 SUKODONO	NEGERI	300.000,00	313.147,00	313.147,00	-
96	20511428	SD NEGERI 4 KLEPU	NEGERI	1.342.000,00	105.784,00	105.784,00	-
98	20511537	SD NEGERI 1 GEMBUK	NEGERI	-	-	-	-
99	20511418	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	NEGERI	9.451.120,00	-	-	-
100	20511402	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	NEGERI	5.610.350,00	521.250,00	521.250,00	-
101	20511384	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	NEGERI	1.143.536,00	114.086,00	114.086,00	-
102	20511447	SD NEGERI 1 KETEPUNG	NEGERI	1.152.545,00	-	-	-
103	20511455	SD NEGERI 1 KETRO	NEGERI	1.110.067,00	-	-	-
104	20511425	SD NEGERI 1 KLESEM	NEGERI	1.020.150,00	5.874,00	5.874,00	-
105	20510804	SD NEGERI 1 PUNJUNG	NEGERI	6.762.102,00	1.293.102,00	1.293.102,00	-
106	20510774	SD NEGERI 1 PURWOASRI	NEGERI	2.981.700,00	401.800,00	401.800,00	-
107	20510769	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	NEGERI	1.421.000,00	-	-	-
108	20510833	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	NEGERI	2.100.400,00	-	-	-
109	20511094	SD NEGERI 1 WONOGONDO	NEGERI	13.311.270,00	410.365,00	410.365,00	-
110	20511069	SD NEGERI 1 WORAWARI	NEGERI	695.600,00	-	-	-
111	20511483	SD NEGERI 2 GAWANG	NEGERI	3.097.290,00	41.045,00	41.045,00	-
112	20511538	SD NEGERI 2 GEMBUK	NEGERI	1.220.750,00	403.000,00	403.000,00	-
113	20511417	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	NEGERI	3.232.297,00	-	-	-
114	20511401	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	NEGERI	2.734.352,00	505.712,00	505.712,00	-
115	20511383	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	NEGERI	5.288.550,00	-	-	-
116	20511446	SD NEGERI 2 KETEPUNG	NEGERI	179.977,00	29.410,00	29.410,00	-
117	20511463	SD NEGERI 2 KETRO	NEGERI	24.509.123,00	35.062,00	35.062,00	-
118	20511424	SD NEGERI 2 KLESEM	NEGERI	3.994.300,00	337.500,00	337.500,00	-
119	20510803	SD NEGERI 2 PUNJUNG	NEGERI	16.092.342,00	68.500,00	68.500,00	-
120	20510773	SD NEGERI 2 PURWOASRI	NEGERI	1.722.000,00	148.800,00	148.800,00	-
121	20510768	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	NEGERI	4.002.000,00	118.000,00	118.000,00	-
122	20510842	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	NEGERI	1.563.050,00	234.550,00	234.550,00	-
123	20511202	SD NEGERI 2 WONOGONDO	NEGERI	556.963,00	12.346,00	12.346,00	-
124	20511068	SD NEGERI 2 WORAWARI	NEGERI	564.500,00	3.300,00	3.300,00	-
125	20510850	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	NEGERI	161.600,00	283.000,00	283.000,00	-
126	20511272	SD NEGERI BANJARJO	NEGERI	5.329.878,00	-	-	-
127	20511419	SD NEGERI KALIPELUS	NEGERI	11.336.021,00	6.313.871,00	6.313.871,00	-
128	20511400	SD NEGERI KEBONAGUNG	NEGERI	1.332.010,00	539.626,00	539.626,00	-
129	20511435	SD NEGERI MANTREN	NEGERI	228.900,00	525.000,00	525.000,00	-
130	20510796	SD NEGERI PLUMBUNGAN	NEGERI	2.838.958,00	151.596,00	151.596,00	-
131	20511543	SD NEGERI 1 GONDANG	NEGERI	3.926.080,00	239.080,00	239.080,00	-
132	20511422	SD NEGERI 1 JETIS LOR	NEGERI	23.692,00	378.765,00	378.765,00	-
134	20510891	SD NEGERI 1 NAWANGAN	NEGERI	2.351.000,00	438.269,00	438.269,00	-
135	20510869	SD NEGERI 1 NGROMO	NEGERI	5.230.500,00	295.904,00	295.904,00	-
136	20510916	SD NEGERI 1 PAKIS BARU	NEGERI	8.400.000,00	271.300,00	271.300,00	-
137	20510900	SD NEGERI 1 PENGGUNG	NEGERI	120.000,00	-	-	-
138	20510781	SD NEGERI 1 SEMPU	NEGERI	17.358.000,00	523.954,00	523.954,00	-
139	20511041	SD NEGERI 1 TOKAWI	NEGERI	74.000,00	399.600,00	399.600,00	-
140	20511542	SD NEGERI 2 GONDANG	NEGERI	875.100,00	-	-	-
141	20511411	SD NEGERI 2 JETIS LOR	NEGERI	6.122.986,00	251.986,00	251.986,00	-
142	20510883	SD NEGERI 2 MUJING	NEGERI	762.500,00	300.000,00	300.000,00	-
143	20510889	SD NEGERI 2 NAWANGAN	NEGERI	9.891.750,00	42.500,00	42.500,00	-
144	20510868	SD NEGERI 2 NGROMO	NEGERI	2.343.000,00	225.000,00	225.000,00	-
145	20510915	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	NEGERI	1.150.000,00	145.000,00	145.000,00	-
146	20510899	SD NEGERI 2 PENGGUNG	NEGERI	4.030.500,00	34.000,00	34.000,00	-
147	20510780	SD NEGERI 2 SEMPU	NEGERI	1.219.200,00	130.800,00	130.800,00	-
148	20511030	SD NEGERI 2 TOKAWI	NEGERI	11.426.163,00	434.800,00	434.800,00	-
149	20511541	SD NEGERI 3 GONDANG	NEGERI	1.737.713,00	1.206.472,00	1.206.472,00	-
150	20511410	SD NEGERI 3 JETIS LOR	NEGERI	6.881.300,00	-	-	-
151	20510893	SD NEGERI 3 MUJING	NEGERI	1.275.600,00	1.060.000,00	1.060.000,00	-
152	20510887	SD NEGERI 3 NAWANGAN	NEGERI	11.974.000,00	510.000,00	510.000,00	-
153	20510867	SD NEGERI 3 NGROMO	NEGERI	182.951,00	39.800,00	39.800,00	-
155	20510898	SD NEGERI 3 PENGGUNG	NEGERI	760.600,00	300.000,00	300.000,00	-
156	20510851	SD NEGERI 3 SEMPU	NEGERI	25.500,00	-	-	-
157	20511029	SD NEGERI 3 TOKAWI	NEGERI	3.670.000,00	-	-	-
159	20510897	SD NEGERI 4 PENGGUNG	NEGERI	2.582.000,00	-	-	-
160	20510840	SD NEGERI 4 SEMPU	NEGERI	180.000,00	76.090,00	76.090,00	-
161	20511028	SD NEGERI 4 TOKAWI	NEGERI	1.405.672,00	28.417,00	28.417,00	-
162	20510885	SD NEGERI 5 NAWANGAN	NEGERI	2.063.700,00	-	-	-
163	20511267	SD NEGERI 1 BODAG	NEGERI	1.867.640,00	-	-	-
164	20511381	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	NEGERI	2.662.260,00	1.562.400,00	1.562.400,00	-
165	20511487	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	NEGERI	5.601.800,00	272.767,00	272.767,00	-
166	20511513	SD NEGERI 1 HADILUWIH	NEGERI	4.199.102,00	26.802,00	26.802,00	-
167	20511511	SD NEGERI 1 HADIWARNO	NEGERI	14.185.296,00	3.248.400,00	3.248.400,00	-
168	20510872	SD NEGERI 1 NGADIROJO	NEGERI	3.485.600,00	2.261,00	2.261,00	-
169	20510923	SD NEGERI 1 NOGOSARI	NEGERI	17.845.000,00	9.514.583,00	9.514.583,00	-
170	20510925	SD NEGERI 1 PAGEREJO	NEGERI	2.760.910,00	-	-	-
171	20510834	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	NEGERI	17.618.304,00	3.600,00	3.600,00	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO BOS 2020	SALDO TAHUN 2021	RINCIAN SALDO	
						TUNAI	BANK
172	20511048	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	NEGERI	2.407.000,00	33.000,00	33.000,00	-
173	20511046	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	NEGERI	15.847.450,00	9.000,00	9.000,00	-
174	20511099	SD NEGERI 1 WONOASRI	NEGERI	1.881.929,00	23.562,00	23.562,00	-
175	20511089	SD NEGERI 1 WONODADIKULON	NEGERI	3.954.698,00	3.025.531,00	54.831,00	2.970.700,00
176	20511085	SD NEGERI 1 WONODADIWETAN	NEGERI	13.788.300,00	64.000,00	64.000,00	-
177	20511201	SD NEGERI 1 WONOKARTO	NEGERI	5.322.000,00	122.100,00	122.100,00	-
178	20511200	SD NEGERI 1 WONOSOBO	NEGERI	2.306.050,00	56.781,00	56.781,00	-
179	20511256	SD NEGERI 2 BODAG	NEGERI	-	649.649,00	649.649,00	-
180	20511506	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	NEGERI	6.111.282,00	24.062,00	24.062,00	-
181	20511486	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	NEGERI	271.935,00	167.720,00	167.720,00	-
182	20511512	SD NEGERI 2 HADILUWIH	NEGERI	1.403.500,00	7.932,00	7.932,00	-
183	20511510	SD NEGERI 2 HADIWARNO	NEGERI	23.008.465,00	5.286,00	5.286,00	-
184	20510871	SD NEGERI 2 NGADIROJO	NEGERI	10.690.386,00	8.294,00	8.294,00	-
185	20510922	SD NEGERI 2 NOGOSARI	NEGERI	1.422.845,00	87,00	87,00	-
186	20510926	SD NEGERI 2 PAGEREJO	NEGERI	16.428.286,00	1.186.538,00	1.186.538,00	-
187	20510841	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	NEGERI	10.166.200,00	-	-	-
188	20511047	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	NEGERI	5.427.915,00	23.652,00	23.652,00	-
189	20511045	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	NEGERI	842.507,00	332.191,00	332.191,00	-
190	20511096	SD NEGERI 2 WONOASRI	NEGERI	673.500,00	1.466.150,00	1.466.150,00	-
191	20511088	SD NEGERI 2 WONODADIKULON	NEGERI	341.100,00	341.100,00	-	341.100,00
192	20511093	SD NEGERI 2 WONODADIWETAN	NEGERI	2.781.250,00	442.545,00	442.545,00	-
193	20511097	SD NEGERI 2 WONOKARTO	NEGERI	8.135.300,00	343.000,00	343.000,00	-
194	20511098	SD NEGERI 2 WONOSOBO	NEGERI	11.586.692,00	8.692,00	8.692,00	-
195	20511485	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	NEGERI	74.200,00	90.000,00	-	90.000,00
196	20510934	SD NEGERI 3 PAGEREJO	NEGERI	2.824.000,00	-	-	-
197	20510849	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	NEGERI	1.861.464,00	26.200,00	26.200,00	-
198	20511087	SD NEGERI 3 WONODADIKULON	NEGERI	2.915.567,00	6.195,00	6.195,00	-
199	20511095	SD NEGERI 3 WONOKARTO	NEGERI	3.178.890,00	603.000,00	603.000,00	-
200	20510933	SD NEGERI 4 PAGEREJO	NEGERI	7.030.511,00	1.301.011,00	1.301.011,00	-
201	20510848	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	NEGERI	8.017.602,00	691,00	691,00	-
202	20511086	SD NEGERI 4 WONODADIKULON	NEGERI	-	1.830.197,00	1.830.197,00	-
203	20510847	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	NEGERI	6.859.660,00	2.031,00	2.031,00	-
204	20511501	SD NEGERI CANGKRING	NEGERI	415.864,00	-	-	-
205	20511203	SD NEGERI WIYORO	NEGERI	14.689.147,00	37.284,00	37.284,00	-
206	20511264	SD NEGERI 1 BALEHARJO	NEGERI	284.000,00	7.243.400,00	7.243.400,00	-
207	20511391	SD NEGERI 1 KAYEN	NEGERI	447.000,00	-	-	-
208	20510909	SD NEGERI 1 PLOSO	NEGERI	1.987.272,00	37.601,00	37.601,00	-
209	20510771	SD NEGERI 1 SAMBONG	NEGERI	858.595,00	-	-	-
210	20510786	SD NEGERI 1 SEDENG	NEGERI	1.197.379,00	314.920,00	314.920,00	-
211	20510846	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	NEGERI	1.888.200,00	13.100,00	13.100,00	-
212	20511050	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	NEGERI	23.295.298,00	1.895.645,00	1.895.645,00	-
213	20511263	SD NEGERI 2 BALEHARJO	NEGERI	6.418.241,00	572.597,00	572.597,00	-
214	20511392	SD NEGERI 2 KAYEN	NEGERI	152.735,00	85.135,00	85.135,00	-
215	20510906	SD NEGERI 2 PLOSO	NEGERI	1.054.054,00	134.777,00	134.777,00	-
216	20510770	SD NEGERI 2 SAMBONG	NEGERI	912.650,00	10.300,00	10.300,00	-
217	20510785	SD NEGERI 2 SEDENG	NEGERI	1.699.000,00	341.300,00	341.300,00	-
218	20510845	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	NEGERI	872.150,00	624.100,00	624.100,00	-
219	20511049	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	NEGERI	487.500,00	41.710,00	41.710,00	-
220	20510844	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	NEGERI	1.274.507,00	91.977,00	91.977,00	-
221	20511276	SD NEGERI ARJOWINANGUN	NEGERI	2.732.400,00	2.697.800,00	2.697.800,00	-
222	20555436	SD NEGERI BANGUNSARI	NEGERI	17.879.179,00	964.200,00	964.200,00	-
223	20511271	SD NEGERI BANJARSARI	NEGERI	3.011.590,00	139.783,00	139.783,00	-
225	20511394	SD NEGERI KEMBANG	NEGERI	3.160.050,00	128.330,00	128.330,00	-
226	20510894	SD NEGERI MENADI	NEGERI	715.579,00	318.698,00	318.698,00	-
227	20510877	SD NEGERI MENTORO	NEGERI	2.989.050,00	371.800,00	371.800,00	-
228	20510892	SD NEGERI NANGGUNGAN	NEGERI	4.547.850,00	23.700,00	23.700,00	-
229	20510921	SD NEGERI PACITAN	NEGERI	25.340.909,00	4.224.867,00	4.224.867,00	-
230	20510794	SD NEGERI PONGGOK	NEGERI	643.800,00	325.000,00	325.000,00	-
231	20510805	SD NEGERI PUCANGSEWU	NEGERI	4.453.192,00	491.715,00	491.715,00	-
232	20510772	SD NEGERI PURWOREJO	NEGERI	5.348.000,00	115,00	115,00	-
233	20510782	SD NEGERI SEMANTEN	NEGERI	1.088.800,00	75.000,00	75.000,00	-
234	20510836	SD NEGERI SIDOHARJO	NEGERI	3.681.227,00	1.694.167,00	1.694.167,00	-
235	20510813	SD NEGERI SUKOHARJO	NEGERI	839.730,00	32.230,00	32.230,00	-
236	20510825	SD NEGERI SUMBERHARJO	NEGERI	1.822.324,00	1.323.525,00	1.323.525,00	-
237	20511044	SD NEGERI TANJUNGSARI	NEGERI	32.568.938,00	4.497.412,00	4.497.412,00	-
238	20511034	SD NEGERI WIDORO	NEGERI	360.000,00	-	-	-
239	20511505	SD NEGERI 1 CANDI	NEGERI	5.602.125,00	335.475,00	335.475,00	-
240	20511473	SD NEGERI 1 DADAPAN	NEGERI	10.619.160,00	127.560,00	127.560,00	-
241	20511471	SD NEGERI 1 DERSONO	NEGERI	3.118.800,00	2.938.100,00	2.938.100,00	-
242	20511546	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	NEGERI	3.159.200,00	2.192.198,00	2.192.198,00	-
243	20511407	SD NEGERI 1 JLUBANG	NEGERI	1.678.300,00	248.300,00	248.300,00	-
244	20510902	SD NEGERI 1 PELEM	NEGERI	7.192.430,00	86.520,00	86.520,00	-
245	20510793	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	NEGERI	2.664.716,00	265.881,00	265.881,00	-
246	20510815	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	NEGERI	-	120.000,00	120.000,00	-
247	20511062	SD NEGERI 1 TAMANASRI	NEGERI	1.141.350,00	-	-	-
248	20511504	SD NEGERI 2 CANDI	NEGERI	1.313.792,00	90.035,00	90.035,00	-
249	20511474	SD NEGERI 2 DADAPAN	NEGERI	1.201.386,00	1.039.119,00	1.039.119,00	-
250	20511470	SD NEGERI 2 DERSONO	NEGERI	75.000,00	-	-	-
251	20511545	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	NEGERI	514.984,00	706.460,00	706.460,00	-
252	20511406	SD NEGERI 2 JLUBANG	NEGERI	14.875.600,00	1.024.490,00	1.024.490,00	-
253	20510903	SD NEGERI 2 PELEM	NEGERI	1.761.991,00	594.840,00	594.840,00	-
254	20510792	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	NEGERI	367.866,00	39.566,00	39.566,00	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO BOS 2020	SALDO TAHUN 2021	RINCIAN SALDO	
						TUNAI	BANK
255	20510814	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	NEGERI	64.500,00	40.000,00	40.000,00	-
256	20511051	SD NEGERI 2 TAMANASRI	NEGERI	2.312.308,00	137.650,00	137.650,00	-
257	20511503	SD NEGERI 3 CANDI	NEGERI	3.396.000,00	718.910,00	718.910,00	-
258	20511472	SD NEGERI 3 DERSONO	NEGERI	4.988.816,00	251.815,00	251.815,00	-
259	20511544	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	NEGERI	1.308.500,00	9.100,00	9.100,00	-
260	20510901	SD NEGERI 3 PELEM	NEGERI	4.232.016,00	643.894,00	643.894,00	-
261	20510800	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	NEGERI	5.323.166,00	264.700,00	264.700,00	-
262	20511502	SD NEGERI 4 CANDI	NEGERI	729.756,00	227.056,00	227.056,00	-
263	20555437	SD NEGERI NGADIREJAN	NEGERI	4.044.201,00	147.100,00	147.100,00	-
264	20510795	SD NEGERI POKO	NEGERI	21.226.590,00	320.183,00	320.183,00	-
265	20510843	SD NEGERI SOBO	NEGERI	2.043.790,00	1.657.790,00	1.657.790,00	-
266	20511038	SD NEGERI WATUKARUNG	NEGERI	3.105.800,00	2.153.709,00	2.153.709,00	-
267	20511494	SD NEGERI 1 BOMO	NEGERI	604.500,00	287.770,00	287.770,00	-
268	20511540	SD NEGERI 1 GONDOSARI	NEGERI	406.000,00	41.400,00	41.400,00	-
269	20511434	SD NEGERI 1 MANTREN	NEGERI	81.500,00	28.243,00	28.243,00	-
270	20510881	SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL	NEGERI	3.034.877,00	72.293,00	72.293,00	-
271	20510879	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	NEGERI	46.500,00	29.400,00	29.400,00	-
272	20510911	SD NEGERI 1 PITON	NEGERI	6.823,00	18.560,00	18.560,00	-
273	20510907	SD NEGERI 1 PLOSO	NEGERI	865.072,00	47.524,00	47.524,00	-
274	20510802	SD NEGERI 1 PUNUNG	NEGERI	5.214.900,00	454.704,00	454.704,00	-
275	20510832	SD NEGERI 1 SOOKA	NEGERI	190.330,00	202.970,00	202.970,00	-
276	20511054	SD NEGERI 1 TINATAR	NEGERI	1.508.000,00	-	-	-
277	20511493	SD NEGERI 2 BOMO	NEGERI	809.000,00	220.300,00	220.300,00	-
278	20511528	SD NEGERI 2 GONDOSARI	NEGERI	2.040.000,00	-	-	-
279	20511423	SD NEGERI 2 MANTREN	NEGERI	25.000,00	-	-	-
280	20510880	SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL	NEGERI	134.186,00	353.218,00	353.218,00	-
281	20510878	SD NEGERI 2 MENDOLO LOR	NEGERI	25.730,00	192.000,00	192.000,00	-
282	20510910	SD NEGERI 2 PITON	NEGERI	606.000,00	184.703,00	184.703,00	-
283	20510895	SD NEGERI 2 PLOSO	NEGERI	1.017.380,00	31.158,00	31.158,00	-
284	20510791	SD NEGERI 2 PUNUNG	NEGERI	1.677.317,00	38.412,00	38.395,00	17,00
285	20510831	SD NEGERI 2 SOOKA	NEGERI	1.111.310,00	4.310,00	4.310,00	-
286	20511043	SD NEGERI 2 TINATAR	NEGERI	760.500,00	-	-	-
287	20511492	SD NEGERI 3 BOMO	NEGERI	249.545,00	21.206,00	21.206,00	-
288	20511527	SD NEGERI 3 GONDOSARI	NEGERI	707.489,00	221.707,00	221.707,00	-
289	20510799	SD NEGERI 3 PLOSO	NEGERI	50.000,00	13.500,00	13.500,00	-
290	20510790	SD NEGERI 3 PUNUNG	NEGERI	158.093,00	72.178,00	72.178,00	-
291	20511042	SD NEGERI 3 TINATAR	NEGERI	171.200,00	74.200,00	74.200,00	-
292	20510797	SD NEGERI 4 PLOSO	NEGERI	760.690,00	100.936,00	100.936,00	-
293	20510788	SD NEGERI 4 PUNUNG	NEGERI	1.368.850,00	258.760,00	258.760,00	-
294	20510775	SD NEGERI 6 PUNUNG	NEGERI	1.776.411,00	89.143,00	89.132,00	11,00
295	20511397	SD NEGERI KEBONSARI	NEGERI	93.588,00	323.206,00	323.206,00	-
296	20511452	SD NEGERI KENDAL	NEGERI	1.092.000,00	180.100,00	180.100,00	-
297	20511039	SD NEGERI WARENG	NEGERI	1.831.200,00	606.200,00	606.200,00	-
298	20510819	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	NEGERI	7.758.000,00	5.050.500,00	5.050.500,00	-
299	20511449	SD NEGERI 1 KARANGMULYO	NEGERI	10.006.175,00	-	-	-
300	20511451	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	NEGERI	33.079.900,00	109.500,00	109.500,00	-
301	20511442	SD NEGERI 1 KLEPU	NEGERI	12.938.500,00	6.501.150,00	51.150,00	6.450.000,00
302	20510932	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL	NEGERI	1.608.000,00	-	-	-
303	20510930	SD NEGERI 1 PAGERLOR	NEGERI	2.114.100,00	-	-	-
304	20511495	SD NEGERI 1 SEMBOWO	NEGERI	14.550.570,00	908.900,00	908.900,00	-
305	20510830	SD NEGERI 1 SUDIMORO	NEGERI	9.652.000,00	583.500,00	583.500,00	-
306	20510829	SD NEGERI 1 SUKOREJO	NEGERI	240.500,00	-	-	-
307	20510828	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	NEGERI	7.783.050,00	-	-	-
308	20510816	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	NEGERI	2.093.000,00	80.000,00	-	80.000,00
309	20511448	SD NEGERI 2 KARANGMULYO	NEGERI	1.796.725,00	148.800,00	148.800,00	-
310	20511450	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	NEGERI	8.766.400,00	811.900,00	811.900,00	-
311	20537132	SD NEGERI 2 KLEPU	NEGERI	1.157.550,00	-	-	-
312	20510931	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL	NEGERI	1.890.300,00	-	-	-
313	20510929	SD NEGERI 2 PAGERLOR	NEGERI	324.020,00	-	-	-
314	20511426	SD NEGERI 2 SEMBOWO	NEGERI	20.850.950,00	2.932.500,00	2.932.500,00	-
315	20510818	SD NEGERI 2 SUDIMORO	NEGERI	322.600,00	-	-	-
316	20510827	SD NEGERI 2 SUKOREJO	NEGERI	270.000,00	-	-	-
318	20511427	SD NEGERI 3 KLEPU	NEGERI	23.169.780,00	230.050,00	230.050,00	-
319	20510928	SD NEGERI 3 PAGERLOR	NEGERI	3.771.475,00	182.500,00	182.500,00	-
320	20510817	SD NEGERI 3 SUDIMORO	NEGERI	4.541.100,00	1.160.000,00	1.160.000,00	-
321	20511480	SD NEGERI 1 GEDANGAN	NEGERI	4.903.709,00	805.307,00	805.307,00	-
322	20511535	SD NEGERI 1 GEMAHARJO	NEGERI	145,00	380,00	380,00	-
323	20511388	SD NEGERI 1 KASIHAN	NEGERI	2.461.500,00	135.200,00	135.200,00	-
324	20511399	SD NEGERI 1 KEBONDALEM	NEGERI	900.060,00	205.852,00	205.852,00	-
325	20511393	SD NEGERI 1 KEMUNING	NEGERI	16.850.000,00	-	-	-
326	20510855	SD NEGERI 1 NGRECO	NEGERI	1.613.500,00	5.000,00	5.000,00	-
327	20510908	SD NEGERI 1 PLOSO	NEGERI	61.000,00	-	-	-
328	20510801	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	NEGERI	-	-	-	-
329	20510823	SD NEGERI 1 TAHUNAN	NEGERI	150.000,00	-	-	-
330	20510824	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	NEGERI	8.733.500,00	888.000,00	888.000,00	-
331	20511052	SD NEGERI 1 TEGALOMBO	NEGERI	625.631,00	353.402,00	353.402,00	-
332	20511479	SD NEGERI 2 GEDANGAN	NEGERI	7.250,00	2.544.000,00	2.484.000,00	60.000,00
333	20511534	SD NEGERI 2 GEMAHARJO	NEGERI	55.000,00	2.000,00	2.000,00	-
334	20511387	SD NEGERI 2 KASIHAN	NEGERI	875.144,00	927.227,00	927.227,00	-
335	20511398	SD NEGERI 2 KEBONDALEM	NEGERI	687.800,00	309.250,00	309.250,00	-
336	20511382	SD NEGERI 2 KEMUNING	NEGERI	6.848.450,00	55.650,00	55.650,00	-
337	20510854	SD NEGERI 2 NGRECO	NEGERI	1.500,00	-	-	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO BOS 2020	SALDO TAHUN 2021	RINCIAN SALDO	
						TUNAI	BANK
339	20510809	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	NEGERI	600.000,00	-	-	-
340	20510822	SD NEGERI 2 TAHUNAN	NEGERI	14.658.170,00	3.963.700,00	3.963.700,00	-
341	20510811	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	NEGERI	144.000,00	-	-	-
342	20511053	SD NEGERI 2 TEGALOMBO	NEGERI	1.561.550,00	199.000,00	199.000,00	-
343	20511533	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	NEGERI	8.739.900,00	259.244,00	259.244,00	-
344	20511386	SD NEGERI 3 KASIHAN	NEGERI	93.000,00	100.500,00	100.500,00	-
345	20511465	SD NEGERI 3 KEMUNING	NEGERI	27.064.967,00	146.800,00	146.800,00	-
346	20510853	SD NEGERI 3 NGRECO	NEGERI	23.142.759,00	-	-	-
347	20510798	SD NEGERI 3 PLOSO	NEGERI	2.079.000,00	-	-	-
348	20510808	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	NEGERI	1.190.000,00	-	-	-
349	20510936	SD NEGERI 3 TAHUNAN	NEGERI	23.785.850,00	20.000,00	20.000,00	-
350	20555442	SD NEGERI 3 TEGALOMBO	NEGERI	440.000,00	-	-	-
351	20511532	SD NEGERI 4 GEMAHARJO	NEGERI	223.083,00	63.331,00	63.331,00	-
352	20511385	SD NEGERI 4 KASIHAN	NEGERI	405.700,00	-	-	-
353	20511453	SD NEGERI 4 KEMUNING	NEGERI	5.590.504,00	12.291,00	12.291,00	-
354	20510861	SD NEGERI 4 NGRECO	NEGERI	1.068.836,00	56.840,00	56.840,00	-
355	20510807	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	NEGERI	1.414.200,00	235.000,00	235.000,00	-
356	20511060	SD NEGERI 4 TEGALOMBO	NEGERI	5.258.500,00	12.200,00	12.200,00	-
357	20511531	SD NEGERI 5 GEMAHARJO	NEGERI	575.140,00	148.654,00	148.654,00	-
358	20510862	SD NEGERI 5 NGRECO	NEGERI	10.573.500,00	1.100,00	1.100,00	-
359	20510806	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	NEGERI	135.000,00	-	-	-
360	20510870	SD NEGERI 6 NGRECO	NEGERI	1.857.000,00	550.928,00	550.928,00	-
361	20511489	SD NEGERI 1 BUBAKAN	NEGERI	5.440.200,00	36.950,00	36.950,00	-
362	20511475	SD NEGERI 1 GASANG	NEGERI	4.491.405,00	220.000,00	219.595,00	405,00
363	20511509	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG	NEGERI	6.564.414,00	93.429,00	93.429,00	-
364	20511518	SD NEGERI 1 JETAK	NEGERI	2.508.000,00	-	-	-
365	20511412	SD NEGERI 1 KALIKUNING	NEGERI	2.126.400,00	-	-	-
366	20511454	SD NEGERI 1 KETRO	NEGERI	71.472.622,00	42.921.722,00	38.613.000,00	4.308.722,00
367	20511432	SD NEGERI 1 KLUWIH	NEGERI	3.023.950,00	2.750,00	2.750,00	-
369	20510860	SD NEGERI 1 NGILE	NEGERI	3.442.000,00	68.251,00	68.251,00	-
370	20510858	SD NEGERI 1 NGLARAN	NEGERI	11.100.000,00	12.487,00	12.487,00	-
371	20510866	SD NEGERI 1 NGUMBUL	NEGERI	910.000,00	-	-	-
372	20510919	SD NEGERI 1 PADI	NEGERI	-	-	-	-
373	20511025	SD NEGERI 1 TULAKAN	NEGERI	220.000,00	9.153,00	9.153,00	-
374	20511091	SD NEGERI 1 WONOANTI	NEGERI	-	-	-	-
375	20511084	SD NEGERI 1 WONOSIDI	NEGERI	6.515.500,00	-	-	-
376	20511488	SD NEGERI 2 BUBAKAN	NEGERI	6.209.692,00	310.115,00	310.115,00	-
377	20511476	SD NEGERI 2 GASANG	NEGERI	7.251.200,00	163.800,00	163.800,00	-
378	20511508	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG	NEGERI	1.169.960,00	70.000,00	-	70.000,00
379	20511507	SD NEGERI 2 JETAK	NEGERI	2.090.000,00	41.200,00	41.200,00	-
380	20511413	SD NEGERI 2 KALIKUNING	NEGERI	1.093.000,00	-	-	-
381	20511464	SD NEGERI 2 KETRO	NEGERI	2.402.000,00	604.597,00	604.597,00	-
383	20511440	SD NEGERI 2 LOSARI	NEGERI	42.858,00	-	-	-
385	20510857	SD NEGERI 2 NGLARAN	NEGERI	8.250.000,00	98.000,00	98.000,00	-
386	20510865	SD NEGERI 2 NGUMBUL	NEGERI	2.993.070,00	597.500,00	597.500,00	-
387	20510918	SD NEGERI 2 PADI	NEGERI	160.500,00	160.500,00	-	160.500,00
388	20511024	SD NEGERI 2 TULAKAN	NEGERI	74.000,00	-	-	-
389	20511090	SD NEGERI 2 WONOANTI	NEGERI	25.500,00	-	-	-
390	20511083	SD NEGERI 2 WONOSIDI	NEGERI	134.000,00	-	-	-
391	20511516	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	NEGERI	2.468.000,00	8.714,00	8.714,00	-
392	20511421	SD NEGERI 3 KALIKUNING	NEGERI	4.414.084,00	78.040,00	78.040,00	-
393	20511462	SD NEGERI 3 KETRO	NEGERI	2.504.000,00	136.000,00	136.000,00	-
394	20510856	SD NEGERI 3 NGLARAN	NEGERI	2.092.900,00	-	-	-
395	20510864	SD NEGERI 3 NGUMBUL	NEGERI	510.000,00	-	-	-
396	20510917	SD NEGERI 3 PADI	NEGERI	3.236.100,00	7.608.700,00	7.608.700,00	-
397	20511023	SD NEGERI 3 TULAKAN	NEGERI	1.312.742,00	12.924,00	12.924,00	-
398	20511082	SD NEGERI 3 WONOSIDI	NEGERI	5.713.200,00	240.500,00	240.500,00	-
399	20511517	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG	NEGERI	318.811,00	-	-	-
400	20511420	SD NEGERI 4 KALIKUNING	NEGERI	419.750,00	47.000,00	47.000,00	-
401	20511461	SD NEGERI 4 KETRO	NEGERI	13.460.000,00	-	-	-
402	20511439	SD NEGERI 4 LOSARI	NEGERI	110.500,00	-	-	-
403	20511071	SD NEGERI 4 WONOSIDI	NEGERI	1.540.500,00	-	-	-
404	20557631	SD NEGERI 5 KALIKUNING	NEGERI	2.448.710,00	354.006,00	354.006,00	-
405	20511460	SD NEGERI 5 KETRO	NEGERI	14.702.500,00	1.089.750,00	1.089.750,00	-
406	20511070	SD NEGERI 5 WONOSIDI	NEGERI	12.015.750,00	1.546.000,00	1.546.000,00	-
407	20557632	SD NEGERI 6 KETRO	NEGERI	5.124.400,00	-	-	-
408	20511496	SD NEGERI BUNGUR	NEGERI	2.377.580,00	500,00	420,00	80,00
409	20510961	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	NEGERI	289.790,00	391.354,00	391.354,00	-
410	20510960	SMP NEGERI 1 BANDAR	NEGERI	645.900,00	1.464.710,00	1.464.710,00	-
411	20510959	SMP NEGERI 1 DONOROJO	NEGERI	5.337.503,00	3.536.915,00	3.536.915,00	-
412	20510967	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	NEGERI	14.580.998,00	8.943.500,00	8.943.500,00	-
413	20510968	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	NEGERI	48.163.400,00	1.151.800,00	1.151.800,00	-
414	20510937	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	NEGERI	16.023.540,00	2.919.840,00	36.300,00	2.883.540,00
415	20510976	SMP NEGERI 1 PACITAN	NEGERI	52.930.100,00	2.681.280,00	2.681.280,00	-
416	20510975	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	NEGERI	1.791.230,00	-	-	-
417	20510974	SMP NEGERI 1 PUNUNG	NEGERI	1.631.265,00	368.325,00	368.325,00	-
418	20510973	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	NEGERI	4.906.744,00	3.958.312,00	3.958.312,00	-
419	20511021	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	NEGERI	21.330.828,00	22.203.902,00	708.174,00	21.495.728,00
420	20511009	SMP NEGERI 1 TULAKAN	NEGERI	7.810.054,00	837.324,00	837.324,00	-
421	20510972	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	NEGERI	796.086,00	639.095,00	639.095,00	-
422	20510971	SMP NEGERI 2 BANDAR	NEGERI	481.780,00	198.080,00	197.300,00	780,00
423	20510970	SMP NEGERI 2 DONOROJO	NEGERI	3.091.674,00	33.609,00	33.609,00	-

NO	NPSN	LEMBAGA	STATUS	SALDO BOS 2020	SALDO TAHUN 2021	RINCIAN SALDO	
						TUNAI	BANK
424	20510969	SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG	NEGERI	7.500.940,00	1.563.279,00	1.302.339,00	260.940,00
425	20510958	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	NEGERI	11.649.928,00	114.580,00	34.580,00	80.000,00
426	20510957	SMP NEGERI 2 NGADIROJO	NEGERI	7.230.872,00	4.801,00	4.801,00	-
427	20510956	SMP NEGERI 2 PACITAN	NEGERI	27.560.500,00	3.882.535,00	3.882.535,00	-
428	20510945	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	NEGERI	1.425.850,00	2.262.285,00	2.262.285,00	-
429	20510944	SMP NEGERI 2 PUNUNG	NEGERI	2.578.997,00	8.170.129,00	50.129,00	8.120.000,00
430	20510943	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	NEGERI	2.865.955,00	190.342,00	190.342,00	-
431	20510942	SMP NEGERI 2 TEGALOMBO	NEGERI	148.398,00	26.995,00	26.995,00	-
432	20510941	SMP NEGERI 2 TULAKAN	NEGERI	766.500,00	18.636,00	18.636,00	-
433	20549692	SMP NEGERI 3 ARJOSARI SATU ATAP	NEGERI	6.683.500,00	-	-	-
434	20510940	SMP NEGERI 3 BANDAR	NEGERI	17.569.800,00	410.830,00	410.830,00	-
435	20510939	SMP NEGERI 3 DONOROJO	NEGERI	732.770,00	95,00	95,00	-
436	20573297	SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU ATAP	NEGERI	2.403.700,00	636.000,00	636.000,00	-
437	20510938	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	NEGERI	4.786.087,00	110.463,00	110.463,00	-
438	20510946	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	NEGERI	20.349.956,00	202.608,00	182.652,00	19.956,00
439	20510947	SMP NEGERI 3 PACITAN	NEGERI	77,00	31.572,00	31.572,00	-
440	20510955	SMP NEGERI 3 PRINGKUKU	NEGERI	3.602.210,00	343.200,00	342.590,00	610,00
441	20510954	SMP NEGERI 3 PUNUNG	NEGERI	6.649.267,00	5.419.732,00	130.465,00	5.289.267,00
442	20510953	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	NEGERI	4.793.961,00	270.720,00	270.720,00	-
443	20510952	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	NEGERI	48.183.190,00	1.152.864,00	1.152.864,00	-
444	20510951	SMP NEGERI 3 TULAKAN	NEGERI	5.997.356,00	284.202,00	284.202,00	-
445	20573295	SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU ATAP	NEGERI	1.748.745,00	9.512,00	9.512,00	-
447	20540380	SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU ATAP	NEGERI	1.775.990,00	-	-	-
448	20510950	SMP NEGERI 4 NAWANGAN	NEGERI	1.784.451,00	112.779,00	112.779,00	-
449	20540381	SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU ATAP	NEGERI	7.284.652,00	5.849.358,00	5.849.358,00	-
450	20510949	SMP NEGERI 4 PACITAN	NEGERI	9.245.778,00	562.952,00	562.952,00	-
451	20549693	SMP NEGERI 4 SUDIMORO SATU ATAP	NEGERI	3.508.000,00	3.924.500,00	416.500,00	3.508.000,00
452	20573296	SMP NEGERI 4 TEGALOMBO SATU ATAP	NEGERI	9.164.000,00	-	-	-
453	20510948	SMP NEGERI 4 TULAKAN	NEGERI	9.977.790,00	318.280,00	318.280,00	-
454	20557251	SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU ATAP	NEGERI	3.093.200,00	-	-	-
455	20570232	SMP NEGERI 5 PACITAN SATU ATAP	NEGERI	128.016,00	33.016,00	33.016,00	-
456	20570242	SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU ATAP	NEGERI	7.700.900,00	2.419.400,00	2.419.400,00	-
457	69766201	SMP NEGERI 5 TEGALOMBO SATU ATAP	NEGERI	2.567.000,00	-	-	-
458	69831500	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	NEGERI	1.401.600,00	326.140,00	326.140,00	-
JUMLAH				**2.143.110.368,00**	**308.146.143,00**	**251.852.880,00**	**56.293.263,00**

Lampiran 7

DAFTAR MUTASI ASET EXTRACOMTABLE
KABUPATEN PACITAN

No	Nama SKPD	Keadaan per 1 Januari 2021		Mutasi 2021				Keadaan per 30 Desember 2021		Ket.
				Bertambah		Berkurang				
		Jml	Harga	Jml	Jumlah Harga	Jml	Jumlah Harga	Jml	Jumlah Harga	
1	2	3							4	
1	DINAS PENDIDIKAN	391.415	39.545.320.657,94	2.565	424.271.171,00			393.980	39.969.591.828,94	
2	DINAS KESEHATAN	33.928	4.443.567.938,13	78	34.835.974,00			34.006	4.478.403.912,13	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.631	691.277.803,50					2.631	691.277.803,50	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	987	866.471.146,00					987	866.471.146,00	
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	254	96.101.545,46					254	96.101.545,46	
6	DINAS PERHUBUNGAN	3.440	642.702.580,40					3.440	642.702.580,40	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	306	156.631.311,18					306	156.631.311,18	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	238	117.485.000	373	14.614.600,00	4	1.540.000,00	607	130.559.600,00	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	460	104.688.383,34					460	104.688.383,34	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	540	187.492.382,05					540	187.492.382,05	
11	DINAS SOSIAL	1.553	241.784.654,00					1.553	241.784.654,00	
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.645	253.591.100					1.645	253.591.100,00	
13	DINASPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	836	245.884.800,00	55	21.991.750,00			891	267.876.550,00	
14	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	229	145.917.825,00					229	145.917.825,00	
15	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAI	648	107.985.950,00					648	107.985.950,00	
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.970	217.523.625,00					3.970	217.523.625,00	
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	652	119.972.100,00					652	119.972.100,00	
18	SEKRETARIAT DAERAH	12.922	2.295.804.250,07	23	21.527.000			12.945	2.317.331.250,07	
19	SEKRETARIAT DPRD	1.417	324.701.350,00					1.417	324.701.350,00	
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	727	443.537.250,00					727	443.537.250,00	
21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	93	33.966.400,00					93	33.966.400,00	
22	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	107	33.465.000,00					107	33.465.000,00	
23	INSPEKTORAT	40	15.393.628					40	15.393.628,00	
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	467	210.708.409					467	210.708.409,38	
25	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	660	94.117.524,91					660	94.117.524,91	
26	KANTOR KECAMATAN PACITAN	3.734	288.961.100,00					3.734	288.961.100,00	
27	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	264	34.323.026,00					264	34.323.026,00	
28	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	642	90.462.400,00					642	90.462.400,00	
29	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	574	70.303.950,00					574	70.303.950,00	
30	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	249	46.715.120,00					249	46.715.120,00	
31	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	408	71.572.650,00					408	71.572.650,00	
32	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	223	38.130.235,00					223	38.130.235,00	
33	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	271	19.692.700,00					271	19.692.700,00	
34	KANTOR KECAMATAN BANDAR	240	43.996.009					240	43.996.009,00	
35	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	143	8.358.200,00					143	8.358.200,00	
36	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	176	24.014.866,65					176	24.014.866,65	
37	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	211	16.907.200,00					211	16.907.200,00	
38	DINAS PANGAN	65	20.873.700,00					65	20.873.700,00	
39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100	25.408.755,00					100	25.408.755,00	
40	DINAS PERPUSTAKAAN	322	68.574.375,00					322	68.574.375,00	
41	DINAS PERTANIAN	1.753	393.574.608,00	2	16.447.850			1.755	410.022.458,00	
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN	328	71.182.750					328	71.182.750,00	
43	DINAS PERIKANAN	706	154.090.684,00	109	11.858.000,00			815	165.948.684,00	
	Jumlah Total	**470.573**	**53.123.234.942,99**	**3.205**	**545.546.345,00**	**4**	**1.540.000**	**473.774**	**53.667.241.287,99**	

Lampiran 8

PENYUSUTAN EXTRACOMTABLE
KABUPATEN PACITAN

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SKPD	NILAI PERLENGKAPAN	PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	DINAS PENDIDIKAN	39.969.591.828,94	31.926.407.502,77	8.043.184.326,17
2	DINAS KESEHATAN	4.478.403.912,13	3.513.820.687,90	964.583.224,23
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	691.277.803,50	605.471.501,62	85.806.301,87
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	866.471.146	584.378.509	282.092.636,88
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	96.101.545,46	94.774.045,45	1.327.500,01
6	DINAS PERHUBUNGAN	642.702.580,40	580.430.645,40	62.271.935,00
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	156.631.311,18	117.118.623,68	39.512.687,50
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130.559.600,00	89.687.470,83	40.872.129,17
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	104.688.383,34	68.636.862,51	36.051.520,83
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	187.492.382,05	160.027.366,24	27.465.015,81
11	DINAS SOSIAL	241.784.654,00	237.370.904,00	4.413.750,00
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	253.591.100	179.182.963	74.408.137,50
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	267.876.550,00	234.524.925,00	33.351.625,00
14	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	145.917.825,00	88.152.848,75	57.764.976,25
15	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	107.985.950,00	106.720.950,00	1.265.000,00
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	217.523.625,00	192.854.291,67	24.669.333,33
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	119.972.100,00	86.155.351,67	33.816.748,33
18	SEKRETARIAT DAERAH	2.317.331.250,07	2.033.994.025,07	283.337.225,00
19	SEKRETARIAT DPRD	324.701.350,00	322.753.475,00	1.947.875,00
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	443.537.250,00	364.762.125,00	78.775.125,00
21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	33.966.400,00	32.701.400,00	1.265.000,00
22	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	33.465.000,00	29.387.500,00	4.077.500,00
23	INSPEKTORAT	15.393.628,00	8.246.217,33	7.147.410,67
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	210.708.409	140.232.859	70.475.550,63
25	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	94.117.524,91	92.691.570,29	1.425.954,63
26	KANTOR KECAMATAN PACITAN	288.961.100,00	276.427.975,00	12.533.125,00
27	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	34.323.025,00	24.189.276,00	10.133.749,00
28	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	90.462.400,00	68.347.770,83	22.114.629,17
29	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	70.303.950	61.215.700	9.088.250,00
30	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	46.715.120,00	43.690.057,50	3.025.062,50
31	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	71.572.650	61.645.150	9.927.500,00
32	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	38.130.235,00	32.038.985,00	6.091.250,00
33	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	19.692.700,00	18.427.700,00	1.265.000,00
34	KANTOR KECAMATAN BANDAR	43.996.009,00	42.681.009,00	1.315.000,00
35	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	8.358.200,00	7.093.200,00	1.265.000,00
36	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	24.014.866,65	20.647.366,65	3.367.500,00
37	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	16.907.200,00	14.967.200,00	1.940.000,00
38	DINAS PANGAN	20.873.700,00	15.071.200,00	5.802.500,00
39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.408.755,00	24.143.755,00	1.265.000,00
40	DINAS PERPUSTAKAAN	68.574.375,00	55.323.775,00	13.250.600,00
41	DINAS PERTANIAN	410.022.458,00	357.769.329,63	52.253.128,38
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN	71.182.750,00	62.320.767,50	8.861.982,50
43	DINAS PERIKANAN	165.948.684	124.117.913	41.830.770,83
	Jumlah Total	**53.667.241.286,99**	**43.200.602.750,82**	**10.466.638.536,17**

Lampiran 9

LAPORAN ASET TETAP RENOVASI
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No. Urut	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Jenis Bangunan	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak/Lokasi	Dokumen		Tahun	Asal Usul	Nilai perolehan awal (Rp)			Pemeliharaan (Rp)
			(P,SP,D)	Bertingkat/ Tidak	Beton/Tidak	M²	Alamat	Tanggal	Nomor	Mulai Pembangunan	Pembiayaan (Rp)	AP	P2T	Fisik	Total
1	Pembangunan Gedung Serbaguna Kec. Punung Tahap 2 (lanjutan)	P	TIDAK	Beton	250	Jl. Pacitan - Solo, Punung	21-02-2020	641.6/372/CK/II/2020	21-02-2020		2.189.488,65	12.828.900,00	97.117.000,00	112.135.388,65	112.135.388,65
2	Rehabilitasi Bangunan Kawasan Pendopo	P	TIDAK	Beton	54,56	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Pacitan	06-02-2020	641.6/252/CK/II/2020	06-02-2020		4.029.456,87	12.828.400,00	194.638.000,00	211.495.856,87	211.495.856,87
3	Rehabilitasi Gedung Kantor KADIN (Kamar Dagang dan Industri)	P	TIDAK	Beton	229	Sidoharjo Pacitan	09-09-2020	641.6/1441/CK/IX/2020	09-09-2020		3.090.161,97	12.828.400,00	144.854.000,00	160.772.561,97	160.772.561,97
4	Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perpustakaan	P	TIDAK	Beton	260	Jl. Jend. A. Yani No. 76 Pacitan	14-02-2020	641.6/312/CK/II/2020	14-02-2020		2.233.921,39	12.828.400,00	80.532.706,00	95.595.027,39	95.595.027,39
5	Pembangunan Sarana Gedung Kantor Kecamatan Bandar (lanjutan)	P	TIDAK	Beton	89,6	Bandar Pacitan	08-10-2020	641.6/1587/CK/X/2020	08-10-2020		3.078.049,10	12.828.400,00	144.212.000,00	160.118.449,10	160.118.449,10
6	Pembangunan Sarana Gedung Kantor Kecamatan Pacitan	P	TIDAK	Beton	32,9	Jl. Letjend. R. Suprapto No. 44 Pacitan	08-10-2020	641.6/1588/CK/X/2020	08-10-2020		2.241.430,60	12.828.400,00	99.870.000,00	114.939.830,60	114.939.830,60
7	Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Pacitan	P	TIDAK	Beton	180	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Pacitan	08-10-2020	641.6/1585/CK/X/2020	08-10-2020		3.181.574,55	12.828.400,00	149.699.000,00	165.708.974,55	165.708.974,55
8	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Pacitan	P	TIDAK	Beton	200	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Pacitan	15-10-2020	641.6/1646/CK/X/2020	15-10-2020		2.231.751,64	12.828.400,00	99.357.000,00	114.417.151,64	114.417.151,64
Total															**1.135.183.240,77**

LAPORAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Jenis Bangunan	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak/Lokasi	Dokumen		Tahun	Asal Usul	Nilai perolehan awal				Pemeliharaan				Total KDP	Ket
		(P,SP,D)	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	M²	Alamat	Tanggal	Nomor	Mulai Pembangunan	Pembiayaan	AP	P2T	Fisik	Total	AP	P2T	Fisik	Total		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Dinas Pendidikan**																			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja																			
	SD Islam Terpadu Tawakal, SMPIT AR RAHMAH, SDN BUNGUR, SDN WATUKARUNG, SDN GEGERAN, SDN 4 PENGGUNG		Tidak	Beton		PACITAN	09/04/2020	9-4/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.4/2020	2020	APBD		16.659.500,00		16.659.500,00					16.659.500,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SMP MUHAMADIYAH TEGALOMBO, SDN 2 MENDOLO KIDUL, SDN SIDOHARJO, SDN 2 PETUNGSINARANG, SDN 1 JETAK, SDN 4 LOSARI, SDN 3 KETRO TULAKAN, SDN 5 KETRO TULKAN, SDN 1 BOGOHARJO, SDN 6 KETRO, SMPN 5 PACITAN SATU ATAP, SDN 1 PLOSO, SDN BANGUNSARI, SDN 2 WORAWARI, SDN 1 NOGOSARI, SDN 2 KETRO KEBONAGUNG, SDN 1 WONOASRI, SMPN 1 PACITAN, SD TREMAS (POSKESTREN), SDN NGADIREJAN, SDN 2 GAWANG		Tidak	Beton		PACITAN	09/04/2020	8-5/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.1/2020	2020	APBD		70.218.500,00		70.218.500,00					70.218.500,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SMP PGRI Gondang, SDN 2 KAYEN, SDN 1 KARANGANYAR, SDN 2 GONDANG, SDN 1 SIDOMULYO, SDN 1 KEDUNGBENDO, SDN 1 TEMON, SDN 2 KETRO KEC.TULAKAN, SMPN 2 TEGALOMBO		Tidak	Beton		PACITAN	09/04/2020	4-9/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.1/2020	2020	APBD		17.355.800,00		17.355.800,00					17.355.800,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDN 2 BALEHARJO, SMPN 3 DONOROJO, SDN 2 TEGALOMBO, SDN 1 SIRNOBOYO, SMPN 3 PRINGKUKU, SDN 2 PURWOASRI, SDN 2 SEDENG, SMPN 3 KEBONAGUNG, SDN 1 PITON, SDN GONDOSARI, SDN KEBONSARI		Tidak	Beton		PACITAN	09-04-2020	6-7/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.3/2020	2020	APBD		19.212.600,00		19.212.600,00					19.212.600,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SMP ISLAM NAHDLATUSSUBBAN, SMP PGRI BANDAR, SMPN 3 PUNUNG		Tidak	Beton		PACITAN	09-04-2020	2.11/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.3/2020	2020	APBD		15.450.600,00		15.450.600,00					15.450.600,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDIT AL WAKIL WONOANTI TULAKAN, SDN 2 GUNUNGREJO, SDN 2 KAYEN, SDN 1 GONDOSARI, SDN 1 KETRO KEBONAGUNG, SDN 1 TANJUNG LOR, SDN 1 HADILUWIH, SDN 2 PRINGKUKU, SDN BUNGUR, SDN 3 SUDIMORO, SDN 2 KLEPU SUDIMORO		Tidak	Tidak		PACITAN	09-04-2020	1-12/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.4/2020	2020	APBD		15.614.500,00		15.614.500,00					15.614.500,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDN 2 BALEHARJO, SMPN 1 NGADIROJO, SDN 1 COKROKEMBANG		Tidak	Beton		PACITAN	09-04-2020	1-12/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.4/2020	2020	APBD		13.563.000,00		13.563.000,00					13.563.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SMP MUHAMADIYAH TEGALOMBO, SDN 2 MENDOLO KIDUL, SDN SIDOHARJO, SDN 2 PETUNGSINARANG, SDN 1 JETAK, SDN 4 LOSARI, SDN 3 KETRO TULAKAN, SDN 5 KETRO TULKAN, SDN 1 BOGOHARJO, SDN 6 KETRO, SMPN 5 PACITAN SATU ATAP, SDN 1 PLOSO, SDN BANGUNSARI, SDN 2 WORAWARI, SDN 1 NOGOSARI, SDN 2 KETRO KEBONAGUNG, SDN 1 WONOASRI, SMPN 1 PACITAN, SD TREMAS (POSKESTREN), SDN NGADIREJAN, SDN 2 GAWANG		Tidak	Tidak		PACITAN	05/03/2020	13/PPK-ATK-RHB.RUANG KLS/16.90/III/2020	2020	APBD		19.162.000,00		19.162.000,00					19.162.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SMP PGRI Gondang, SDN 2 KAYEN, SDN 1 KARANGANYAR, SDN 2 GONDANG, SDN 1 SIDOMULYO, SDN 1 KEDUNGBENDO, SDN 1 TEMON, SDN 2 KETRO KEC.TULAKAN, SMPN 2 TEGALOMBO		Tidak	Tidak		PACITAN	04-03-2020	23/PPK-ATK-RHB MCK/16.90./III/2020	2020	APBD	4.191.550,00			4.191.550,00					4.191.550,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDN 1 PADI , SDN 1 TAMBAKREJO, SDN 4 TOKAWI, SDN 2 LOSARI, SDN MANTREN		Tidak	Beton		PACITAN	05/02/2020	5/PPK-ATK-G.PERPUS/16.90./II/2020	2020	APBD	4.197.600,00			4.197.600,00					4.197.600,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDIT AL WAKIL WONOANTI TULAKAN, SDN 2 GUNUNGREJO, SDN 2 KAYEN, SDN 1 GONDOSARI, SDN 1 KETRO KEBONAGUNG, SDN 1 TANJUNG LOR, SDN 1 HADILUWIH, SDN 2 PRINGKUKU, SDN BUNGUR, SDN 3 SUDIMORO, SDN 2 KLEPU SUDIMORO		Tidak	Tidak		PACITAN	14/04/2020	1-5/15.70/PPK-PRN-PAUD-APBD.2.1/2020	2020	APBD		2.112.000,00		2.112.000,00					2.112.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDN 1 PADI , SDN 1 TAMBAKREJO, SDN 4 TOKAWI, SDN 2 LOSARI, SDN MANTREN		Tidak	Beton		PACITAN	09/04/2020	7-6/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.2/2020	2020	APBD		27.203.000,00		27.203.000,00					27.203.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDN BALEHARJO, SDN 1 SEDAYU, SDN 1 GEMBONG, SDN 1 BORANG, SDN SOBO		Tidak	Tidak		PACITAN	09/04/2020	3-10/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.2/2020	2020	APBD		7.711.000,00		7.711.000,00					7.711.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SMPN 4 ARJOSARI		Tidak	Beton		PACITAN	09/04/2020	5-8/16.90/PPK-PRN-DIKDAS-APBD.2.4/2020	2020	APBD		4.917.000,00		4.917.000,00					4.917.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	SDN BALEHARJO, SDN 1 SEDAYU, SDN 1 GEMBONG, SDN 1 BORANG, SDN SOBO		Tidak	Beton		PACITAN	13-10-2020	19/PPK-ATK-APBD.2/16.90/X/2020	2020	APBD	8.827.500,00			8.827.500,00					8.827.500,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	TOTAL										17.216.650,00	229.179.500,00	-	246.396.150,00	-	-	-	-	246.396.150,00	
2	**Dinas Kesehatan**																			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja																			

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Jenis Bangunan	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak/Lokasi	Dokumen		Tahun	Asal Usul	Nilai perolehan awal				Pemeliharaan				Total KDP	Ket
		(P,SP,D)	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	M²	Alamat	Tanggal	Nomor	Mulai Pembangunan	Pembiayaan	AP	P2T	Fisik	Total	AP	P2T	Fisik	Total		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahap I	P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	15/11/2019	440/03/PPK-02-03-FC/408.36/2019	15/11/2019		15.257.200,00			15.257.200,00					15.257.200,00	
		P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	28/03/2019	04/PPK-DAU/Dinkes/III/2019	28/03/2019			39.539.500,00		39.539.500,00					39.539.500,00	
		P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	18/07/2019	18/PPK-DAU/Dinkes/VII/2019	18/07/2019			39.859.600,00		39.859.600,00					39.859.600,00	
		P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	16/07/2019	16/PPK-DAU/Dinkes/VII/2019	16/07/2019				2.501.059.079,00	2.501.059.079,00					2.501.059.079,00	
	Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahap II	P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	07/09/2020	07342/SP2D/LS/2020	07/09/2020						2.325.000,00			2.325.000,00	2.325.000,00	
		P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	07/09/2020	07344/SP2D/LS/2020	07/09/2020						300.000,00			300.000,00	300.000,00	

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Jenis Bangunan	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak/Lokasi	Dokumen		Tahun	Asal Usul	Nilai perolehan awal				Pemeliharaan				Total KDP	Ket
		(P,SP,D)	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	M²	Alamat	Tanggal	Nomor	Mulai Pembangunan	Pembiayaan	AP	P2T	Fisik	Total	AP	P2T	Fisik	Total		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	07/09/2020	07341/SP2D/LS/2020	07/09/2020						2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00	
		P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	07/09/2020	07343/SP2D/2020	07/09/2020						200.000,00			200.000,00	200.000,00	
		P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	14/2/2020	04/PPK/DINKES/2020	14/2/2020							59.851.000,00		59.851.000,00	59.851.000,00	
	Perencanaan Gedung Puskesmas Candi	P	Tidak	Beton	531	Desa Candi Kec Pringkuku,Kab Pacitan	14/2/2020	03/PPK/Candi/2020	14/2/2020		2.272.396,64	79.860.000,00		82.132.396,64					82.132.396,64	
	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahap II	P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	02/11/2021	03/PPK.DAU/DINKES/2021	27/3/2021		49.826.700,00			49.826.700,00					49.826.700,00	
	Pembangunan Tahap 2 Gedung Kantor Dinas Kesehatan	P	Ya (2)	Beton	817	jln.Sasuit Tubun no 1 Pucangsewu - Pacitan	06/08/2021	11/KPA.DAU/DINKES/2021	06/08/2021		54.372.300,00		1.306.934.702,00	1.361.307.002,00					1.361.307.002,00	
	TOTAL										121.728.596,64	159.259.100,00	3.807.993.781,00	4.088.981.477,64	5.225.000,00	59.851.000,00	-	65.076.000,00	**4.154.057.477,64**	
3	**Rumah Sakit Dareah Darsono Kab. Pacitan**																			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja																			
1	Gedung Rawat Inap (Ponek)	p	Bertingkat	Beton	1064,8 m²	Jl. Dl. Panjaitan Pacitan	16/12/2021	001/BAST/ASB.RSUD/XII/2021	14/07/2021	APBD	1.949.550,00	57.673.000,00	195.200.000,00	254.822.550,00	29.985.082,00	384.282.470,00	13.405.040.000,00	13.819.307.552,00	14.074.130.102,00	
	TOTAL										1.949.550,00	57.673.000,00	195.200.000,00	254.822.550,00	29.985.082,00	384.282.470,00	13.405.040.000,00	13.819.307.552,00	14.074.130.102,00	
4	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung :																			
	Pengadaan s/d 2019																			
	Gedung Kelurahan Pacitan	P	TIDAK	BETON	2240m2	Kelurahan Pacitan	08-06-2018	641.6/868/CK-TB/VI/2018	08-06-2018	APBD	15.092.635,21	49.675.000,00	2.115.600.000,00	2.180.367.635,21					2.180.367.635,21	
	Gedung ex Kantor Camat Ngadirojo	P	TIDAK	BETON	3300 M2		15-10-2018	641.6/1252.1/CK-TB/X/2018	15-10-2018	APBD	2.033.200,00		144.552.000,00	146.585.200,00					146.585.200,00	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap-2 (2019)	P	TIDAK	BETON	40m;x48m'		26-07-2019	641.6/1401/CK/VII/2019	26-07-2019	APBD	40.361.700,00	147.967.600,00	3.061.846.784,00	3.250.176.084,00					3.250.176.084,00	
	Rehabilitasi EX Kantor Camat Ngadirojo Tahap - 2 (2019)	P	TIDAK	BETON	297 M2		16-09-2019	641.6/1880/CK/IX/2019	16-09-2019	APBD	6.914.600,00		194.550.000,00	201.464.600,00					201.464.600,00	
	Pengadaan Tahun 2020																			
	Penataan Kawasan Ex. Kantor Kawedanan Lorok di Ngadirojo Tahap 1	P	TIDAK	BETON			15-10-2020	641.6/1647/CK/X/2020	15-10-2020	APBD	4.820.000,00	29.900.200,00	169.002.000	203.722.200,00					203.722.200,00	
	Pengadaan Tahun 2021																			
	Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap IV	P	TIDAK	BETON	2136 M2	Kec. Pacitan	26-04-2021	641.6/498/CK/IV/2021	26-04-2021	APBD	12.111.171,32	49.390.000,00	159.205.000						221.957.677,72	
	Rehabilitasi Ex Kantor Camat Ngadirojo Tahap 2	P	TIDAK	BETON	53,4 M2	Kec. Ngadirojo	26-04-2021	641.6/500/CK/IV/2021	26-04-2021	APBD	3.512.344,56		198.374.000						205.260.655,45	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung ex. Kawedanan Lorog dan Penataan Kawasan	P	TIDAK	BETON	548,32 M2	Kec. Ngadirojo	06-08-2021	641.6/1029/CK/VIII/2021	06-08-2021	APBD	285.840,82	43.007.250,00	414.373.218						524.543.397,61	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan :																			
	Pengadaan s/d 2019																			
	Jembatan Gunungsari	P	TIDAK	BETON	170m' x 8m'	Ds. Gunungsari Arjosari	20-07-2017	602,4/2047/PPK.BM2/VII/2017	20-07-2017	APBD	879.728,68	99.300.000,00	2.014.134.000,00	2.114.313.728,68					2.114.313.728,68	
	Jembatan Giwang - Bolang (Dsn. Gedangan Ds. Ketro)	P	TIDAK	BETON	12m' x 3,5m'	Dsn. Gedangan Ds. Ketro	02-10-2018	602,4/5010/PPK.BM1/X/2018	02-10-2018	APBD	-	4.125.000,00	98.673.000,00	102.798.000,00					102.798.000,00	
	Jembatan Gantung dsn,Kraket Ds.Wonodadi Wetan	SP	TIDAK	BETON	65 m'x1,5m'	dsn,Kraket Ds.Wonodadi Wetan Ngadirojo	10-04-2018	602,4/842/PPK.BM1/IV/2018	10-04-2018	APBD	-	-	198.946.000,00	198.946.000,00					198.946.000,00	
	Jembatan Gegeran	P	TIDAK	BETON	125m' x 4m'	Ds. Gegeran Arjosari	07-06-2018	602,4/1148/PPK.BM2/VI/2018	07-06-2018	APBD	7.558.000,00	51.241.777,00	1.701.718.000,00	1.760.517.777,00					1.760.517.777,00	
	Jembatan Gunungsari Tahap II	P	TIDAK	BETON	170m' x 8m'	Ds. Gunungsari Arjosari	25-06-2018	602,2/1329/PPK.BM2/VI/2018	25-06-2018	APBD	7.558.000,00	99.548.446,00	4.248.712.000,00	4.355.818.446,00					4.355.818.446,00	
	Jembatan Gunungsari Tahap III 150 m x 8,0 m	P	TIDAK	BETON	170m' x 8m'	Ds. Gunungsari Arjosari	17-07-2019	602.4/2173/PPK.BM2/VII/2019	17-07-2019	APBD	-	65.843.050,00	12.528.487.730,00	12.594.330.780,00					12.594.330.780,00	
	Jembatan Gegeran Tahap II 150 m x 8,0 m	P	TIDAK	BETON	125m' x 4m'	Ds. Gegeran Arjosari	17-07-2019	602.4/2172/PPK.BM2/VII/2019	17-07-2019	APBD	-	65.318.050,00	2.232.505.332,00	2.297.823.382,00					2.297.823.382,00	
	Jembatan Gantung Kraket Desa Wonodadi di Wetan	SP	TIDAK	BETON	65 m'x1,5m'	dsn,Kraket Ds.Wonodadi Wetan Ngadirojo	25-6-2019	602.4/3254/PPK.BM100/VI/2019	25-6-2019	APBD	-	-	102.536.000,00	102.536.000,00					102.536.000,00	
	Pengadaan Tahun 2020																			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung Kraket	SP	TIDAK	BETON	65 m'x1,5m'	dsn,Kraket Ds.Wonodadi Wetan Ngadirojo					580.000,00	-	-	580.000,00					580.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	Jembatan Bolang	P	TIDAK	TIDAK	12m' x 3,5m'	Dsn. Gedangan Ds. Ketro					985.000,00	-	-	985.000,00					985.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	Jembatan Tosari	P	TIDAK	BETON	50m' x 4m'	Ds. Tegalombo					985.000,00	-	-	985.000,00					985.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	Jembatan Gunungsari IV	P	TIDAK	BETON	170m' x 8m'	Ds. Gunungsari Arjosari					-	24.216.500,00	-	24.216.500,00					24.216.500,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Jenis Bangunan	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak/Lokasi	Dokumen		Tahun	Asal Usul	Nilai perolehan awal				Pemeliharaan				Total KDP	Ket
		(P,SP,D)	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	M²	Alamat	Tanggal	Nomor	Mulai Pembangunan	Pembiayaan	AP	P2T	Fisik	Total	AP	P2T	Fisik	Total		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Konstruksi Dalam Pengerjaan La innya																			
	Pengadaan Tahun 2020																			
	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Gayam Ds. Mujing Nawangan	P	TIDAK	TIDAK	panjang 672	Ds. Mujing Nawangan	17/01/2020	602.2/03/01/PPK.KONSUL.PPJIR/I/2020	17/01/2020	DAK		6.910.000,00		6.910.000,00					6.910.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Blumbang, Kledung Bandar	P	TIDAK	TIDAK	panjang 547	Ds. Kledung Bandar	17/01/2020	602.2/03/01/PPK.KONSUL.PPJIR/I/2020	17/01/2020	DAK		6.910.000,00		6.910.000,00					6.910.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Miri, Gejek DS. Sempu Nawangan	P	TIDAK	TIDAK	panjang 350	Ds. Sempu Nawangan	17/01/2020	602.2/03/01/PPK.KONSUL.PPJIR/I/2020	17/01/2020	DAK		6.910.000,00		6.910.000,00					6.910.000,00	Pek. Konstrusksi tdk jadi dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran
	TOTAL										103.677.220,59	750.262.873,00	29.583.215.064,00	**29.556.896.332,89**					**30.508.658.063,67**	
5	**Dinas Pariwisata,Kepemudaan dan Olah Raga**																			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :																			
	Lapangan Olah Raga - Ploso				1270,61 M²	Jalur Lintas Selatan Ploso	20/11/2019	04/PPHP/OR.ULSP/XI/2019	20/11/2019	APBD		6.625.493,55	196.369.130,00	202.994.623,55					202.994.623,55	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan La innya																		-	
	Pembuatan Desain Engenering Detail (DED) Pantai Pancer Door (Tahun 2020)					Pantai Pancer door				APBD	7.916.489,085	44.902.000,00		52.818.489,09					52.818.489,09	Gambar Dokumen Perencanaan
	Pembuatan Desain Engenering Detail (DED) Pantai Klayar (tahun 2020)					Pantai Klayar				APBD	7.767.157,958	44.055.000,00		51.822.157,96					51.822.157,96	Gambar Dokumen Perencanaan
	Pembuatan Desain Engenering Detail (DED) Pantai Srau (Tahun 2020)					Pantai Srau				APBD	7.907.761,941	44.852.500,00		52.760.261,94					52.760.261,94	Gambar Dokumen Perencanaan
												-		-					-	
	TOTAL										23.591.408,984	140.434.993,550	196.369.130,000	360.395.532,53	-	-	-		**360.395.532,53**	
6	**Dinas Perikanan**																			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja																			
	Perencanaan Pengadaan Kontruksi BBI Kucur (Tahun 2020)		Tidak	Beton		BBI Kucur Teleng,Kel Sidoharjo, Kec Pacitan	11-2-2020	4.03/PPK-PRBDDY/408.31/II/2020				2.977.975,00		2.977.975,00					2.977.975,00	Perencanaan
	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Gerbang BBI Kucur (Tahun 2020)		Tidak	Beton		BBI Kucur Teleng,Kel Sidoharjo, Kec Pacitan	28-2-2020	5.03/PPK-PRBDDY/408.31/II/2020				2.209.150,00		2.209.150,00					2.209.150,00	Perencanaan
																			5.187.125,00	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan La innya																			
	Perencanaan Pembangunan Kolam UPR (Tahun 2020)		Tidak	Beton		Desa Pagotan Kec Arjoasi	11-2-2020	2.03/PPK-PRBDDY/408.31/II/2020				1.645.600,00		1.645.600,00					1.645.600,00	Perencanaan
	Perencanaan Jalan Rabat BBI Kucur (Tahun 2020)		Tidak	Beton		BBI Kucur Teleng,Kel Sidoharjo, Kec Pacitan	11-2-2020	3.03/PPK-PRBDDY/408.31/II/2020				472.175,00		472.175,00					472.175,00	Perencanaan
																			2.117.775,00	
	TOTAL										-	4.326.925,000	-	4.326.925,00	-	-	-		**7.304.900,00**	
7	**Dinas Lingkungan Hidup**																			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja																			
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lampu Hight Mast, Peningkatan Sarana Taman Alun-alun Pacitan, Pembangunan GAZEBO di TPA Ds. Dadapan		Tidak	Beton		Taman Alun-alun dan TPA Dadapan	01/03/2021	660/182/PPK-TMN/III/2021	01/03/2021	APBD	5.850.000,00		19.899.000,00	25.749.000,00					26.648.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lampu Hight Mast, Peningkatan Sarana Taman Alun-alun Pacitan, Pembangunan GAZEBO di TPA
	TOTAL	-	-	-	-	-	**44.256,00**	-	**44.256,00**	-	**5.850.000,00**	-	**19.899.000,00**	**25.749.000,00**	-	-	-	-	**26.648.000,00**	
	TOTAL KONTRUKSI PENGERJAAN										**274.013.426,22**	**1.341.136.391,55**	**33.802.676.975,00**	**34.537.567.968,07**	**35.210.082,00**	**444.133.470,00**	**13.405.040.000,00**	**13.884.383.552,00**	**49.377.590.225,85**	

Keterangan: Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp49.377.590.225,85 tersebut diantaranya Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diatribusikan ke Aset Tetap sebesar Rp20.730.000,00 dan tidak dilanjutkan pembangunannya sebesar Rp184.048.908,99 yang direklasifikasi sebagai Aset Lain-Lain. Sehingga Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.172.811.316,86.

LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN DAN/ATAU EKONOMI SOSIAL UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5
I.Bidang Kesehatan				
1	**Penanganan Covid-19**			
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (satpol PP)	3.017.854.800	2.972.031.400	98%
b	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (BPBD)	700.000.000	675.715.612	97%
c	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (dinkes)	5.255.931.882	3.063.935.232	58%
d	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (dinkes)	2.743.947.180	1.277.893.062	47%
e	Pengadaan Obat, Vaksin (dinkes)	2.912.196.816	2.230.510.159	77%
f	Pengadaan Bahan Habis Pakai (dinkes)	7.926.276.297	4.520.106.752	57%
g	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dinkes)	825.807.300	816.239.694	99%
h	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinkes)	27.389.356	27.359.646	100%
i	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan (Dinkes)	86.762.310	86.334.610	100%
j	Pengadaan sarana prasarana penanganan covid19 (RSUD)	6.411.443.400	5.610.477.138	88%
	Subtotal Penanganan Covid-19	**29.907.609.341**	**21.280.603.305**	71%
2	**Dukungan vaksinasi:**			
a	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinkes)	99.192.000	98.818.200	100%
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (dinkes)	11.498.327.169	9.144.845.430	80%
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinkes)	930.014.635	797.724.195	86%
d	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinkes)	481.691.305	230.543.351	48%
e	Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinkes)	2.910.000.000	2.282.442.922	
f	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes)	4.238.897.000	3.984.025.442	94%
g	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinkes)	74.046.150	39.625.400	54%
h	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinkes)	24.400.000	5.390.000	22%
i	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinkes)	314.598.818	220.772.570	70%
j	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)	1.834.746.450	1.652.024.550	90%
k	Insentif tenaga vaksin PNS dan Non PNS (RSUD)	101.770.000	73.937.500	73%
	Subtotal Dukungan Vaksinasi	**22.507.683.527**	**18.530.149.560**	82%
3	**Dukungan kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19**			
a	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kec. Pacitan)	500.000.000	498.274.100	100%
	Subtotal Dukungan kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	**500.000.000**	**498.274.100**	100%
4	**Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19**			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	8.297.545.692	5.027.500.482	61%
b	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dinkes)	3.569.243.489	1.446.071.566	41%
c	Insentif tenaga kesehatan PNS dan Non PNS (RSUD)	14.099.700.000	9.263.214.637	66%
	Subtotal Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	**25.966.489.181**	**15.736.786.685**	61%
5	**Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah Pusat**			
a	Santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dalam menangani Covid19 (RSUD)	0,00	0,00	0%
	Subtotal Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah Pusat	**0,00**		0%
Total Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan		**78.881.782.049**	**56.045.813.650**	**71%**
II Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi				
	DUKUNGAN EKONOMI			
a	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota (Perindag)	200.000.000	184.775.900	92%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
		2021	2021	
b	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi UM)	33.400.000	33.399.950	100%
c	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Koperasi UM)	36.800.000	36.800.000	100%
	Subtotal DUKUNGAN EKONOMI	**270.200.000**	**254.975.850**	**94%**
	III.Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial			
	PERLINDUNGAN SOSIAL			
a	Pemberian makanan tambahan (Sosial)	1.317.200.000	1.317.200.000	100%
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL	**1.317.200.000**	**1.317.200.000**	100%
	JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI DTU			**0%**
	TOTAL I+II+III	**80.469.182.049**	**57.617.989.500**	**72%**

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN PACITAN
NERACA
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET

	CATATAN	2021	2020
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2e,3	9.133.800.584	7.755.288.398
Piutang Usaha	2f,4	2.139.653.704	2.114.432.803
Persediaan	2g,5	250.156.788	214.918.003
Jumlah Aset Lancar		11.523.611.076	10.084.639.203
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp41.805.396.053 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp.39.836.027.867 pada tanggal 31 Desember 2020	2h, 6	20.894.535.554	21.429.111.591
ASET LAIN-LAIN			
Beban Ditangguhkan	7	487.326.095	570.398.629
Uang Muka	2i,7	229.300.000	229.300.000
Jumlah Aset Lain-lain		716.626.095	799.698.629
JUMLAH ASET		33.134.772.725	32.313.449.423

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Mengetahui / Menyetujui
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

AGUS SUSENO, SE,MM
NIK. 198 510 014

Pacitan, 5 Maret 2022
Dibuat Oleh
Kabag Adm &Keuangan

HARIJANTO,S.IP
NIK. 198 905 028

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	2021	2020
PENDAPATAN USAHA			
Penjualan Air	2j,12	16.966.118.170	16.891.233.315
Penjualan Non Air	13	524.889.636	488.832.737
Jumlah Pendapatan		17.491.007.806	17.380.066.052
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	2k,14	16.751.573.437	17.157.068.438
LABA KOTOR		739.434.369	222.997.614
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASION.	15		
Pendapatan Lain-Lain		138.856.483	138.856.483
Beban Lain-Lain		14.548.808	8.977.887
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional		124.307.675	129.878.597
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		863.742.043	352.876.211

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Pacitan, 5 Maret 2022
Dibuat Oleh
Kabag Adm &Keuangan

HARIJANTO,S.IP
NIK. 198 905 028

Mengetahui / Menyetujui
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

AGUS SUSENO, SE,MM
NIK. 198 510 014

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JENIS EKUITAS						
	Pemda	Pemerintah Pusat	Hibah	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya		Saldo Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
				Daerah	Pusat		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Per 1 Januari 2020	9.466.304.823	5.614.900.041	2.772.529.471	34.455.074.798	-	(21.185.573.807)	31.123.235.326
Penyertaan 2020	300.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	319.669.261	319.669.261
Saldo Per 31 Desember 2020	**9.766.304.823**	**5.614.900.041**	**2.772.529.471**	**34.455.074.798**	**-**	**(20.865.904.546)**	**31.742.904.587**
Penyertaan 2021	-	-	-	-	-	-	-
Hibah Penyertaan Pemda	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun berjalan	-	-	-	-	-	863.742.043	863.742.043
Saldo Per 31 Desember 2021	**9.766.304.823**	**5.614.900.041**	**2.772.529.471**	**34.455.074.798**	**-**	**(20.002.162.503)**	**32.606.646.630**

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	863.742.043	319.669.261
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.969.368.635	319.669.261
Laba Tunai setelah Penyesuaian	2.833.110.678	639.338.523
(Kenaikan) Penurunan Modal Kerja Aset :		
Piutang Usaha	(25.220.902)	(63.769.889)
Piutang non Usaha	-	-
Persediaan	(35.238.785)	(3.996.284)
Kenaikan (Penurunan) Modal Kerja Kewajiban :		
Hutang Usaha	40.800.000	(14.437.500)
Hutang Pajak	(146.207)	146.207
Arus kas bersih aktivitas operasi	2.813.304.784	(82.057.465)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan (Penurunan) :		
Aset Tetap	(1.434.792.598)	(1.141.421.475)
Arus kas bersih aktivitas pendanaan	(1.434.792.598)	(1.141.421.475)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) :		
Modal Pemerintah Daerah	-	-
Modal Pemerintah Pusat	-	-
Modal Hibah	-	-
Modal Pemerintah yang Belum ditetapkan statusnya	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (penurunan) Kas Dan Setara Kas	1.378.512.187	1.132.943.680
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	7.755.288.398	6.622.344.718
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	9.133.800.584	7.755.288.398

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN
NERACA
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET

	CATATAN	2018	2017
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2, 3	2.520.918	15.338.161
Piutang Usaha			
Pihak Ketiga	2, 4	4.800.000	23.600.000
Perlengkapan Kantor	2, 5	-	5.694.600
Biaya dibayar Dimuka	2, 6	1.500.000	2.250.000
Biaya Rehab Gedung	7	-	2.957.896
Jumlah Aset Lancar		8.820.918	49.840.657
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap dikurangi	2, 8	262.850.788	257.204.206
Akumulasi penyusutan		(229.122.663)	(212.003.943)
Nilai Buku		33.728.125	45.200.263
Selisih hasil penilaian kembali		(1.228.125)	-
Nilai Wajar/Nilai buku Aset Tetap		32.500.000	45.200.263
ASET LAIN-LAIN			
Aset Lain-lain Bersih	2, 9	20.025.637	20.032.500
Jumlah Aset Lain-lain		20.025.637	20.032.500
JUMLAH ASET		61.346.555	115.073.420

EKUITAS

EKUITAS	2, 10		
Modal		1.000.000.000	1.000.000.000
Selisih penilaian Kembali		(1.228.125)	-
Saldo Laba		(878.080.002)	(902.679.954)
Laba Tahun berjalan		(59.345.318)	17.753.374
Jumlah Ekuitas		61.346.555	115.073.420
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		61.346.555	115.073.420

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Pacitan, 6 Desember 2019

Menyetujui,

Warito, S.H.,MH.
Plt.Direktur

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	2018	2017
PENDAPATAN	2, 11		
Pendapatan Produk		50.360.000	95.925.000
Pendapatan Non Produk		5.302.000	49.342.000
JUMLAH PENDAPATAN		55.662.000	145.267.000
BEBAN USAHA	2, 12		
Beban Operasional		52.441.400	52.729.000
Beban Umum dan Administrasi		15.420.000	23.773.600
Beban Kantor		20.270.302	20.805.806
Beban Pemeliharaan		2.871.500	7.159.000
Beban Penyusutan/Amortisasi		24.004.116	21.046.220
Beban Kerugian dari penjualan persediaan		-	2.000.000
Jumlah Beban Usaha		115.007.318	127.513.626
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(59.345.318)	17.753.374

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Pacitan, 6 Desember 2019

Menyetujui,

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

Warito, S.H., MH
Plt Direktur

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Saldo Defisit	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2017		1.000.000.000	-	(615.179.667)	384.820.333
Koreksi Audit 2017		-	-	(287.500.287)	(287.500.287)
Rugi Tahun Berjalan		-	-	17.753.374	17.753.374
Saldo 31 Desember 2017		1.000.000.000	-	(884.926.580)	115.073.420
Koreksi saldo awal		-	-	6.846.578	6.846.578
Rugi Tahun Berjalan		-	-	(59.345.318)	(59.345.318)
Selisih Penilain kembali		-	(1.228.125)	-	(1.228.125)
Saldo 31 Desember 2018		1.000.000.000	(1.228.125)	(937.425.320)	61.346.555

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		
Laba tahun berjalan	(59.345.318)	17.753.374
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan	17.118.721	212.003.943
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	(42.226.597)	229.757.317
Penurunan (Kenaikan) :		
Piutang Usaha	18.800.000	(21.200.000)
Pihak Ketiga	-	45.000.000
Persediaan	5.694.600	13.055.670
Perlengkapan	2.957.896	16.287.704
Biaya Rehab Gedung	750.000	-
Biaya Dibayar Dimuka		
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(14.024.101)	282.900.691
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI:		
Perolehan Aset Tetap	(5.646.582)	(6.019.078)
Perolehan Aset Lain-lain	6.863	22.398.000
Kas Yang Digunakan Untuk Kegiatan Investasi	(5.639.719)	16.378.922
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penurunan Ekuitas	6.846.578	(287.500.287)
Kas Yang Diperoleh Dari Kegiatan Pendanaan	6.846.578	(287.500.287)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(12.817.242)	11.779.326
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	15.338.160	3.558.835
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	2.520.918	15.338.161

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan